



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

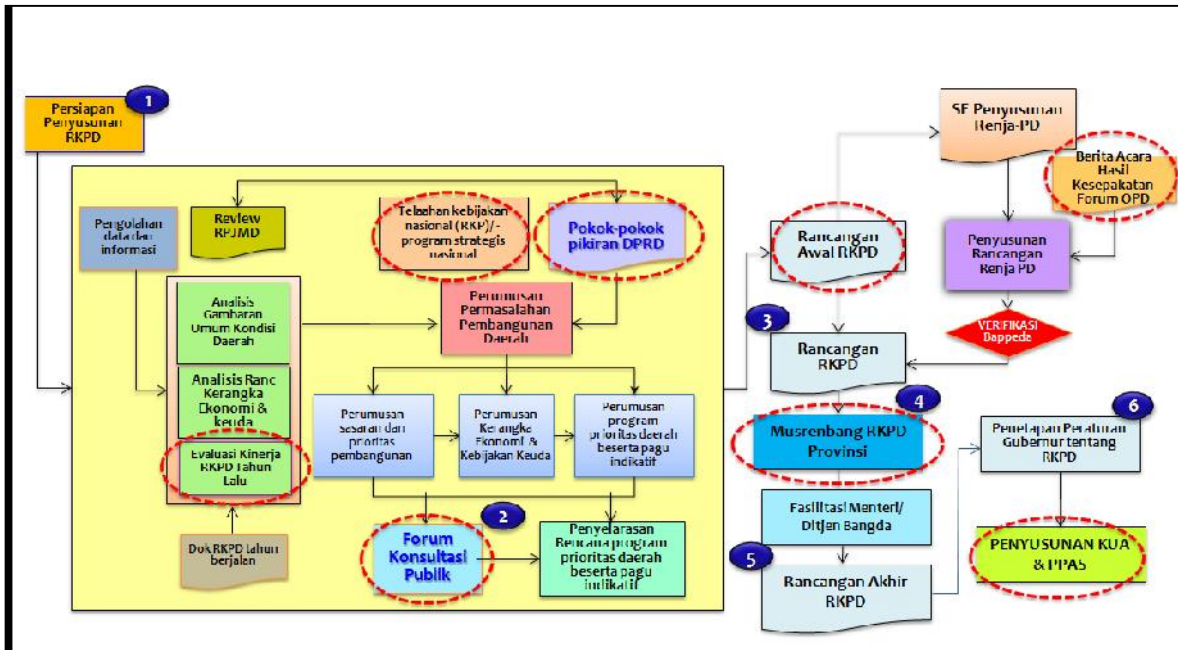
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan RKPD melalui 6 tahapan yaitu: 1) Persiapan penyusunan RKPD, 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD, 3) Penyusunan Rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD. 5) Perumusan Rancangan Akhir RPKD, 6) Penetapan RKPD. Bagan alir penyusunan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut ini:



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

Gambar I.1 Tahapan Penyusunan RKPD



Sumber: Materi Sosialisasi dan Orientasi Permendagri 86 Tahun 2017, Gunarto Taslim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. RKPD Kabupaten Maros Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kelima RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.

Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses perencanaan dan penganggaran Kabupaten Maros selama lima tahun termuat dalam Kalender Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Maros Tahun 2016-2021, dimana awal tahun 2018 telah diadakan penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tertuang dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kalender Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Maros Tahun 2016-2021. Hasil rekapitulasi usulan musrenbang kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD



diinput ke dalam system aplikasi E-planning dan selanjutnya akan menjadi bahan pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah. Hasil dari Forum Gabungan Perangkat Daerah serta Musrenbang RKPD Kabupaten Maros akan tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan. Pada tahapan perumusan rancangan akhir RKPD, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Pohon Program Eselon IV dan Kerangka Acuan Kegiatan Berbasis Eselon IV yang memuat rencana program dan kegiatan serta rincian pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun setiap sub bidang/eselon IV perangkat daerah. Setelah penetapan RKPD dan KUA PPAS, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang selanjutnya akan menjadi Pra RKA Perangkat Daerah dan kemudian akan diinput ke dalam Aplikasi E-Planning.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 39);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 2).

39. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2020 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2020. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2020 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Maros 2016-2021;
- b. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2020;



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

- c. Tersedianya acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Maros Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maros Tahun 2020; dan
- d. Tersedianya acuan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

1.5 Sistematika Penyusunan RKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen DPRD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan juga memperhatikan dokumen RPjMD dan RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Bab ini mencakup beberapa sub bab yaitu:

- 2.1 Kondisi Umum Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPjMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Bab ini mencakup beberapa sub bab yaitu:

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Bab ini mencakup beberapa sub bab yaitu:

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII PENUTUP



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Sebagai salah satu kabupaten yang cukup berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros diproyeksikan memiliki jumlah penduduk sekitar 350 ribu jiwa pada tahun 2019. Dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Maros mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selain dampak positif yang bermunculan, perkembangan ini juga banyak menimbulkan efek atau kondisi negatif yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Maros. Kondisi umum Kabupaten Maros dapat dilihat melalui beberapa aspek yang diuraikan berikut ini.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Maros dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedang gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Maros.

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Maros memiliki luas wilayah 1.619,12 km² atau sekitar 3,51 % dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batasan wilayah :

- Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep,
- Sebelah selatan adalah Kota Makassar,
- Sebelah timur adalah Kabupaten Bone, dan
- Sebelah barat adalah Selat Makassar.

Secara administrasi Kabupaten Maros terbagi atas 14 (Empat Belas) Kecamatan, 80 Kelurahan dan 103 Desa. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas Masing-masing Kecamatan Kabupaten Maros

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase
1	Mandai	49,11	3,03
2	Moncongloe	46,87	2,89

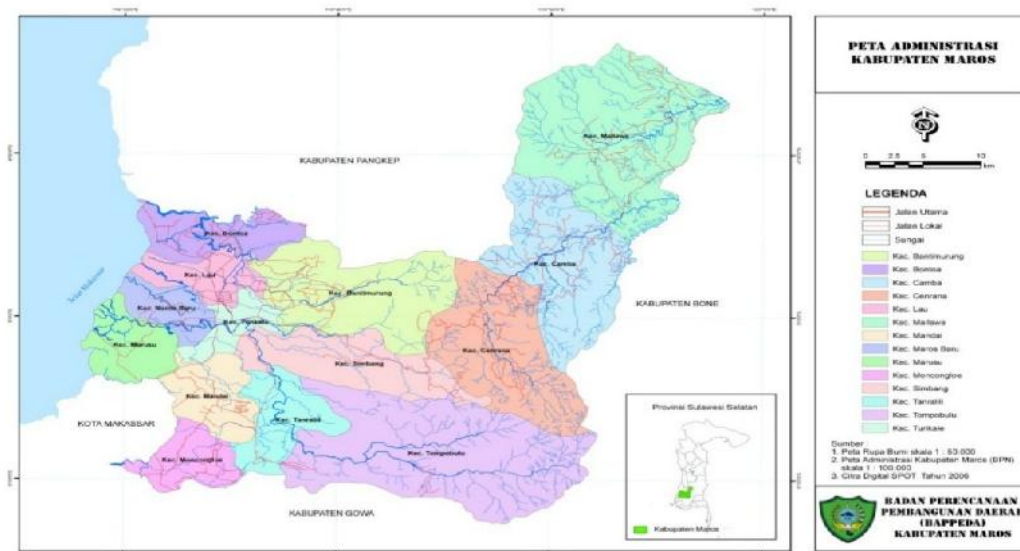
No	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase
3	Maros baru	53,76	3,32
4	Marusu	73,83	4,56
5	Turikale	29,93	1,85
6	Lau	53,73	3,32
7	Bontoa	93,52	5,78
8	Bantimurung	173,70	10,70
9	Simbang	105,30	6,50
10	Tanralili	89,45	5,52
11	Tompobulu	287,66	17,77
12	Camba	145,36	8,98
13	Cenrana	180,90	11,18
14	Mallawa	235,92	14,57
Total Luas		1.619,12	100

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2019

2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 Kabupaten Maros Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 30 km arah utara Kota Makassar. Kabupaten Maros berada pada posisi 40°45' hingga 50°07' Lintang Selatan, dan 109°20' hingga 129°12' Bujur Timur. Kabupaten Maros termasuk salah satu kabupaten yang masuk dalam konsep pengembangan kota baru MAMMINSATA (Makassar-Maros, Sungguminasa-Takalar).

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Maros



Sumber: Bappeda Kab. Maros, 2019



Dalam perkembangan dan pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan sangat berperan terutama dengan adanya Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang merupakan simpul transportasi wilayah Indonesia Timur.

3. Kondisi Topografi

Kelas kemiringan lereng yang dominan di Kabupaten Maros adalah kelas 25 – 40 % (bergunung), yang menempati areal sekitar 21.311 ha, atau sekitar 14,8% dari luas total areal kabupaten, selanjutnya kelas kemiringan lereng 15 – 25% (berbukit) dengan luas areal 24.745 ha, atau 17,2 % dari luas Kabupaten, dan kelas 40 – > 60 % luasnya sekitar 45.799 ha atau setara 31,9%. Wilayah kabupaten Maros yang berada pada kondisi topografi datar sampai relatif datar (kelas 0 - 8%) adalah yang terluas yaitu sebesar 47.579 ha (33,1%) dari luas kabupaten.

Dari sisi topografi, Kecamatan Bantimurung merupakan kecamatan bertopografi agak datar (lereng 0 – 8%) terluas, yakni sekitar 7.829 ha, diikuti oleh Kecamatan Bontoa sekitar 4.901 ha, Kecamatan Tanralili dan Simbang dengan luas areal masing-masing sekitar 4.736 ha dan 4.712 ha.

Tabel 2.2
Luas areal (Ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng Setiap Kecamatan

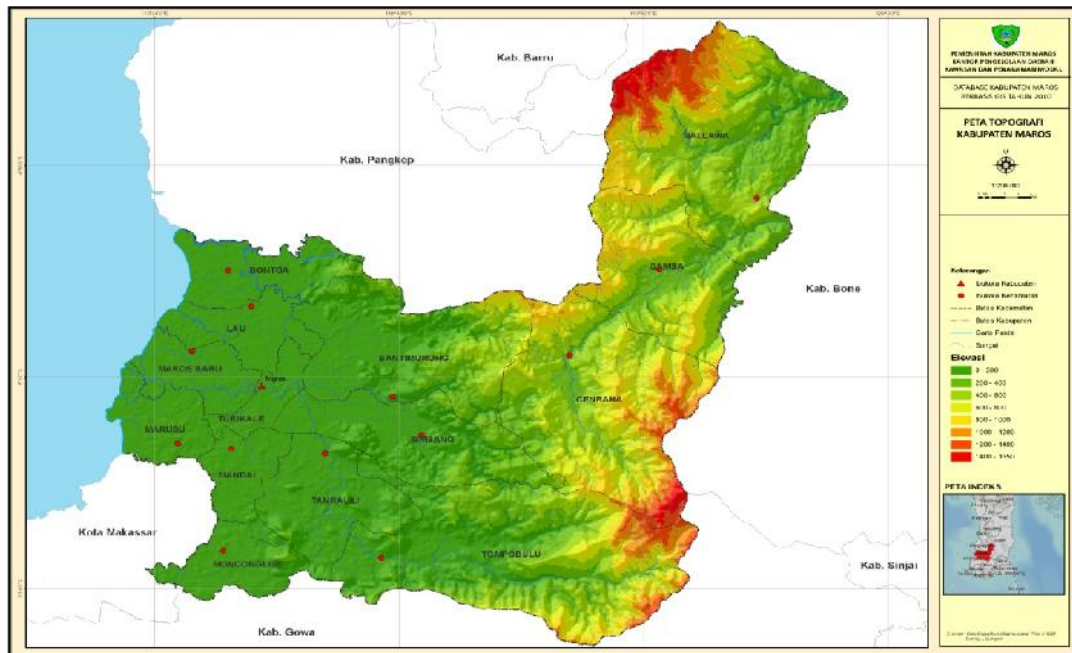
No	Kecamatan	Luas areal (Ha) berdasarkan kemiringan lereng (%) disetiap kecamatan							Jumlah
		>2%	2-8 %	8-15 %	15-25%	25-40%	40-60%	<60%	
1	Mandai	3.677,5	51,3	-	-	64,6	-	-	3.793,4
2	Moncongloe	2.214,2	524,5	-	85,5	1.540,8	-	-	4.365,1
3	Maros Baru	2.805,7	-	-	-	-	-	-	2.805,7
4	Marusu	4.375,6	425,5	-	-	-	-	-	4.801,1
5	Turikale	2.577,0	229,4	-	-	-	-	-	2.806,4
6	Lau	4.349,0	74,0	-	-	0,1	-	-	4.423,1
7	Bontoa	3.835,4	1.065,0	46,1	-	908,2	796,1	-	6.650,9
8	Bantimurung	3.506,1	4.323,2	931,8	1.759,4	243,7	2.064,9	2.027,9	14.857,0
9	Simbang	4.711,7	-	699,9	4.005,0	213,7	-	2,5	9.632,8
10	Tanralili	3.657,3	1.078,8	521,6	1.408,6	1.321,0	-	-	7987,4
11	Tompobulu	260,0	1.331,1	779,5	6.721,6	6.521,6	5.314,1	4.424,3	25.352,1
12	Camba	941,5	-	178,5	-	3.605,0	387,5	4.535,1	9.647,7
13	Cenrana	165,6	1.399,2	-	4.006,7	4.594,9	8.066,9	3.866,1	22.099,5
14	Mallawa	-	-	1.133,6	6.758,1	2.297,1	5.914,2	8.399,5	24.502,5
		37.076,7	10.502,2	4.291,1	24.745,0	21.310,6	22.543,6	23.255,3	143.724,5

Sumber : Bappeda Maros, 2019

Untuk kemiringan lereng 8 – 15% maka, Kecamatan Mallawa, Bantimurung, dan Tompobulu adalah kecamatan dengan lereng 8 – 15% terluas, masing-masing seluas 1.134 Ha, 932 Ha dan 780 Ha. Seperti halnya dengan iklim, kemiringan lereng adalah salah satu indikator biofisik penting dalam penentuan potensi lahan suatu wilayah. Wilayah dengan dominasi lereng yang terjal (lebih besar dari 40%), umumnya memiliki potensi yang kecil untuk pengembangan

pertanian. Karena itu, data pada Tabel 3.3 bisa menjadi indikator umum dari potensi sumberdaya lahan setiap kecamatan di Maros.

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Maros



Sumber: Bappeda Kab. Maros, 2019

4. Kondisi Geologi

Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam empat kelompok besar, yaitu (1) batuan permukaan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Mallawa dengan luas keseluruhan 55.359 Ha; (2) batuan sedimen yang penyebarannya juga hampir terdapat di seluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Bontoa dengan luas 66.195 Ha; (3) batuan gunung api yang tersebar di Kecamatan Tanralili, Camba, Mallawa dan Bantimurung dengan luas 32.008 Ha, dan (4) batuan terobosan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Maros Baru dan Bontoa dengan luas 8.312 Ha.

Kabupaten Maros terbagi dalam empat satuan geomorfologi, sebagai berikut :

- a. Satuan pegunungan Vulkanik: menempati bagian utara, tengah dan timur puncak tertinggi Bulu Lekke (1.361 m dpl) menempati luas 30% dari luas daerah Kabupaten Maros.
- b. Satuan perbukitan vulkanik: intrusi dan sedimen. Menempati daerah perbukitan yang menyebar secara setempat-setempat sekitar 15% dari luas Kabupaten Maros.
- c. Satuan perbukitan Kars: satuan perbukitan ini tersebar cukup luas pada bagian tengah, timur laut daerah Kabupaten Maros.
- d. Satuan Pedataran Alluvium: terletak dibagian barat yang tersebar dengan arah utara-selatan, menempati sekitar 25% dari luas daerah Kabupaten Maros.



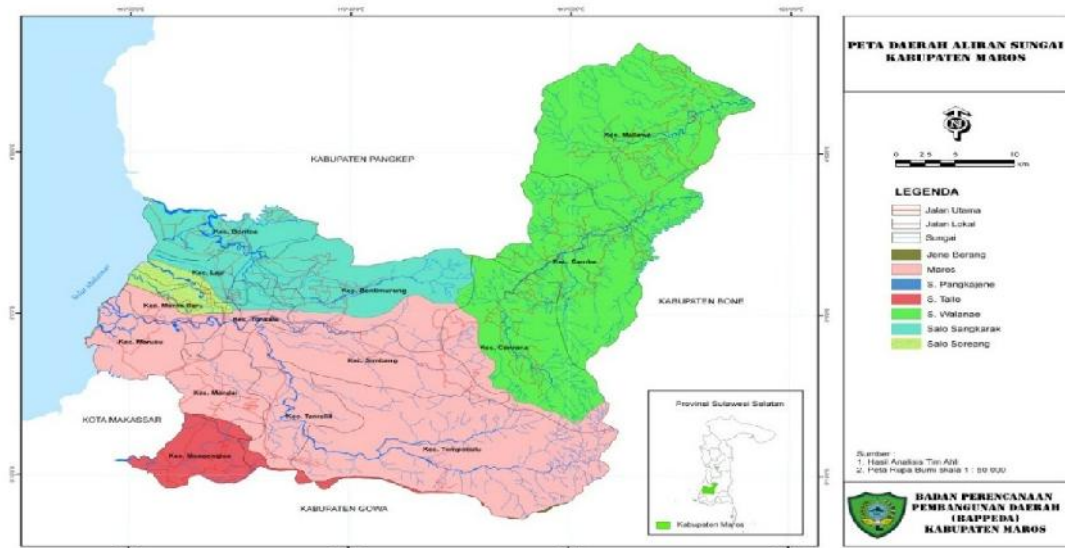
5. Kondisi Hidrologi

Keadaan hidrologi di Kabupaten Maros dapat diamati dengan adanya air tanah yang bersumber dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (*run off*) dan sebagian lagi meresap ke bumi dan sampai ke tempat –tempat yang dangkal, serta sebagian lagi mencapai tempat-tempat yang dalam, dimana sering dikategorikan sebagai air tanah tertekan yang dapat diperoleh dari pemboran dengan kedalaman 75-100 meter.

Pada umumnya jenis air permukaan yang terdapat di Kabupaten Maros adalah berasal dari sungai-sungai yang mengalir di wilayah tersebut, yaitu sungai Maros, Parangpakku, Marusu, Pute, Borongkaluku, Batu Pute, Bantimurung, Marana, Cambaya, Pattunuang Asue, Bontotengnga dan Sabantang. Untuk Jenis air ini sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pertanian, sedangkan untuk air tanah dangkal dapat diperoleh dari sumur gali dengan kedalaman sekitar 10 – 15 meter dengan kualitas airnya cukup memenuhi syarat-syarat kesehatan. Untuk jenis air sumur ini dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber air untuk keperluan rumah tangga.

Kabupaten Maros arealnya terlingkupi oleh 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) / Sub DAS yaitu DAS Jeneberang, DAS Maros, Sub DAS Mario, Sub DAS Minraleng dengan luas wilayah masing-masing sekitar 5.400 ha, 86.109 ha, 873 ha dan 51.769 ha. DAS yang memiliki wilayah paling luas adalah DAS Maros, hampir semua wilayah kecamatan masuk dalam wilayah DAS Maros kecuali Kecamatan Camba dan Mallawa. Kemudian DAS terluas kedua adalah Sub DAS Minraleng dengan wilayah pengaliran adalah Kecamatan Bantimurung, Camba, Cenrana, Mallawa dan Tonmpobulu, kemudian DAS Jeneberang adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tanralili dan Tompobulu dan Sub DAS yang kecil arealnya adalah Sub DAS Mario hanya di Kecamatan Mallawa, dan Sub DAS Minraleng.

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Maros



Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2019

7. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis basah, rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah 27,58 °C tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 24,73 °C. Sedangkan suhu yang paling tinggi adalah 31,92 °C.

Curah hujan rata-rata sekitar 261,83 mm tiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 222 hari. Rata-rata tahunan kelembaban udara minimum Kabupaten Maros sekitar 9,92 % dan rata-rata tahunan kelembaban udara maksimum 89,25 %. Rata-rata penyinaran matahari sepanjang tahun berkisar pada angka 68 %.

Tabel 2.4
Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan Kabupaten maros

Bulan	Tekanan Udara	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari
Januari	1.013,5	7	75
Februari	1.013,2	6	47
Maret	1.013,3	6	63
April	1.013,3	5	73
Mei	1.013,7	6	66
Juni	1.013,7	15	66
Juli	1.013,3	5	78
Agustus	1.013,3	6	90
September	1.013,4	7	79
Oktober	1.013,9	3	67
November	1.013,5	6	62



Bulan	Tekanan Udara	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari
Desember	1.013,0	7	51

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros (BMKG)

Tabel 2.5

Suhu Udara Maksimum dan Rata-rata Menurut Bulan Kabupaten Maros

Bulan	Suhu Udara (°C)		
	Maksimum	Minimum	Rata-Rata
Januari	31,6	25,1	27,7
Februari	30,8	24,9	27,1
Maret	31,4	25,2	27,6
April	32,4	25,4	28,0
Mei	32,5	25,7	28,4
Juni	31,7	24,7	27,5
Juli	31,7	23,6	26,9
Agustus	33,1	23,4	27,5
September	33,3	24,3	28,1
Oktober	32,0	24,5	27,5
November	31,8	25,1	27,5
Desember	30,7	24,9	27,2
Rata-Rata Tahunan	31,92	24,73	27,58

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros (BMKG)

Tabel 2.6

Kelembaban Udara Kabupaten Maksimum, Minimum dan Rata-rata Menurut Bulan

Bulan	Kelembaban (%)		
	Maksimum	Minimum	Rata-Rata
Januari	90,0	73,0	84,0
Februari	94,0	84,0	89,0
Maret	93,0	75,0	87,0
April	91,0	69,0	83,0
Mei	88,0	70,0	82,0
Juni	90,0	70,0	82,0
Juli	89,0	66,0	81,0
Agustus	84,0	58,0	74,0
September	83,0	58,0	75,0
Oktober	88,0	69,0	82,0
November	90,0	72,0	84,0
Desember	91,0	75,0	85,0
Rata-Rata Tahunan	89,25	9,92	79,53

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros (BMKG)

Tabel 2.7
Jumlah Curah Hujan dan banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Maros

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan
1	Januari	491	21
2	Februari	583	23
3	Maret	379	25
4	April	202	22
5	Mei	221	15
6	Juni	119	16
7	Juli	101	11
8	Agustus	5	1
9	September	66	15
10	Oktober	317	24
11	November	222	22
12	Desember	436	27
Rata-Rata Tahunan		261,83	18,50

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros (BMKG)

2.1.1.2 Zonasi Pola Ruang Kabupaten Maros

Didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 Kabupaten Maros tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032 meliputi kawasan antara lain :

1. Kawasan Permukiman

- a. **Kawasan perkotaan** adalah kawasan yang memiliki ciri utama kegiatan non pertanian (seperti perdagangan, jasa, industri), merupakan tempat konsentrasi penduduk dengan kepadatan tinggi, pusat pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah belakangnya dan pusat pemerintahan. Di Kabupaten Maros di indikasikan adanya 14 (empat belas) kawasan perkotaan yang terdiri dari 1 (satu) ibukota kabupaten dan 13 (tiga belas) ibukota kecamatan.
- b. **Kawasan peruntukan permukiman perkotaan**, mencakup : Kawasan Permukiman Perkotaan Baru Maros-Gowa yang merupakan kota satelit KSN Perkotaan Mamminasata Bagian Timur di Kecamatan Moncongloe; Kawasan Permukiman Baru Kawasan Strategis Moncongloe di Kecamatan Moncongloe; Kawasan permukiman Kota Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; Kawasan perkotaan Baru Maros di Kecamatan Turikale; Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor by pass Mamminasata di Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Mandai, dan Kecamatan Turikale; dan Kawasan permukiman di pusat kegiatan PKN, PKLP dan PPK.



- c. **Permukiman perdesaan** merupakan kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan, mencakup: Kawasan permukiman transmigrasi di Kecamatan Tompobulu; dan Kawasan permukiman di pusat kegiatan PPL di sebagian wilayah Kecamatan Camba, dan sebagian wilayah Kecamatan Mallawa serta Kecamatan Tompobulu.

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Kabupaten Maros meliputi : pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

- a. **Rencana pengembangan kawasan perdagangan tradisional** di Kabupaten Maros terdistribusi di masing-masing kecamatan meliputi : Kawasan perkotaan Tetebatu di Kecamatan Mandai; Kawasan perkotaan Pamanjengang di Kecamatan Moncongloe; Kawasan perkotaan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru; Kawasan perkotaan Pattene di Kecamatan Marusu; Kawasan perkotaan Barandasi di Kecamatan Lau; Kawasan perkotaan Panjalingang di Kecamatan Bontoa; Kawasan perkotaan Pakalu di Kecamatan Bantimurung; Kawasan perkotaan Parang Tinggi di Kecamatan Simbang; Kawasan perkotaan Ammarrang di Kecamatan Tanralili; Kawasan perkotaan Pucak di Kecamatan Tompobulu; Kawasan perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba; Kawasan perkotaan Bengo di Kecamatan Cenrana; Kawasan perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa;

- b. **Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pusat perbelanjaan** di Kabupaten Maros meliputi : Kawasan pengembangan Pasar Induk Regional/Pasar Tradisional Modern (Tramo) Kota Maros di Kecamatan Turikale; Kawasan pengembangan Pasar Sentral Kota Maros di Kecamatan Turikale; Kawasan pengembangan kawasan perdagangan skala kabupaten di Kecamatan Lau dan di Kota Baru Satelit Moncongloe di Kecamatan Moncongloe; Kawasan perdagangan pasar tradisional skala kecamatan yang terdistribusi di seluruh Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba dan PPK di perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa; Kawasan perdagangan pasar tradisional skala lingkungan yang terdistribusi di pusat kegiatan PPL di Kecamatan Camba dan PPL Kecamatan Mallawa; Kawasan pasar induk pertanian Maros di Kecamatan Turikale; dan Kawasan pasar grosir di Kota Maros Kecamatan Turikale.

- c. **Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa toko modern** di Kabupaten Maros, meliputi: Kawasan Pasar Induk Regional semi modern/pasar tradisional modern



(Tramo) Kota Maros di Kecamatan Turikale; Kawasan Pasar Sentral Kota Maros di Kecamatan Turikale; Kawasan Kota Baru Satelit Moncongloe di Kecamatan Moncongloe; Kawasan Kota Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; dan Kawasan Pengembangan ekonomi Marusu, Maros Baru, Lau, dan Bontoa di Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Bontoa.

3. Kawasan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran di Kabupaten Maros, mencakup :

- a. **Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan**, terdiri atas : Kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten di kawasan perkotaan Turikale Kecamatan Turikale; Kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan di kawasan perkotaan Tetebatu di Kecamatan Mandai, Kawasan perkotaan Pamanjengang di Kecamatan Moncongloe, Kawasan perkotaan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru, Kawasan perkotaan Pattene di Kecamatan Marusu, Kawasan perkotaan Barandasi di Kecamatan Lau, Kawasan perkotaan Panjalingang di Kecamatan Bontoa, Kawasan perkotaan Pakalu di Kecamatan Bantimurung, Kawasan perkotaan Parang Tinggi di Kecamatan Simbang, Kawasan perkotaan Ammarrang di Kecamatan Tanralili, Kawasan perkotaan Pucak di Kecamatan Tompobulu, Kawasan perkotaan Cemaniga di Kecamatan Camba, Kawasan perkotaan Bengo di Kecamatan Cenrana, dan Kawasan perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa.
- b. **Kawasan peruntukan perkantoran swasta**, terdiri atas : Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Turikale di Kecamatan Turikale; Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Tetebatu di Kecamatan Mandai; Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru; Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Barandasi di Kecamatan Lau; dan Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Panjalingang di Kecamatan Bontoa;

4. Kawasan Pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan/bahan galian pada lokasi-lokasi yang terdapat potensi bahan tambang/galian dan mempunyai potensi cadangan yang menguntungkan untuk dieksploitasi. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Maros terdiri atas :

- a. **Wilayah usaha pertambahan komoditas mineral logam**, terdiri atas : Komoditas emas tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, dan sebagian wilayah Kecamatan Mallawa; Komoditas Galena



tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Camba.

- b. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam** berupa oker tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Camba, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana.
- c. Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan**, terdiri atas: Komoditas marmer di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, dan sebagian wilayah Kecamatan Camba; Komoditas lempung di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale; Komoditas batu gamping di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, dan sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe; Komoditas pasir kuarsa di sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung; Komoditas basalt di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu; Komoditas andesit di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana; Komoditas diorite di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana; Komoditas granodiorit di sebagian wilayah Kecamatan Camba, dan sebagian wilayah Kecamatan Mallawa; Komoditas trakhit di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa; Komoditas krikil galian dari bukit di sebagian wilayah Kecamatan Marusu; Komoditas pasir pasang di sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale; Komoditas krikil berpasir alami di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung,



sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang;

- d. **Wilayah usaha pertambahan batubara** tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang.

5. Kawasan Industri dan Pergudangan

Untuk pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Maros sampai Tahun 2032 digunakan pendekatan terpusat dimana kegiatan industri dikembangkan dalam satu zona yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkannya, yakni:

- a. **Kawasan Peruntukan Industri Besar**, meliputi :Kawasan peruntukan industri semen terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung; Kawasan peruntukan industri manufaktur diarahkan di Kawasan Industri Maros di Kecamatan Marusu dan maros Baru; Kawasan peruntukan industri pengolahan marmer diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Turikale, dan sebagian wilayah Kecamatan Lau; dan Kawasan peruntukan industri peleburan diarahkan di Kecamatan Bontoa.
- b. **Kawasan peruntukan industri sedang**, terdiri atas: Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas perikanan diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, dan sebagian wilayah Kecamatan Lau; dan Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas peternakan di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.
- c. **Kawasan peruntukan industri rumah tangga** berupa aglomerasi industri rumah tangga diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale.



6. Kawasan Pariwisata/Agrowisata

Untuk pengembangan kegiatan wisata di Kabupaten Maros sampai tahun 2032, maka beberapa obyek wisata yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut;

- a. **Kawasan peruntukan pariwisata budaya**, terdiri atas: Kawasan upacara adat Appalili, Katto Bokko, dan Mappadendang di Kecamatan Maros Baru; Kawasan perlombaan perahu hias di Kecamatan Bontoa; Kawasan kompleks makam kassi kebo di Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru; Kawasan kompleks makam Karaeng Simbang di Desa Samangki Kecamatan Simbang; Kawasan Pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru; Kawasan rumah adat Karaeng Loe Repakere (Istana Raja Marusu) di Pakere Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang; dan Kawasan budaya khalawatiah Sammang di Patte'ne Desa Temmappadae Kecamatan Marusu, Leppangkomae Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru dan Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale.
- b. **Kawasan peruntukan pariwisata alam**, terdiri atas : Kawasan wisata alam Bantimurung di Kecamatan Bantimurung; Kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri di Kecamatan Marusu; Kawasan wisata Cagar Alam Karaenta di Kecamatan Cenrana yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang di Kecamatan Cenrana dan Goa Liku Makallang di Kecamatan Simbang; Kawasan wisata alam Goa Pattunuang di Desa Samangki Kecamatan Simbang; Kawasan wisata alam air terjun Bonto Somba di Kecamatan Tompobulu; Kawasan wisata alam air panas di Dusun Reatoa Desa Samaenre Kecamatan Mallawa; Kawasan wisata Leang PanningE (goa kelelawar) di Desa Batu Putih Kecamatan Mallawa; Kawasan wisata arum jerang di Sungai Maros; Kawasan wisata air terjun Lacolla' di Kecamatan Camba; Kawasan taman prasejarah Leang-Leang di Kecamatan Bantimurung; dan Kawasan situs prasejarah Leang Akkarrasa Rammang-Rammang di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa.
- c. **Kawasan peruntukan pariwisata buatan dan Agrowisata**, terdiri atas : Kawasan agrowisata Tanralili yang merupakan kawasan pengembangan wisata pertemuan, konvensi, dan pameran (MICE) yang terpadu dengan kawasan agrowisata Pucak di Kecamatan Tanralili; Kawasan agrowisata Bantimurung di Kecamatan Bantimurung; dan Kawasan wisata kuliner di Jalan Topaz dan Jalan Gladiol di kawasan taman hutan kota dan kola di Kecamatan Turikale dan rencana kawasan wisata kuliner di sempadan Sungai Maros di Kecamatan Turikale, dan Kawasan wisata Sungai Maros di Kecamatan Turikale, Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Marusu.



7. Kawasan Pertanian

- a. **Luas kawasan pertanian lahan basah** di Kabupaten Maros adalah 28.688 Ha. Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pertanian lahan basah, dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan kriteria diatas, maka daerah yang dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian lahan basah adalah sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale.
- b. **Kawasan budidaya pertanian lahan kering** di Kabupaten Maros meliputi tanaman pangan lahan kering, tanaman keras tahunan, perkebunan, hutan produksi dan peternakan. Berdasarkan kriteria diatas, maka daerah yang dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian lahan kering adalah sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale.

8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan yang dimaksud adalah kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus dijaga dan dipelihara dengan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar. Adapun Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi kawasan militer Kariango, kawasan militer Samboeja; kawasan Kodim Maros, kawasan Polres Maros, kawasan Koramil yang tersebar di masing-masing kecamatan dan kawasan Polsek yang tersebar di masing-masing kecamatan meliputi fasilitas Kodam, Koramil, Lapangan Tembak, Polres dan Polsek dan lainnya.



Kawasan pertahanan dan keamanan Negara, terdiri atas : Komando Distrik Militer 1422 Maros di Kecamatan Turikale; Komando Rayon Militer di Kecamatan Mandai, Kecamatan Camba, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Marusu, Kecamatan Simbang, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Lau, Kecamatan Moncongloe, dan Kecamatan Turikale; Batalyon Infantri L-433 Julu Siri di Kecamatan Simbang; Kompi Zeni dan Tempur A, B, dan C serta Batalyon Zeni dan Tempur 8 Sakti Mandraguna di Kecamatan Tanralili; Kepolisian Resort Maros di Kecamatan Turikale; Kepolisian sektor di Kecamatan Mandai, Kecamatan Camba, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Marusu, Kecamatan Simbang, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Lau, Kecamatan Moncongloe, dan Kecamatan Turikale; dan Pangkalan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Mandai.

9. Kawasan Pelayanan Umum

Secara umum, rencana peruntukan kawasan pelayanan umum di Kabupaten Maros, meliputi: Kawasan peruntukan pelayanan olahraga, merupakan kawasan olahraga kabupaten yang dikembangkan secara berhirarki pada masing-masing pusat dan sub pusat kegiatan secara proporsional, terdiri atas: Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kabupaten diarahkan dipusat kegiatan PKN di Kecamatan Turikale; dan Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.

- a. **Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan**, terdiri atas: Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional diarahkan dipusat kegiatan PKN di Kecamatan Turikale; dan Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala kabupaten dan/atau kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.
- b. **Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi** diarahkan di kawasan perkotaan Turikale Kecamatan Turikale, dan kawasan perkotaan Mandai di Kecamatan Mandai.
- c. **Kawasan peruntukan pelayanan pemakamam umum** merupakan kawasan peruntukan pemakaman umum skala regional diarahkan di kawasan perkotaan Tetebatu Kecamatan Mandai.

10. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) ditetapkan dengan kriteria ruang kawasan butir a s/d f yang berikut yang merupakan batas ruang untuk



bangunan dan kegiatan yang mengganggu penerbangan. Area kawasan KKOP adalah sebagai berikut: Kawasan penpendekatan dan lepas landas, kemiringan 70 jarak 15.000 m dari ujung landasan pacu; Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, sudut sudut horizontal 7,50 kanan kiri, radius 15.000 m; Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, ketinggian 46 m radius 4.000 m dari as dan ujung landasan pacu; Kawasan di bawah permukaan horizontal luar, ketinggian 191 m radius 9.000 m dari batas permukaan kerucut ; Kawasan di bawah permukaan kerucut bawah 46 m jarak 2000 m dari as dan ujung landasan pacu sampai batas kerucut atas setinggi 191 m pada radius 1000 m dari batas permukaan bawah kerucut; Kawasan di bawah permukaan transisi, dari permukaan landasan pacu ke ketinggian 46 m dengan jarak 2.000 m dari ujung landasan pacu.

11. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah wilayah yang memiliki potensi terjadi bencana yang cukup tinggi, baik itu bencana banjir, longsor, puting beliung dan lain sebagainya. Hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Maros memiliki potensi akan terjadinya bencana. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Maros termasuk dalam wilayah rawan bencana, hal ini disebabkan karena kondisi geografis dan topografi Kabupaten Maros yang berada di wilayah pegunungan dan pesisir.

Tabel 2.8
Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Maros

NO	TIPE BENCANA	JUMLAH KAWASAN	KECAMATAN
1	Banjir	1	Mandai
		1	Camba
		1	Maros Baru
		1	Bontoa
		1	Tanralili
		1	Marusu
		1	Simbang
		1	Tompobulu
		1	Lau
		1	Moncongloe
		1	Turikale
2	Longsor	3	Bantimurung
		2	Mallawa
		2	Camba
		8	Cenrana
		5	Tompobulu



NO	TIPE BENCANA	JUMLAH KAWASAN	KECAMATAN
3	Kebakaran	18	Mandai
		7	Camba
		1	Bantimurung
		4	Maros Baru
		3	Bontoa
		6	Mallawa
		2	Marusu
		3	Simbang
		3	Cenrana
		1	Lau
		3	Moncongloe

Sumber : BPBD Kab. Maros, 2019

2.1.1.3. Demografi

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Triwulan I yang merujuk dari proyeksi data penduduk tahun susel tahun 2010-2021 (BPS Sulsel), jumlah penduduk Kabupaten Maros tahun 2019 diperkirakan sebanyak 353.121 jiwa, dengan rincian 171.884 jiwa penduduk laki-laki dan 180.237 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar masih berada di Kecamatan Turikale dengan jumlah penduduk sebesar 45.633 jiwa. Sedangkan penduduk dengan jumlah terkecil berada di kecamatan Mallawa sebanyak 11.761 jiwa.

Kepadatan penduduk tahun 2019 diperkirakan mencapai 218 jiwa/km². Kecamatan Turikale adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi (1.525 jiwa/km²). Sedangkan Kecamatan Mallawa adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah (50 jiwa/km²). Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan dan pendidikan Kabupaten Maros tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019*

Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Mandai	19.514	20.316	39.830	96	811
Moncongloe	9.392	9.815	19.208	96	410
Maros Baru	13.074	13.573	26.647	96	496
Marusu	13.787	14.062	27.850	98	518
Turikale	22.079	23.554	45.633	94	1525
Lau	13.174	13.712	26.886	96	364
Bontoa	14.226	14.807	29.033	96	310
Bantimurung	14.876	15.894	30.770	94	177

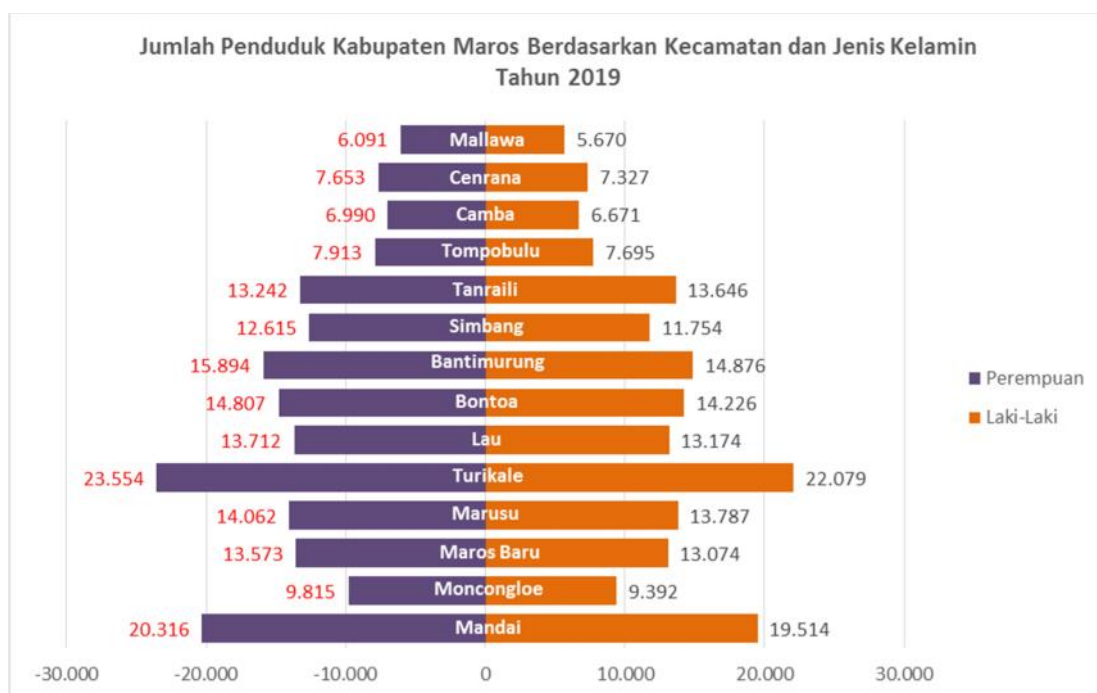
Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Simbang	11.754	12.615	24.369	93	231
Tanralili	13.646	13.242	26.888	103	301
Tompobulu	7.695	7.913	15.608	97	54
Camba	6.671	6.990	13.660	95	94
Cenrana	7.327	7.653	14.979	96	83
Mallawa	5.670	6.091	11.761	93	50
Jumlah	172.884	180.237	353.121	96	218

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2019

*) Angka Sementara berdasarkan hasil proyeksi BPS

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan masih lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini terlihat dari sex ratio sebesar 99. Apabila sex ratio diatas 100 maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Gambar 2.5
Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2019*



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2019

*) Angka Perkiraan

Tabel 2. 10
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelompok Umur
Kabupaten Maros Tahun 2019*

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
0 – 4	18.028	17.572	35.078	9,93
5 – 9	16.802	16.195	33.288	9,43
10 – 14	16.218	15.119	32.167	9,11
15 – 19	17.584	16.511	32.378	9,17
20 – 24	16.599	15.455	32.354	9,16
25 – 29	13.448	14.296	28.342	8,03
30 – 34	11.848	13.474	25.732	7,29
35 – 39	11.772	13.617	25.160	7,13
40 – 44	11.924	12.903	24.142	6,84
45 – 49	10.903	11.524	21.753	6,16
50 – 54	8.549	9.701	18.270	5,17
55 – 59	6.883	7.657	14.580	4,13
60 – 64	4.646	5.368	10.406	2,95
65 – 69	3.502	4.153	7.771	2,20
70 – 74	2.297	3.130	5.610	1,59
75+	2.291	3.637	6.090	1,72
Jumlah	173.294	180.312	353.121	100

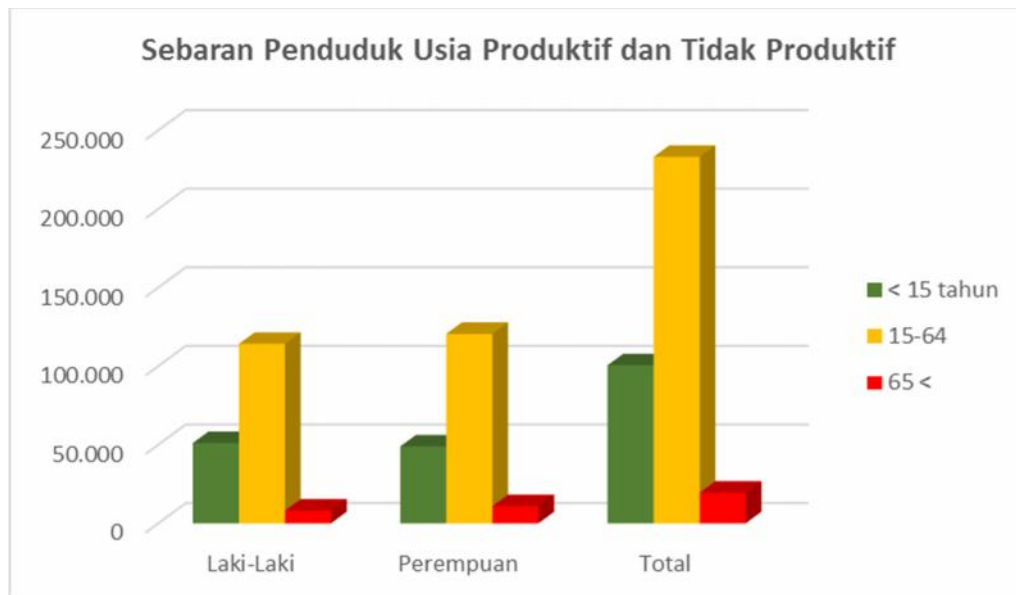
Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2019

*) Angka Sementara berdasarkan hasil proyeksi BPS

Berdasarkan tabel 2.10 diatas terlihat bahwa jumlah penduduk tahun 2019 dengan kelompok umur di Kabupaten Maros, jumlah tertinggi pada kelompok umur 0-4 tahun dengan jumlah penduduk sekitar 35.078 orang atau 9,93 % dari total jumlah penduduk, kemudian diikuti oleh kelompok umur 15-19 tahun dengan perkiraan jumlah penduduk 33.288 orang atau 9,43 % dari total jumlah penduduk.

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (Usia 15-64 tahun) di tahun 2019 sejumlah 233.117 orang dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sejumlah 120.506 jiwa dan laki-laki sejumlah 114.156 jiwa. Sedangkan Kelompok penduduk tidak produktif (< 15 tahun dan 65 <) sebanyak 120.004 orang dengan jumlah penduduk tidak produktif jenis kelamin perempuan sebesar 59.806 orang dan laki-laki 59.138 orang. Angka beban ketergantungan tahun 2019 diperkirakan sebesar 51,48 % yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung 52 orang penduduk usia tidak produktif.

Gambar 2.6
Grafik Sebaran Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif
Kabupaten Maros Tahun 2019*



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2019
*) Angka Perkiraan

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) Aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) Aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) Aspek kesejahteraan dengan fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.



1. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

PDRB atas harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satuan tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara *riil* dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Sedangkan PDRB Atas harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini. PDRB menurut harga berlaku juga digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah.



Tabel 2.11
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017*
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.601.405,40	1.749.999,40	1.888.855,60	2.069.235,71	2.202.311,90
2	Pertambangan dan Penggalian	624.609,30	736.331,00	828.870,50	955.853,50	1.142.053,80
3	Industri Pengolahan	1.967.108,70	2.337.241,30	2.586.445,90	2.653.474,04	2.733.882,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.943,00	9.228,80	8.967,42	10.042,26	10.649,50
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10.492,40	10.807,30	10.837,20	10.979,78	12.171,70
6	Konstruksi	535.777,00	573.016,70	627.453,30	675.641,73	735.098,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	326.539,20	354.445,70	371.946,80	396.964,01	419.031,60
8	Transportasi dan Pergudangan	3.441.355,30	3.161.029,80	3.407.382,93	3.917.728,64	4.175.994,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.908,40	34.748,70	37.141,40	39.628,66	41.548,70
10	Informasi dan Komunikasi	140.731,80	143.700,50	153.273,00	160.210,88	168.702,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	142.676,80	147.007,30	153.272,97	168.982,54	169.505,50
12	Real Estate	144.706,00	150.430,90	158.704,65	167.671,46	178.653,90
13	Jasa Perusahaan	2.541,50	2.621,60	2.705,53	2.798,87	3.060,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	361.658,80	374.002,40	399.310,25	432.041,41	453.024,00
15	Jasa Pendidikan	171.578,20	174.907,30	180.154,54	187.360,72	193.918,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63.927,40	69.991,70	76.290,99	80.796,03	84.108,70
17	Jasa Lainnya	36.822,90	37.714,20	39.222,77	40.987,79	44.603,50
PDRB		9.612.782,10	10.067.224,60	10.930.835,75	11.970.398,03	12.768.318,40

Sumber : BPS Kab. Maros, 2019

*) Angka Sementara



Tabel 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017*
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.846.522,50	2.116.114,90	2.473.846,00	2.707.892,20	3.055.509,70
2	Pertambangan dan Penggalian	702.996,90	906.062,40	986.032,37	1.081.677,50	1.208.401,40
3	Industri Pengolahan	2.229.842,80	2.762.351,20	3.075.552,50	3.245.902,50	3.570.314,40
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.080,60	8.535,70	7.674,10	8.675,90	10.605,90
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.197,40	12.785,80	13.308,60	14.063,00	17.581,10
6	Konstruksi	688.764,30	807.083,90	968.500,60	1.128.303,20	1.311.810,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	348.654,10	385.935,40	434.671,70	459.527,90	516.645,30
8	Transportasi dan Pergudangan	4.773.774,70	5.064.809,30	6.056.562,80	7.477.534,10	7.866.724,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.574,10	45.174,90	49.655,00	54.445,60	61.506,30
10	Informasi dan Komunikasi	144.358,30	148.748,90	163.111,30	185.131,30	211.049,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	182.062,80	193.406,00	208.126,90	232.762,70	244.478,60
12	Real Estate	165.400,30	177.608,00	190.928,50	215.749,30	237.229,30
13	Jasa Perusahaan	3.508,20	3.850,70	4.235,80	4.553,50	5.112,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	428.695,80	482.286,70	567.286,40	636.413,20	682.998,40
15	Jasa Pendidikan	192.847,40	208.803,50	229.723,40	244.655,40	263.004,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75.064,20	89.434,50	101.060,90	110.409,10	119.021,00
17	Jasa Lainnya	43.802,20	49.083,30	55.464,10	62.397,20	69.386,30
PDRB		11.885.146,60	13.462.075,10	15.585.740,97	17.870.093,60	19.451.379,40

Sumber : BPS Kab. Maros, 2019

*) Angka Sementara



Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB ADHK
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,06	9,28	7,93	9,55	6,43
2	Pertambangan dan Penggalian	12,04	17,89	12,57	15,32	19,48
3	Industri Pengolahan	8,18	18,82	10,66	2,59	3,03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,59	16,19	-2,83	11,99	6,05
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,75	3,00	0,28	1,32	10,86
6	Konstruksi	13,28	6,95	9,50	7,68	8,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,95	8,55	4,94	6,73	5,56
8	Transportasi dan Pergudangan	5,24	-8,15	7,79	14,98	6,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,31	5,59	6,89	6,70	4,85
10	Informasi dan Komunikasi	6,66	2,11	6,66	4,53	5,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,39	3,04	4,26	10,25	0,31
12	Real Estate	4,40	3,96	5,50	5,65	6,55
13	Jasa Perusahaan	5,72	3,15	3,20	3,45	9,34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,90	3,41	6,77	8,20	4,86
15	Jasa Pendidikan	7,05	1,94	3,00	4,00	3,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,95	9,49	9,00	5,91	4,10
17	Jasa Lainnya	1,40	2,42	4,00	4,50	8,82
PDRB		6,28	4,73	8,58	9,51	6,67

Sumber : BPS Kab. Maros, 2019

*) Angka Sementara

Kondisi makro selama 5 tahun terakhir (2013-2017) menunjukkan kondisi yang tidak terlalu baik pada tahun 2017. Jika dilihat dari laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan *output agregat* (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Meskipun pada tahun 2013-2016 pertumbuhan relatif pesat bahkan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 9,51% (tertinggi ke-3 di Provinsi Sulawesi Selatan), namun pada tahun 2017 terjadi perlambatan yang cukup signifikan hingga mencapai 6,67%.

Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan Penggalian serta Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Sedangkan rata-rata pertumbuhan lapangan usaha yang lain cenderung mengalami perlambatan. Secara umum pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten Maros pada tahun 2015-2016 berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Namun pada tahun 2017, perlambatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Maros menyebabkan pertumbuhannya berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan, namun masih berada diatas pertumbuhan nasional.

Gambar 2.6
Grafik Sebaran Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif
Kabupaten Maros Tahun 2019*



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2019

*) Angka Perkiraan

2. PDRB Berdasarkan Pengeluaran

PDRB pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB pengeluaran juga dapat dilihat ketrkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa. Dengan demikian PDRB pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis).



Tabel 2.14
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017

No	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Konsumsi rumah tangga	5.804.256,73	6.579.095,70	7.461.129,03	8.274.214,48	9.127.519,16
2	Konsumsi LNPR	117.427,15	138.322,72	161.354,97	179.256,39	197.019,99
3	Konsumsi Pemerintah	907.569,25	983.907,43	1.102.404,69	1.238.296,33	1.317.806,82
4	Pembentukan Modal tetap Bruto	2.420.043,46	2.819.646,10	3.218.840,40	3.711.284,82	4.282.022,37
5	Perubahan Inventori	246.738,52	-138.477,79	343.880,78	303.450,28	186.827,29
6	Ekspor	9.423.226,65	10.712.777,79	12.277.436,77	14.712.052,39	16.028.945,75
7	Impor	6.952.343,72	7.633.196,74	8.979.205,34	10.549.058,52	11.688.762,06
PDRB		11.966.918,04	13.462.074,02	15.585.841,29	17.869.496,17	19.451.379,32

Sumber : BPS Kab. Maros, 2109

*) Angka Sementara

Tabel 2.15
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017

No	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Konsumsi rumah tangga	4.725.676,50	4.983.899,05	5.301.616,92	5.651.450,98	5.980.663,60
2	Konsumsi LNPR	102.380,36	111.991,68	119.157,31	127.408,22	133.593,47
3	Konsumsi Pemerintah	756.987,37	778.808,91	822.88,00	867.748,27	896.083,01
4	Pembentukan Modal tetap Bruto	1.999.640,44	2.159.248,47	2.311.468,47	2.496.256,12	2.740.000,69
5	Perubahan Inventori	218.640,33	-96.321,38	226.817,58	191.267,88	118.444,53
6	Ekspor	7.115.451,23	7.467.351,20	8.043.678,05	8.889.344,13	9.529.615,08
7	Impor	5.306.513,77	5.338.154,18	5.908.894,17	6.269.476,42	6.630.081,98
PDRB		9.612.262,47	10.066.823,74	10.196.729,15	11.953.999,17	12.768.318,40

Sumber : BPS Kab. Maros, 2109

*) Angka Sementara

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2017

No	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*
1	Konsumsi rumah tangga	5,46	6,37	6,60	5,83
2	Konsumsi LNPRT	9,39	6,40	6,92	4,85
3	Konsumsi Pemerintah	2,88	5,66	5,45	3,27
4	Pembentukan Modal tetap Bruto	7,98	7,05	7,99	9,76
5	Perubahan Inventori	-144,05	-335,48	-15,67	-38,07
6	Ekspor	4,95	7,72	10,51	7,20
7	Impor	0,60	10,69	6,10	5,75
PDRB		4,73	1,29	17,23	6,81

Sumber : BPS Kab. Maros, 2109

*) Angka Sementara

b. Laju Inflasi

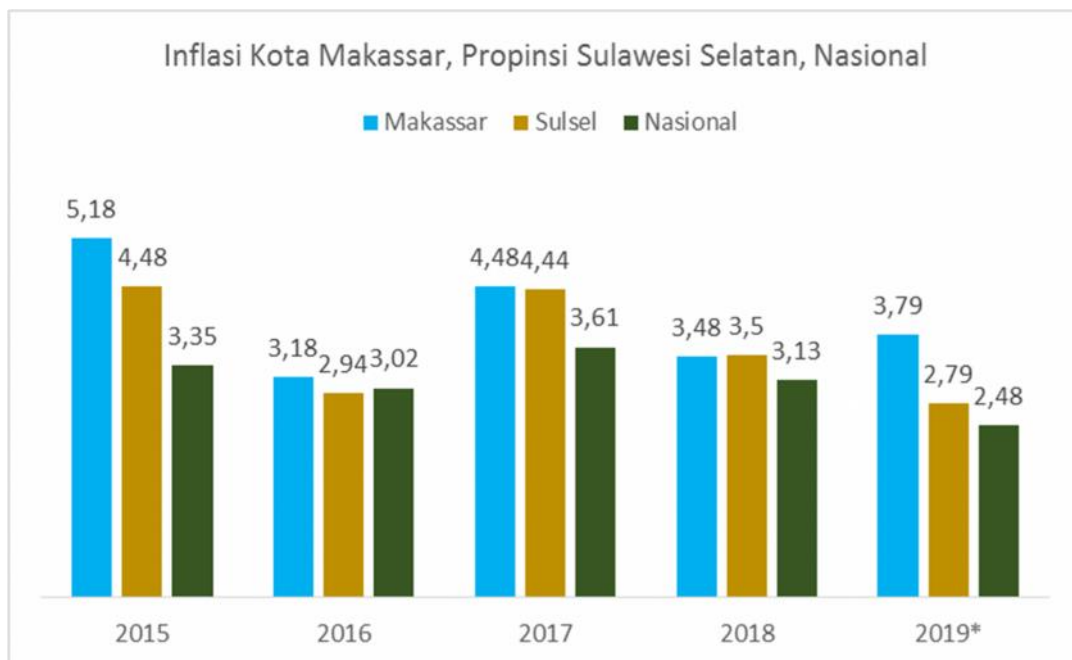
Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Secara sederhana inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, campak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah, dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor terjadinya *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara itu faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Untuk mengukur tingkat inflasi, BPS menggunakan ukuran berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong terjadinya laju inflasi. Inflasi pada satu propinsi tidak dihitung untuk setiap kabupaten/kota, namun hanya menggunakan kabupaten/kota yang dapat mewakili kabupaten/kota lainnya.

Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, perhitungan inflasi hanya dilakukan pada wilayah Kota Makassar, Kabupaten Watampone, Kabupaten Bulukumba, Kota Pare-Pare, dan Kota Palopo. Untuk Kabupaten Maros, dikarenakan kondisi geografis, maka kondisi inflasi Kabupaten Maros dapat mengikut kondisi inflasi Kota Makassar atau Provinsi Sulawesi Selatan.

Laju inflasi Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang berfluktuatif namun cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 laju inflasi kota Makassar sebesar 5,18 % kemudian menurun hingga mencapai 3,79 % pada tahun 2019 (Per Februari). Namun secara umum laju inflasi Kota Makassar masih berada di atas laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Gambar 2.7
Perbandingan Laju Inflasi Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019*



Sumber : BPS Sulsel, 2019
*) Per Februari 2019

c. PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB Per kapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

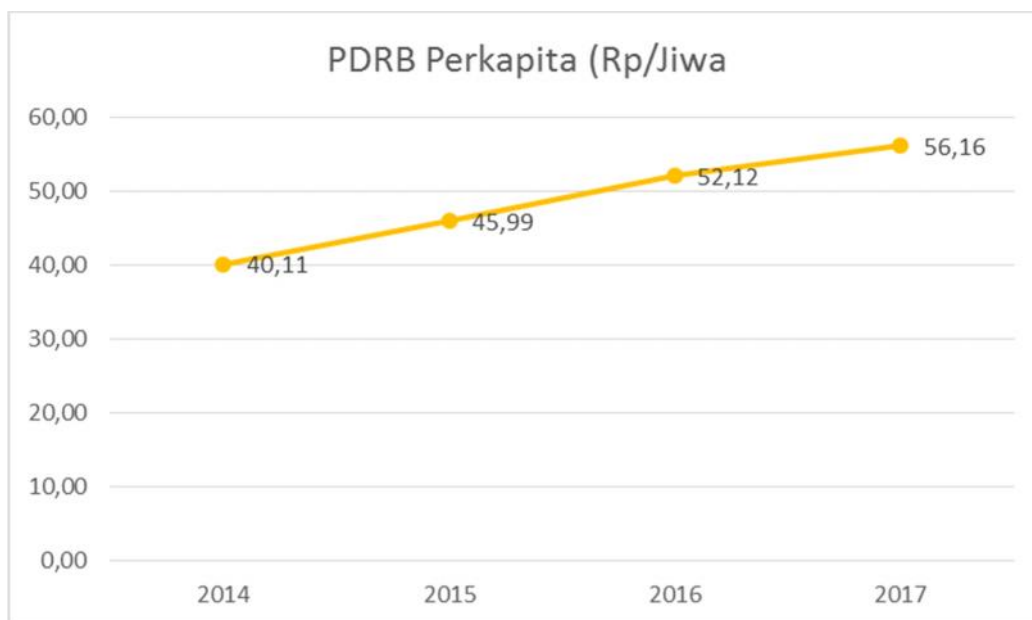
Tabel 2.17
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2014-2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Nilai PDRB (Rp)	13.462.074	15.602.765	17.870.093	19.451.379
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	335.596	339.300	342.890	346.383
3	PDRB Perkapita (Rp/Jiwa)	40,11	45,99	52,12	56,16

Sumber : BPS Kab. Maros, 2019

Dari PDRB Atas Dasar harga Berlaku yang dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Maros, diperoleh pendapatan per kapita nominal (memperhitungkan kenaikan harga atau inflasi) tahun 2017 sebesar 56,16 juta rupiah/jiwa/bulan. Kondisi PDRB Per Kapita pada kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2014 PDRB Per Kapita Kabupaten Maros sebesar 40,11 juta rupiah/jiwa/bulan.

Gambar 2.7
Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2014-2017



Sumber : BPS Kab. Maros, 2019

d. Koefisien Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kabupaten Maros digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio antara 0 – 1 (> 0 dan < 1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



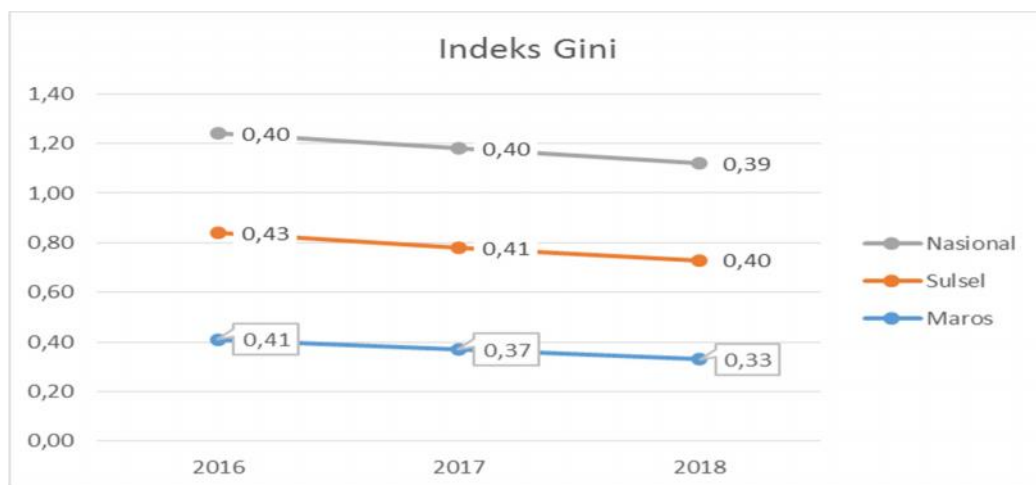
$0,00 < G < 0,35$: Pemerataan tinggi/ketimpangan rendah

$0,35 < G < 0,50$: Pemerataan/Ketimpangan sedang

$G > 0,50$: Pemerataan rendah/Ketimpangan tinggi

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Maros menunjukkan pada tahun 2016 sebesar 0,41, kemudian menurun pada tahun 2017 hingga mencapai 0,36 dan pada tahun 2018 kembali menurun hingga mencapai 0,33. Besaran Indeks Gini Kabupaten Maros menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan termasuk kategori tinggi atau dengan kata lain ketimpangan rendah. Kondisi ini berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Rata-Rata Gini ratio Kabupaten Maros selama tiga tahun terakhir (2016-2018) sebesar 0,37, sedangkan rata-rata gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,41 dan Nasional sebesar 0,40.

Gambar 2.8
Indeks Gini Kabupaten Maros, Provinsi Sulsel dan Nasional
Tahun 2016-2018



Sumber : BPS Kab. Maros, 2019

e. Kemiskinan

Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kemiskinan secara umum di Indonesia disusun dengan menggunakan standar indikator dari BPS. Berdasarkan data kemiskinan dari BPS, perkembangan kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2018. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin Kabupaten Maros sebanyak 40.100 jiwa, kemudian menurun hingga mencapai 37.913 jiwa pada tahun 2018. Tingkat kemiskinan



Kabupaten Maros tahun 2018 menurun hingga 10,31 %, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

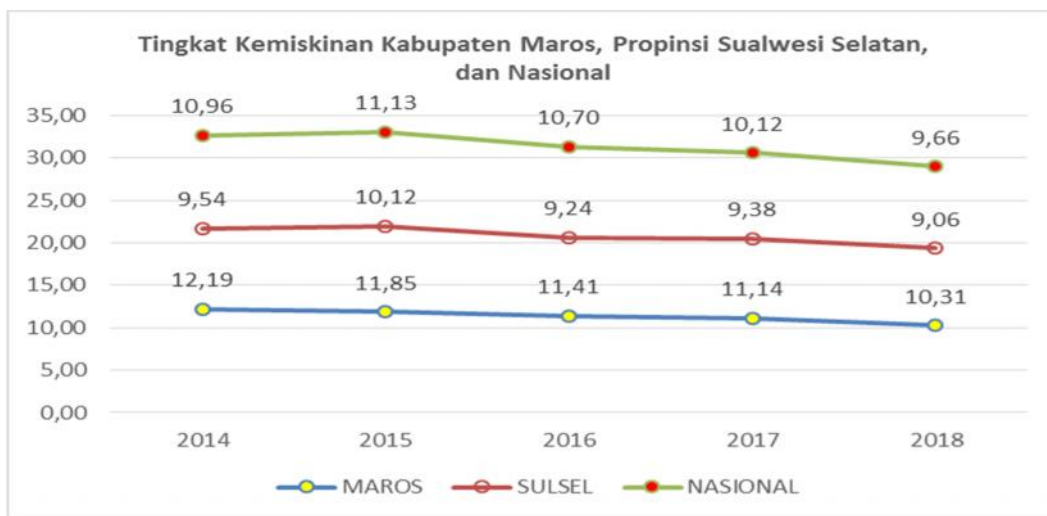
Tabel 2.18
Kondisi Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk Miskin	40.100	39.020	38.500	37.913
2	Tingkat Kemiskinan	11,85	11,41	11,10	10,31
3	Garis Kemiskinan	307.717	336.579	348.726	369.968

Sumber : BPS Kab. Maros, 2019

Kondisi kemiskinan Kabupaten Maros secara umum masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros sebesar 10,31 %, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 9,06 % dan Nasional sebesar 9,66 %.

Gambar 2.9
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Sulsel dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Kab. Maros, 2019

Kemiskinan juga merupakan salah satu dari target dalam Tujuan Pembangunan Bersama (TPB) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030. Berdasarkan capaian pelaksanaan TPB di Kabupaten Maros untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan usaha-usaha yang mengarah pada beberapa target, diantaranya:

- a. Menurunkan hingga setengah dari proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang USD 1 (PPP) per hari, dengan indikator:
 - Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional
 - Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)

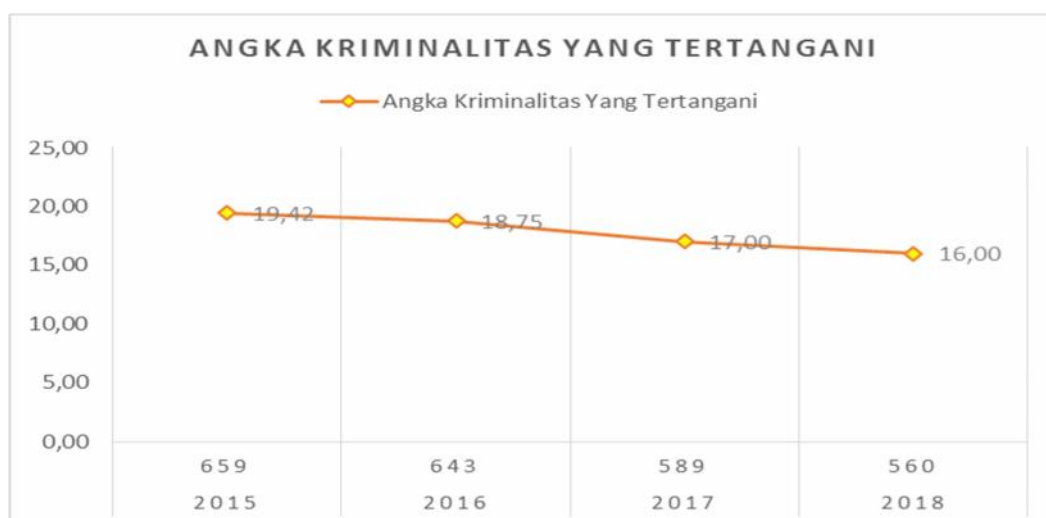


- b. Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda dengan indikator:
- Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja
 - Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas
 - Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
- c. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dengan indikator :
- Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi
 - Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi

f. Angka Kriminalitas

Dinamika perkembangan Kabupaten Maros yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan. Hal ini akan memacu meningkatnya angka kriminalitas. Selama tahun 2015 hingga tahun 2018, angka kriminalitas yang tertangani rata-rata sebesar 17,79 tindak kriminal per 10.000 penduduk, dengan rata-rata jumlah kejadian kriminal sebanyak 612 kasus. Jumlah kasus kriminal pada tahun 2015 sebesar 659 kasus kemudian menurun hingga mencapai 560 kasus pada tahun 2018.

Gambar 2.10
Angka Kriminalitas Yang Tertangani Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018



Sumber : Polres Maros, 2019

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

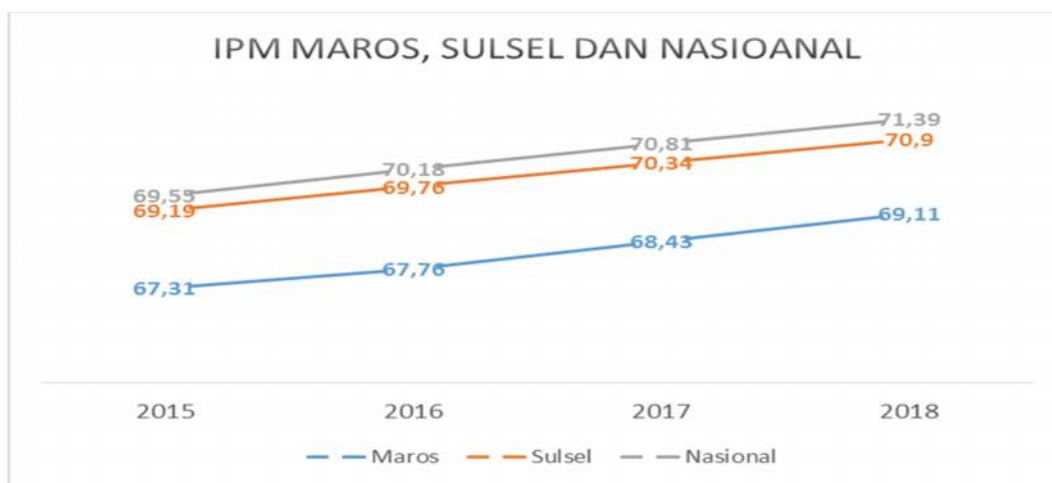
Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2018 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup yang panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Sejak tahun 2014 indikator pembentuk IPM terdiri atas Angka harapan hidup (AHH), Harapan lama Sekolah (HLS), rata-rata lama Sekolah (RLS) dan Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah).

Capaian IPM Kabupaten Maros secara umum masih cukup jauh dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Disisi lain laju pertumbuhan IPM Kabupaten Maros cukup pesat dan berada di atas pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dimana selama tahun 2015 hingga tahun 2018, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Maros sebesar 0,88 %, Sedangkan laju pertumbuhan IPM Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,81 % dan Nasional 0,87 %.

Gambar 2.11
IPM Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, Nasional
Tahun 2015-2018



Sumber : BPS Kab. Maros , 2019

Secara umum, dalam tiga tahun terakhir (2015-2019), pembangunan manusia Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 capaian IPM Kabupaten Maros sebesar 67,31, kemudian meningkat menjadi 67,76 pada tahun 2016. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten



maros mencapai 69,11. Pencapaian IPM Kabupaten Maros dalam 4 tahun terakhir masuk ke dalam kategori sedang dengan angka capaian 60-70. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel 2.19
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Maros Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018*

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018*
1	Angka Harapan Hidup	68,55	68,58	68,60	68,63
2	Paritas Daya beli (PPP)	9.468	9.758	10.121	10.305
3	Harapan Lama Sekolah	12,67	12,96	12,97	13,31
4	Rata-rata Lama Sekolah	7,19	7,20	7,42	7,50
5	IPM	67,31	67,76	68,43	69,11

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2019

*) Angka Sementara

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Maros, antara lain adalah Harapan lama Sekolah (HLS), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang masih sangat rendah. Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Maros masih berada pada tingkatan tahun pertama Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau 7,5 tahun. Sedangkan target lama sekolah setiap penduduk Kabupaten Maros adalah selesai pendidikan dasar 9 Tahun. Sedangkan untuk HLS, penduduk Kabupaten Maros masih berada pada tingkatan SMP (13 tahun).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus melakukan intervensi terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tingkatan SD dan SMP dengan Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) juga pada tingkatan SMP ke SMA. Jumlah penduduk melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA harus lebih ditingkatkan dengan cara; memberikan beasiswa kepada siswa miskin.

b. Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link* dan *Match*, yaitu pendekatan atau strategi meingkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan



pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Tabel 2.20
Kinerja Makro urusan Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2016-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Angka Melek Huruf	87,89	90,17	86,63	86,99
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,19	7,2	7,42	7,5
3	Angka Partisipasi Kasar				
	a. PAUD	69,35	70,18	72,63	74,08
	b. SD/MI	110,05	103,46	105,58	109,77
	c. SMP/MTs	100,78	91,76	86,42	78,04
4	Angka Partisipasi Murni				
	a. PAUD	69,95	71,77	71,11	71,68
	b. SD/MI	100	93,16	97,34	99,74
	c. SMP/MTs	99,56	74,97	74,63	72,13
5	Angka Partisipasi Sekolah				
	a. 7-12 tahun	100	99,29	99,68	99,74
	b. 13-15 tahun	89,55	96,37	95,44	96,42
	c. 16-18 tahun	68,95	71,15	79,11	71,53

Sumber : BPS Kab. Maros, 2019

Indikator kinerja urusan pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial antara lain dilihat dari Angka Melek Hruuf, Angka rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Indikator partisipasi sekolah terdiri dari APK dan APM. APK adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Berdasarkan data-data diatas, maka tingkatan pendidikan yang memerlukan perhatian khusus adalah pendidikan pada tingkat menengah pertama (SMP). Hal ini terlihat dari masih rendahnya APM, dan APK pada tingkat pendidikan SMP (70 – 74 %). Selain itu angka rata-rata lama sekolah juga masih sangat rendah (7 – 8 tahun), dimana rata-rata penduduk Kabupaten Maros belum menyelesaikan sekolah pada tingkatan SMP.

c. Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang dan sehat. Peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu antara lain; faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan dan



penedudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat di intervensi dengan cepat yaitu faktor kesehatan lingkungan dan faktor pelayanan kesehatan.

Sisi lain yang menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan diperlihatkan oleh rata-rata hari sakit yang dialami penduduk dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini sejalan dengan perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan kemudahan akses masyarakat ke tempat berobat yang semakin mudah serta program kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Dengan demikian berbagai kemudahan yang ada tersebut memberikan efek positif terhadap kesehatan penduduk yakni penyakit yang diderita penduduk akan lebih cepat tertangani dan terdeteksi lebih awal dan pada akhirnya akan memperpendek rentang waktu hari sakit.

Tabel 2.21
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)	990,77	991,68	992,91	994,58
2	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	9,59	8,85	7,45	5,70
3	Jumlah Kematian bayi	45	34	33	32
4	Persentase Gizi Buruk (%)	0,02	0,01	0,01	0,01
5	Prevalensi Balita Stunting (%)	42,30	38,16	40,87	23,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2019

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, terlihat bahwa angka kematian balita pada menunjukkan tren penurunan selama tahun 2015 hingga tahun 2018, begitu pula dengan jumlah kematian bayi. Pada tahun 2015 angka kematian balita sebesar 9,59 kasus/1000 kelahiran dan pada tahun 2018 mencapai 5,70 kasus/1000 kelahiran. Sedangkan untuk angka kematian bayi pada tahun 2015 terdapat 45 kasus kematian dan pada tahun 2018 sebesar 32 kasus.

d. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja).

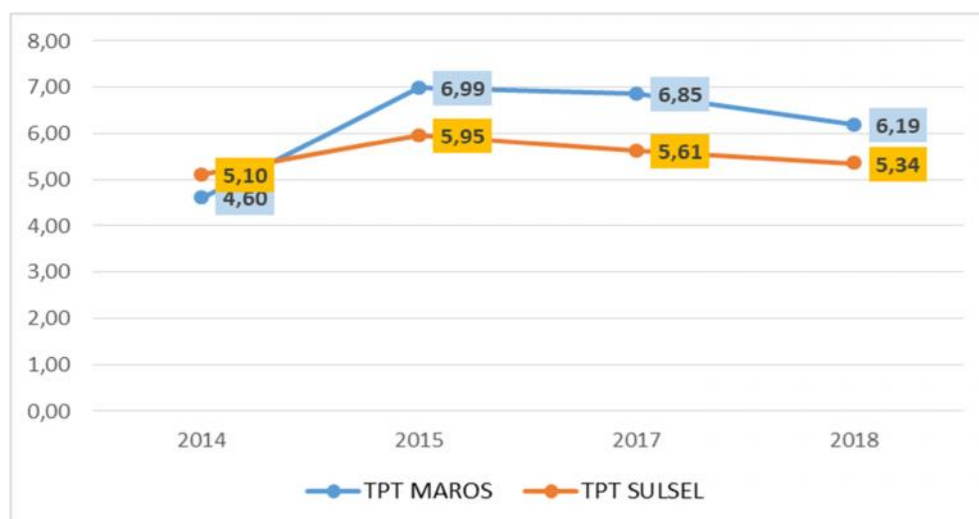
Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses

produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Untuk melihat kesempatan kerja, digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat Tingkat Pengangguran Terbuka secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada pada wilayah tersebut. Kondisi TPT Kabupaten Maros pada tahun 2015 – 2018 menunjukkan tren yang berfluktuatif, Namun secara umum apabila dibandingkan sejak tahun 2015 (5,71 %), terjadi peningkatan TPT pada tahun 2018 (6,19 %). TPT Kabupaten Maros masih berada diatas TPT Provinsi Sulawesi Selatan dimana pada tahun 2018 TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,34 %.

Gambar 2.12
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2018



Sumber : BPS Kab. Maros, 2019

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan TPT, TPAK disuatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi TPAK maka akan mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja.

Kondisi TPAK Kabupaten Maros selama tahun 2015 hingga tahun 2018 juga menunjukkan kondisi yang berfluktuatif, seperti halnya kondisi TPT. Secara umum kondisi TPAK apabila dilihat perkembangannya dari tahun 2015 (70,28 %) menunjukkan penurunan pada tahun 2018 (59,63 %).

Kondisi TPAK kabupaten Maros masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2018 TPAK Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 63,02 %. Hal ini menunjukkan kesempatan kerja di Kabupaten Maros masih lebih kecil bagi para pencari kerja apabila dibandingkan dengan kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 2.13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2018



Sumber : BPS Kab. Maros, 2019

Tabel 2.22
Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

KARAKTERISTIK	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Penduduk Usia kerja	239.275	224.967	227.844	230.575
Penduduk 15 Tahun Keatas	239.275	242.790	246.179	249.456
Angkatan kerja	155.988	160.703	142.621	143.250
a. Bekerja	145.081	149.885	132.854	133.998
b. Pengangguran	10.907	10.818	9.767	9.253
Bukan angkatan Kerja	83.856	104.114	85.223	72.574
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	65,04	65,55	57,80	59,63
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	6,99	6,49	6,85	6,19

Sumber : BPS Kab. Maros, 2019



Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja harus dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Di tahun 2018 tercatat 40 grup kesenian yang di bina oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Sedangkan untuk olahraga terdapat 116 atlet yang mendapat bantuan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Maros dan 77,78 % cabang olahraga yang berprestasi.

Dari sisi kebudayaan di Kabupaten Maros terdapat 63 cagar budaya yang dikelola secara terpadu dengan harapan cagar budaya tersebut dapat terjaga kelestariannya. Untuk selain pelestarian cagar budaya. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian seni budaya di Kabupaten Maros adalah penyelenggaraan festival seni budaya. Pemerintah Kabupaten Maros sejak tahun 2015 telah rutin menyelenggarakan festival seni dan budaya.

Tabel 2.23
Kondisi Kepemudaan, Olahraga dan Seni Budaya Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
I	Pemuda dan Olahraga				
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase wirausaha muda	8,55	9,12	9,41	8,58
3	Cakupan pembinaan olahraga	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan pembinaan atlet muda	0,00	0,00	3,54	7,08
6	Jumlah atlet berprestasi	18	28	30	116
7	Jumlah prestasi olahraga	18,52	22,22	14,81	77,78
II	Kebudayaan				
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	2	3
2	Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20,50	20,50	20,50	22,38
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	3
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	63	63	63	63

Sumber: Dispora, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros, 2019

2.1.2 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta memberdayakan masyarakat secara eksplisit pada kinerja pelaksanaan



pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros yang terdiri dari fokus urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Fokus Layanan urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Maros. Kinerja urusan pendidikan sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	40,80	36,74	37,56	37,78
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	APK SD/MI	110,05	103,46	105,58	109,77
	APK SMP/MTs	100,78	91,76	86,42	78,04
3	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	APM SD/MI/Paket A	100,00	93,16	97,34	99,74
	APM SMP/MTs/Paket B	99,56	74,97	74,63	72,13
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	100,00	99,29	99,68	99,74
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	89,55	96,37	95,44	96,42
5	Angka Kelulusan (AL)				
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,48	99,64	99,94	98,74
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,26	99,11	99,92	99,86
6	Fasilitas Pendidikan				
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	99,27	98,73	99,31	99,65
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	98,84	69,18	98,29	99,15
7	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	75,91	76,10	75,07	75,61
8	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	680,61	648,87	644,30	622,64
9	Rasio Guru/Murid Terhadap Murid Per Kelas rata-Rata	69,16	66,57	66,58	64,17
10	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan laki-Laki	94,42	95,55	96,86	97,13



NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
11	Penduduk Yang Berusia > 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	81,52	83,40	82,17	82,59
12	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	50,25	22,61	46,08	52,88

Sumber : Dinas Pendidikan kab. Maros, 2019

Berdasarkan data-data pada tabel di atas, indikator yang memerlukan perhatian dan intervensi dari pemerintah adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang masih cukup rendah capaiannya (37,78 % pada tahun 2018). Hal ini mengindikasikan masih banyaknya penduduk pada jenjang usia 4-6 tahun yang belum menjadi peserta PAUD. Selain itu Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkatan SMP juga masih cukup rendah (72,13 % pada tahun 2018). Hal ini menunjukkan masih banyaknya penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah/putus sekolah atau pun tidak melanjutkan sekolah ketika telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar.

b. Kesehatan

Pada urusan kesehatan dari jumlah 42 indikator, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan capaian. Berikut kinerja Pemerintah Kabupaten Maros pada urusan kesehatan selama tahun 2015 hingga tahun 2018.

Tabel 2.25
Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kematian bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	9,23	8,32	7,09	5,42
2	Angka Kelangsungan Hidup bayi	990,77	991,68	992,91	994,58
3	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	9,59	8,85	7,45	5,70
4	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	7,99	6,02	5,85	4,45
5	Angka Kematian Ibu Per 100000 Kelahiran Hidup	88,78	88,50	106,42	69,52
6	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	8,04	7,95	7,95	9,56
7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,12	0,12	0,12	0,11
8	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01
9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,32	0,28	0,25	0,25
10	Rasio Tenaga Medis Per Satuan penduduk	1,60	1,56	1,65	1,86
11	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	51,29	53,82	65,80	62,91



NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
12	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan	90,48	93,86	93,07	79,94
13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	n/a	82,52	79,61	100,00
14	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	117,52	113,96	91,10	95,00
17	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	0,00	4,77	7,31	7,69
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	17,98	20,03	20,12	20,68
20	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	123,78	103,82	127,03	295,29
21	Tingkat kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	0,00	6,42	5,20	4,29
22	Proporsi jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	90,78	82,14	53,15	72,20
23	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	90,78	82,14	53,15	72,20
24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Penderita Diare Yang Ditangani	94,84	31,58	32,90	31,76
26	Angka Kejadian malaria	12,08	20,12	55,72	43,74
27	Proporsi Anak balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Doibati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat	0,00	0,00	0,52	0,00
29	Prevalensi HIV/AIDS (%) Dari Total Populasi	0,00	0,00	0,01	0,01
30	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Akhir	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Cakupan Kunjungan Bayi	96,54	96,93	90,15	84,48
33	Cakupan Puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Cakupan Pembantu Puskesmas	25,24	25,24	25,24	25,24
35	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	92,09	85,64	91,02	78,06
36	Cakupan Pelayanan Nifas	95,22	93,83	91,82	78,69



NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
37	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Usia 6-24 Bulan Keluarga	10,41	13,84	15,27	15,98
38	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidomologi < 24 Jam	0,00	0,00	100,00	100,00
41	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	47,40	46,39	65,32	80,17
42	Cakupan Pelayanan Anak Balita	52,79	52,02	65,95	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2019

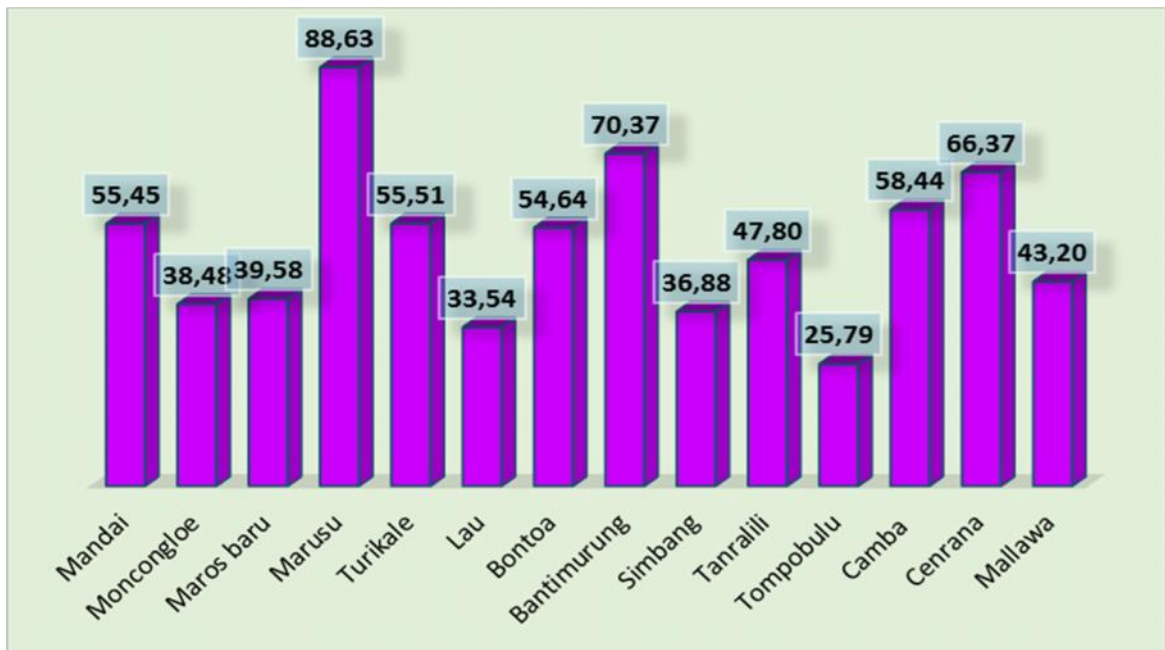
Berdasarkan data-data diatas, indikator yang memerlukan perhatian adalah jumlah dokter yang tersedia. Sampai tahun 2018 rasio dokter dibandingkan jumlah penduduk hanya sebesar 0,25 dokter untuk setiap 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan jumlah dokter yang sangat kurang, utamanya dokter ahli apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Fokus pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah peningkatan infrastruktur. Untuk pelaksanaan infratsruktur bidang jalan, telah menjadi fokus utama yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2015-2020 dan Perubahan RPJMD Tahun 2015-2020. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros pada tahun 2018 adalah 1.032,13 km.

Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, kecamatan yang memerlukan perhatian dalam hal perbaikan kondisi jalan adalah Kecamatan Tompobulu, Moncongloe, Maros Baru, Lau dan Simbang dikarenakan persentase jalan yang baik pada kecamatan-kecamatan tersebut masih berada di bawah 40 %.

Gambar 2.14
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2018



Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2019

Persentase jalan dalam kondisi baik sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 mencapai 64,39 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 367,52 km jalan kabupaten yang masih harus ditingkatkan kondisinya.

Gambar 2.15
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018



Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2019



Apabila dilihat dari kondisi permukaan jalan, maka kondisi jalan dengan permukaan yang di aspal sepanjang 123,66 km, jalan beton 560,74 km, telford/sirtu sepanjang 243,42 km. Sedangkan jalan tanah atau yang belum tembus sepanjang 103,52 km.

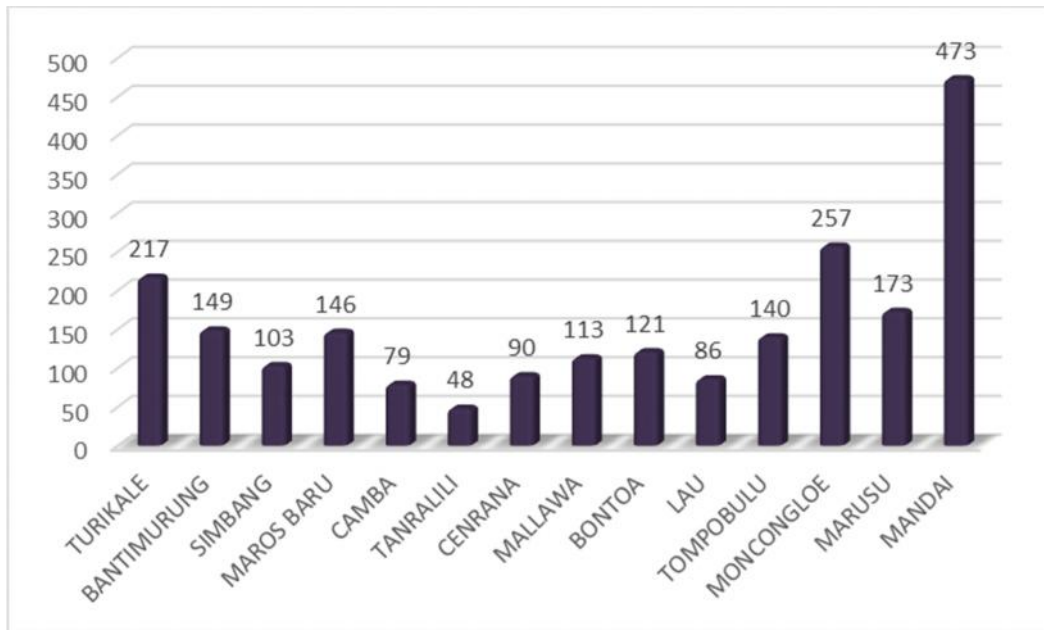
Tabel 2.26
Kondisi Jalan Berdasarkan Jenis Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018

NO	Kecamatan	Jenis Permukaan jalan (km)			
		Aspal	Beton	Telford/Sirtu	Tanah/Belum tembus
1	Mandai	7,75	29,54	1,87	1,87
2	Moncongloe	4,60	25,44	8,54	0,80
3	Maros baru	3,67	24,90	2,61	0,00
4	Marusu	7,30	26,54	3,01	0,00
5	Turikale	14,89	21,81	1,16	1,90
6	Lau	0,00	9,32	0,75	0,00
7	Bontoa	3,30	36,76	2,40	0,09
8	Bantimurung	3,29	55,98	3,35	1,02
9	Simbang	7,57	29,43	11,87	0,00
10	Tanralili	19,74	20,93	16,55	4,35
11	Tompobulu	10,67	17,70	54,40	12,60
12	Camba	1,30	43,71	32,58	16,46
13	Cenrana	1,95	34,05	13,52	19,80
14	Mallawa	7,21	55,96	45,68	34,32
15	LINTAS KECAMATAN	30,42	128,67	45,13	10,31
TOTAL		123,66	560,74	243,42	103,52

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2019

Kondisi infrastruktur Kabupaten Maros dilihat dari penerangan jalan umum menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Namun masih diperlukan penambahan lampu jalan pada lokasi atau wilayah yang rawan akan tindak kejahatan seperti jalan-jalan yang masih kurang pemukiman penduduk. Jumlah lampu jalan yang telah terpasang sepanjang tahun 2019 sebanyak 2.195 unit yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros .

Gambar 2.16
Jumlah Penerangan Jalan Kabupaten Maros 2018



Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2019

Untuk penataan ruang khususnya yang berkaitan dengan penataan bangunan dikendalikan dengan pengeluaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Rasio bangunan ber-IMB selama kurun waktu tersebut sebesar 0,04. Dengan jumlah IMB yang dikeluarkan pada tahun 2018 sebanyak 3.176 IMB. Walaupun IMB merupakan syarat untuk melakukan pembangunan namun harus diperhatikan ketepatan/presisi bangunan dengan IMB yang dikeluarkan. Selain itu setiap pembangunan yang akan dilaksanakan baik oleh masyarakat, pengusaha maupun pemerintah harus sesuai dengan fungsi ruang kota yang telah di atur dalam RTRW Kabupaten Maros (Perda Nomor 4 Tahun 2012). Perkembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dijabarkan berdasarkan variabel yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Realisasi Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
Pekerjaan Umum					
1	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (termasuk jalan nasional dan propinsi)	0,50	0,52	0,66	0,68
2	Rasio Panjang jalan Dengan Jumlah Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum dapat Dilalui Roda 4	28,50	24,60	19,80	16,20



NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam)	45,74	47,23	61,87	64,39
5	Persentase Jalan Yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuang air (min 1,5 m)	1,23	1,23	1,54	1,54
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai kaki lima atau bangunan liar	12,74	12,57	15,57	15,45
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65,11	67,13	69,08	70,96
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	0,96	1,44	2,90	3,86
9	Persentase bangunan turap di wilayah penghujung dan aliran sungai rawan longsor	0,63	2,52	3,58	4,41
10	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	0,00	27,86	37,57	47,64
11	Rasio jaringan irigasi	0,00	0,27	0,34	0,39
12	Persentase Penduduk berakses air minum	58,49	60,55	62,58	64,57
13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	58,49	60,55	62,58	64,57
14	Persentase areal kawasan kumuh	0,35	0,15	0,09	0,05
15	Tersedianya Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0,20	0,22	0,25	0,27
16	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,00	0,00	0,17	0,17
17	Rasio Tempat ibadah per satuan penduduk	2,10	2,01	1,84	1,73
Penataan Ruang					
1	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	8,15	19,37	0,71	0,74
2	Luasa RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1,00	1,17	1,34	1,67
3	Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan	0,00	0,04	0,04	0,04
4	Ruang Oublik yang Berubah Peruntukannya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ketaatan Terhadap RTRW	0,71	1,11	1,45	1,74

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2019

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan indikator urusan perumahan, pertanahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Realisasi Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Rasio rumah layak huni	0,14	0,14	0,14	0,14
2	Rasio Pemukiman layak huni	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	64,29	55,59	55,75	54,93
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0,31	1,57	3,35	4,01
5	Persentase pemukiman yang tertata	99,83	99,83	99,96	100,00
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,004	0,004	0,001	0,00
7	Persentase luasan pemukiman kumuh kawasan perkotaan	0,00	56,79	82,40	0,00
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPPKP Kab. Maros, 2019

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa luas pemukiman kumuh perkotaan telah tuntas diselesaikan pada tahun 2018. Luas pemukiman kumuh susai dengan Surat Keputusan Bupati Maros sebesar 5,74 Ha yang terdiri dari kelurahan Alliritengngae, Turikale dan Bajubodoa untuk Kecamatan Turikale. Sedangkan untuk penyediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sampai dengan tahun 2018 telah terbangun sebanyak 47.792 unit.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Perkembangan melibatkan 2 (dua) OPD yang terkait didalamnya; yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Realisasi Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	91,87	92,33	95,48	99,00



No	Uraian	2015	2016	2017	2018
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan eilayah manajemen kebakaran (WMK)	93,48	97,01	98,08	98,15
4	Persentase Penegakan PERDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP dan Dmakar Kab. Maros, 2019

f. Sosial

Pada urusan sosial terdapat 8 (delapan) indikator yang menjadi ukuran kinerja. Dari indikator tersebut beberapa indikator capaiannya masih relatif rendah sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Indikator yang capaiannya masih rendah tersebut berhubungan dengan PMKS, persentase PMKS yang tertangani ataupun yang mendapat bantuan sosial atau kebutuhan dasar.

Masih rendahnya penanganan PMKS di Kabupaten Maros disebabkan karena jumlah PMKS yang tidak bisa terdata dengan akurat, disebabkan banyak PMKS utamanya fakir miskin dan gelandangan dari Kota Makassar yang "berimigrasi" ke Kabupaten Maros sehingga penanganannya memerlukan koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial pemerintah Kota Makassar.

Tabel 2.30
Realisasi Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,00	0,00	13,04	18,52
2	Persentase PMKS yang tertangani	0,00	6,00	15,00	14,81
3	Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar'	0,00	0,00	11,54	13,04
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha KUBE atau kelompok sosial ekoomi sejenis lainnya	0,00	0,00	3,85	13,64
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	85,71	85,71	85,71	57,14
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana	33,33	33,33	33,33	33,33



No	Uraian	2015	2016	2017	2018
	prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	52,05	31,20	100,00	100,00
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	52,05	31,20	100,00	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2019

1.1.3.1 Fokus Layanan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Pada tahun 2018, sasaran pelaksanaan urusan wajib ketenagakerjaan yang ingin dicapai adalah meingkatnya kualitas daya saing tenaga kerja. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun	27,91	31,67	21,74	38,91
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	16,31	4,55	7,45	9,63
4	Keselamatan dan perlindungan	5,12	10,41	15,22	15,56
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	0,00	66,12	70,07	87,98
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Besaran pemeriksaan perusahaan	16,28	20,36	26,09	58,37
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0,00	0,00	50,00	40,00
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0,00	0,00	20,00	46,67
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	0,00	0,00	30,00	30,00
11	Rasio lulusan S1/S2/S3	45,97	46,67	49,15	50,13

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Maros, 2019



Dari tabel di atas, diketahui bahwa indikator yang memerlukan perhatian pemerintah adalah besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan. Dimana pada tahun 2018 persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan hanya sebesar 9,63 %. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros cukup kecil apabila dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia setiap tahunnya. Masalah ini sebenarnya telah dilakukan intervensi Pemerintah Kabupaten Maros dengan melakukan kegiatan *Job Fair* yang melibatkan perusahaan-perusahaan serta BUMN yang berada dalam wilayah Kabupaten Maros, namun penyerapannya masih cukup rendah.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Maros sangat memperhatikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani serta menurunnya Rasio KDRT yang cukup signifikan di tahun 2018 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk kesetaraan gender, kondisi di Kabupaten Maros semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi perempuan baik di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Selain itu pemerintah juga sangat serius dalam memperhatikan kepentingan/kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat, terlihat dari cukup banyaknya forum anak yang terbentuk serta sekolah, puskesmas dan kecamatan layak anak.

Tabel 2.32
Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,08	7,53	16,85	17,24
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20,00	20,00	20,00	20,00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	91,92	92,47	83,15	82,76
4	Rasio KDRT	0,04	0,04	0,06	0,04
5	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47,85	40,41	37,54	40,01
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	n/a	100,00	100,00	100,00



No	Uraian	2015	2016	2017	2018
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	n/a	n/a	100,00	100,00
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	n/a	n/a	100,00	100,00
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	n/a	100,00	100,00	100,00
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	n/a	59,38	70,00	80,00
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	n/a	62,50	70,00	80,00
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	97,47	86,77	94,61	95,46
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	104,74	109,41	98,18	95,50
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	92,41	93,23	99,66	100,00
17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	27,62	27,62

Sumber : DPPPA Kab. Maros, 2019

c. Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator ketersediaan pangan utama, pencapaian skor pola pangan harapan, penguatan cadangan pangan, penanganan daerah rawan pangan ketersediaan pangan utama dan ketersediaan energi dan protein perkapita. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Maros tergolong aman bahkan surplus, dan tidak terdapat daerah yang kekurangan pangan.

Tabel 2.33
Realisasi Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Skor Pola Pangan Harapan	78,78	81,40	83,20	85,10
2	Penanganan Daerah rawan pangan (%)	100	100	100	100
3	Ketersediaan pangan utama	68,66	70,18	68,32	69,00
4	Ketersediaan energi dan protein perkapita	4.234,65	7.127,06	6.937,65	7.006,96

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2019

d. Pertanian

Pada urusan pertanian, indikator yang digunakan sebagai ukuran kinerja adalah persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi. Berdasarkan indikator-indikator yang menjadi ukuran kinerja, pencapaiannya selama tahun 2015 hingga tahun 2018 tergolong baik bahkan sangat baik, dikarenakan tidak terdapat kasus tanah negara yang diserobot oleh pihak-pihak lain, baik individu maupun kelompok/organisasi/ perusahaan.

Tabel 2.34
Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase luas lahan bersertifikat	2,17	2,51	21,00	22,05
2	Penyelesaian kasus tanah negara	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyelesaian izin lokasi	n/a	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPPKP Kab. Maros, 2019

e. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Salah satu hasil yang menonjol adalah penghargaan Adipura yang diperoleh Kabupaten Maros sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 untuk kategori kota kecil terbersih. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros memiliki kepedulian dalam pengendalian pencemaran serta memiliki komitmen dalam mewujudkan kota hijau dan bersih. Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2015 hingga tahun 2018 yang secara umum kondisinya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.35
Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pemabngunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat daerah	ada	ada	ada	ada
4	Hasil pengukuran indeks kualitas air	0,00	5,64	7,51	7,03
5	Hasil pengukuran indeks kaulitas udara	105,56	78,33	92,78	93,89
6	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	16,03	16,20	16,32	16,33
7	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	60,00	37,04	71,11	n/a
8	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas daerah (PPLHD) di kabupaten/kota	-	1,00	1,00	1,00
9	Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tervverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan ttradisional	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Penetapan Hal MHA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Terfasilitasi kegiata peningkatan pengetahuan dan keterampilan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada	ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oelh pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Timbunan sampah yang ditangani	14,98	25,00	30,00	35,00
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R	2,62	2,87	3,27	4,61
20	Persentase jumlah sampah yang tertangani	14,98	25,00	30,00	42,00



NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
21	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	73,81	78,71	89,79	89,79
22	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data-data diatas, indikator yang memerlukan perhatian adalah tingkat kualitas air dan udara. Tingkat pencemaran air dan udara di Kabupaten Maros termasuk dalam kategori tercemar sedang. Harus diupayakan penurunan tingkat pencemaran baik udara maupun air.

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan urusan kependudukan dan catatan sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Capaian indikator-indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maros sudah termasuk dalam kategori sangat baik, namun permasalahan yang dihadapi adalah, data-data kependudukan seperti akta kelahiran dan akta nikah yang berada pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil adalah data penduduk yang beragama non muslim. Sedangkan data-data penduduk berupa akta nikah dan akta lahir penduduk yang beragama muslim berada di Kantor Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Maros.

Tabel 2.36
Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	n/a	n/a	0,88	0,97
2	Rasio bayi berakte lahir	0,89	0,95	0,96	0,97
3	Rasio pasangan berakte nikah	n/a	n/a	0,17	0,19
4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada	Ada	ada	ada
5	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP)	n/a	n/a	88,95	97,99
7	Cakupan penertiban akta kelahiran	88,56	95,45	97,95	98,19

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros, 2019



g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari ketertiban lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri urusan pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan dan peran serta semua pihak, baik swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2015 hingga tahun 2018 telah tercapai angka 100 % untuk PKK aktif, sedangkan LSM yang kati pada tercapai 75 %. Untuk cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik telah tercapai besaran 83,75 %, dimana masih terdapat beberapa kantor desa yang masih memerlukan perbaikan dan telah dimasukkan dalam penganggaran tahun 2019 dan 2020 nanti.

Tabel 2.37
Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	81,25	82,50	82,50	83,75
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	9,58	9,58	9,58	9,58
4	Persentase LSM Aktif	50,00	69,23	71,43	75,00
5	Persentase LPM berprestasi	11,65	13,59	14,56	15,53
6	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase posyandu aktif	70,89	74,94	78,20	81,14

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2019

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/pasangan yang telah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.



Tabel 2.38
Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,23	1,20	1,18	1,15
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,39	2,37	2,35	2,33
3	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	0,00	0,00	9,09	15,91
4	Persentase perangkat daerah (dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	11,36	31,82	52,27	72,73
5	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	7,00	7,00	7,00	7,00
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0,00	0,00	0,00	1,00
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,63	1,62	1,62	1,59
9	Ratio akseptor KB	56,43	56,95	57,47	57,93
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	60,26	62,63	62,23	63,22
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) tahun	90,02	95,10	131,09	108,25
12	Cakupan pasangan usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	51,26	52,31	53,36	42,56
13	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	28,68	27,24	25,81	24,70
14	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	9,31	10,54	11,75	13,25
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	72,41	72,02	71,64	71,29



No	Uraian	2015	2016	2017	2018
16	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) Ber-KB	13,59	13,76	13,86	13,90
17	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	5,50	7,24	8,93	11,40
18	Cakupan bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	4,32	4,49	4,67	4,86
19	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	14,29	21,43	21,43	50,00
20	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	100,00	100	100	100
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk	0,00	100,00	100,00	100,00
22	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	19,18	22,13	24,68	26,84
23	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	n/a	100,00	100,00	100,00
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	96,47	198,71	170,09	156,05
25	Persentase faskers dan jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	n/a	100,00	100,00	100,00
27	Persentase remaja yang terkena infeksi penyakit infeksi menular seksual (IMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1,06	1,20	1,35	1,51
29	Rata-rata usia kawin pertama	25,17	25,45	25,84	26,33



No	Uraian	2015	2016	2017	2018
30	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	0,67	0,57	0,50	0,83

Sumber : DPPKB Kab. Maros, 2019

Berdasarkan data-data diatas, jumlah akseptor KB masih harus memerlukan perhatian dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sampai tahun 2018, rasio akseptor KB hanya sebesar 50 %, hal ini mengindikasikan masih ada separuh pasangan usia subur (PUS) yang belum menjadi akseptor. Untuk itu diperlukan sosialisasi serta pendekatan-pendekatan yang lebih intensif terhadap PUS agar dapat menjadi akseptor KB.

i. Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuensi keberadaan transportasi harus menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internak maupun eksternal. Sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang baik.

Tabel 2.39
Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	11.602.159,00	12.702.191,00	12.284.224,00	12.664.472,33
2	Rasio ijin trayek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jumlah uji kir angkutan umum	1.108,00	963,00	705,00	668,00
4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Persentase layanan angkutan darat	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	20,30	18,42	14,86	10,33
7	Pemasangan rambu-rambu	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,03	0,01	0,01	0,01
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	14.302.159,00	16.202.191,00	17.134.224,00	19.168.348,00
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	59.200.030,00	72.390.045,00	84.357.050,00	100.727.255,74
11	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	11.602.159,00	12.702.191,00	12.284.224,00	12.664.472,33
12	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	59.200.030,00	72.390.045,00	84.357.050,00	100.727.255,74

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2019



Dikarenakan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Berada dalam wilayah Kabupaten Maros, maka jumlah barang dan orang yang terangkut angkutan umum jumlah cukup besar. Sedangkan rasio ijin trayek jumlah sangat sedikit bahkan berkurang setiap tahunnya dikarenakan jumlah angkutan umum jenis pete-pete yang berkurang jumlahnya. Hal ini disebabkan banyaknya bermunculan layanan moda transportasi berbasis online yang lebih nyaman dan mudah dibandingkan angkutan umum jenis pete-pete.

j. Komunikasi dan Informatika

Pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.40
Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	0,00	0,00	100,00	100,00
2	Cakupan layanan telekomunikasi	0,00	0,00	4,98	6,71
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	55,65	56,31	56,78	57,23
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,00	0,00	0,27	0,27
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,74	0,77	0,77	0,78

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Maros, 2019

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kondisi capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Maros sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 menunjukkan capaian yang cukup baik. Dimana persentase koperasi aktif sampai tahun 2018 sebesar 75,50 %, Persentase usaha mikro dan kecil mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan pemerintah telah melakukan pembinaan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah, baik berupa bantuan pelatihan manajemen, bantuan pelatihan pengemasan, fasilitasi distribusi produk ke pasaran, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Tabel 2.41
Realisasi Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase koperasi aktif	67,14	74,34	74,86	75,50



No	Uraian	2015	2016	2017	2018
2	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase BPR/LKM Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,49	93,26	96,54	99,40

Sumber : Dinas Kopumdag Kab. Maros, 2019

I. Penanaman Modal

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian urusan wajib penanaman modal tahun 2015 hingga tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.42
Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	237,00	298,00	330,00	420,00
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rp)	0,00	0,00	195,20	281,95
3	Rasio daya serap tenaga kerja	n/a	6,26	6,47	6,66
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar rupiah)	0,00	0,00	0,00	44,44

Sumber Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2019

Pada tahun 2018 terjadi kenaikan investasi PMDN sebesar 44,4 % . Hal ini sejalan dengan jumlah investor yang juga semakin bertambah, dimana pada tahun 2018 terdapat 420 investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Maros.

Berbagai upaya perijinan terus ditingkatkan untuk menunjang iklim investasi seperti infrastruktur, kondusifitas wilayah, pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin dan pengembangan objek wisata.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga antara lain jumlah organisasi dan sarana kepemudaan dan olahraga, serta peningkatan kualitas wasit dan pelatih.

Tabel 2.43
Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100,00	100,00	100,00	100,00



2	Persentase wirausaha muda	8,55	9,12	9,41	8,58
3	Cakupan pembinaan olahraga	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan pembinaan atlet muda	0,00	0,00	3,54	7,08
6	Jumlah atlet berprestasi	18	28	30	116
7	Jumlah prestasi olahraga	18,52	22,22	14,81	77,78

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Maros, 2019

n. Statistik

Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2018 pelaksanaan urusan statistik melalui program penyediaan data dan informasi dan kerjasama dengan lembaga BPS maka buku Maros Dalam Angka dan PDRB telah tersusun. Sedangkan sistem data statistik yang tersedia baik sektoral maupun data makro telah disusun dalam aplikasi SIPD.

Tabel 2.44
Realisasi Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tidak	tidak	tidak	tidak
2	Buku " kabupaten dalam angka "	ada	ada	ada	ada
3	Buku " PDRB "	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2019

o. Persandian

Urusan persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan jumlah OPD yang telah memanfaatkan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Sampai dengan tahun 2018 belum ada OPD yang belum menggunakan sandi dalam melakukan komunikasi, namun diharapkan pada tahun 2019 seluruh OPD yang ada telah menggunakan sandi.

Tabel 2.45
Realisasi Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2019

p. Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni serta cagar budaya yang telah dilestarikan.

Tabel 2.46
Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	2	3
2	Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20,50	20,50	20,50	22,38
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	3
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	63	63	63	63

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Maros, 2019

Hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah yaitu kurang tertariknya minat generasi muda terhadap seni dan budaya lokal, untuk itu pemerintah berupaya menumbuhkan minat generasi muda dengan selalu mencoba melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni budaya yang lebih atraktif serta kreatif antara lain melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya.

q. Perpustakaan

Selama tahun 2015 hingga tahun 2018, Kabupaten Maros memiliki 3 Perpustakaan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Selain itu terdapat perpustakaan di sekolah-sekolah baik pada tingkat SD maupun SMP. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 26.335 orang. Namun karena jumlah populasi yang dilayani sebesar 285.739 orang sehingga persentase pengunjung sebesar 0,09 %.

Semakin berkembangnya teknologi informasi pada saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros, diakibatkan semakin tingginya akses terhadap buku dan bacaan lainnya tanpa harus ke perpustakaan. Hal ini mengakibatkan pengunjung perpustakaan semakin menurun. Diperlukan kiat-kiat khusus untuk menarik minat baca masyarakat terutama anak-anak, sehingga mereka dapat berkunjung ke perpustakaan.

Tabel 2.47
Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	0,07	0,08	0,08	0,09



No	Uraian	2015	2016	2017	2018
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,30	0,38	0,38	0,73
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,10	1,09	1,08	1,07
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	0,09	0,12	0,11	0,12
5	Jumlah koleksi buku perpustakaan	911	5.911	10.911	15.911
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Maros, 2019

r. Kearsipan

Hampir semua indikator kinerja pada urusan kearsipan mengalami kenaikan. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.48
Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	97,73	97,73	93,18	100,00
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Maros, 2019

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan. Pada urusan kelautan dan perikanan menunjukkan keberhasilan. Hal ini terlihat dari indikator produksi perikanan yang meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 produksi perikanan mencapai 124,07 ton. Sedangkan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Maros sampai tahun 2018 sebesar 9,06 %. Pada tahun 2018 terdapat 30 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah dari 276 kelompok nelayan yang ada.

Tabel 2.49
Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Produksi perikanan (ton)	108,64	99,29	102,21	124,07
2	Konsumsi ikan (ton)	100,00	99,85	99,78	100,00
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	8,93	4,30	11,65	9,06
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	53,34	54,35	52,45	53,02



No	Uraian	2015	2016	2017	2018
5	Proporsi Tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	70,64	74,55	76,41	78,13

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Maros, 2019

b. Pariwisata

Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah pendapatan dari sektor pariwisata. Untuk itu peningkatan perekonomian Kabupaten Maros juga terus didorong dicapai dan sektor pariwisata dengan upaya yang dilakukan pada peningkatan jumlah wisatawan ke Kabupaten Maros. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros pada tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah berfluktuatif. Tahun 2015 hingga tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah kunjungan, namun pada tahun 2017 hingga tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung menunjukkan tren penurunan. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan ini disebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan asing. Selain itu tidak adanya destinasi wisata baru juga menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan tidak bertambah secara signifikan. Hal lain yang menyebabkan berkurang jumlah kunjungan wisatawan disebabkan Kabupaten Maros hanya sebagai area transit bagi para wisatawan dari luar Sulawesi selatan.

Tabel 2.50
Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Kunjungan wisata	365.209	441.399	422.869	386.500
2	Lama kunjungan wisata	1	1	1	2
3	PAD Sektor Pariwisata	4,95	4,79	4,12	3,59

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros, 2019

c. Pertanian

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian pada tahun 2015 hingga tahun 2018 menunjukkan stagnansi pada sektor produksi, bahkan sedikit berkurang. Kondisi ini disebabkan banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi areal pemukiman dan industri. Walaupun demikian produksi pertanian di Kabupaten Maros utamanya tanaman padi dan pangan utama lokal lainnya masih cukup besar. Dari segi SDM petani, terdapat peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Hal ini dapat terlihat dengan semakin banyaknya kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Tabel 2.51
Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0,28	0,28	0,27	0,27
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,11	0,10	0,09	0,10
3	Kontribusi sektor kelompok tani terhadap PDRB	100	100	100	100
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	57,16	51,80	58,73	58,73
5	Cakupan bina kelompok tani	38,43	18,51	15,30	21,71

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2019

Tabel 2.52
Realisasi Produksi Komoditas Sektor Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018*
1	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)	518.907,51	486.277,41	485.365,56	495.072,86
	- Padi Sawah	386.858,70	399.456,80	392.868,20	400.725,56
	- Padi Ladang	73.649,50	12.236,80	18.347,54	18.714,49
	- Jagung	6.490,37	37.559,92	37.253,59	37.998,66
	- Kedelai	5.147,80	4.737,76	1.140,95	1.163,77
	- Kacang Tanah	1.352,28	1.866,47	1.263,44	1.288,71
	- Kacang Hijau	918,47	703,98	762,19	777,43
	- Ubi Kayu	29.869,11	19.350,02	19.922,42	20.320,87
	- Ubi Jalar	14.621,28	10.365,66	13.807,23	14.083,37
2	Luas Areal Tanam Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ha)	9.078	9.388	8.264	8.429
	- Padi Sawah	52.139	59.007,00	56.288,00	57.413,76
	- Padi Ladang	13.410	1.901,00	2.115,00	2.157,30
	- Jagung	1.216	8.239,00	4.316,00	4.402,32
	- Kedelai	2.772	2.390,00	735,00	749,70
	- Kacang Tanah	744	960,00	797,00	812,94
	- Kacang Hijau	496	566,00	344,00	350,88
	- Ubi Kayu	1.450	1.579,00	1.359,00	1.386,18
	- Ubi Jalar	393	464,00	157,00	160,14
3	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lainnya Per Hektar	57,16	51,80	58,73	58,73



d. Perdagangan

Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Salah satu sektor yang cukup memberikan andil besar bagi perekonomian Kabupaten Maros adalah sektor perdagangan. Sektor ini menyumbang 2,93 % terhadap PDRB Kabupaten Maros. Beberapa komoditi ekspor yang memberikan kontribusi adalah komoditi pertanian, dan marmer. Ekspor bersih perdagangan pada tahun 2018 mencapai 64,64 milyar rupiah.

Tabel 2.53
Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Ekspor bersih perdagangan (Milyar Rp)	63,25	63,55	64,12	64,64
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi	0,00	0,00	73,67	85,94
3	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	2,79	2,57	2,66	2,93

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kab. Maros, 2019

e. Perindustrian

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Maros.

Sumbangan sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Maros cukup besar (tahun 2018 sebesar 18,44 %) dan menempati urutan ketiga terbesar yang berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Maros. Jumlah industri juga menunjukkan peningkatan walaupun tidak terlalu besar. Nantinya dengan adanya kawasan industri yang ditempatkan di Kecamatan Marusu, diharapkan perkembangan industri di Kabupaten Maros dapat berkembang dengan pesat.

Tabel 2.54
Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	n/a	50	43	50
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	19,73	18,16	18,36	18,44



3	Jumlah Industri	220	322	308	314
---	-----------------	-----	-----	-----	-----

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2019

2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang

a. Perencanaan Pembangunan

Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2018 Kabupaten Maros melakukan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Maros tahun 2016-2021 untuk mengakomodir Permendagri 86 Tahun 2017, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, akselerasi pembangunan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Perubahan tersebut diwadahi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten maros Tahun 2016-2021.

Tabel 2.55
Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya dokume perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	78,57	84,21	63,53	43,61

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2019

b. Keuangan

Belum optimalnya upaya peningkatan potwensi pendapatan terutama dari pajak daerah, terutama dari kesadaran wajib pajak, keterbatasan SDM pemeriksa pajak dan perda pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Masih kurangnya pengelolaan dan tertib keuangan daerah denga masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah, belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan



keuangan dan perencanaan online, juklak dan juknis dana DAK yang selalu terlambat, dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpuk di akhir tahun. Pengelolaan asset daerah belum optimal karena belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan asset daerah. Hal ini mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah, walaupun setiap tahun persentasenya meningkat.

Tabel 2.56
Realisasi Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	0	0	C&C	C&C
2	Persetase SILPA	0	1,55	2,41	2,41
3	Persentase SILPA terhadap APBD	0,00	1,55	2,41	2,41
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	n/a	n/a	100	100
5	Persentase belanja pendidikan (20 %)	0,00	2,34	6,35	7,86
6	Persentase belanja kesehatan (10 %)	0,00	11,02	11,96	12,51
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	1,06	0,99	1,02	1,11
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,00	0,00	5,09	5,09
9	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	16,16	11,89	18,02	29,85
10	Tingkat Kemandirian APBD	14,74	13,80	19,07	21,25
9	Penetapan APBD	tepat	tepat	tepat	tepat

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Maros, 2019

c. Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan

Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan anggaran untuk pejabat fungsional untuk mengikuti diklat teknis. Namun demikian BKPPD Kabupaten Maros telah melakukan kerjasama dengan BKN dan Universitas Hasanuddin dalam hal peningkatan kapasitas pegawai.

Tabel 2.57
Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20,00	20,00	20,00	20,00



No	Uraian	2015	2016	2017	2018
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	68,49	61,13	62,77	63,34
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	48,36	31,70	31,27	35,99
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36,00	36,00	36,00	36,00
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	175,00	175,00	175,00	175,00
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.735,00	3.189,00	3.066,00	3.002,00

Sumber : BKPPD Kab. Maros, 2019

d. Penelitian dan Pengembangan

Salah satu unsur yang mendukung kualitas perencanaan adalah dukungan penelitian dan pengembangan. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dengan stakeholder lainnya baik dari pihak swasta, akademisi maupun masyarakat secara umum. Kencana-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Maros untuk urusan penelitian dan pengembangan adalah belum tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki profesi sebagai peneliti, sehingga dalam melakukan penelitian dan pengembangan, pemerintah Kabupaten Maros sangat tergantung dari kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi (PT) dalam hal ini Universitas Hasanuddin.

Tabel 2.58
Realisasi Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase implementasi rencana kelibatngan	0,00	0,00	0,00	29,27
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0	0	0	25,00
	Penerapan SIDA				
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	0	0	0	25,00

Sumber : Balitbangda Kab. Maros, 2019



e. Pengawasan

Capaian dalam urusan fungsi penunjang pengawasan cukup memuaskan. Dalam lima tahun terakhir Kabupaten Maros mendapatkan 5 (lima) kali Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Daerah, termasuk di Tahun 2018. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.59
Realisasi Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kab. Maros, 2019

f. Unsur Pendukung

Fungsi unsur pendukung ditangani oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Untuk Sekretariat DPRD telah tersedia rencana kerja setiap tahunnya untuk anggota DPRD dan rencana kerja tersebut telah dimasukkan dalam aplikasi perencanaan (E-Planning) untuk dibahas bersama dan masuk dalam usulan anggaran (APBD) tahun berikutnya.

Tabel 2.60
Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD	ada	ada	ada	ada
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada

Sumber : Sekratriat DPRD Kab. Maros



2.1.3.5 Fokus Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum di daerah lebih menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk diantaranya kehidupan berpolitik. Menurunnya penerapan nilai-nilai kebangsaan/nasionalisme, gotong royong, budi pekerti dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat serta belum optimalnya pengawasan dan pendekatan terkait pendidikan ideologi asing dan organisasi sosial politik masyarakat masih sering menjadi simpul-simpul masalah yang berkembang di masyarakat. Kinerja urusan Pemerintahan Umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat	0,00	0,00	0,03	0,06
2	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	0,29	0,43	0,71	0,99
3	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideology negara	0,39	0,78	1,49	1,92
4	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam menjaga stabilitas kemandirian dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama	0,59	0,87	1,15	1,44
5	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	0,00	0,00	12,39	12,39
6	Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	0,29	0,44	1,19	1,35

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Maros, 2019

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat dilihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Kemampuan ekonomi Kabupaten Maros selama tahun 2014 hingga tahun 2017 yang tertinggi adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan, pertanian dan industri pengolahan. Namun terdapat gap yang cukup besar antara kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dan sektor-sektor lainnya. Sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan memiliki kontribusi 40 % terhadap PDRB Kabupaten Maros.



Tabel 2.62
Nilai dan Kontribusi PDRB tahun 2014 -2017 Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Maros (Milyar Rp)

No	Sektor	2014		2015		2016		2017*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.116.114,90	14,18	2.473.846,00	15,87	2.707.892,20	15,15	3.055.509,70	15,71
2	Pertambangan dan Penggalian	906.062,40	6,14	986.032,37	6,33	1.081.677,50	6,05	1.208.401,40	6,21
3	Industri Pengolahan	2.762.351,20	18,27	3.075.552,50	19,73	3.245.902,50	18,16	3.570.314,40	18,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.535,70	0,05	7.674,10	0,05	8.675,90	0,05	10.605,90	0,05
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.785,80	0,09	13.308,60	0,09	14.063,00	0,08	17.581,10	0,09
6	Konstruksi	807.083,90	5,47	968.500,60	6,21	1.128.303,20	6,31	1.311.810,50	6,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	385.935,40	2,62	434.671,70	2,79	459.527,90	2,57	516.645,30	2,66
8	Transportasi dan Pergudangan	5.064.809,30	43,77	6.056.562,80	38,86	7.477.534,10	41,84	7.866.724,80	40,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45.174,90	0,31	49.655,00	0,32	54.445,60	0,30	61.506,30	0,32
10	Informasi dan Komunikasi	148.748,90	1,01	163.111,30	1,05	185.131,30	1,04	211.049,70	1,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	193.406,00	1,32	208.126,90	1,34	232.762,70	1,30	244.478,60	1,26
12	Real Estate	177.608,00	1,20	190.928,50	1,23	215.749,30	1,21	237.229,30	1,22
13	Jasa Perusahaan	3.850,70	0,03	4.235,80	0,03	4.553,50	0,03	5.112,10	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	482.286,70	3,19	567.286,40	3,64	636.413,20	3,56	682.998,40	3,51
15	Jasa Pendidikan	208.803,50	1,42	229.723,40	1,47	244.655,40	1,37	263.004,60	1,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.434,50	0,61	101.060,90	0,65	110.409,10	0,62	119.021,00	0,61
17	Jasa Lainnya	49.083,30	0,33	55.464,10	0,36	62.397,20	0,35	69.386,30	0,36
PDRB		13.462.075,10	100	15.585.740,97	100	17.870.093,60	100	19.451.379,40	100

Sumber : BPS Kab. Maros, 2018

2.1.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Maros meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur



yang memadai merupakan salah satu daya Tarik Kabupaten Maros dalam meningkatkan daya saing daerah.

a. Aksesibilitas Daerah

Kabupaten Maros merupakan jalur perlintasan trans Sulawesi ke utara (Manado), tenggara (Kendari) dan Tengah (Palu) atau sebaliknya, sehingga Kabupaten Maros merupakan penyangga jalur distribusi perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kabupaten Maros antara lain :

1. Sarana jalan di Kabupaten Maros, terdiri atas jalan nasional, provinsi dan jalan kabupaten dengan panjang jalan total sepanjang 1.406,96 km dengan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan sebesar mencapai 0,52 % pada tahun 2018. Sedangkan proporsi jalan baik pada tahun 2018 mencapai 0,68 %.
2. Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang melayani penumpang domestik dan internasional dengan jumlah penumpang pada tahun 2018 sebanyak 12.662.215 orang, barang yang terangkut melalui cargo sebesar 100.727.190 ton. Dengan adanya rencana penambahan luas areal, tentunya akan meningkatkan kemampuan kapasitas Bandara Internasional Sultas Hasanuddin.
3. Dengan adanya pembangunan jaringan rel kereta api yang Makassar – Barru yang melalui Kabupaten Maros juga diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat secara umum menuju Kabupaten Maros, dengan waktu tempuh yang tidak terlalu lama.

b. Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kabupaten Maros terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya dukung lingkungan. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah bi=udaya abngsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung terdiri atas ; 1) kawasan yang melindungi kawasan dibawahnya; 2) Kawasan perlindungan setempat; 3) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya; 4) kawasan rawan bencana alam; 5) kawasan lindung geologi; dan 6) Kawasan lindung lainnya.

Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidaya ini mencakup; 1) Kawasan peruntukan hutan produksi; 2) kawasan peruntukan pertanian; 3) Kawasan peruntukan perikanan; 3) Kawasan Peruntukan pernyambangan; 4) Kawasan peruntukan industri; 5) Kawasan



peruntukan pariwisata; 6) Kawasan peruntukan permukiman dan 7) Kawasan peruntukan lainnya.

Penataan wilayah Kabupaten Maros secara detail dan jelas telah diatur dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Maros Tahun 2012-2032 dan termuat dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2012. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembanguna kota, banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti Kawasan Industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman di daerah pinggiran Kabupaten Maros, utamanya di wilayah Kecamatan Mandai, Marusu, Tanralili dan Moncongloe yang mana wilayah kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Kota Makassar.

c. Ketersediaan Air Minum

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum Kabupaten Maros dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat setiap tahunnya. Jumlah pemakaian air melalui PDAM Kabupaten Maros pada tahun 2018 tercatat sebesar 4.273.638 m³, pemakaian terbanyak teradapat pada pelanggan rumah tangga dengan jumlah air yang disalurkan sebesar 2.692.094 m³ atau sekitar 62,99 % dari seluruh pemakaian air minum.

Tabel 2.63
Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan PDAM Kabupaten Maros

No	Uraian	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
1	Sosial	253	121.581	343.581.900
2	Rumah tangga	15.288	2.962.094	10.328.014.900
3	Instansi Pemerintah	153	212.734	817.602.700
4	Niaga	1.538	435.360	2.002.239.400
5	Industri	108	112.470	679.686.300
6	Khusus	8	429.410	4.523.906.200
TOTAL		17.348	4.273.639	18.695.031.400

Sumber : PDAM ab. Maros, 2018

d. Fasilitas Listrik, Telepon

Seperti halnya air, listrik juga merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat saat ini. Perkembangan atau kemajuan suatu wilayah dapat diukur berdasarkan ketersediaan listrik yang dapat menjangkau seluruh wilayah tersebut. Selama tahun 2013 hingga tahun 2016, jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Maros mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2016 jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Maros mencapai 70.754 pelanggan dengan daya yang terpasang sebesar 186.914.639 KW.

Tabel 2.64
Saya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT.PLN pada Cabang/Ranting di Kabupaten Maros

Tahun	Daya terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2013	143.586.200	173.785.518	393.038.044	19.779.765
2104	151.556.500	-	429.337.810	-
2015	156.225.500	451.882.662	431.449.658	-
2016	175.626.750	369.297.158	345.897.612	19.551.478
2017	186.914.639	500.194.400	476.499.864	23.694.536

Sumber : PLN Kab. Maros, 2018

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting pada jaman sekarang ini, dikarenakan fungsinya yang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi (Smartphone) tetapi juga digunakan sebagai alat untuk berselancar di dunia maya (internet), media sosial, dan beberapa fungsi lainnya. Persentase penduduk Kabupaten Maros yang menggunakan telepon selular menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 persentase penduduk yang menggunakan telepon selular sebesar 55,65 %, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 56,31 %, dan pada tahun 2018 mencapai 57,23%.

Tabel 2.65
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Telepon Selular Kabupaten Maros

No	Uraian	2015	2016	2017	2018*
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	188.805	193.087	196.668	200.193
2	Jumlah penduduk	339.300	342.890	346.383	349.822
3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	55,65	56,31	56,78	57,23

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2019

e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kabupaten Maros sebagai kabupaten yang mengandalkan perdagangan dan jasa untuk perekonomian dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2018 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan.

Pada tahun 2018 jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Maros sebanyak 255 unit yang terdiri dari 57 unit pasar tradisional, 154 unit toko dan 44 unit minimarket. Sedangkan jumlah restoran di Kabupaten Maros pada tahun 2018 sebanyak 96 restoran yang tersebar di 14



kecamatan. Untuk sarana prasarana penginapan/hotel, di Kabupaten Maros terdapat 11 unit Hotel yang terdiri dari 1 unit hotel bintang tiga, 1 unit hotel bintang dua , 2 unit hotel bintang satu dan 7 unit hotel kelas melati.

Tabel 2.66
Jumlah Sarana Perdagangan Kabupaten Maros
Tahun 2015-2019

No	Sarana Perdagangan	2015	2016	2017	2018
1	Pasar	19	20	43	57
2	Toko	31	33	145	154
3	Minimarket	17	26	38	44
TOTAL		67	79	226	255

Sumber : Dinas Kompumdag Kab.Maros, 2019

Tabel 2.67
Jumlah Hoten dan Penginapan Kabupaten Maros Tahun 2018

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Jumlah Hotel Bintang Lima	0	Unit
	1. Jumlah Kamar	0	Kamar
	2. Jumlah Tempat Tidur	0	Unit
2	Jumlah Hotel Bintang Empat	0	Unit
	1. Jumlah Kamar	0	Kamar
	2. Jumlah Tempat Tidur	0	Unit
3	Jumlah Hotel Bintang Tiga	1	Unit
	1. Jumlah Kamar	52	Kamar
	2. Jumlah Tempat Tidur	104	Unit
4	Jumlah Hotel Bintang Dua	1	Unit
	1. Jumlah Kamar	119	Kamar
	2. Jumlah Tempat Tidur	167	Unit
5	Jumlah Hotel Bintang Satu	2	Unit
	1. Jumlah Kamar	121	Kamar
	2. Jumlah Tempat Tidur	169	Unit
6	Jumlah Hotel Melati	7	Unit
	1. Jumlah Kamar	205	Kamar
	2. Jumlah Tempat Tidur	298	Unit

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros, 2018

Tabel 2.68
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2018

NO	Kecamatan	2016	2017	2018
1	Mandai	36	55	60
2	Moncongloe	-	-	-
3	Maros Baru	-	-	-
4	Marusu	3	3	-
5	Turikale	18	17	20
6	Lau	-	1	-



NO	Kecamatan	2016	2017	2018
7	Bontoa	-	-	-
8	Bantimurung	2	2	2
9	Simbang	2	2	2
10	Tanralili	-	1	1
11	Tompobulu	-	-	-
12	Camba	1	1	1
13	Cenrana	-	1	1
14	Mallawa	5	5	5
MAROS		57	88	96

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros, 2019

2.1.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

a. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Maros relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh paratur pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2018 angka kriminalitas yang dapat ditangani sebesar 16 kasus per 10.000 penduduk, dengan jumlah tindakan kriminal yang terjadi sebanyak 560 kasus.

Gambar 2.15
Angka Kriminalitas Yang Tertangani Kabupaten Maros Tahun 2015 - 2018





Sumber : Polres Maros

Sedangkan jumlah kejadian unjuk rasa yang terjadi selama tahun 2018 sebanyak 2 kasus dan pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) sebanyak 1 kasus. Namun keseluruhan kasus unjuk rasa dan pelanggaran K3 tersebut dapat tertangani dengan baik.

Tabel 2.69
Jumlah Kejadian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3), Unjuk Rasa serta Jumlah Sarana dan Prasarana serta Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros Tahun 2018

No	Nama		Nilai	Satuan
I	Keamanan dan Ketertiban Umum *			*
	1.	Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)*	1	*
		1. Jumlah Pelanggaran K3	1	Kasus
II	Unjuk Rasa			*
	1	Jumlah Kasus Unjuk Rasa**	2	Kasus
		1 Bidang Politik	0	Kasus
		2 Bidang Ekonomi	2	Kasus
		3 Bidang Agama	0	Kasus
		4 Lainnya	0	Kasus
	2	Korban Unjuk Rasa*		*
		1 Korban Meninggal	0	Orang
		2 Korban Luka-Luka	0	Orang
III	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum*			*
	1	Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum**	7.576	Orang
		1 Jumlah Aparat Pamong Praja	531	Orang
		2 Jumlah Aparat Linmas	5.768	Orang
		3 Jumlah Petugas Patroli Satpol Pp	143	Orang
		4 Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	1134	Orang
	2	Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum**	28	Unit
		1 Jumlah Pos Keamanan	14	Unit
		2 Jumlah Pos Siskamling	14	Unit
	3	Jumlah Kendaraan Operasional**	28	Unit
		1 Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2	23	Unit
		2 Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4	5	Unit

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Maros, 2018

b. Kemudahan Perijinan

Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan terpadu satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Maros. Penyelesaian ijin bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan



publik. Prosedur ijin terbit perijinan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan telah mencapai 95 %. Diharapkan dengan adanya kondisi iklim usaha Kabupaten Maros yang kondusif dapat berpengaruh terhadap perkembangan penanaman modal selanjutnya.

Tabel 2.70
Lama Proses Perijinan Kabupaten Maros

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	SIUP	3	2	1	1
2.	TDP	3	2	1	1
3.	IUI	3	2	1	1
4.	TDI	3	2	1	1
5.	IMB	5	5	5	4
6.	HO/SITU	4	4	4	3
Rata-Rata		3,50	2,83	2,17	1,83

Sumber : DMPTP Kab. Maros, 2019

2.1.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019, persentase penduduk Kabupaten Maros kategori usia muda, produktif dan usia lansia tidak banyak mengalami perubahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penduduk usia produktif (Usia 15-64 tahun) di tahun 2019 sejumlah 233.117 orang dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sejumlah 120.506 jiwa dan laki-laki sejumlah 114.156 jiwa. Sedangkan Kelompok penduduk tidak produktif (< 15 tahun dan 65 <) sebanyak 120.004 orang dengan jumlah penduduk tidak produktif jenis kelamin perempuan sebesar 59.806 orang dan laki-laki 59.138 orang. Angka beban ketergantungan tahun 2019 diperkirakan sebesar 51,48 % yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung 52 orang penduduk usia tidak produktif.

2.1.4 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1.4.1 Pendidikan

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan dasar sendiri merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Salah satu bentuk Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros yang telah ditetapkan SPMnya adalah Urusan Pendidikan. Jenis pelayanan berupa Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota dan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan pada semua level pendidikan dasar (SD, MI, SMP, MTs).

Tabel 2.71
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	
Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	30,73	15,34	15,76	Dinas Pendidikan
Jumlah penduduk usia 7 s/d 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	97,83	96,82	98,11	Dinas Pendidikan
Jumlah penduduk usia 7 s/d 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (% / per tahun)	100%				Dinas Pendidikan

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Maros, 2018

2.1.4.2 Kesehatan

Bentuk Pelayanan Dasar lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros yang telah ditetapkan SPMnya adalah Urusan Kesehatan. Jenis pelayanan berupa Pelayanan Kesehatan Ibu hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pelayanan Kesehatan bayi Baru lahir; Pelayanan Kesehatan Balita; Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM); Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat; Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).

Tabel 2.72
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	-	91,02	85,25	Dinas Kesehatan
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		-	90,72	83,74	Dinas Kesehatan



Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		-	96,75	97,63	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		-	68,73	68,69	Dinas Kesehatan
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-	87,11	87,11	Dinas Kesehatan
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		-	52,61	26,95	Dinas Kesehatan
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		-	26,6	51,14	Dinas Kesehatan
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		-	21,34	26,95	Dinas Kesehatan
Cakupan penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		-	18,23	24,49	Dinas Kesehatan
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		-	78,42	69,33	Dinas Kesehatan
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar		-	89,41	100	Dinas Kesehatan
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan dini HIV sesuai standar		-	70	91,66	Dinas Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2018

2.1.4.3 Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum adalah pemenuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah.

Tabel 2.73
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	
Persentase penduduk/warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%				DINAS PUPR
Persentase penduduk/warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic					DINAS PUPR

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2018

2.1.4.4 Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.74
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	
Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%				Dinas Perumahan, Pertanahan dan Kawasan Permukiman
Persentase penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah					Dinas Perumahan, Pertanahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2018

2.1.4.5 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.



Tabel 2. 75

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	
Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%				Satpol PP dan Damkar
Persentase warga negara yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan informasi rawan bencana					BPBD
Persentase warga negara yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					BPBD
Persentase warga negara yang berada pada kawasan rawan bencana mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					BPBD
Persentase warga negara yang berada pada kawasan rawan bencana mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					Satpol PP dan Damkar

Sumber : Satpol PP Kab. Maros, 2018

2.1.4.6 Sosial

Bentuk Pelayanan Dasar lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros yang telah ditetapkan SPMnya adalah Urusan Sosial. Indikator SPM yang dipersyaratkan untuk Urusan Sosial, diantaranya; rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi social dasar lanjut usia telantar di luar panti, rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Tabel 2.76
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan sosial dasarnya di luar panti	100%				Dinas Sosial
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan sosial dasarnya di luar panti					Dinas Sosial
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					Dinas Sosial
Persentase tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					Dinas Sosial
Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah					Dinas Sosial

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2018

2.1.5 PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Konsep dan kesepakatan global terbangun melalui Program “SDG’s” yang melahirkan 17 proksi dandiagendakan sampai tahun 2030 kelak, sebagai bangsa kepulauan, Indonesia yang dilandasi dari kesadaran geografis dan budaya telah melahirkan berbagai instrument nilai dan regulasi yang mengamankan pelaksanaan pembangunan yang menyeimbangkan proporsi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan antar generasi.

Rangkaian peraturan tentang tinjauan strategis lingkungan diterbitkan mulai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sampai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, mengamankan



terciptanya produk perencanaan yang diharapkan melahirkan perlakuan terhadap lingkungan yang moderat dan fungsional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros berkomitmen dalam penerapan inklusifitas pengelolaan lingkungan, ekonomi, sosial, dan hukum yang diterjemahkan dalam bahasa nasional sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang secara operasional pencapaiannya diukur dalam 220 indikator TPB/SDG's yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan RAD SDGs, Kabupaten Maros diamanahi target pencapaian TPB sebanyak 220 indikator dengan 16 Tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77
Jumlah Indikator berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No.	Uraian TPB	Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	24
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	11
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan	0



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

No.	Uraian TPB	Indikator
	Berkelanjutan	
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	4
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	21
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16
Jumlah		220



Tabel 2.78
Capaian dan Target TPB/SDG's Kabupaten Maros

No	Tujuan / Indikator	Target		Capaian Target SDGs					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Lokal	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun								
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	10,03%	-	88,15	88,59	88,90	89,28	Dinas Sosial
1.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	90%	85%						Dinas Kesehatan
1.3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	62,4 juta formal, 3,8 juta pekerja informal	14.760 orang (100%)	-	-	66,12	70,07	74,26	Dinas Tenaga Kera dan Transmigrasi
1.4	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	98%	100%	-	80	100	100	100	Dinas Sosial
1.5	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	2,8 jt RT		-	-	8.232	8.109	7.988	Dinas Sosial
1.6	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang diproses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%	88,70%						



No	Tujuan / Indikator	Target		Capaian Target SDGs					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Lokal	2014	2015	2016	2017	2018	
1.7	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	80%						
1.8	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	68%	64,32%	-	60,26	62,63	62,23	63,26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak berkelanjutan	100%	68,56%	-	58,49	60,55	62,58	64,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	73,10%	-	65,11	67,13	69,08	71,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.11	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	0%	0%	-	0,355	0,153	0,094	0,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	94,78%	98,11%	-	95,07	94,93	97,34	98,50	Dinas Pendidikan
1.13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	82,20%	74,49%	-	72,07	73,06	74,63	75,94	Dinas Pendidikan
1.14	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	77,40%	98%	-	88,56	95,45	97,95	103,04	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1.15	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Tidak ada dalam lampiran							



No	Tujuan / Indikator	Target		Capaian Target SDGs					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Lokal	2014	2015	2016	2017	2018	
		Perpres 59/1997							
1.16	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah	39 daerah	14 kecamatan	-		2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	BPBD
1.17	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/1997	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	BPBD
2	Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian yang Berkelanjutan								
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%	0,73%	-	0,63	0,83	0,80	0,91	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan		0%	-					Dinas Kesehatan
2.3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	8,50%	0%	-					Dinas Kesehatan
2.4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada anak dibawah dua tahun/baduta	28%	1,20%	-	42,3	38,16	40,87	23,50	Dinas Kesehatan



No	Tujuan / Indikator	Target		Capaian Target SDGs					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Lokal	2014	2015	2016	2017	2018	
2.5	Prevalensi bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif	80%	74%	-					Dinas Kesehatan
3	Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia								
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	306/100000	55,62/100000	-	88,78	88,5	106,42	117,03	Dinas Kesehatan
3.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	95%	96%	-					
3.3	Presentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	85%	81%	-					
3.4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/1997	5,31/1000	-	9,23	8,32	7,09	6,22	Dinas Kesehatan
3.5	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	<0,5%	0,01%	-	0,01	0,002	0,005	0,01	Dinas Kesehatan
3.6	Insiden Tuberkolosis per 100.000 penduduk	245	278,66/100000 penduduk	-	123,78	103,82	127,03	130,99	Dinas Kesehatan
3.7	Kejadian malaria per 1000 orang	Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/1997	0,48/1000	-					Dinas Kesehatan
3.8	Prevalensi tekanan darah tinggi	24,30%	15,28%	-					Dinas Kesehatan



No	Tujuan / Indikator	Target		Capaian Target SDGs					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Lokal	2014	2015	2016	2017	2018	
3.9	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun	15,40%	10%	-					
3.10	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	66,00%	59,39%	-	60,26	62,63	62,23	63,26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.11	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	23,50%	64,19%	-	60,26	62,63	62,23	63,26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.12	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	23,50%	14,19%	-	9,31	10,54	11,75	13,20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.13	Total Fertility Rate (TPR)	38	2,38	-	2,39	2,37	2,35	2,33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.14	Unmet need pelayanan kesehatan	9,91%	23,64%	-	228,68	27,24	25,81	13,76	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.15	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	95%	100%	-					
3.16	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	96%	76%	-					
4	Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata								



No	Tujuan / Indikator	Target		Capaian Target SDGs					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Lokal	2014	2015	2016	2017	2018	
	serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua								
4.1	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,20%	90,00%	-		48,40%	62,28%		Dinas Pendidikan
4.2	Persentase SMP/Mts berakreditasi minimal B	81%	85%	-		30,34%	32,58%		Dinas Pendidikan
4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	114,09%	111,36%	-	111,5	103,44	108,34	106,99	Dinas Pendidikan
4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	106,94%	131,62%	-	134,82	135,48	116,86	109,12	Dinas Pendidikan
4.5	Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun	8,8 tahun	13,37	-	12,67	12,96	13,1	13,32	Dinas Pendidikan
4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77,30%	38,02%	-	40,8	36,74	37,56	36,11	Dinas Pendidikan
4.7	Persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun	96,10%	90%	-	87,89	90,01	88,78	89,24	Dinas Pendidikan
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan								
5.1	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	<20,48%	0,03%	-	0,04	0,04	0,06	0,08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	70%	100%	-	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin 25-49 Tahun	> 21 tahun	26 tahun	-					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Tujuan / Indikator	Target		Capaian Target SDGs					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Lokal	2014	2015	2016	2017	2018	
5.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	> 16,6%	28,57%	-	20	20	20	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak Yang Berkelanjutan Untuk Semua								
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	100%	66,56%	-	58,49	60,55	62,58	64,73	Dinas PUPR
6.2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	100%	73,10%	-	65,11	67,13	69,08	71,15	Dinas PUPR
7	Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua								
8	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua								
8.1	Laju pertumbuhan PDB Perkapita	Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017	7%	-	8,58	9,5	6,81	6,21	Dinas Kominfo
8.2	PDB Perkapita	50 juta/jiwa	65,45 juta/jiwa	-	45,59	52,12	56,16	62,36	Dinas Kominfo



No	Tujuan / Indikator	Target		Capaian Target SDGs					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Lokal	2014	2015	2016	2017	2018	
8.3	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017	6,09%	-	6,99	6,73	6,85	6,78	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.4	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%	50%	-					
8.5	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	8%	0,35%	-	0,32	0,3	0,32	0,32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.6	Jumlah wisatawan mancanegara	20 juta (skala nasional)	1.700 orang	3731	609	1.297	1.392	2.229	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.7	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017	550.000 orang	358.823	341.558	440.102	421.492	473.383	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi								
10	Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara								
10.1	Koefisien Gini	0,36	0,32	-	0,37	0,39	0,4	0,42	Dinas Kominfo
10.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	10,57%	-	88,15	88,59	88,9	89,28	Dinas Sosial



No	Tujuan / Indikator	Target		Capaian Target SDGs					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Lokal	2014	2015	2016	2017	2018	
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan								
11.1	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	32%	40,05%	-					
11.2	Persentase sampah [erkotaan yang tertangani	80%	50%	-	15	25	30	43,00	DLHD
12	Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan								
12.1	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 ton/hari	2542 m3	-	963	1.065	1.226	1383,60	DLHD
13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya								
14	Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumberdaya Kelautan dan Samudra untuk Berkelanjutan								
15	Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daerahan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggusuran, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati								
16	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								



No	Tujuan / Indikator	Target		Capaian Target SDGs					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Lokal	2014	2015	2016	2017	2018	
16.1	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dan Pemerintah Daerah	60%	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah
16.2	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	16,60%	28,57%	-	20,00	20,00	20,00	20,00	Dinas P3A
16.3	Persentasase anak yang memiliki akte kelahiran	85	98,93%	-	88,56	95,45	97,95	100,00	Dinas Administrasi dan Pencatatan Sipil
17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan								



2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi tentang target kinerja yang akan menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi serta data yang akurat. Dengan demikian program/kegiatan pembangunan akan menjadi lebih efisien dan efektif yang disertai dengan akuntabilitas pelaksanaan yang jelas.

Namun dalam pelaksanaannya, program pembangunan memiliki potensi untuk tidak memberikan hasil yang sesuai dengan target-target yang telah direncanakan. Oleh sebab itu diperlukan sebuah evaluasi dalam mengendalikan perencanaan pembangunan agar dapat terlihat sejauh mana pencapaian pelaksanaan program dikaitkan dengan proses tahapan perencanaan sebelumnya.

Gambaran hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Maros hingga triwulan I Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Maros secara umum dapat terpilah pada kualitas sumberdaya manusia yang masih perlu ditingkatkan; Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2019

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Maros digambarkan melalui kajian data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah Kabupaten Maros. Gambaran umum kinerja Kabupaten Maros tidak semua menggambarkan penurunan capaian, namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan Kabupaten Maros dengan dasar bahwa Kabupaten Maros sudah tidak lagi mentolerir kondisi-kondisi minor seperti angka kemiskinan, permukiman kumuh dan kondisi-kondisi minor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya dengan target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Maros dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin Kabupaten Maros sebesar 37.913 jiwa dengan tingkat kemiskinan 10,31 %. Kondisi kemiskinan Kabupaten Maros masih berada lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dengan demikian masih diperlukan penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin, serta peningkatan perlindungan masalah sosial melalui lembaga sosial dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman.
2. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya kualitas pendidikan (masih belum tuntasnya pendidikan dasar 9 tahun bagi seluruh penduduk), Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang belum merata, tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi serta belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3. Pembangunan telah diarahkan ke seluruh wilayah namun masih terdapat konektivitas antar wilayah yang belum terbangun secara total; masih seringnya terjadi kemacetan di jalan-jalan utama diakibatkan jumlah kendaraan yang semakin bertambah sedangkan panjang dan lebar jalan tidak berubah serta belum selesainya jalan-jalan lingkar luar MAMMINASATA sehingga tidak terdapat jalan alternatif.
4. Produksi pertanian yang cenderung stagnan bahkan menurun disebabkan peralihan penggunaan lahan menjadi kawasan industri, perdagangan dan permukiman. Oleh karena itu



diperlukan upaya penggunaan teknologi tepat guna serta peningkatan kualitas bibit agar dapat meningkatkan produksi tanpa menambah luas tanam.

5. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi masih memerlukan usaha yang cukup besar. Kondisi ini disebabkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan serta kompetitif usaha kecil menengah masih terbatas, selain itu jumlah destinasi wisata yang tidak bertambah juga menggambarkan perkembangan wisata yang belum optimal.
6. Pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup dan penanganan bencana yang masih harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya industri tambang yang akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Implikasinya dapat terlihat dari semakin seringnya terjadi banjir di wilayah perkotaan disebabkan tidak adanya penahan air di wilayah hulu. Selain itu penanganan sampah juga masih merupakan suatu permasalahan tersendiri mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah yang akan berbanding lurus dengan jumlah produksi sampah, utamanya di wilayah perkotaan. Sedangkan kapasitas pengangkutan dan penanganan sampah yang dikelola oleh pemerintah sangat terbatas.
7. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik.

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Maros maka dapat dirumuskan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Daya Saing Ekonomi Daerah :

- a. Pengembangan industri hilir pertanian yang lebih bersinergi dengan produk primer pertanian wilayah;
- b. Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro;
- c. Pengintegrasian pasar modern dengan sentra-sentra IKM untuk memperluas pasar;
- d. Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama;
- e. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif.

2. Kemiskinan :

- a. Peningkatan kasus dan penerima manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan ekonomi;
- b. Peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu;
- c. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha;



- d. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.

3. Daya Saing Sumber Daya manusia :

- a. Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak dan pembentukan karakter;
- b. Peningkatan kualitas pendidikan formal dan informal;
- c. Peningkatan kualitas dan prestasi masyarakat utamanya dari kelompok masyarakat generasi muda;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- e. Peningkatan peran perempuan dalam peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, budaya masyarakat;
- f. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman.

4. Pemerataan Pembangunan Wilayah :

- a. Pembinaan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya;
- b. Peningkatan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang kepada seluruh kawasan strategis (Nasional, Provinsi dan Kabupaten);
- c. Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
- d. penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi fungsi dan peran kawasan perkotaan.

5. Daya Saing Infrastruktur Daerah :

- a. Peningkatan ketersediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman layak huni;
- b. Peningkatan dan pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan;
- c. Pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan pedesaan;
- d. Peningkatan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan daerah.

6. Daya Dukung Sumber Daya Alam :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan;
- c. Optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);



- d. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R secara berkala;
- e. Peningkatan mitigasi bencana dan pelayanan tanggap darurat bencana;
- f. Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup, sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati.

7. Tata kelola Pemerintahan, Politik dan Pelayanan Publik :

- a. Peningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Daerah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik secara kewilayahan.
- b. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung kinerja aparatur melalui mekanisme dan analisa kebutuhan dan ketersediaan.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- d. Peningkatan kualitas, ketersediaan, dan pemanfaatan Data/Informasi yang terpilah sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- e. Peningkatan dan pengembangan upaya untuk mengakselerasi pencapaian target standar pelayanan minimal diseluruh tingkatan administrasi pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan).
- f. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur pelaksana pelayanan publik berbasis kompetensi.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

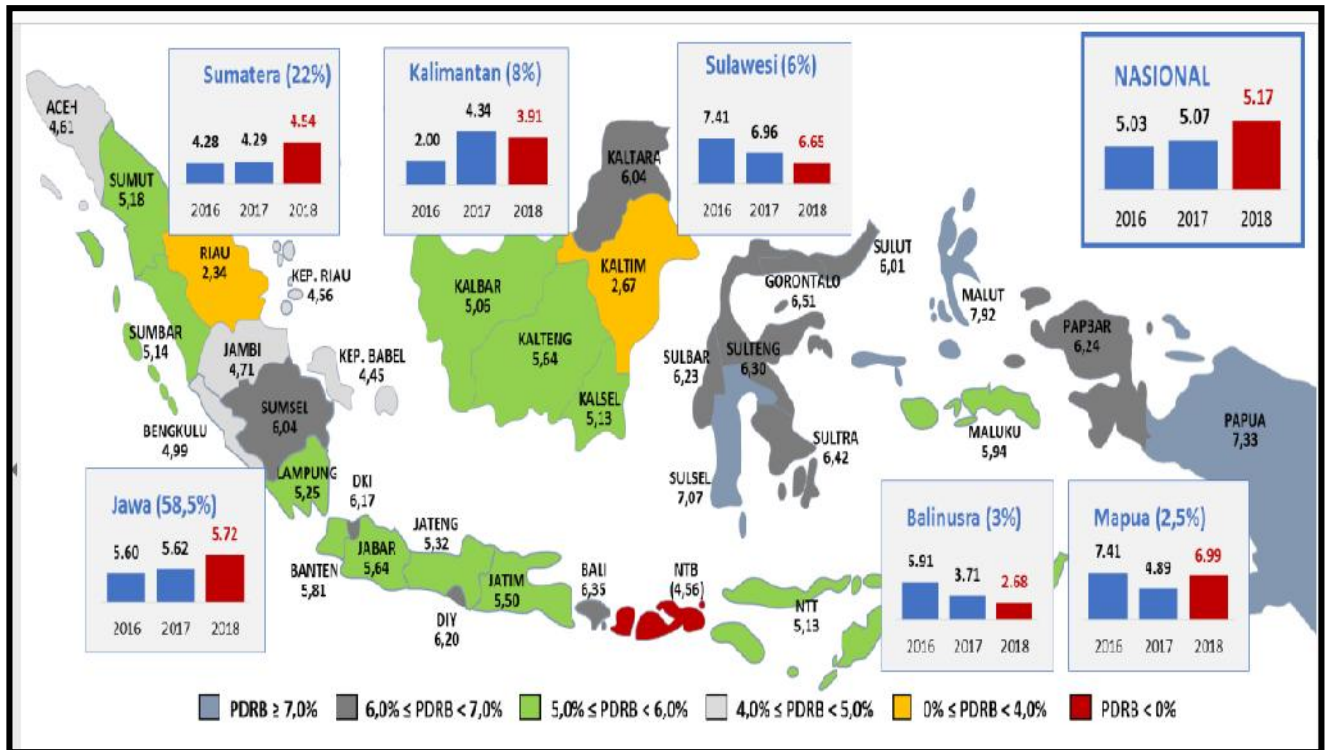
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Nusantara oleh Bank Indonesia menjelaskan bahwa tren pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berlanjut pada triwulan IV 2018 ditopang oleh permintaan domestik. Ekonomi nasional tumbuh 5,18% meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang tumbuh 5,17%, merupakan pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir. Sejumlah 22 dari 34 provinsi mampu tumbuh di atas nasional, terutama provinsi di Jawa, Sulawesi dan Mapua (Maluku Papua). Dibandingkan tahun 2017, fase ekspansi perekonomian nasional didukung oleh akselerasi ekonomi di 18 provinsi terutama di Jawa, Sumatera dan Mapua. Permintaan domestik menjadi penopang utama ekonomi seluruh wilayah didorong oleh perbaikan daya beli masyarakat karena program perluasan bantuan social, meningkatnya penyaluran dana desa, serta dukungan inflasi yang rendah dan stabil. Selain itu belanja penyelenggaraan Pilkada, persiapan pemilu 2019, serta berlanjutnya investasi swasta dan pemerintah juga menjadi penopang pertumbuhan permintaan domestik pada 2018. Namun kuatnya permintaan domestik berdampak pada meningkatnya impor, baik untuk konsumsi, bahan baku, maupun barang modal, sehingga menjadi penahan pertumbuhan lebih tinggi di semua wilayah. Pertumbuhan ekspor secara nasional juga relative tertahan, karena menurunnya kinerja ekspor Sumatera, Kalimantan dan Bali Nusra (Nusa Tenggara).

Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tetap kuat pada triwulan I 2019, masih ditopang permintaan domestik. Konsumsi diperkirakan lebih baik terutama berasal dari dorongan belanja Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) di semua wilayah, terkait penyelenggaraan kampanye. Sementara konsumsi rumah tangga akan didukung oleh *front loading* belanja subsidi dan bantuan social, meski relative moderat sesuai pola historis pasca berakhirnya liburan akhir tahun.



Gambar 3.1
Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan IV 2018 (% yoy)



Sumber : Laporan Kajian Ekonomi Nusantara Februari 2020, Bank Indonesia

Dari sisi inflasi, hingga akhir tahun 2018 inflasi di semua wilayah terjaga di kisaran target $3,5\% \pm 1\%$ dan secara nasional lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2017. Penurunan inflasi pada 2018 terutama dipengaruhi oleh inflasi administered prices karena kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian tariff listrik daya 900 VA pada 2018 maupun penyesuaian tarif lainnya. Selain itu, inflasi inti juga terjaga karena dukungan kebijakan moneter dalam pengelolaan permintaan domestic di tengah tekanan eksternal yang meningkat, serta eskpetasi inflasi yang terjangkau sesuai sasaran inflasi. Secara spasial, hamper seluruh provinsi mencatatkan inflasi yang berada di kisaran target $3,5\% \pm 1\%$. Namun, terdapat lima provinsi yang mencatatkan inflasi tahunan di atas kisaran, yakni Sulawesi Tengah (6,46%), Papua (6,38%), Papua Barat (5,21%), Kalimantan Utara (5,00%) dan Kalimantan Tengah (4,52%), terutama disebabkan oleh peningkatan tariff angkutan udara dan komoditas ikan segar di sepanjang 2018. Selain itu, bencana alam di Sulawesi Tengah juga berkontribusi besar terhadap tingginya inflasi di Sulawesi Tengah.

Inflasi pada awal triwulan I 2019 cenderung menurun di hamper semua wilayah. Penurunan tekanan inflasi tersebut terutama disumbang deflasi cabai merah karena stock yang melimpah seiring panen yang terjadi di berbagai daerah sentra diantaranya di Jawa



Barat, Jawa Timur dan berbagai daerah di Sumatera dan Sulawesi. Penurunan inflasi juga disumbang deflasi harga bensin yang terjadi secara merata diseluruh daerah. Hingga penghujung triwulan I 2019, inflasi diperkirakan masih akan terjaga dikisaran target inflasi 2019 sebesar $3,5\% \pm 1\%$. Hal tersebut di dukung adanya panen raya padi di Februari-Maret, nilai tukar rupiah yang cenderung menguat serta menurunnya harga minyak.

Sejalan dengan optimis pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 dan 2019, arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional untuk tahun 2020 ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas melalui peningkatan sumber daya manusia.

Arah kebijakan pembangunan nasional dalam rancangan RKP 2020 mengambil tema ***“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”***. Dalam Rancangan RKP Tahun 2020 terdapat 5 Prioritas Nasional dan 25 Program Prioritas. Adapun 5 Prioritas Nasional dan 25 Program Prioritas yang dimaksud adalah:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan;
- 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- 3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- 4) Pengentasan Kemiskinan;
- 5) Pembangunan Budaya, Karakter dan Prestasi Bangsa.

2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;

- 1) Perluasan Infrastruktur Dasar;
- 2) Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana;
- 3) Peningkatan Konetivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
- 4) Peningkatan Infrastuktur Perkotaan;
- 5) Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Nilai Tambah Ekonomi, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;

- 1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM;
- 2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil;
- 3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja;
- 4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- 5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

- 1) Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan;
- 2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air;
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
- 4) Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan;
- 5) Penguatan Ketahanan Bencana.

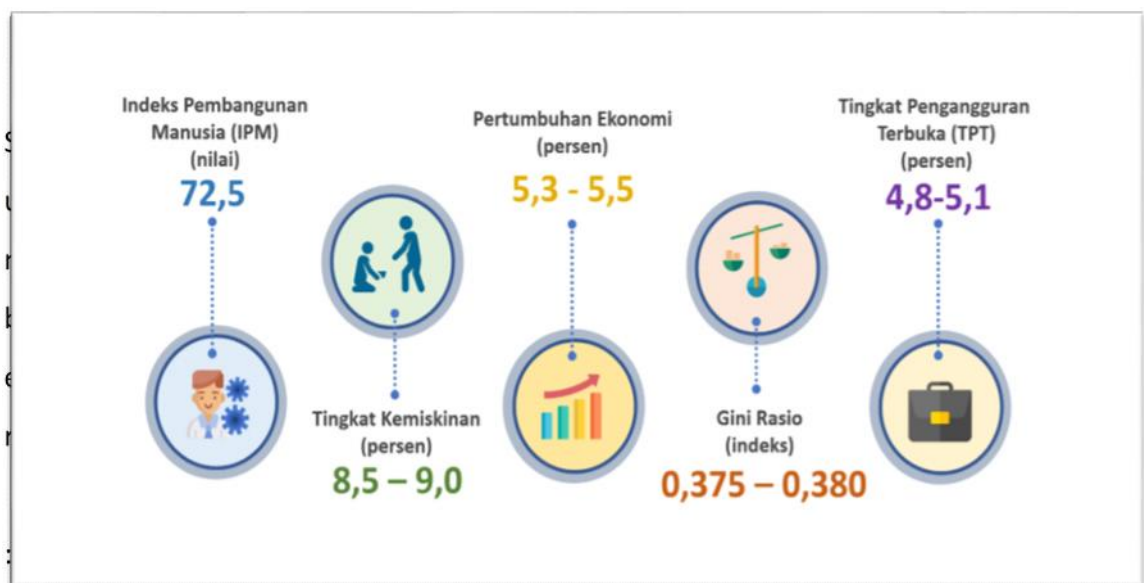
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

- 1) Penguatan Kemampuan Pertahanan;
- 2) Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional;
- 3) Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi;
- 4) Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut;
- 5) Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas.

Dengan mengacu kepada RKP Tahun 2020 **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka target pembangunan tahun 2020 yaitu:

Gambar 3.2

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2020



Sumber : Paparan Menteri PPN Bappenas Rakortek Tahun 2019



3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulsel pada triwulan III 2018 tumbuh 7,13%(yoy), sedikit lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,35% karena faktor musiman yang telah berlalu (hari raya lebaran), sehingga konsumsi Rumah Tangga kembali ke pola normalnya. Namun, pencapaian ini masih lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional 5,17%(yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menjadi tertinggi ketiga di nasional setelah Maluku Utara (8,17%), dan Sulawesi Barat (7,90%). Dengan pangsa yang dominan di Kawasan Indonesia Timur, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,17%.

Perekonomian Sulsel pada Triwulan IV 2018 tumbuh 6,47% (yoy), dalam tren melambat dari triwulan sebelumnya, mendorong keseluruhan tahun 2018 tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Perlambatan pada triwulan IV 2018 terjadi pada komponen konsumsi pemerintah. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, ekonomi Sulsel tetap tumbuh kuat dibandingkan nasional yang mencapai 5,18%(yoy). Pada triwulan IV 2018, perlambatan penduduk disebabkan oleh Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi; Jasa Keuangan dan Jasa Kesehatan. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2018 terutama karena Konsumsi Pemerintah dan Ekspor Luar Negeri. Secara keseluruhan tahun 2018, ekonomi Sulsel tumbuh 7,0% (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, Sulsel tetap berada pada peringkat 3 secara nasional setelah Maluku Utara (7,92%), dan Papua (7,33%). Lapangan usaha utama yang melambat yaitu Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada investasi, namun terjadi peningkatan impor luar negeri untuk merespon konsumsi yang masih kuat.

Pada triwulan I 2019 pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 7,1-7,5% (yoy). Penguatan tersebut terutama berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan karena masuknya musim panen; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran seiring peningkatan stok yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi hari besar keagamaan yaitu ramadhan dan Idul Fitri. Dari sisi pengeluaran, penguatan perekonomian terutama karena meningkatnya konsumsi pemerintah dan investasi sejalan dengan historisnya.

Realisasi inflasi keseluruhan tahun 2018 tercatat 3,50% (yoy), berada dalam titik tengah sasaran inflasi 2018. Meningkatnya inflasi pada akhir 2018 dibandingkan triwulan



III 2018, terutama didorong oleh keelompok pendidikan dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan, seiring kenaikan tariff angkutan pada masa libur anak sekolah.

Pada triwulan I 2019, tekanan inflasi diperkirakan sedikit menurun yang berasal dari meredanya tekanan inflasi dari semua kelompok pengeluaran. Inflasi tahun 2019 diharapkan berada pada rentang yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu $3,5\pm 1\%$ (yoy). Tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari bahan makanan yang dipengaruhi oleh factor cuaca, produksi dan factor ketersediaan air sejalan dengan tertundanya operasional beberapa bendungan/waduk. Adapun pada kelompok harga yang diatur pemerintah pada tahun 2019 diperkirakan lebih terkendali sejalan dengan upaya pemerintah meredam kenaikan harga tiket angkutan udara.

Pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Tema pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah “Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan Yang Inklusif”. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Sejalan dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, meliputi:

- 1 Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan;
- 2 Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
- 3 Akseleras Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 4 Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air dna Pelestarian Lingkungan Hidup;
- 5 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Maros

Arah kebijakan ekonomi pemerintah daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat dan provinsi. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Maros. Arah kebijakan



yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Maros juga telah diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 merupakan tahun politik bagi Kabupaten Maros, dimana tahun 2020 diadakannya Pemilukada untuk menentukan kepala daerah terpilih yang akan memimpin Kabupaten Maros selama lima tahun kedepan.

Untuk itu, kebijakan pembangunan tahun 2020 tidak terlepas dari hal tersebut (pemilukada). Adapun tema pembangunan Tahun 2020 Kabupaten Maros yaitu: **“Pemantapan Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Pelayanan Publik Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**. Berdasarkan tema yang telah ditetapkan dan isu strategis, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020 yaitu:

I. Daya Saing Ekonomi Daerah

- 1) Pengembangan Industri Hilir Pertanian Yang Lebih Bersinergi Dengan Produk Primer Pertanian Wilayah;
- 2) Pemanfaatan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Informasi Dalam Meningkatkan Produksi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro;
- 3) Pengintegrasian Pasar Modern dengan Sentra-Sentra IKM Untuk Memperluas Pasar;
- 4) Pengembangan Destinasi Wisata Baru dan Peremajaan Destinasi Wisata Lama;
- 5) Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan dan Produktivitas Pelaku Sektor Industri Kecil.

II. Kemiskinan

- 1) Peningkatan Akses dan Penerima Manfaat Bagi Penduduk Miskin Perempuan dan Laki-laki Terhadap Pelayanan Dasar, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Serta Kesempatan Ekonomi;
- 2) Peningkatan Cakupan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- 3) Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Kurang Mampu Dalam Kesempatan Kerja Serta Pengembangan Wirausaha;
- 4) Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

III. Daya Saing Sumberdaya Manusia

- 1) Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah dengan Penekanan Pada Penguatan Akhlak dan Pembentukan Karakter;



- 2) Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal;
- 3) Peningkatan Kualitas dan Prestasi Masyarakat Utamanya dari Kelompok Masyarakat Generasi Muda;
- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- 5) Peningkatan Peran Perempuan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Kesehatan, Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat;
- 6) Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

IV. Pemerataan Pembangunan Wilayah

- 1) Pembinaan Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa Sesuai Dengan Kondisi Geografinya;
- 2) Peningkatan Harmonisasi Dalam Pemanfaatan, Penataan dan Pengendalian Ruang Pada Seluruh Kawasan Strategis (Nasional, Provinsi dan Kabupaten);
- 3) Peningkatan Kinerja Perencanaan Ruang Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang;
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Sesuai dengan Tipologi, Fungsi dan Peran Kawasan Perkotaan.

V. Daya Saing Infrastruktur Daerah

- 1) Peningkatan Ketersediaan Serta Pengelolaan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni;
- 2) Peningkatan dan Pemantapan Kondisi Jaringan Jalan dan Jembatan;
- 3) Pengembangan Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan;
- 4) Peningkatan Ketersediaan Sarana Komunikasi dan Informasi Yang Memadai Bagi Masyarakat dan Pihak Berkepentingan Berkaitan Dengan Implementasi Kebijakan dan Pembangunan Daerah.

VI. Daya Dukung Sumber Daya Alam

- 1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- 2) Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian Berkelanjutan;
- 3) Optimalisasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- 4) Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Secara Berkala;
- 5) Peningkatan Mitigasi Bencana dan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana;



- 6) Peningkatan Upaya Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati.

VII. Tata Kelola Pemerintahan, Politik dan Pelayanan Publik

- 1) Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Secara Kewilayahan;
- 2) Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung Kinerja Aparatur Melalui Mekanisme dan Analisa Kebutuhan dan Ketersediaan;
- 3) Pemanfaatan Teknologi Informas Untuk Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan;
- 4) Peningkatan Kualitas, Ketersediaan dan Pemanfaatan Data/Informasi Yang Terpilah Sebagai Dasar Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- 5) Peningkatan dan Pengembangan Upaya Untuk Mengakselerasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal di Seluruh Tingkatan Administrasi Pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan);
- 6) Peningkatan Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap Perilaku Aparatur Pelaksana Pelayanan Publik Berbasis Kompetensi.

Sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta tema pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020, maka prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020 yakni:

I. Pemantapan Ekonomi Daerah Yang Berbasis Pada Ekonomi Kreatif, Industri Kecil Menengah, Usaha Kecil Menengah, Pariwisata dan Pertanian; dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- 2) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat;
- 3) Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah;
- 4) Terkendalinya Inflasi Daerah

II. Pemantapan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Layanan Sosial Dasar Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kreatif; dengan sasaran:

- 1) Menurunnya Tingkat Kemiskinan;
- 2) Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat;



- III. Pemantapan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Gizi, Pengarustamaan Gender dan Pengendalian Penduduk; dengan sasaran**
- 1) Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat;
 - 2) Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan;
 - 3) Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bahan Pangan.
- IV. Pemantapan Daya Saing Wilayah Melalui Pembangunan Kawasan Pedesaan, Ketaatan Terhadap Tata Ruang Wilayah, Pembangunan Wilayah Kelurahan dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan; dengan sasaran:**
- 1) Terwujudnya Ruang Kota yang Layak Huni;
 - 2) Meningkatnya Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Desa;
 - 3) Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- V. Pemantapan Pusat-pusat Pertumbuhan Baru Melalui Konektivitas Infrastruktur; dengan sasaran:**
- 1) Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Umum yang Berkualitas;
 - 2) Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.
- VI. Prioritas Daya Dukung Lingkungan dan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Lahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan; dengan sasaran:**
- 1) Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
 - 2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Menurunnya Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.
- VII. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Pilkada, Penciptaan Kondusifitas Wilayah dan Pemenuhan Target SPM; dengan sasaran:**
- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
 - 2) Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien dan Efektif;



- 3) Meningkatnya Stabilitas Keamanan, KEtertiban dan Kerukunan Hidup Masyarakat.

3.1.4 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016-2018

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros dapat dilihat pada kondisi ekonomi secara makro. Kondisi makro tersebut diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi/pertumbuhan PDRB, Sektor-sektor PDRB yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang berkaitan dengan harga bahan pokok serta daya beli masyarakat, serta rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Maros yang terlihat pada PDRB Perkapita.

1. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Produk Dimestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah produksi yang dimiliki residen atau non residen. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Pembangunan perekonomian Kabupaten Maros telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 6,81 % dengan jumlah PDRB Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) sebesar 19,4 Trilyun Rupiah dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 12,7 Trilyun Rupiah. Namun angka-angka tersebut diatas masih bersifat sementara, sehingga masih dapat berubah.

Sejak tahun 2010 (metode perhitungan baru), sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Maros adalah sektor transportasi dan pergudangan (30 %), kemudian sektor industri pengolahan (20 %) dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (15 %). Sedangkan untuk 14 sektor lainnya kontribusi yang diberikan merata pada kisaran 1-7 %. Tingginya kontribusi sektor transportasi dan pergudangan disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat terhadap penggunaan transportasi udara sehingga otomatis menyebabkan perputaran uang pada sektor tersebut sangat pesat.



Perkembangan nilai dan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku, serta nilai dan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Maros selama kurun waktu 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Nilai dan Kontribusi PDRB tahun 2014 -2017 Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Maros (Milyar Rp)

No	Sektor	2014		2015		2016		2017*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.116.114,90	14,18	2.473.846,00	15,87	2.707.892,20	15,15	3.055.509,70	15,71
2	Pertambangan dan Penggalian	906.062,40	6,14	986.032,37	6,33	1.081.677,50	6,05	1.208.401,40	6,21
3	Industri Pengolahan	2.762.351,20	18,27	3.075.552,50	19,73	3.245.902,50	18,16	3.570.314,40	18,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.535,70	0,05	7.674,10	0,05	8.675,90	0,05	10.605,90	0,05
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.785,80	0,09	13.308,60	0,09	14.063,00	0,08	17.581,10	0,09
6	Konstruksi	807.083,90	5,47	968.500,60	6,21	1.128.303,20	6,31	1.311.810,50	6,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	385.935,40	2,62	434.671,70	2,79	459.527,90	2,57	516.645,30	2,66
8	Transportasi dan Pergudangan	5.064.809,30	43,77	6.056.562,80	38,86	7.477.534,10	41,84	7.866.724,80	40,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45.174,90	0,31	49.655,00	0,32	54.445,60	0,30	61.506,30	0,32
10	Informasi dan Komunikasi	148.748,90	1,01	163.111,30	1,05	185.131,30	1,04	211.049,70	1,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	193.406,00	1,32	208.126,90	1,34	232.762,70	1,30	244.478,60	1,26
12	Real Estate	177.608,00	1,20	190.928,50	1,23	215.749,30	1,21	237.229,30	1,22
13	Jasa Perusahaan	3.850,70	0,03	4.235,80	0,03	4.553,50	0,03	5.112,10	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	482.286,70	3,19	567.286,40	3,64	636.413,20	3,56	682.998,40	3,51
15	Jasa Pendidikan	208.803,50	1,42	229.723,40	1,47	244.655,40	1,37	263.004,60	1,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.434,50	0,61	101.060,90	0,65	110.409,10	0,62	119.021,00	0,61
17	Jasa Lainnya	49.083,30	0,33	55.464,10	0,36	62.397,20	0,35	69.386,30	0,36
PDRB		13.462.075,10	100	15.585.740,97	100	17.870.093,60	100	19.451.379,40	100

Sumber : BPS Kab. Maros, 2018

*) Angka Sementara



Tabel 3.2
Nilai dan Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2014 – 2017 Kabupaten Maros (Milyar Rp)

No	Sektor	2014		2015		2016		2017*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.749.999,40	9,28	1.888.854,90	7,93	2.051.940,00	9,55	2.202.311,90	6,43
2	Pertambangan dan Penggalian	736.331,00	17,89	828.870,50	12,57	955.853,50	15,32	1.142.053,80	19,48
3	Industri Pengolahan	2.337.241,30	18,82	2.572.164,10	10,66	2.653.474,00	2,59	2.733.882,10	3,03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.228,80	10,62	8.967,40	-2,83	10.042,30	11,99	10.649,50	6,05
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10.807,30	3,00	10.873,20	0,28	10.979,80	1,32	12.171,70	10,86
6	Konstruksi	573.016,70	6,95	627.453,30	9,50	675.641,70	7,68	735.098,20	8,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	354.445,70	8,55	371.946,80	4,94	396.964,00	6,73	419.031,60	5,56
8	Transportasi dan Pergudangan	3.161.029,80	-6,59	3.407.382,90	7,79	3.917.728,60	14,98	4.175.994,60	6,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34.748,70	5,59	37.141,40	6,89	39.628,70	6,70	41.548,70	4,85
10	Informasi dan Komunikasi	143.700,50	2,11	153.273,00	6,66	160.210,90	4,53	168.702,10	5,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	147.007,30	3,55	153.637,30	4,26	169.038,20	10,25	169.505,50	0,31
12	Real Estate	150.430,90	3,96	158.704,60	5,50	167.671,50	5,65	178.653,90	6,55
13	Jasa Perusahaan	2.261,60	3,15	2.705,50	3,20	2.798,90	3,45	3.060,30	9,34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	374.002,40	1,88	399.085,70	6,77	432.882,60	8,20	453.024,00	4,86
15	Jasa Pendidikan	174.907,30	1,94	180.154,50	3,00	187.360,70	4,00	193.918,30	3,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.991,70	9,49	76.291,00	9,00	80.796,00	5,91	84.108,70	4,10
17	Jasa Lainnya	37.714,20	2,42	39.222,80	4,00	40.987,80	4,50	44.603,50	8,82
PDRB		10.067.224,60	4,73	10.916.728,90	8,44	11.953.999,20	9,50	12.768.318,40	6,81

Sumber : BPS Kab. Maros, 2018

*) Angka Sementara



Tabel 3.3
Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2014 -2017 Kabupaten Maros

Sektor	2014		2015		2016		2017*	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,60	9,28	16,91	7,93	9,46	9,55	12,84	6,43
Pertambangan dan Penggalian	28,89	17,89	8,83	12,57	9,70	15,32	11,72	19,48
Industri Pengolahan	23,88	18,82	11,34	10,66	5,54	2,59	9,99	3,03
Pengadaan Listrik dan Gas	20,55	10,62	-10,09	-2,83	13,05	11,99	22,25	6,05
Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,82	3,00	4,09	0,28	5,67	1,32	25,02	10,86
Konstruksi	17,18	6,95	20,00	9,50	16,50	7,68	16,26	8,80
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,69	8,55	12,63	4,94	5,72	6,73	12,43	5,56
Transportasi dan Pergudangan	6,10	-6,59	19,58	7,79	23,46	14,98	5,20	6,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,15	5,59	9,92	6,89	9,65	6,70	12,97	4,85
Informasi dan Komunikasi	3,04	2,11	9,66	6,66	13,50	4,53	14,00	5,30
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,23	3,55	7,61	4,26	11,84	10,25	5,03	0,31
Real Estate	7,38	3,96	7,50	5,50	13,00	5,65	9,96	6,55
Jasa Perusahaan	9,76	3,15	10,00	3,20	7,50	3,45	12,27	9,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,50	1,88	17,62	6,77	12,19	8,20	7,32	4,86
Jasa Pendidikan	8,27	1,94	10,02	3,00	6,50	4,00	7,50	3,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,14	9,49	13,00	9,00	9,25	5,91	7,80	4,10
Jasa Lainnya	12,06	2,42	13,00	4,00	12,50	4,50	11,20	8,82
PDRB	13,17	4,73	15,78	8,44	14,66	9,50	8,85	6,81

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2018

*) Angka Sementara

Selama kurun waktu 2014-2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros sebesar 4,73%. Tahun 2015 dan 2016 mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi, yakni sebesar 8,44 % dan 9,50 %. Percepatan ini didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan. Namun pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi



RKPD

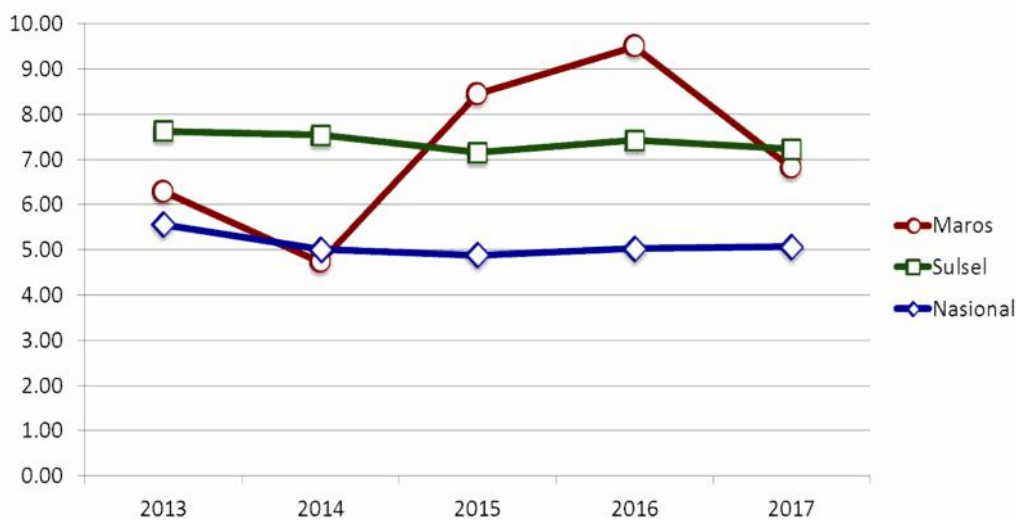
Kabupaten Maros Tahun 2020

Kabupaten Maros mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan sebesar 6,81 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros lima tahun terakhir sebesar 7,15%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros tahun 2017 disebabkan karena beberapa sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB mengalami perlambatan. Diantaranya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pada tahun 2017 hanya bertumbuh 6,43 %, demikian juga dengan lapangan usaha transportasi dan perdagangan yang tahun sebelumnya bertumbuh hingga 14,98% kemudian melambat menjadi 6,89 %. Namun disisi lain sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan paling akseleratif, yakni bertumbuh sebesar 15,46 %. Demikian halnya dengan sektor Konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 9,73 pada tahun 2017.

Secara umum pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten Maros berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Pada tahun 2017, pelambatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Maros menyebabkan pertumbuhannya berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan, namun masih berada diatas pertumbuhan nasional.

Gambar 3.3
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2018

2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab munculnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas



di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang . Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi.

Angka inflasi disajikan pada tingkat provinsi dan kota. Untuk wilayah provinsi Sulawesi Selatan, inflasi dihitung pada wilayah Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kota Palopo, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bulukumba. Untuk daerah-daerah atau kabupaten lainnya dapat mengikuti inflasi pada kabupaten terdekat yang dihitung inflasinya. Laju inflasi Kabupaten Maros mengikuti laju inflasi Kota Makassar sebagai wilayah terdekat. Laju inflasi Kota Makassar pada tahun 2017 mencapai 4,48%, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan 4,44%. Gambaran perkembangan laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Laju Inflasi Tahun 2014-2017 Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	2014	2015	2016	2017
Inflasi Provinsi (%)	8,30	3,85	2,94	4,44
Inflasi Makassar (%)	8,51	5,18	3,18	4,48

Sumber : BPS Sulsel, 2018

3. Indeks Gini

Indeks Gini adalah Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks gini Kabupaten Maros menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berada pada kategori sedang. Indeks Gini Kabupaten Maros tiga tahun terakhir cukup menggembirakan. Pada tahun 2015 berada pada 0,439, kemudian membaik pada tahun 2016 pada angka 0,410. Pada tahun 2017 indeks gini Kabupaten Maros mencapai angka 0,368. Hal ini mengindikasikan bahwa semua kelompok penduduk memperoleh manfaat dari pertumbuhan.

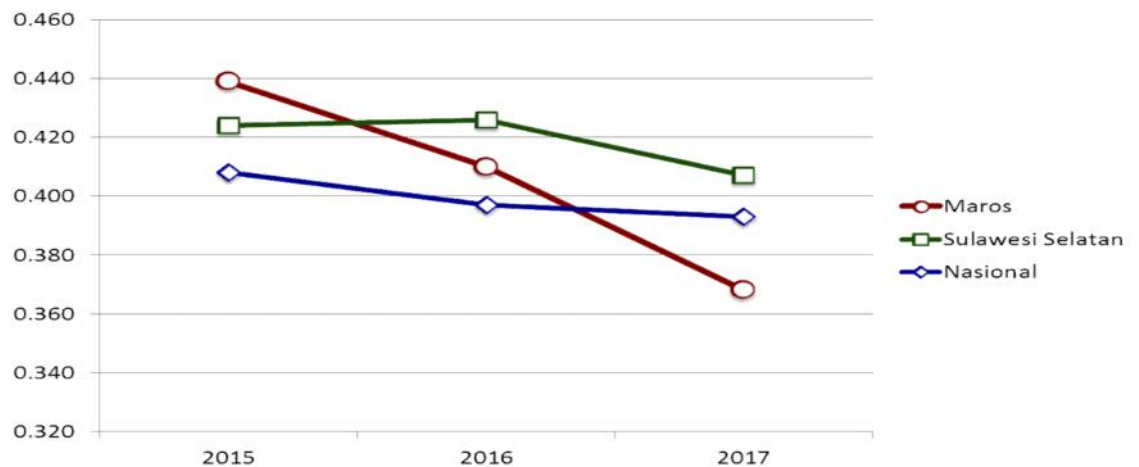


Tabel 3.5
Indeks Gini Kabupaten Maros

Uraian	2015	2016	2017
Indeks Gini	0,439	0,410	0,368

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah). 2018

Gambar 3.4
Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2018

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Indeks Gini Kabupaten Maros pada tahun 2017 berada dibawah Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan penduduk di Kabupaten Maros lebih merata dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

4. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang yang tidak memiliki kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, walaupun peningkatannya sangat kecil. Pada tahun 2015 persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 88,15 %, kemudian pada tahun 2016 sebesar 88,59 %. Pada tahun 2018 penduduk diatas garis kemiskinan mencapai 89,21 %. Persentase penduduk miskin Kabupaten Maros sekitar 11 % masih berada diatas persentase provinsi dan nasional yang sudah berada dibawah 10 %.



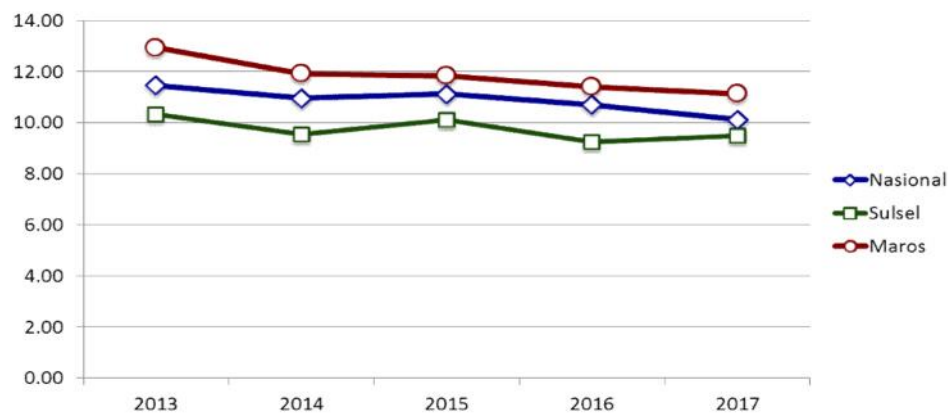
Tabel 3.6
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Maros

No	Uraian	2015	2016	2017	2018*
1	Jumlah Penduduk Miskin	40.100	39.020	38.500	37.913
2	Tingkat Kemiskinan	11,85	11,41	11,10	10,31
3	Garis Kemiskinan	307.717	336.579	348.726	369.968
4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	88,15	88,59	88,90	89,21

Sumber : BPS Kab. Maros, 2018

*) Angka Sementara

Gambar 3.5
Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2018

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Maros masih tinggi dibandingkan jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional sejak tahun 2013-2017, walaupun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Maros pada tahun 2015 sebesar 6,99 %, kemudian pada tahun 2016 menurun hingga mencapai 6,73 %. Pada tahun 2017 TPT Kabupaten Maros sedikit meningkat hingga 6,85 %. Namun pada tahun 2018 kembali turun hingga mencapai 6,19 %.Tingginya TPT Kabupaten Maros disebabkan karena banyaknya penduduk usia kerja produktif dan potensial yang mencari pekerjaan di luar Kabupaten Maros. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang berada dalam wilayah Kabupaten Maros.



Tabel 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros

NO	URAIAN	2015	2017	2018
1	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja	10.907	9.767	8.867
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	155.988	142.621	143.250
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,99	6,85	6,19

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2018

Gambar 3.6
Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2018

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros pada tahun 2014 sempat berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, namun pada tahun 2015 dan 2017 serta tahun 2018, Persentasenya lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan maupun Nasional.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Penentuan keberhasilan pembangunan daerah diukur dengan menggunakan indikator resmi yang digunakan oleh badan dunia, yaitu *The United Nations Development Programme (UNDP)*. Indikator tersebut mengukur kualitas sumberdaya manusia yang dikenal dengan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur kualitas sumberdaya manusia pada dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Perkembangan IPM dihitung secara komposit berdasarkan; angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan rata-rata pengeluaran riil yang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.8

**Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros
Tahun 2015-2018***

URAIAN	2015	2016	2017	2018*
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,67	12,96	13,40	13,86
Angk Melek huruf (%)	94,29	96,36	98,48	99,76
Daya Beli (Ribu Rp)	9.468	9.758	9.875	9.994
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12,67	12,96	13,10	13,23
Angka harapan Hidup (tahun)	68,55	68,58	68,60	68,62
IPM	67,31	67,76	68,43	69,11

Sumber: BPS Kabupaten Maros, 2019 (Diolah)

*) Angka Sementara

Perkembangan IPM Kabupaten Maros menunjukkan trend meningkat setiap tahun. Capaian IPM Kabupaten Maros tahun 2018 diperkirakan sebesar 69,11, dengan capaian tertinggi pada indikator angka melek huruf sebesar 99,76%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros secara berkelanjutan membuahkan hasil yang positif. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1 PENDAPATAN DAERAH

1) Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Penyusunan anggaran tahun 2020 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta



dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2020 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan rasional yang dapat dicapai. Untuk menganggarkan pendapatan daerah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi, dan realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
3. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor PAD perlu diambil langkah-langkah pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan mempertimbangkan prinsi-prinsip dari kebijakan pendapatan daerah, maka arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Maros tahun 2020, adalah :

1. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sistem data dan informasi serta manajemen pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur dan organisasi;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kepada daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, penagihan dan pengendalian operasional.

Adapun kebijakan dan struktur dari Rancangan APBD Kabupaten Maros Tahun 2020 masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. Selanjutnya disampaikan kebijakan dan struktur dari masing-masing sumber pendapatan daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 sebagai berikut:



3.2.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan dan secara langsung dipengaruhi oleh kinerja Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Adapun struktur Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah yang mencakup : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Retribusi daerah, mencakup: retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, retribusi penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum dan luar TPI, retribusi sewa kios pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi laboratorium pemeriksaan kualitas air, retribusi sewa alat berat, retribusi tempat pelelangan, retribusi parkir khusus TPI, retribusi pelayanan parkir tempat rekreasi, retribusi hotel dan wisma bantimurung, retribusi jasa usaha pemeriksaan kesehatan dan badan hewan, retribusi jasa usaha rumah potong hewan (RPH), retribusi TWA Bantimurung, retribusi taman prasejarah leang-leang, retribusi bantimurung waterpark, retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah agribisnis kehutanan, retribusi jasa usaha penjualan bibit ikan, retribusi agribisnis perikanan, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi izin taryek.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- d. Lain-lain PAD yang sah, yang mencakup : Jasa giro kas daerah, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, angsuran /cicilan penjualan kendaraan perorangan dinas, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa, pendapatan jasa layanan umum BLUD (JKN, JAMKESDA dan UMUM), pendapatan usaha lainnya, sewa penggunaan lahan rumah sakit dan pelataran parkir rumah sakit, pemanfaatan kekayaan daerah sewa, Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD. Lain-lain PAD yang sah lainnya, (lain-lain pengembalian dan penjualan aset daerah), sumbangan pihak ketiga, dana kapitasi JKN dan FKTP.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan hal-hal berikut:
 - Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya;
 - Pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
 - Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012;

- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusda yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.



3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Kerjasama Pemanfaatan KSP dan kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

3.2.1.2 DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun struktur dari Dana Perimbangan sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak meliputi : Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan (bagian daerah), Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 (PPh pasal 21), Bagi hasil dari provinsi sumberdaya hutan, Bagi hasil dari pungutan perusahaan perikanan, Bagi hasil dari pertambangan minyak dan bumi, Bagi hasil dari pertambangan gas bumi. Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri dan PPh pasal 21, Bagi hasil bea cukai tembakau, Bagi hasil dari Sumber Daya Hutan, Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) dan bagi hasil dari



pungutan pengusahaan perikanan, Bagi hasil dari pertambangan gas bumi.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU),
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik, meliputi: DAK Bidang Infrastruktur Jalan, DAK Bidang Infrastruktur Irigasi, DAK Bidang Infrastruktur Air Minum, DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi, DAK Bidang Keluarga Berencana, DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, DAK Bidang Perdagangan, DAK Bidang Lingkungan Hidup, DAK Bidang Petanian, DAK Bidang Pariwisata, DAK Bidang Pendidikan. Sementara DAK Non Fisik meliputi: DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, DAK Tunjangan Profesi Guru (TPG), DAK Tambahan Penghasilan Guru, DAK Tunjangan Khusus Guru, DAK Bantuan Operasional Kesehatan, DAK Operasional Keluarga Berencana, DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan.

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPH Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020
- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020.
- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 .



d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020.

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum bersumber dari pendapatan ABPN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal ini Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

3) Dana Alokasi Khusus

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

3.2.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut:

- a. Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya (Bantuan Operasional Sekolah dari Provinsi Sulawesi Selatan).
- b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, yang meliputi; Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah, Bagi Hasil dari PLTA Bakaru, Bagi Hasil Pajak Rokok dan Bagi Hasil CHT dari Sulawesi Selatan.
- c. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus yang meliputi : Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.



- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Kesehatan Gratis.
- Adapun penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - 3) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020;
 - 4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan;
 - 5) Hibah Dana Bos, Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

2) Target Pendapatan Daerah

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan data Perubahan Anggaran Tahun 2019 penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp 1.497.906.779.871,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 35.318.362.000,00 atau sekitar 2,36 persen menjadi Rp 1.533.225.141.871,00 pada anggaran pokok tahun 2020. Berikut rincian dari target Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 sebagai berikut:



1) Target Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, secara keseluruhan untuk tahun 2020 diproyeksikan mengalami perubahan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 288.807.562.871,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran pokok tahun 2020 senilai Rp 22.468.252.000,00 atau sekitar 7,78 persen menjadi Rp 311.275.814.871,00 pada anggaran pokok tahun 2020. Komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 153.408.500.000,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 1.296.500.000,00 atau sekitar 0,85 persen menjadi Rp 154.705.000.000,00 pada anggaran pokok tahun 2020.

b. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 22.222.000.000,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 1.100.000.000,00 atau sekitar 4,95 persen menjadi Rp 23.322.000.000,00 pada anggaran pokok tahun 2020.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 13.107.062.871,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan pada anggaran pokok tahun 2020.

d. Lain-lain PAD Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 100.070.000.000,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 20.071.752.000,00 atau sekitar 20,06 persen menjadi Rp 120.141.752.000,00 pada anggaran pokok tahun 2020.

2) Target Dana Perimbangan

Dana perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimaan DAK terbagi atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Penerimaan Dana Perimbangan pada perubahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 985.485.153.000,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan



senilai Rp 2.317.371.000,00 atau sekitar 0,23 persen menjadi Rp 987.802.524.000,00 pada anggaran pokok tahun 2020. Komponen Dana Perimbangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi hasil pajak/bukan pajak (SDA) pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 28.443.258.000,00 dan diproyeksikan mengalami penurunan senilai Rp 8.803.202.000,00 atau sekitar 30,95 persen menjadi Rp 19.640.056.000,00 di anggaran pokok tahun 2020.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum untuk perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 738.574.547.000,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 8.511.200.000,00 atau sekitar 1,15 persen menjadi Rp 747.085.747.000,00 pada anggaran pokok tahun 2020.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 218.467.348.000,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 221.076.721.000,00 atau sekitar 1,19 persen pada anggaran pokok tahun 2020.

Dana Perimbangan masih mendominasi total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan masih dominannya ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan masih rendahnya kemampuan fiskal yang dimiliki oleh daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

3) Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Secara keseluruhan untuk tahun 2020 diproyeksikan mengalami perubahan dari perubahan anggaran tahun 2019. Penerimaan pos ini pada perubahan anggaran 2019 senilai Rp 223.614.064.000,00, dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 10.532.739.000,00 atau sekitar 4,71 persen menjadi Rp 234.146.803.000,00 pada anggaran pokok 2020. Adapun komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah untuk tahun 2020 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari perubahan tahun 2019 senilai Rp 47.018.800.000,00.

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya



Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk tahun 2020 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari perubahan tahun 2019 senilai Rp 56.804.453.000,00.

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 109.490.811.000,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 13.532.739.000,00 atau sekitar 12,36 persen menjadi Rp 123.023.550.000,00 pada anggaran pokok tahun 2020.

d. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan tahun 2020 diproyeksikan mengalami penurunan. Pada perubahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 10.300.000.000,00 dan diproyeksikan mengalami penurunan senilai Rp. 3.000.000.000,00 atau 29,13 persen menjadi Rp. 7.300.000.000,00.

3) Upaya-upaya Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Maros yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan, adalah sebagai berikut:

1. Penataan sistem pemerintahan pada segenap jajaran dan segenap tingkatan melalui program reformasi birokrasi, reformasi anggaran, dan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa.
2. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD.
3. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dalam pembayaran pajak, retribusi, dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen melalui teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan.
5. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
6. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi atas pendapatan dan penerimaan daerah.
7. Melakukan kajian potensi terhadap sumber-sumber pendapatan secara sistematis dan teruji dengan berbagai studi akademik terhadap potensi wilayah.
8. Melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program kegiatan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.



9. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat terhadap data-data potensi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kabupaten sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki.
10. Melakukan berbagai upaya yang bersifat insentif untuk pengembangan investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
11. Melakukan penyederhanaan system administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui system pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah.

3.2.2 BELANJA DAERAH

1) Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.



Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan ditinjau dari aspek indicator, tolak ukur dan targer kinerjanya.

Beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah, adalah :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai dengan amanat peraturan perundang – undangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 % (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan minimal 10% untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan sarana transportasi umum.
4. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD tahun anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu arah kebijakan belanja daerah tahun 2020 adalah:

1. Mengupayakan penghematan, efisiensi dan efektifitas anggaran belanja secara proporsional akan dilakukan melalui memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat
2. Belanja daerah dititikberatkan kepada prioritas pembangunan daerah.
3. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.



Anggaran belanja daerah Kabupaten Maros pada tahun 2020 diproyeksikan mengalami peningkatan dari perubahan anggaran 2019, pada perubahan anggaran 2019 alokasi belanja sebesar Rp 1.551.449.773.598,61 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 361.256.379.242,39 atau sekitar 23,29 persen menjadi Rp 1.912.706.152.841,00 di anggaran pokok tahun 2020. Berikut rincian pos belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2020.

3.2.2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Pos belanja tidak langsung pada tahun 2020 diproyeksikan mengalami peningkatan dari perubahan anggaran 2019. Alokasi belanja tidak langsung pada pos perubahan anggaran 2019 sebesar Rp 773.220.692.500,61 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 81.280.521.741,39 atau sekitar 10,51 persen menjadi Rp 854.501.214.242,00. Berikut rincian pos belanja tidak langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2020:

1) Belanja Pegawai

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji tiga belas dan gaji keempat belas.
- Penganggaran belanja pegawai untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada Pos Belanja Tidak Langsung.
- Pos belanja pegawai pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan mengalami peningkatan dari perubahan anggaran 2019. Alokasi belanja pegawai pada



perubahan anggaran 2019 sebesar Rp 575.916.641.000,61 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 32.680.409.941,39 atau sekitar 5,67 persen menjadi Rp 608.597.050.942,00 pada anggaran pokok tahun 2020.

2) Bunga

- Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan pinjaman jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
- Belanja bunga tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan.

3) Subsidi

Belanja subsidi direncanakan dianggarkan, namun harus dilakukan pengkajian sebelum memberikan subsidi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar subsidi yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4) Hibah

- Pemberian dana hibah berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial, yaitu Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
- Pos belanja hibah pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan mengalami peningkatan dari perubahan anggaran 2019. Alokasi belanja hibah pada perubahan anggaran 2019 sebesar Rp 11.130.200.000,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 48.222.400.000,00 atau sekitar 433,26 persen menjadi Rp 59.352.600.000,00 pada anggaran pokok 2020. Adanya peningkatan yang cukup signifikan pada pos hibah ini terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tahun 2020.



5) Bantuan Sosial

- Penganggaran bantuan sosial digunakan dalam rangka memberi bantuan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengalami kemungkinan terjadi resiko dan diberikan berupa uang atau barang dan sifatnya selektif, tidak terus menerus dan tidak mengikat. Pemberian bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial, yaitu Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Kabupaten, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial
- Belanja Bantuan Sosial pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 2.622.609.000,00 dan diproyeksikan mengalami penurunan senilai Rp 1.622.609.000,00 atau sekitar 61,87 persen menjadi Rp 1.000.000.000,00 pada anggaran pokok tahun 2020.

6) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa / Kelurahan dan Partai politik

- Bantuan keuangan untuk pengalokasian dana desa mengacu pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.



- Selain itu, pemerintah Kabupaten juga menganggarkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam tahun anggaran 2018 setelah dikurangi DAK.
- Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Pos belanja bantuan keuangan kepada desa dan partai politik pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 181.551.242.000,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 2.000.320.800,00 atau sekitar 1,10 persen menjadi Rp 183.551.563.300,00 pada anggaran pokok tahun 2020.

7) Belanja Tidak Terduga

- Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Pos belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari perubahan anggaran 2019 senilai Rp 2.000.000.000,00.

3.2.2.2 BELANJA LANGSUNG

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- 2) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam



rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pos belanja langsung pada perubahan anggaran 2019 senilai Rp 778.229.081.098,00 dan diproyeksikan mengalami penurunan senilai Rp 279.975.857.501,00 atau sekitar 35,98 persen menjadi Rp 1.058.204.938.599,00 pada anggaran pokok tahun 2020. Komponen belanja langsung Pemerintah Kabupaten Maros dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Honorarium Pegawai

- Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.
- Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Belanja Pegawai diproyeksikan mengalami perubahan dari perubahan anggaran tahun 2019. Perubahan anggaran 2019 belanja pegawai senilai Rp 8.516.250.000,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 3.063.807.886,85 atau sekitar 35,98 persen menjadi Rp 11.580.057.886,85 pada anggaran pokok 2020.

2) Belanja Barang dan Jasa

- Belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan nyata, belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan tersebut.
- Belanja barang dan jasa diproyeksikan mengalami penurunan dari perubahan anggaran tahun 2019. Pos belanja barang dan jasa pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 316.903.851.825,00 dan diproyeksikan mengalami



peningkatan senilai Rp 114.009.396.224,17 atau sekitar 35,98 persen menjadi Rp 430.913.248.049,17 pada anggaran pokok tahun 2020.

3) Belanja Modal

- Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- Belanja modal diproyeksikan mengalami penurunan dari perubahan anggaran tahun 2019. Pos belanja barang dan jasa pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 452.808.979.273,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai Rp 162.902.653.389,98 atau sekitar 35,98 persen menjadi Rp 615.711.632.662,98 pada anggaran pokok tahun 2020.

3.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat tapi semakin terbatasnya jumlah pendapatan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos pembiayaan pada perubahan anggaran 2019 senilai Rp 53.542.993.727,00 dan diproyeksikan mengalami penurunann senilai Rp



30.542.993.727,61 atau sekitar 57,04 persen menjadi Rp 23.000.000.000,00 pada anggaran pokok tahun 2020. Berikut rincian komponen pembiayaan:

1) Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya; Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman; dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Untuk tahun anggaran 2020, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mengalami penurunan dari perubahan anggaran tahun 2019 yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Dimana SILPA Tahun Sebelumnya pada perubahan anggaran 2019 sebesar Rp 69.605.268.760,61 dan mengalami penurunan senilai Rp 40.542.993.727,61 atau sekitar 58,25 persen menjadi Rp 29.062.275.033,00 pada anggaran pokok tahun 2020.

2) Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Pembentukan dana cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; dan Pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Maros dalam Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan mengalami perubahan. Pos Pengeluaran pembiayaan pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 16.062.275.033,00 dan diproyeksikan mengalami penurunan senilai Rp 10.000.000.000,00 atau sekitar 62,26 persen menjadi Rp 6.062.275.033,00. Adapun rencana penggunaannya adalah sebagai berikut:

1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

-Pos penyertaan modal/investasi pemerintah daerah pada perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 12.000.000.000,00 dan diproyeksikan mengalami penurunan senilai Rp 10.000.000.000,00 atau sekitar 83,33 persen menjadi Rp 2.000.000.000,00 pada anggaran pokok tahun 2020.



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2) Pembayaran Utang Jangka Panjang Pokok Utang

- Pos Pembayaran Pokok Utang untuk perubahan anggaran tahun 2019 senilai Rp 4.062.275.033,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan pada anggaran pokok tahun 2020.

Ringkasan Rancangan APBD Pokok Kabupaten Maros Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RANCANGAN RINGKASAN APBD POKOK
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2019	POKOK 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.	PENDAPATAN	1.497.906.779.871,00	1.533.225.141.871,00	35.318.362.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	288.807.562.871,00	311.275.814.871,00	22.468.252.000,00
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	153.408.500.000,00	154.705.000.000,00	1.296.500.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	22.222.000.000,00	23.322.000.000,00	1.100.000.000,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.107.062.871,00	13.107.062.871,00	-
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	100.070.000.000,00	120.141.752.000,00	20.071.752.000,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	985.485.153.000,00	987.802.524.000,00	2.317.371.000,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.443.258.000,00	19.640.056.000,00	(8.803.202.000,00)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	738.574.547.000,00	747.085.747.000,00	8.511.200.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	218.467.348.000,00	221.076.721.000,00	2.609.373.000,00
	<i>DAK Fisik</i>	<i>92.415.682.000,00</i>	<i>92.415.682.000,00</i>	-
	<i>DAK Non Fisik</i>	<i>126.051.666.000,00</i>	<i>126.051.666.000,00</i>	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	223.614.064.000,00	234.146.803.000,00	10.532.739.000,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	47.018.800.000,00	47.018.800.000,00	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.804.453.000,00	56.804.453.000,00	-
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	109.490.811.000,00	123.023.550.000,00	13.532.739.000,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	10.300.000.000,00	7.300.000.000,00	(3.000.000.000,00)
				-
5.	BELANJA	1.551.449.773.598,61	1.912.706.152.841,00	361.256.379.242,39
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	773.220.692.500,61	854.501.214.242,00	81.280.521.741,39



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

5.1.1.	Belanja Pegawai	575.916.641.000,61	608.597.050.942,00	32.680.409.941,39
5.1.4.	Belanja Hibah	11.130.200.000,00	59.352.600.000,00	48.222.400.000,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.622.609.000,00	1.000.000.000,00	(1.622.609.000,00)
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Partai Politik	181.551.242.500,00	183.551.563.300,00	2.000.320.800,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
				-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	778.229.081.098,00	1.058.204.938.599,00	279.975.857.501,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	8.516.250.000,00	11.580.057.886,85	3.063.807.886,85
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	316.903.851.825,00	430.913.248.049,17	114.009.396.224,17
5.2.3.	Belanja Modal	452.808.979.273,00	615.711.632.662,98	162.902.653.389,98
				-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(53.542.993.727,61)	(23.000.000.000,00)	30.542.993.727,61
6.	PEMBIAYAAN	53.542.993.727,61	23.000.000.000,00	(30.542.993.727,61)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.605.268.760,61	29.062.275.033,00	(40.542.993.727,61)
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	69.605.268.760,61	29.062.275.033,00	(40.542.993.727,61)
				-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.062.275.033,00	6.062.275.033,00	(10.000.000.000,00)
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)
6.2.7.	Pembayaran Utang	4.062.275.033,00	4.062.275.033,00	-
				-
	PEMBIAYAAN NETTO	53.542.993.727,61	23.000.000.000,00	(30.542.993.727,61)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	-	(0,00)



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 berpedoman pada Visi Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“Maros Lebih Sejahtera 2021”

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Maros lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Maros yang lebih sejahtera di tahun 2021.

Visi tersebut bermakna: kondisi masyarakat kabupaten maros pada tahun 2021 yang lebih baik dari kondisi sekarang (2015/2016) pada seluruh sektor kehidupan masyarakat yang ditandai dengan beberapa pokok Visi, yaitu:

1. Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Seperti: Kecukupan Pangan, Papan, Dan Sandang Yang Bermutu, Kecukupan Kebutuhan Dan Ketersediaan Akan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Pekerjaan, Lingkungan Yang Bersih, Aman, Damai, Dan Nyaman Serta Akses Untuk Berpartisipasi.
2. Tersedianya Infrastruktur Dasar Pendukung Pelayanan Publik Dan Pembangunan Daerah yang Lebih Berkualitas Dan Merata.
3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kerangka *Good Governance And Clean Government*.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, maka sangatlah perlu dilakukan sinergi yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta/Dunia Usaha serta seluruh stakeholders secara terpadu.



Sesuai dengan harapan terwujudnya “Maros Lebih Sejahtera 2021”, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Maros yang tertuang dalam RPJMD periode 2016 - 2021 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, yang terdiri dari:

1. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH

Merupakan Misi yang berorientasi kepada Pokok Visi Pertama yang menitikberatkan pada pembangunan aspek kesejahteraan dan aspek daya saing daerah yang mengarah pada kemandirian lokal sebagai akibat dari suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata melalui tata kelola yang kreatif, inovatif, dan profesional pada seluruh potensi sumber daya yang ada.

2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Merupakan Misi yang berorientasi kepada pokok Visi Pertama dan pokok Visi Ketiga yang menitikberatkan pada pembangunan pada aspek pelayanan yang dimulai dari suatu proses birokrasi yang meliputi berbagai sistem yang saling berkaitan, saling mendukung, dan saling menentukan untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, berupa:

- a. Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
- b. Pelayanan Perijinan
- c. Pelayanan Administras Terpadu
- d. Pelayanan Dasar (Urusan Wajib) sesuai standar pelayanan minimal (SPM)
- e. Non Pelayanan Dasar Pada Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Pemerintahan.
- f. Pelayanan Pembinaan Keagamaan

3. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

Merupakan Misi yang berorientasi kepada pokok Visi Pertama yang menitikberatkan pada pembangunan aspek kesejahteraan yang mengarah pada pembangunan Sumber Daya Manusia Guna menjadi Lebih Sehat, Cerdas, Produktif, Kompetitif, Dan Kreatif Melalui Pelayanan Yang Maksimal, Berupa:

- a. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat
- b. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- c. Peningkatan Ketersediaan Bahan Pangan Yang Berkualitas
- d. Peningkatan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat
- e. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak.

4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN

Merupakan Misi yang berorientasi kepada pokok Visi Pertama yang menitikberatkan pada pembangunan aspek kesejahteraan dan aspek daya saing daerah yang mengarah pada Pemanfaatan Ruang/Wilayah Kabupaten Maros, Utamanya Pada Wilayah Yang Menjadi Kawasan – Kawasan Potensial secara merata (14 Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan)

5. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

Merupakan Misi yang berorientasi kepada pokok Visi Pertama yang menitikberatkan pada pembangunan aspek kesejahteraan dan aspek daya saing daerah yang mengarah pada Tata Kelola Sumber Daya Yang Berwawasan Lingkungan, Mitigasi Bencana, Dan berkelanjutan

6. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

Merupakan Misi yang berorientasi kepada pokok Visi Kedua yang menitikberatkan pada pembangunan aspek kesejahteraan dan aspek daya saing daerah yang mengarah pada pembangunan Infrastruktur Pendukung Yang Memberikan Dampak Pada Akses Pemerintah, Masyarakat, Dan Dunia Usaha Dalam Mengelola Serta Memanfaatkan Seluruh Sumber Daya Daerah Yang Ada Secara Lebih Efisien, Efektif, Dan Produktif.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Maros

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021	1. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH	1 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Berkualitas	1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
			2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata
			3 Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja
			4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan
			5 Meningkatkan Pendapatan Daerah
			6 Terkendalinya Inflasi Daerah
			7 Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat
			8 Meningkatkan Nilai Investasi
	2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi	1 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel
			2 Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas
	3. MENINGKATKAN	1 Meningkatkan Taraf	1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
	AN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT	Hidup Penduduk, Baik Sebagai Individu Maupun Sebagai Masyarakat	Sebagai Individu
			2 Meningkatkan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan
			3 Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan dan Anak
			4 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat
			5 Terkendalinya Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah
	4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN	1 Meningkatkan Pembangunan Di Wilayah Perkotaan, Perdesaan dan Kawasan Strategis	1 Meningkatkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Desa
			2 Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni
			3 Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	5. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	1 Meningkatkan Tata Kelola Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Alam	1 Meningkatkan Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan
			2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
		2 Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Terhadap Mitigasi Bencana	1 Menurunnya Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana
	6. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA	1 Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Dan Keseimbangan Pembangunan	1 Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas
			2 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik



Tabel 4.2
Tabel Sasaran Kabupaten Maros
Tahun 2020

SASARAN	TOLAK UKUR	TARGET	PELAKSANAAN	
		2020	KONDISI AKHIR	SATUAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	7,66	7,66	Persen
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	91,12	91,12	Rp/Jiwa
	Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang Dari Usd 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari	10,32	10,32	Persen
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja.	Produktifitas Total Daerah	110,81	110,81	Rasio
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,79	5,79	Persen
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,12	68,12	Persen
Menurunnya Tingkat Kemiskinan.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	89,79	89,79	Persen
	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	0,1	0,1	Rasio
	Keluarga Prasejahtera Dan Sejahtera I	21,67	21,67	Persen
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.	Tingkat Kemandirian Kabupaten	20,68	20,68	Persen
Terkendalinya Inflasi Daerah.	Laju Inflasi Daerah	3,03	3,03	Persen
Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat.	Rasio Gini	0,34	0,34	Rasio
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	80	80	Indeks



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

SASARAN	TOLAK UKUR	TARGET	PELAKSANAAN	
		2020	KONDISI AKHIR	SATUAN
Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.	Nilai SAKIP	B	B	Nilai
	Opini BPK	WTP	WTP	Nilai Opoini
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,25	3,25	Indeks
	Persentase Pencapaian Target SPM	90	90	Persen
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	70,49	70,49	IPM
Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,94	89,94	Indeks
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,78	69,88	Indeks
Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.	Angka kriminalitas yang tertangani	14,18	14,18	/10000 penduduk
Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	93,18	93,18	Persen
Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,1	1,1	Persen
Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	69,97	69,97	Indeks
Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,6	0,6	Indeks



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

SASARAN	TOLAK UKUR	TARGET	PELAKSANAAN	
		2020	KONDISI AKHIR	SATUAN
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW	2,83	2,83	Persen
Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan	Indeks Produksi Sub Sektor Pertanian	98,29	98,29	Indeks
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	15,47	15,47	Indeks
Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.	Indeks Kesiapsiagaan bencana	65	65	Indeks
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur	62,64	62,64	Indeks
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	0,61	0,61	Indeks

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2021 melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran pada setiap Misi dalam RPJMD tahun berjalan, yang berkorelasi dengan:

- Pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP 2020)
- Pencapaian prioritas pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD 2020)



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

- Sektor/bidang/urusan yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- Hasil evaluasi pencapaian target pembangunan Kabupaten Maros pada tahun sebelumnya (tahun 2017, 2018, dan 2019 (paruh waktu)).
- Hasil pokok – pokok pikiran DPRD kabupaten Maros yang didapatkan melalui: Reses, Rapat Dengar Pendapat, dan kunjungan kerja ke seluruh wilayah Kabupaten Maros serta studi perbandingan ke beberapa Daerah lain.
- Hasil Musyawarah perencanaan pembangunan (Tingkat Desa/Kelurahan sampai Kabupaten) dan Hasil pelaksanaan Forum Gabungan OPD.
- pencapaian kebijakan yang terkait dengan isu – isu strategis pembangunan misalnya:SDG's, Pengarusutamaan Gender, Kemiskinan, Disabilitas, Reformasi Birokrasi, Implementasi Standar pelayanan Minimal, pesta demokrasi serentak, dan lain sebagainya yang diproyeksikan akan menjadi tantangan pembangunan pada tahun 2020.

Selain hal tersebut, prioritas pembangunan Kabupaten Maros tahun 2020 juga dirumuskan berdasarkan Keterdesakan, dan daya ungkit kinerja pembangunan Daerah. Penentuan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Maros tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan dan berdasarkan pada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan Daerah pada tahun 2018

Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah tahun 2018 yang menunjukkan beberapa permasalahan pembangunan yang harus diatasi pada tahun 2020. Permasalahan pembangunan tersebut dituangkan dalam isu strategis pembangunan tahun 2020. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional pada tahun 2020

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.



Arah kebijakan pembangunan nasional dalam rancangan RKP 2020 mengambil tema **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Dalam Rancangan RKP Tahun 2020 terdapat 5 Prioritas Nasional dan 25 Program Prioritas. Adapun 5 Prioritas Nasional dan 25 Program Prioritas yang dimaksud adalah:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan;
- 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- 3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- 4) Pengentasan Kemiskinan;
- 5) Pembangunan Budaya, Karakter dan Prestasi Bangsa.

2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;

- 1) Perluasan Infrastruktur Dasar;
- 2) Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana;
- 3) Peningkatan Konetivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
- 4) Peningkatan Infrastuktur Perkotaan;
- 5) Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Nilai Tambah Ekonomi, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;

- 1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM;
- 2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil;
- 3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja;
- 4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- 5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;

- 1) Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan;
- 2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air;
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
- 4) Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan;
- 5) Penguatan Ketahanan Bencana.

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

- 1) Penguatan Kemampuan Pertahanan;
- 2) Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional;



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

- 3) Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi;
- 4) Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut;
- 5) Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas.

3. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020.

Pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Tema pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah “Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan Yang Inklusif”. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Sejalan dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan;
2. Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
3. Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik.

4. Visi, Misi, Arah kebijakan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Maros yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021.

RKPD Kabupaten Maros Tahun 2020 merupakan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun kelima Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021, dalam rangka memastikan terjadinya perubahan yang berdampak kepada peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Maros sebagai representasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Maros jangka menengah, maka pada RKPD Kabupaten Maros tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Maros mengambil Tema

Pembangunan, yaitu:

“PEMANTAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”



5. Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Maros

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah meliputi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten harus dilibatkan secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan dilibatkannya DPRD dalam pembahasan sejak awal, diharapkan dapat memberikan masukan berupa aspirasi masyarakat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang dihasilkan/didapatkan pada saat melaksanakan reses maupun kunjungan kerja ke daerah pemilihan.

6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020

Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros tahun lalu, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan Daerah, Strategi Pembangunan, telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dan Arah Kebijakan Pembangunan pada dokumen RPJMD periode 2016 – 2021, maka Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 adalah:

- I. **Pemantapan Ekonomi Daerah Yang Berbasis Pada Ekonomi Kreatif, Industri Kecil Menengah, Usaha Kecil Menengah, Pariwisata dan Pertanian; dengan sasaran:**
 - 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
 - 2) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat;
 - 3) Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah;
 - 4) Terkendalinya Inflasi Daerah
- II. **Pemantapan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Layanan Sosial Dasar Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kreatif; dengan sasaran:**
 - 1) Menurunnya Tingkat Kemiskinan;
 - 2) Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat;
- III. **Pemantapan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Gizi, Pengarustamaan Gender dan Pengendalian Penduduk; dengan sasaran:**
 - 1) Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat;
 - 2) Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan;
 - 3) Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bahan Pangan.



- IV. Pemantapan Daya Saing Wilayah Melalui Pembangunan Kawasan Pedesaan, Ketaatan Terhadap Tata Ruang Wilayah, Pembangunan Wilayah Kelurahan dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan; dengan sasaran:**
- 1) Terwujudnya Ruang Kota yang Layak Huni;
 - 2) Meningkatnya Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Desa;
 - 3) Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- V. Pemantapan Pusat-pusat Pertumbuhan Baru Melalui Konektivitas Infrastruktur; dengan sasaran:**
- 1) Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Umum yang Berkualitas;
 - 2) Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.
- VI. Prioritas Daya Dukung Lingkungan dan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Lahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan; dengan sasaran:**
- 1) Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
 - 2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Menurunnya Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.
- VII. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Pilkada, Penciptaan Kondusifitas Wilayah dan Pemenuhan Target SPM; dengan sasaran:**
- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
 - 2) Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien dan Efektif;
 - 3) Meningkatnya Stabilitas Keamanan, KETertiban dan Kerukunan Hidup Masyarakat.

Tabel 4.3

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penurunan Angka Kemiskinan	Pemantapan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Gizi, Pengarustamaan Gender dan



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Maros
		Pengendalian Penduduk
		Pemantapan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Layanan Sosial Dasar Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kreatif
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Pemantapan Pusat-pusat Pertumbuhan Baru Melalui Konektivitas Infrastruktur
		Pemantapan Daya Saing Wilayah Melalui Pembangunan Kawasan Pedesaan, Ketaatan Terhadap Tata Ruang Wilayah, Pembangunan Wilayah Kelurahan dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan
Nilai Tambah Ekonomi, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pemantapan Ekonomi Daerah Yang Berbasis Pada Ekonomi Kreatif, Industri Kecil Menengah, Usaha Kecil Menengah, Pariwisata dan Pertanian
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Prioritas Daya Dukung Lingkungan dan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Lahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Pilkada, Penciptaan Kondusifitas Wilayah dan Pemenuhan Target SPM

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Maros tahun 2020, maka diperlukan keselarasan antara



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

sasaran daerah yang terdapat dalam RPJMD kabupaten Maros Periode 2016 - 2021 dengan prioritas pembangunan Kabupaten Maros yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020. Adapun gambaran tentang keselarasan sasaran daerah (RPJMD 2016 – 2021) dengan prioritas pembangunan (RKPD 2019) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Kesesuaian Prioritas Pembangunan (RKPD 2020)
Dan Sasaran Pembangunan (RPJMD 2016 - 2021)

PRIORITAS PEMBANGUNAN (RKPD 2020)		SASARAN PEMBANGUNAN (RPJMD 2016 - 2021)	
1	Pemantapan Ekonomi Daerah Yang Berbasis Pada Ekonomi Kreatif, Industri Kecil Menengah, Usaha Kecil Menengah, Pariwisata dan Pertanian	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
		2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
		3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja
		4	Terkendalinya Inflasi Daerah
		5	Meningkatnya Pendapatan Daerah
		6	Meningkatnya Nilai Investasi
2	Pemantapan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Layanan Sosial Dasar Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kreatif	1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan
		2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
		3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja
		4	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat
		5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3	Pemantapan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Gizi, Pengarusutamaan Gender dan Pengendalian Penduduk	1	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat
		2	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan
		3	Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan dan Anak
		4	Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN (RKPD 2020)		SASARAN PEMBANGUNAN (RPJMD 2016 - 2021)	
		5	Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah
4	Pemantapan Daya Saing Wilayah Melalui Pembangunan Kawasan Pedesaan, Ketaatan Terhadap Tata Ruang Wilayah, Pembangunan Wilayah Kelurahan dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan	1	Meningkatnya Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Desa
		2	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni
		3	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5	Pemantapan Pusat-pusat Pertumbuhan Baru Melalui Konektivitas Infrastruktur	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
		2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
		3	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat
		4	Meningkatnya Nilai Investasi
		5	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja
		6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
6	Prioritas Daya Dukung Lingkungan dan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Lahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	1	Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan
		2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
		3	Menurunnya Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana
7	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Pilkada, Penciptaan Kondusifitas Wiayah dan Pemenuhan Target SPM	1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien dan Efektif
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2020 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan kesatuan bangsa dan urusan kewilayahan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020.

Rencana program dan kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui sumberdana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program dan kegiatan. Dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, top down, dan bottom up, untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD.

Beberapa tantangan dan dinamika pembangunan tersebut teridentifikasi dalam proses dan tahapan perencanaan yang dilakukan. Identifikasi terhadap hal tersebut dapat dilakukan melalui penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, usulan langsung masyarakat dan stakeholder yang disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik, Musrenbang maupun media informasi lainnya. Selain itu, juga dilakukan pencermatan terhadap usulan secara bottom-up dari kabupaten/kota yang mana proses pengusulannya oleh masyarakat telah dimulai pada saat dilaksanakannya Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.

Matrik rencana program dan kegiatan disajikan berikut ini secara terperinci berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Lokasi	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.	PENDIDIKAN				78.190.614.400,00		30.502.519.900,00	
1.01.1.01.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		1.763.246.000,00		-	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
1.01.1.01.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	12 Layanan	Dinas Pendidikan	1.108.160.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	10 Layanan	Dinas Pendidikan	521.600.000,00	10 Layanan	-	
1.01.1.01.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	14 Dokumen	Dinas Pendidikan	86.850.000,00	14 Dokumen	-	
1.01.1.01.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang dihasilkan	10 Dokumen	Dinas Pendidikan	28.636.000,00	10 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.01.1.01.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Laporan Pengendalian Kegiatan OPD yang dihasilkan	5 Laporan	Dinas Pendidikan	14.000.000,00	5 Laporan	-	
1.01.1.01.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Survey Onternal Penilaian Kapasitas Organisasi	1 Dokumen	Dinas Pendidikan	4.000.000,00	1 Dokumen	-	
1.01.1.01.01.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	100 %		884.900.000,00		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
1.01.1.01.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Yang disediakan	2 Unit	Dinas Pendidikan	500.000.000,00	2 Unit	-	
1.01.1.01.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang disediakan	11 Jenis	Dinas Pendidikan	249.900.000,00	11 Jenis	-	
1.01.1.01.01.002.004.	Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Disediakan	3 Unit	-	100.000.000,00	3 Unit	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Karnaval Pawai yang dihasilkan	1 Unit	Dinas Pendidikan	10.000.000,00	1 Unit	-	
1.01.1.01.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	1 Tahun	Dinas Pendidikan	25.000.000,00	1 Tahun	-	
1.01.1.01.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Tahun	Dinas Pendidikan	-	1 Tahun	-	
1.01.1.01.01.002.008.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			Unit	-		-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.01.1.01.01.002.009.	Rehabilitasi Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor			Dinas Pendidikan	-		-	
1.01.1.01.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	100 %		-		-	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
1.01.1.01.01.003.002.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Jaringan Kerjasama Pelayanan Kepegawaian	15 Orang	Dinas Pendidikan	-	15 Orang	-	
1.01.1.01.01.003.003.	Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Pembuatan BLog Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian	90 Orang	Dinas Pendidikan	-	90 Orang	-	
1.01.1.01.01.015.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten Maros	70,4 = IPM = 80,3		5.003.486.000,00		28.732.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
1.01.1.01.01.015.001.	Workshop Guru PAUD	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop	1000 Orang	Kabupaten Maros	-	1000 Orang	-	
1.01.1.01.01.015.002.	Sosialisasi Penggunaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga yang mengikuti Sosialisasi Penggunaan Dana BOP PAUD	14 Lembaga	14 Kecamatan	123.735.000,00	14 Lembaga	-	
1.01.1.01.01.015.003.	Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	Jumlah Model Pembelajaran yang diterapkan	3 Model	Kabupaten Maros	59.400.000,00	3 Model	-	
1.01.1.01.01.015.004.	Peningkatan Layanan Pendidikan Keluarga pada Satuan PAUD	Jumlah Penduduk Usia Dewasa Yang Mendapatkan Pendidikan Keayah Bundaan	120 Orang	Kabupaten Maros	44.840.000,00	120 Orang	28.732.000,00	
1.01.1.01.01.015.005.	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Didik (siswa) Pendidikan Anak Usia dini	7488 Siswa	Kabupaten Maros	4.539.900.000,00	7488 Siswa	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.01.1.01.01.015.006.	Pengelolaan Taman Penitipan Anak	Jumlah Taman Penitipan Anak yang terkelola dengan baik	1 Lembaga	Kabupaten Maros	53.400.000,00	1 Lembaga	-	
1.01.1.01.01.015.007.	Pembinaan PKG Gugus PAUD	Jumlah Gugus PAUD Yang Mendapatkan Pembinaan	14 Lembaga	Kabupaten Maros	51.030.000,00	14 Lembaga	-	
1.01.1.01.01.015.008.	Gerakan Sadar PAUD	Jumlah Peserta yang mengikuti Gerakan Sadar PAUD	1025 Org	Kabupaten Maros	131.181.000,00	1025 Org	-	
1.01.1.01.01.015.009.	Sosialisasi Mekanisme dan Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD	Jumlah Peserta Sosialisasi Mekanisme dan Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD dan PNF	60 Orang	Kabupaten Maros	-	60 Orang	-	
1.01.1.01.01.016.	Program Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pendidikan Dasar	Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten Maros	70,4 = IPM = 80,3		50.376.266.400,00		17.148.329.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
1.01.1.01.01.016.001.	Penyediaan Sampul Laporan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik SMP	Jumlah Sampul Laporan Hasil Penilaian Belajar SMP yang disediakan	4000 Buah	Kabupaten Maros	200.000.000,00	4000 Buah	220.000.000,00	
1.01.1.01.01.016.002.	Penyediaan Operasional Pengelolaan Dana BOS SMP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS SMP	1 Laporan	Kabupaten Maros	89.175.000,00	1 Laporan	91.175.000,00	
1.01.1.01.01.016.003.	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Tingkat SMP	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas	600 Siswa	Kabupaten Maros	182.704.000,00	600 Siswa	337.154.400,00	
1.01.1.01.01.016.004.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer dan Ujian Sekolah SMP	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer dan Ujian Nasional	5000 Siswa	Kabupaten Maros	126.100.000,00	5000 Siswa	-	
1.01.1.01.01.016.005.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa SMP mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	15.585 Siswa	Kabupaten Maros	18.413.485.450,00	15.585 Siswa	16.500.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.01.1.01.01.016.006.	Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah	3 Kegiatan	Kabupaten Maros	137.570.000,00	3 Kegiatan	-	
1.01.1.01.01.016.007.	Pengembangan dan Pembinaan Kurikulum Tingkat SD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kurikulum Tingkat SD	6 Kegiatan	Kabupaten Maros	-	6 Kegiatan	-	
1.01.1.01.01.016.008.	Penyediaan Sampul Laporan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik SD	Jumlah Sampul Laporan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik SD	4000 Buah	Kabupaten Maros	200.000.000,00	4000 Buah	-	
1.01.1.01.01.016.009.	Penyediaan Operasional Pengelolaan Dana BOS SD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS SD	1 Laporan	Kabupaten Maros	137.075.000,00	1 Laporan	-	
1.01.1.01.01.016.010.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah	39.985 Siswa	Kabupaten Maros	29.688.384.450,00	39.985 Siswa	-	
1.01.1.01.01.016.011.	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Tingkat SD	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas	315 Siswa	Kabupaten Maros	182.999.000,00	315 Siswa	-	
1.01.1.01.01.016.012.	Penyelenggaraan Ujian Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah SD	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah	5200 Siswa	Kabupaten Maros	427.625.000,00	5200 Siswa	-	
1.01.1.01.01.016.013.	Monitoring dan Evaluasi Sekolah Pasca Pelaksanaan Akreditasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Sekolah Pasca Akreditasi	1 Dokumen	Kabupaten Maros	29.760.000,00	1 Dokumen	-	
1.01.1.01.01.016.014.	Pembuatan data Base Akreditasi	Jumlah Dokumen Data Base yang Akreditasi Sekolah yang dihasilkan	-	Kabupaten Maros	-	-	-	
1.01.1.01.01.016.015.	Bimtek Penguatan Kelembagaan Akreditasi Sekolah	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penguatan Kelembagaan Akreditasi Sekolah	200 Orang	Kabupaten Maros	30.278.500,00	200 Orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.01.1.01.01.016.016.	Penerapan system Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Kependidikan yang diterapkan	1 Sistem	Kabupaten Maros	143.425.000,00	1 Sistem	-	
1.01.1.01.01.016.017.	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Sekolah	Jumlah Dokumen RKTS Sekolah yang dihasilkan	339 Dokumen	Kabupaten Maros	-	339 Dokumen	-	
1.01.1.01.01.016.018.	Penyelenggaraan Try Out Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat Sekolah Dasar	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Try Out	6285 Siswa	Kabupaten Maros	387.685.000,00	6285 Siswa	-	
1.01.1.01.01.017.	Program Pendidikan Non Formal	Nilai Tambah Per Sektor Lapangan Usaha	48,97 Persen		2.373.373.000,00		2.528.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
1.01.1.01.01.017.001.	Penyelenggaraan Paket A Setara SD/MI	Jumlah Peserta yang mengikuti Paket A Setara SD/MI	150 Orang	Kabupaten Maros	131.150.000,00	150 Orang	214.500.000,00	
1.01.1.01.01.017.002.	Penyelenggaraan Paket B setara SMP/MTs	Jumlah Peserta yang mengikuti Paket B setara SMP/MTs	250 Orang	Kabupaten Maros	272.150.000,00	250 Orang	412.500.000,00	
1.01.1.01.01.017.003.	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA/MA	Jumlah Peserta yang mengikuti Paket C setara SMA/MA	450 Orang	Kabupaten Maros	632.550.000,00	450 Orang	891.000.000,00	
1.01.1.01.01.017.004.	Penyediaan Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang dikelola dengan Baik	7 Lembaga	Kabupaten Maros	-	7 Lembaga	-	
1.01.1.01.01.017.005.	Kesertaan dalam Kegiatan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah Tenaga GTK PAUD dan PNF yang mengikuti Kegiatan Apresiasi PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.	50 Orang	Kabupaten Maros	170.300.000,00	50 Orang	-	
1.01.1.01.01.017.006.	Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	80 Orang	Kabupaten Maros	93.300.000,00	80 Orang	102.630.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.01.1.01.01.017.007.	Peningkatan Kapasitas PTK PAUD dan PNF	Jumlah PTK PAUD dan PNF yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	25 Orang	Kabupaten Maros	-	25 Orang	-	
1.01.1.01.01.017.008.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penilik	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	30 Orang	Kabupaten Maros	-	30 Orang	-	
1.01.1.01.01.017.009.	Pelaksanaan Diskusi Terfokus Penilik PLS	Jumlah Peserta yang mengikuti Diskusi Terfokus	30 Orang	Kabupaten Maros	-	30 Orang	-	
1.01.1.01.01.017.010.	Supervisi dan Pelaporan Program PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga PAUD dan PNF yang di supervisi	128 Lembaga	Kabupaten Maros	77.500.000,00	128 Lembaga	-	
1.01.1.01.01.017.011.	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal yang akan dievaluasi	17 Lembaga	Kabupaten Maros	30.610.000,00	17 Lembaga	-	
1.01.1.01.01.017.012.	Peningkatan Kapasitas Tutor Keaksaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Tutor Keaksaraan	150 Orang	Kabupaten Maros	-	150 Orang	-	
1.01.1.01.01.017.013.	Penuntasan Buta Aksara	Jumlah Kelompok Buta Aksara yang mengikuti Pendidikan Keaksaraan Dasar	150 Kelompok	Kabupaten Maros	825.000.000,00	150 Kelompok	907.500.000,00	
1.01.1.01.01.017.015.	Sosialisasi Akreditasi Kelembagaan PAUD dan PNF	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Akreditasi Kelembagaan PAUD dan PNF	240 Orang	Kabupaten Maros	54.505.000,00	240 Orang	-	
1.01.1.01.01.017.016.	Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris	Jumlah peserta yang mengikuti Kursus Bahasa Inggris	50 Orang	Kabupaten Maros	-	50 Orang	-	
1.01.1.01.01.017.017.	Bimtek Penguatan Kelembagaan Akreditasi PAUD dan PNF	Jumlah Lembaga Sasaran Pemetaan Mutu	120 Lembaga	Kabupaten Maros	45.348.000,00	120 Lembaga	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.01.1.01.01.017.018.	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kelembagaan PAUD dan PNF	Jumlah Lembaga yang akan dievaluasi penilaian kelembagaannya	256 Lembaga	Kabupaten Maros	40.960.000,00	256 Lembaga	-	
1.01.1.01.01.017.019.	Penyelenggaraan Kursus Menjahit	Jumlah Peserta yang mengikuti Kursus Menjahit	30 Orang	Kabupaten Maros	-	30 Orang	-	
1.01.1.01.01.017.020.	Pengembangan Model Percepatan Penuntasan Buta Aksara	Jumlah Peserta Pengembangan Model Percepatan Penuntasan Buta Aksara	40 Peserta	Kabupaten Maros	-	40 Peserta	-	
1.01.1.01.01.017.021.	Replikasi Model Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Koperatif	Jumlah Peserta Replikasi Model Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Koperatif	40 Orang	Kabupaten Maros	-	40 Orang	-	
1.01.1.01.01.017.022.	Peningkatan Kapasitas Tutor Kesetaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Tutor Kesetaraan	50 Orang	Kabupaten Maros	-	50 Orang	-	
1.01.1.01.01.018.	Program Peningkatan Mutu Dan Profesionalisme Pendidik Serta Tenaga Kependidikan	Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten Maros	70,4 = IPM = 80,3		610.944.000,00		382.233.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
1.01.1.01.01.018.001.	Workshop Pengusulan Daftar Usul dan Penetapan Angka Kredit	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Daftar Usul dan Penetapan Angka Kredit	82 Orang	Kabupaten Maros	-	82 Orang	-	
1.01.1.01.01.018.002.	Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah (KTI) Bagi Guru	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah (KTI)	128 Orang	Kabupaten Maros	-	128 Orang	-	
1.01.1.01.01.018.003.	Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang SD	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang SD	405 Orang	Kabupaten Maros	226.920.000,00	405 Orang	-	
1.01.1.01.01.018.004.	Diklat Calon Pengawas Sekolah	Jumlah Calon Pengawas yang mengikuti Seleksi Substansi dan Diklat Calon Pengawas	20 Orang	Kabupaten Maros	156.800.000,00	20 Orang	172.480.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.01.1.01.01.018.005.	Bantuan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan	Jumlah Guru yang mendapatkan bantuan dalam mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan	25 Orang	Kabupaten Maros	190.685.000,00	25 Orang	209.753.500,00	
1.01.1.01.01.018.006.	Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru SD Berbasis Komunitas	Jumlah Guru yang mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan	280 Orang	Kabupaten Maros	-	280 Orang	-	
1.01.1.01.01.018.007.	Diklat Calon Kepala Sekolah	Jumlah Guru yang mengikuti Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah	45 Orang	Kabupaten Maros	-	45 Orang	-	
1.01.1.01.01.018.012.	Workshop Pemanfaatan Teknologi Sebagai Media Pembelajaran bagi guru	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pemanfaatan Teknologi sebagai Media Pembelajaran Bagi Guru	80 Orang	Kabupaten Maros	36.539.000,00	80 Orang	-	
1.01.1.01.01.019.	Program Pengelolaan Dan Distribusi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Persentase Desa Mandiri Dan Desa Berkembang	98,75 Persen		104.012.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAERAH
1.01.1.01.01.019.001.	Penilaian Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi terpilih Tingkat Kabupaten Maros	27 Orang	Kabupaten Maros	78.022.000,00	27 Orang	-	
1.01.1.01.01.019.002.	Penilaian Kinerja dan Penetapan angka Kredit Tenaga Fungsional Jabatan Guru	Jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan penilaian angka kredit sesuai ketentuan	400 Orang	Kabupaten Maros	25.990.000,00	400 Orang	-	
1.01.1.01.01.020.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan	60.425 Rupiah		17.074.387.000,00		10.315.095.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH
1.01.1.01.01.020.001.	Pemeliharaan Sekolah	Jumlah Paket Pemeliharaan Sekolah	1 Paket	Kabupaten Maros	-	1 Paket	-	
1.01.1.01.01.020.002.	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	2 Paket	Kabupaten Maros	-	2 Paket	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.01.1.01.01.020.003.	Monitoring dan evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1 Dokumen	Kabupaten Maros	-	1 Dokumen	-
1.01.1.01.01.020.004.	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) DAK	Jumlah Paket Alat Permainan Edukatif (APE) yang disediakan	7 Paket	Kabupaten Maros	140.000.000,00	7 Paket	-
1.01.1.01.01.020.005.	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru TK/PAUD (DAK)	Jumlah Jamban Siswa/Guru PAUD yang direhabilitasi	3 Ruang	Kabupaten Maros	62.445.000,00	3 Ruang	-
1.01.1.01.01.020.006.	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar TK/PAUD (DAK)	Jumlah Ruang TK/PAUD yang direhabilitasi	4 Ruang	Kabupaten Maros	298.564.000,00	4 Ruang	-
1.01.1.01.01.020.007.	Pembangunan Gedung dan Jamban SKB	Jumlah Ruang/Gedung dan Jamban SKB yang disediakan	4 Ruang	Kabupaten Maros	682.320.000,00	4 Ruang	-
1.01.1.01.01.020.008.	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD (RKB) Beserta Perabotnya	Jumlah Ruang Kelas Baru PAUD yang disediakan	3 Ruang	Kabupaten Maros	-	3 Ruang	-
1.01.1.01.01.020.009.	Peningkatan Sarana Pendidikan TK/PAUD/SKB	Jumlah Sarana dan Prasarana TK/PAUD/SKB yang berada dalam Kondisi Baik	61 Paket	Kabupaten Maros	-	61 Paket	-
1.01.1.01.01.020.010.	Penyediaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP (DAK)	Jumlah Paket Buku Koleksi Perpustakaan SMP yang disediakan	4 Paket	Kabupaten Maros	105.000.000,00	4 Paket	-
1.01.1.01.01.020.011.	Pembangunan Sarana PJOK dan/atau Seni Budaya (DAK)	Jumlah Sarana PJOK dan/atau Seni Budaya yang disediakan	9 Paket	Kabupaten Maros	320.000.000,00	9 Paket	-
1.01.1.01.01.020.012.	Pengadaan Media Pembelajaran SMP (DAK)	Jumlah Paket Media Pembelajaran yang disediakan	2 Paket	Kabupaten Maros	80.000.000,00	2 Paket	-



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.01.1.01.01.020.013.	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Alat Peraga Pendidikan SMP (DAK)	Jumlah Peralatan Laboratorium dan alat Peraga Pendidikan SMP yang disediakan	17 Paket	Kabupaten Maros	249.656.000,00	17 Paket	-	
1.01.1.01.01.020.014.	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru SMP (DAK)	Jumlah Jamban Siswa/Guru SMP yang direhabilitasi	-	Kabupaten Maros	450.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.020.015.	Pembangunan Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP (DAK)	Jumlah Laboratorium Komputer SMP beserta perabotnya yang disediakan	1 Ruang	Kabupaten Maros	425.000.000,00	1 Ruang	467.500.000,00	
1.01.1.01.01.020.016.	Pembangunan Jamban Siswa/Guru SMP (DAK)	Jumlah Jamban Siswa/Guru SMP yang disediakan	3 Ruang	Kabupaten Maros	375.000.000,00	3 Ruang	412.500.000,00	
1.01.1.01.01.020.017.	Peningkatan Sarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Sarana Sekolah Menengah Pertama yang berada dalam kondisi baik	37 Sekolah	Kabupaten Maros	-	37 Sekolah	-	
1.01.1.01.01.020.018.	Pengadaan Media Pembelajaran, Teknologi Informasi dan Komunikasi SD (DAK)	Jumlah Media Pembelajaran, Teknologi Informasi dan Komunikasi SD yang disediakan	14 Paket	Kabupaten Maros	1.520.000.000,00	14 Paket	1.804.000.000,00	
1.01.1.01.01.020.019.	Pengadaan Peralatan Pendidikan SD (DAK)	Jumlah Peralatan Pendidikan SD yang disediakan	24 Paket	Kabupaten Maros	280.000.000,00	24 Paket	308.000.000,00	
1.01.1.01.01.020.020.	Peningkatan Sarana Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang berada dalam Kondisi Baik	55 SD	Kabupaten Maros	-	55 SD	-	
1.01.1.01.01.020.021.	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD (DAK)	Jumlah Ruang Perpustakaan SD dan Perabotnya yang direhabilitasi	7 Ruang	Kabupaten Maros	700.000.000,00	7 Ruang	770.000.000,00	
1.01.1.01.01.020.022.	Rehabilitasi Ruang Kelas SD (DAK)	Jumlah Ruang Kelas SD yang direhabilitasi	9 Ruang	Kabupaten Maros	967.950.000,00	9 Ruang	1.064.745.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.01.1.01.01.020.023.	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK)	Jumlah Ruang UKS dan Perabotnya yang disediakan	3 Ruang	Kabupaten Maros	195.000.000,00	3 Ruang	-	
1.01.1.01.01.020.024.	Pembangunan Jamban Siswa/Guru SD Beserta Sanitasinya (DAK)	Jumlah Jamban Siswa/Guru SD beserta Sanitasinya yang tersedia	7 Rung	Kabupaten Maros	700.000.000,00	7 Rung	770.000.000,00	
1.01.1.01.01.020.025.	Pembangunan Ruang Baru (RKB) Beserta Perabotnya DAK	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SD beserta Perabotnya yang terbangun	5 Ruang	Kabupaten Maros	925.000.000,00	5 Ruang	1.017.500.000,00	
1.01.1.01.01.020.026.	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SD (DAK)	Jumlah Jamban Siswa/Guru SD yang direhabilitasi	8 Ruang	Kabupaten Maros	80.802.000,00	8 Ruang	88.000.000,00	
1.01.1.01.01.020.027.	Pengadaan sarana PJOK dan/ atau Seni Budaya SD (DAK)	Jumlah Paket Sarana PJOK dan/atae Seni Budaya yang disediakan	23 Paket	Kabupaten Maros	552.000.000,00	23 Paket	607.200.000,00	
1.01.1.01.01.020.028.	Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (DAK)	Jumlah Ruang Belajar SMP yang disediakan	24 Ruang	Kabupaten Maros	5.055.000.000,00	24 Ruang	-	
1.01.1.01.01.020.029.	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK)	Jumlah Paket Buku Koleksi Perpustakaan SD yang disediakan	-	Kabupaten Maros	950.000.000,00	-	1.045.000.000,00	
1.01.1.01.01.020.030.	Peningkatan Sarana Pendidikan TK/PAUD Swasta	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Alat Permainan Edukatif (APE)	60 Sekolah	14 Kecamatan	1.960.650.000,00	60 Sekolah	1.960.650.000,00	
1.02.	KESEHATAN				390.114.437.890,00		322.905.666.955,00	
1.02.1.02.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		-		2.330.110.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran			Dinas Kesehatan	-		1.340.670.000,00	
1.02.1.02.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran			Dinas Kesehatan	-		337.950.000,00	
1.02.1.02.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan			Dinas Kesehatan	-		414.340.000,00	
1.02.1.02.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD			Dinas Kesehatan	-		94.150.000,00	
1.02.1.02.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD			Dinas Kesehatan	-		139.600.000,00	
1.02.1.02.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi			Dinas Kesehatan	-		3.400.000,00	
1.02.1.02.01.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-			1.000.000.000,00	2.073.875.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.1.02.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor			Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor			Dinas Kesehatan	-		961.500.000,00	
1.02.1.02.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai			Dinas Kesehatan	-		10.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor			Dinas Kesehatan	-		72.375.000,00	
1.02.1.02.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			Dinas Kesehatan	-		30.000.000,00	
1.02.1.02.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-		-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.1.02.01.003.004.	Pelatihan Mandiri			Dinas Kesehatan	-		100.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan	-	-		54.216.536.661,00		54.626.285.560,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.1.02.01.015.001.	Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU)	Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun/rehab	12 Unit	Dinas Kesehatan	-	12 Unit	-	
1.02.1.02.01.015.002.	Monitoring dan evaluasi SDM di FKTP	Jumlah Dokumen Laporan Monev SDM	1 Dokumen	Dinas Kesehatan	-	1 Dokumen	-	
1.02.1.02.01.015.003.	Pemutakhiran Data SDM	Jumlah ASN yang mengikuti pertemuan	36 Orang	Dinas Kesehatan	-	36 Orang	-	
1.02.1.02.01.015.004.	Workshop perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Kabupaten Maros	Jumlah ASN yang mengikuti workshop	36 Orang	Dinas Kesehatan	-	36 Orang	-	
1.02.1.02.01.015.005.	Pengadaan Obat dan Bahan Medis habis Pakai (DAU)	Jumlah Jenis Obat, vaksin dan BMHP yang tersedia	150 Jenis	Dinas Kesehatan	-	150 Jenis	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.015.006.	Pengadaan Obat dan Bahan Medis habis Pakai (DAK)	Jumlah Jenis Obat, Vaksin dan Bahan Medis habis Pakai Yang Tersedia	150 Jenis	Dinas Kesehatan	1.371.466.661,00	150 Jenis	1.508.613.327,00	
1.02.1.02.01.015.007.	Pengadaan Alat Kesehatan (DAU)	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengadaan alat kesehatan	14 Puskesmas	Dinas Kesehatan	-	14 Puskesmas	-	
1.02.1.02.01.015.008.	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengadaan alat kesehatan	14 Puskesmas	Dinas Kesehatan	-	14 Puskesmas	-	
1.02.1.02.01.015.009.	Kalibrasi Alat Kesehatan (DAU)	Jumlah Puskesmas yang melakukan kalibrasi alat kesehatan	4 Puskesmas	Kabupaten Maros	-	4 Puskesmas	-	
1.02.1.02.01.015.010.	Kalibrasi Alat Kesehatan (DAK)	Jumlah Puskesmas yang Melakukan Kalibrasi ALKES	14 Puskesmas	Kabupaten Maros	80.000.000,00	14 Puskesmas	88.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.011.	Pembangunan Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pembangunan/Perluasan/Realokasi	3 Puskesmas	Dinas Kesehatan	11.734.050.000,00	3 Puskesmas	11.734.050.000,00	
1.02.1.02.01.015.012.	Pengadaan Kendaraan Operasional Ambulance	Jumlah Puskesmas yang memiliki ambulance standar kondisi wilayah	14 Puskesmas	Kabupaten Maros	-	14 Puskesmas	-	
1.02.1.02.01.015.013.	Pengadaan Prasarana Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar prasarana listrik	6 Puskesmas	Kabupaten Maros	-	6 Puskesmas	-	
1.02.1.02.01.015.014.	Pengadaan Bangunan Pelayanan TB Paru	Jumlah Puskesmas yang melayani penderita TB Paru sesuai standar	14 Puskesmas	Kabupaten Maros	-	14 Puskesmas	-	
1.02.1.02.01.015.015.	Pemanfaatan Sistem E-Logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten			Dinas Kesehatan	-		-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.015.016.	Pemasangan Lantai Mezanin di Instalasi Farmasi Kabupaten			Dinas Kesehatan	-		-	
1.02.1.02.01.015.017.	Pengendalian Peredaran Obat dan Bahan Berbahaya di Apotek			Dinas Kesehatan	-		-	
1.02.1.02.01.015.018.	Pengelolaan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Tradisional (P4TO)	Tingkat Produktifitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Tradisional	12 Bulan	Kabupaten Maros	-	12 Bulan	-	
1.02.1.02.01.015.019.	Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	30 Orang	Dinas Kesehatan	-	35 Orang	-	
1.02.1.02.01.015.020.	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) bagi Perawat Puskesmas	Jumlah Perawat yang mengikuti pelatihan	30 Orang	Dinas Kesehatan	-	35 Orang	-	
1.02.1.02.01.015.021.	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) bagi Bidan Puskesmas			Dinas Kesehatan	-		115.900.000,00	
1.02.1.02.01.015.022.	Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Maros			Dinas Kesehatan	-		23.950.000,00	
1.02.1.02.01.015.023.	Pelatihan Keselamatan dan Keamanan bagi tenaga Laboratorium Puskesmas			Dinas Kesehatan	-		33.500.000,00	
1.02.1.02.01.015.024.	Pelatihan Advanced Cardiac Life Support (ACLS) bagi Dokter	Jumlah Dokter Yang Mengikuti Pelatihan	16 Orang	Dinas Kesehatan	-	16 Orang	-	
1.02.1.02.01.015.025.	Pelatihan Pemantauan Terapi Obat			Dinas Kesehatan	-		20.700.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.015.026.	Sosialisasi Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga			Dinas Kesehatan	-		9.400.000,00	
1.02.1.02.01.015.027.	Pengawasan Kosmetik dan Makanan			Dinas Kesehatan	-		-	
1.02.1.02.01.015.028.	Pelatihan Koding ICD X	Jumlah Peserta Koding ICD X	98 Orang	Dinas Kesehatan	-	98 Orang	58.050.000,00	
1.02.1.02.01.015.029.	e-logistic (DAK Non Fisik-BOK Kabupaten)	Jumlah Dokumen Laporan e-Logistik	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	31.020.000,00	12 Dokumen	34.122.233,00	
1.02.1.02.01.015.030.	Pembangunan / Rehab. Puskesmas (DAU)	Jumlah Puskesmas Yang Dibangun/Direhab.	10 Puskesmas	Kabupaten Maros	-	10 Puskesmas	-	
1.02.1.02.01.015.031.	Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (DAK)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.032.	Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.033.	Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (DAK)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.034.	Pelatihan Care Giver Untuk Pelayanan Lansia			-	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.015.035.	Penyediaan Prasarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten (DAK FARIVASI)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	-	-		154.775.647.900,00		157.644.740.690,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.1.02.01.016.001.	Workshop Peningkatan Cakupan Imunisasi UCI (DAK NON FISIK-BOK KAB)	Jumlah Peserta Workshop Peningkatan Cakupan UCI	47 Orang	Dinas Kesehatan	81.000.000,00	47 Orang	89.100.000,00	
1.02.1.02.01.016.002.	Upaya Peningkatan Layanan Imunisasi	Jumlah Pengelola Imunisasi yang Memperoleh Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan dalam Melaksanakan Pelayanan Imunisasi	31 Orang	Dinas Kesehatan	-	31 Orang	-	
1.02.1.02.01.016.003.	Imunisasi Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Lau	43.090.000,00	12 Dokumen	47.399.000,00	
1.02.1.02.01.016.004.	Imunisasi Puskesmas Maros Baru (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	49.167.500,00	12 Dokumen	54.084.250,00	
1.02.1.02.01.016.006.	Imunisasi Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	51.981.000,00	12 Dokumen	57.179.100,00	
1.02.1.02.01.016.007.	Imunisasi Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	22.110.000,00	12 Dokumen	24.321.000,00	
1.02.1.02.01.016.008.	Imunisasi Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	58.517.500,00	12 Dokumen	64.369.250,00	
1.02.1.02.01.016.009.	Imunisasi Puskesmas Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	40.852.500,00	12 Dokumen	44.937.750,00	
1.02.1.02.01.016.010.	Imunisasi Puskesmas Tanralili (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	44.592.500,00	12 Dokumen	49.051.750,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.011.	Imunisasi Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	36.120.000,00	12 Dokumen	39.732.000,00	
1.02.1.02.01.016.012.	Imunisasi Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	33.060.000,00	12 Dokumen	36.366.000,00	
1.02.1.02.01.016.013.	Imunisasi Puskesmas Tompobulu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	51.222.500,00	12 Dokumen	56.344.750,00	
1.02.1.02.01.016.014.	Imunisasi Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	56.222.500,00	12 Dokumen	61.844.750,00	
1.02.1.02.01.016.015.	Imunisasi Puskesmas Turikale (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	29.915.000,00	12 Dokumen	32.906.500,00	
1.02.1.02.01.016.016.	Imunisasi Puskesmas Cenrana (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	19.107.500,00	12 Dokumen	21.018.250,00	
1.02.1.02.01.016.017.	Imunisasi Puskesmas Camba (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Camba	42.580.000,00	12 Dokumen	46.838.000,00	
1.02.1.02.01.016.018.	Sosialisasi Advokasi Perda Tuberkulosis	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	60 Orang	Dinas Kesehatan	-	60 Orang	-	
1.02.1.02.01.016.019.	Workshop Aplikasi Pelaporan Penyakit Menular Berbasis WEB	Jumlah pengelola program HIV, TB, Hepatitis, Malaria dan Infeksi saluran pencernaan yang mengikuti workshop	160 Orang	Dinas Kesehatan	-	160 Orang	-	
1.02.1.02.01.016.021.	Penyediaan JUMANTIK KIT	Jumlah Jumantik KIT yang Disediakan	100 Paket	Dinas Kesehatan	-	100 Paket	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.022.	Fogging wilayah Sebelum Masa Penularan dan Fogging Focus	Jumlah titik Fogging wilayah Sebelum Masa Penularan dan fogging fokus	100 Kegiatan	Kabupaten Maros	-	100 Kegiatan	-	
1.02.1.02.01.016.023.	Workshop Tim Fogging Tenaga Penyemprot Kecamatan	Jumlah Orang yang mengikuti Workshop	42 Orang	Dinas Kesehatan	-	42 Orang	-	
1.02.1.02.01.016.024.	Pengendalian Vektor Puskesmas Mallawa (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Vektor di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	22.865.000,00	12 Dokumen	25.151.500,00	
1.02.1.02.01.016.025.	Pengendalian Vektor Puskesmas Maros Baru (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Vektor di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	10.292.500,00	12 Dokumen	11.321.750,00	
1.02.1.02.01.016.026.	Pengendalian Vektor Puskesmas Cenrana (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Vektor di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	1.785.000,00	12 Dokumen	1.963.500,00	
1.02.1.02.01.016.027.	Pengendalian Vektor Puskesmas Tompo Bulu (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Vektor di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	9.477.500,00	12 Dokumen	10.425.250,00	
1.02.1.02.01.016.028.	Pengendalian Vektor Puskesmas Marusu (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.029.	Pengendalian Vektor Puskesmas Mandai (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.030.	Pengendalian Vektor Puskesmas Moncongloe (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Vektor di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	5.950.000,00	12 Dokumen	6.545.000,00	
1.02.1.02.01.016.031.	Pengendalian Vektor Puskesmas Bontoa (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.032.	Pengendalian Vektor Puskesmas Lau (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Vektor di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Lau	13.940.000,00	12 Dokumen	15.334.000,00	
1.02.1.02.01.016.033.	Pengendalian Vektor Puskesmas Bantimurung (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Vektor di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	19.500.000,00	12 Dokumen	21.450.000,00	
1.02.1.02.01.016.034.	Pembentukan Zoonosis Center (DAK NON FISIK-BOK KAB.)	Jumlah Zoonosis Center yang Terbentuk	1 Unit	Kecamatan Turikale	4.265.000,00	1 Unit	4.691.500,00	
1.02.1.02.01.016.035.	Pengendalian Vektor Puskesmas Camba (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.036.	Pengendalian Vektor Puskesmas Tanralili (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Vektor di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	1.360.000,00	12 Dokumen	1.496.000,00	
1.02.1.02.01.016.037.	Pengendalian Vektor Puskesmas Simbang (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Vektor di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	12.240.000,00	12 Dokumen	13.464.000,00	
1.02.1.02.01.016.038.	Pengendalian Vektor Puskesmas Turikale (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Vektor di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	49.470.000,00	12 Dokumen	54.417.000,00	
1.02.1.02.01.016.039.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Camba (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Camba	37.077.000,00	12 Dokumen	40.784.700,00	
1.02.1.02.01.016.040.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Tanralili (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	10.880.500,00	12 Dokumen	11.968.550,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.041.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Simbang (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	44.017.250,00	12 Dokumen	48.418.975,00	
1.02.1.02.01.016.042.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Turikale (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	113.475.000,00	12 Dokumen	124.822.500,00	
1.02.1.02.01.016.043.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Mallawa (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	5.750.000,00	12 Dokumen	6.325.000,00	
1.02.1.02.01.016.044.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Maros Baru (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	16.074.750,00	12 Dokumen	17.682.225,00	
1.02.1.02.01.016.045.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Cenrana (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	37.145.000,00	12 Dokumen	40.859.500,00	
1.02.1.02.01.016.046.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Tompo Bulu (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	55.462.500,00	12 Dokumen	61.008.750,00	
1.02.1.02.01.016.047.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Marusu (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	15.555.000,00	12 Dokumen	17.110.500,00	
1.02.1.02.01.016.048.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Mandai (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	38.624.000,00	12 Dokumen	42.486.400,00	
1.02.1.02.01.016.049.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Moncongloe (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	30.097.000,00	12 Dokumen	33.106.700,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.050.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Bontoa (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)			-	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.051.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Lau (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Lau	64.132.500,00	12 Dokumen	70.545.750,00	
1.02.1.02.01.016.052.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik Puskesmas Bantimurung (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	20.570.000,00	12 Dokumen	22.627.000,00	
1.02.1.02.01.016.053.	Kampanye Triple Eliminasi HIV, Hepatitis, dan Sifilis dalam Rangka Hari AIDS Sedunia	Jumlah Peserta Kampanye	200 Orang	Kecamatan Turikale	-	200 Orang	-	
1.02.1.02.01.016.054.	Penyelidikan epidemiologi kasus zoonosis yang berpotensi kejadian luar biasa (DAK NON FISIK-BOK KAB)	Jumlah kasus zoonosis yang berpotensi kejadian luar biasa Yang dilakukan penyelidikan epidemiologinya	30 Kasus	Kabupaten Maros	9.025.000,00	30 Kasus	9.927.500,00	
1.02.1.02.01.016.055.	Workshop Surveilans dan Respon Penyelidikan Epidemiologi Kejadian Luar Biasa	Jumlah petugas surveilans puskesmas dan RS yang memperoleh peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan surveilans dan respon penyelidikan epidemiologi KLB	31 Orang	Dinas Kesehatan	-	31 Orang	158.890.000,00	
1.02.1.02.01.016.056.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Mallawa (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	11.900.000,00	12 Dokumen	13.090.000,00	
1.02.1.02.01.016.057.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Maros Baru (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	7.097.500,00	12 Dokumen	7.807.250,00	
1.02.1.02.01.016.058.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Cenrana (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	15.087.500,00	12 Dokumen	16.596.250,00	
1.02.1.02.01.016.059.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Tompo Bulu (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	10.200.000,00	12 Dokumen	11.220.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.060.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Marusu (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Dokumen (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB)	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	23.120.000,00	12 Dokumen	25.432.000,00	
1.02.1.02.01.016.061.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Mandai (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	11.050.000,00	12 Dokumen	12.155.000,00	
1.02.1.02.01.016.062.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Moncongloe (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	9.039.750,00	12 Dokumen	9.943.725,00	
1.02.1.02.01.016.063.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Bontoa (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	4.080.000,00	12 Dokumen	4.488.000,00	
1.02.1.02.01.016.064.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Lau (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Lau	21.420.000,00	12 Dokumen	2.356.200.000,00	
1.02.1.02.01.016.065.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Bantimurung (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	14.960.000,00	12 Dokumen	16.456.000,00	
1.02.1.02.01.016.066.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Camba (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Camba	10.475.400,00	12 Dokumen	11.522.940,00	
1.02.1.02.01.016.067.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Tanrallii (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.068.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Simbang (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	6.783.000,00	12 Dokumen	7.461.300,00	
1.02.1.02.01.016.069.	Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa Puskesmas Turikale (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dan Respons KLB di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	26.265.000,00	12 Dokumen	28.891.500,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.070.	Pengadaan Alat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Jenis Alat Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	3 Jenis	Dinas Kesehatan	-	3 Jenis	-	
1.02.1.02.01.016.071.	Workshop Penatalaksanaan Penderita Diabetes Militus dan Hipertensi	Jumlah petugas yang mendapatkan pengetahuan tentang Hipertensi dan Diabetes Millitus	28 Orang	Dinas Kesehatan	-	28 Orang	-	
1.02.1.02.01.016.072.	Workshop Penyusunan Peta Respon	Jumlah Orang yang mengikuti Workshop Penyusunan Peta respon	45 Orang	Dinas Kesehatan	-	45 Orang	-	
1.02.1.02.01.016.073.	Workshop Deteksi Dini dan Penatalaksanaan ODMK (DAK NON FISIK-BOK KAB)	Jumlah Orang yang Mengikuti Workshop	29 Orang	Dinas Kesehatan	8.380.000,00	29 Orang	9.218.000,00	
1.02.1.02.01.016.074.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Mallawa (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	29.099.600,00	12 Dokumen	32.009.560,00	
1.02.1.02.01.016.075.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Maros Baru (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	29.099.600,00	12 Dokumen	32.009.560,00	
1.02.1.02.01.016.076.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Cenrana(DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	29.099.600,00	12 Dokumen	32.009.560,00	
1.02.1.02.01.016.077.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Tompo Butu(DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	29.099.600,00	12 Dokumen	32.009.560,00	
1.02.1.02.01.016.078.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Marusu(DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	29.099.600,00	12 Dokumen	32.009.560,00	
1.02.1.02.01.016.079.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Mandai(DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	29.099.600,00	12 Dokumen	32.009.560,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.080.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Moncongloe (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	29.100.000,00	12 Dokumen	32.010.000,00	
1.02.1.02.01.016.081.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Bontoa (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	29.099.600,00	12 Dokumen	32.009.560,00	
1.02.1.02.01.016.082.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Lau (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Lau	29.099.600,00	12 Dokumen	32.009.560,00	
1.02.1.02.01.016.083.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Bantimurung (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	32.474.600,00	12 Dokumen	35.722.060,00	
1.02.1.02.01.016.084.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Camba(DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Camba	29.099.600,00	12 Dokumen	32.009.560,00	
1.02.1.02.01.016.085.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Tanralilli(DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tanralilli	32.474.600,00	12 Dokumen	35.722.060,00	
1.02.1.02.01.016.086.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Simbang(DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	29.099.600,00	12 Dokumen	32.009.560,00	
1.02.1.02.01.016.087.	Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza Puskesmas Turikale(DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	32.474.800,00	12 Dokumen	35.722.280,00	
1.02.1.02.01.016.088.	Manasik Kesehatan Haji	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Bimbingan Manasik Kesehatan	350 Orang	Baruga Kantor Bupati Maros	-	350 Orang	-	
1.02.1.02.01.016.089.	Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Jumlah data jemaah yang terinput ke siskohatkes yang melakukan vaksinasi dan pelacakan KJH	350 Orang	Kabupaten Maros	-	350 Orang	-	
1.02.1.02.01.016.090.	Penguatan Kapasitas Petugas Pemeriksa Kesehatan haji	Jumlah petugas yang Mendapatkan Pengetahuan Tentang pemeriksaan kesehatan haji	43 Orang	Dinas Kesehatan	-	43 Orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.091.	Workshop Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular (DAK NON FISIK-BOK KAB)	Jumlah Orang yang mengikuti WORKSHOP DETEKSI DINI DAN PENATALAKSANAAN PTM	29 Orang	Dinas Kesehatan	5.640.000,00	29 Orang	6.204.000,00	
1.02.1.02.01.016.092.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Mallawa (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	69.087.250,00	12 Dokumen	75.995.975,00	
1.02.1.02.01.016.093.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Maros Baru(DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	72.495.000,00	12 Dokumen	79.744.500,00	
1.02.1.02.01.016.094.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Cenrana (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	59.740.000,00	12 Dokumen	65.714.000,00	
1.02.1.02.01.016.095.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Tompo Bulu (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tompo Bulu	59.740.000,00	12 Dokumen	65.714.000,00	
1.02.1.02.01.016.096.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Marusu (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	59.740.000,00	12 Dokumen	65.714.000,00	
1.02.1.02.01.016.097.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Mandai (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	60.140.000,00	12 Dokumen	66.154.000,00	
1.02.1.02.01.016.098.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Moncongloe (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	69.540.000,00	12 Dokumen	76.494.000,00	
1.02.1.02.01.016.099.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Bontoa (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	60.140.000,00	12 Dokumen	66.154.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.100.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Lau (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Lau	63.345.000,00	12 Dokumen	69.679.500,00	
1.02.1.02.01.016.101.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Bantimurung (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	69.290.000,00	12 Dokumen	76.219.000,00	
1.02.1.02.01.016.102.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Camba (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Camba	60.140.000,00	12 Dokumen	66.154.000,00	
1.02.1.02.01.016.103.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Tanralili (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	60.140.000,00	12 Dokumen	66.154.000,00	
1.02.1.02.01.016.104.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Simbang (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	69.290.000,00	12 Dokumen	76.219.000,00	
1.02.1.02.01.016.105.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Turikale (DAK NON FISIK-BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	63.345.000,00	12 Dokumen	69.679.500,00	
1.02.1.02.01.016.106.	Penyegaran Kader POSBINDU	Jumlah kader yang mendapatkan pengetahuan tentang posbindu	42 Orang	Dinas Kesehatan	-	42 Orang	-	
1.02.1.02.01.016.107.	Workshop Gangguan Indera Bagi Guru Sekolah	Jumlah guru yang Mendapatkan Pengetahuan Tentang gangguan indera	50 Orang	Dinas Kesehatan	-	50 Orang	-	
1.02.1.02.01.016.108.	Bimbingan Teknis Konselor Usaha Berhenti Merokok (DAK NON FISIK-BOK KAB)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Konselor UBM	20 Orang	Dinkes	13.130.000,00	20 Orang	14.443.000,00	
1.02.1.02.01.016.109.	Monev Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah	Jumlah Kecamatan yang di Monitoring dan Evaluasi	14 Kecamatan	Kabupaten Maros	-	14 Kecamatan	-	
1.02.1.02.01.016.110.	Bimtek Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) dan Sadanis (Pemeriksaan Payudara Klinis)(DAK NON FISIK-BOK KAB)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek Pemeriksaan IVA dan SADANIS	42 Orang	Dinas Kesehatan	24.550.000,00	42 Orang	27.005.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.111.	Kampanye Pencegahan Penyakit Menular dan School Survey (DAK NON FISIK-BOK KAB)	Jumlah Peserta Kampanye Pencegahan Penyakit Menular dan School Survey	1000 Orang	Sekolah	9.625.000,00	1000 Orang	10.587.500,00	
1.02.1.02.01.016.112.	Kampanye CERDIK di OPD (DAK NON FISIK-BOK KAB)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kampanye	600 Orang	Kabupaten Maros	29.300.000,00	600 Orang	32.230.000,00	
1.02.1.02.01.016.113.	Workshop penatalaksanaan dan deteksi dini penyakit menular (DAK NON FISIK - BOK KAB.)	Jumlah Orang yang Mengikuti Workshop penatalaksanaan dan deteksi dini penyakit menular	96 Orang	Dinas Kesehatan	9.860.000,00	96 Orang	10.846.000,00	
1.02.1.02.01.016.114.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DAK NON FISIK-BOK KAB)	Jumlah laporan Pelaksanaan Program P2PM	12 Dokumen	Dinas Kesehatan	39.200.000,00	12 Dokumen	43.120.000,00	
1.02.1.02.01.016.115.	Penyelidikan epidemiologi kasus Tuberkulosis dan Tuberkulosis Multi Drug Resistent/ resisten obat (DAK NON FISIK-BOK KAB)	Jumlah kasus TB dan TB Multi Drug Resistent/ resisten obat yang mendapatkan penyelidikan epidemiologi	30 Kasus	Kabupaten Maros	9.025.000,00	30 Kasus	9.927.500,00	
1.02.1.02.01.016.116.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Mallawa (DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	82.484.000,00	12 Dokumen	90.732.400,00	
1.02.1.02.01.016.117.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Maros Baru(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	51.692.000,00	12 Dokumen	56.861.200,00	
1.02.1.02.01.016.118.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Cenrana(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	94.740.800,00	12 Dokumen	104.214.880,00	
1.02.1.02.01.016.119.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Tompo Bulu(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	89.235.900,00	12 Dokumen	98.159.490,00	
1.02.1.02.01.016.120.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Marusu(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	33.615.300,00	12 Dokumen	36.976.830,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.121.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Mandai(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	35.485.000,00	12 Dokumen	39.033.500,00	
1.02.1.02.01.016.122.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Moncongloe(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	82.350.900,00	12 Dokumen	90.585.990,00	
1.02.1.02.01.016.123.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Bontoa(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	83.258.200,00	12 Dokumen	91.584.020,00	
1.02.1.02.01.016.124.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Lau(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Lau	53.598.500,00	12 Dokumen	58.958.350,00	
1.02.1.02.01.016.125.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Bantimuring(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bantimuring	50.577.000,00	12 Dokumen	55.634.700,00	
1.02.1.02.01.016.126.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Camba(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Camba	35.500.000,00	12 Dokumen	39.050.000,00	
1.02.1.02.01.016.127.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Tanralili(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	37.196.900,00	12 Dokumen	40.916.590,00	
1.02.1.02.01.016.128.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Simbang(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	56.164.000,00	12 Dokumen	61.780.400,00	
1.02.1.02.01.016.129.	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Puskesmas Turikale(DAK Non Fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	47.300.000,00	12 Dokumen	52.030.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.016.130.	Penyediaan Bahan Medis Pakai Habis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DAK Penugasan P2)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.131.	Pengadaan Alat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DAK Penugasan P2)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.132.	Bimtek Penyusunan Rencana Kontijensi Krisis Kesehatan			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.133.	Pengadaan Alat Penunjang Layanan Surveilans dan Imunisasi (DAK Penugasan P2)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.134.	Surveilans Dan Respon Penyelidikan Epidemiologi KLB			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.135.	Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonatik Puskesmas Bontoa (DAK-NF BOK PKM)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.136.	Pengendalian Vektor Puskesmas Mandai (DAK-NF BOK PKM)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.137.	Pengendalian Vektor Puskesmas Bontoa (DAK-NF BOK PKM)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.138.	Pengendalian Vektor Puskesmas Marusu (DAK-NF BOK PKM)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.016.139.	Pengendalian Vektor Puskesmas Camba (DAK-NF BOK PKM)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.017.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-	-		45.472.359.429,00		37.604.488.715,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.1.02.01.017.001.	Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Bagi Kaum Komunitas Awam	Jumlah peserta SPGDT	60 Peserta	Dinas Kesehatan	-	60 Peserta	-	
1.02.1.02.01.017.002.	Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Peserta SPGDT	27 orang	Dinas Kesehatan	-	27 orang	-	
1.02.1.02.01.017.003.	Pendampingan BLUD (Penyusunan Laporan Keuangan)	Jumlah Puskesmas Yang berstatus BLUD	14 Puskesmas	Dinas Kesehatan	-	14 Puskesmas	-	
1.02.1.02.01.017.004.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penerima Bantuan Iuran PBI	Jumlah Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran	93.000 Orang	Dinas Kesehatan	11.349.823.087,00	10.000 Orang	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.005.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Non Asuransi	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan non asuransi	-	Dinas Kesehatan	305.450.000,00	-	335.995.000,00	
1.02.1.02.01.017.006.	Pelayanan Publik operasional PSC 119 dan medis hari-hari tertentu	jumlah Masyarakat yang mendapat pelayanan PSC 119	Jumlah Masyarakat yang dilayani	Dinas Kesehatan	-	Jumlah Masyarakat yang dilayani	-	
1.02.1.02.01.017.008.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Lau	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	24189	Dinas Kesehatan	2.827.900.000,00	24189	3.148.090.000,00	
1.02.1.02.01.017.009.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Maros Baru	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	20136	Dinas Kesehatan	1.701.300.000,00	20136	1.863.180.000,00	
1.02.1.02.01.017.010.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Bantimurung	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	31103	Dinas Kesehatan	3.490.600.000,00	31103	3.588.310.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.017.011.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Simbang	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	19667	Dinas Kesehatan	1.998.250.000,00	19667	2.071.355.000,00	
1.02.1.02.01.017.012.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Mandai	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	26286	Dinas Kesehatan	3.350.850.000,00	26286	3.685.935.000,00	
1.02.1.02.01.017.013.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Mallava	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	13804	Dinas Kesehatan	1.380.914.063,00	13804	1.519.005.469,00	
1.02.1.02.01.017.014.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Tanralili	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	22042	Dinas Kesehatan	2.547.720.000,00	22042	2.396.438.000,00	
1.02.1.02.01.017.015.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Marusu	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	20119 orang	Dinas Kesehatan	1.450.250.000,00	20119 orang	1.566.262.500,00	
1.02.1.02.01.017.016.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Moncongloe	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	12110 orang	Dinas Kesehatan	967.697.079,00	12110 Orang	1.059.186.786,00	
1.02.1.02.01.017.017.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Tompobulu	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	16612	Dinas Kesehatan	1.484.280.000,00	16612	1.632.708.000,00	
1.02.1.02.01.017.018.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Bontoa	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	26501	Dinas Kesehatan	2.377.450.000,00	26501	2.499.695.000,00	
1.02.1.02.01.017.019.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Turikale	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	28530	Dinas Kesehatan	2.074.160.000,00	28530	3.250.099.160,00	
1.02.1.02.01.017.020.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Cenrana	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	14409	Dinas Kesehatan	1.136.640.000,00	14409	1.250.304.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.017.021.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan nasional di Puskesmas Camba	Jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	11985	Dinas Kesehatan	1.390.446.000,00	11985	1.422.405.600,00	
1.02.1.02.01.017.022.	Sosialisasi Advokasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah tenaga yang mengikuti Sosialisasi	28 orang	Dinas Kesehatan	-	50 orang	-	
1.02.1.02.01.017.023.	Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	jumlah pengobat tradisional yang di bina	84 orang	Dinas Kesehatan	-	84 orang	-	
1.02.1.02.01.017.024.	Pembinaan dan Pemantauan Pengobat Tradisional	Jumlah Pengobat Tradisional Yang Dibina	84 Orang	Dinas Kesehatan	-	84 Orang	-	
1.02.1.02.01.017.025.	Workshop Peningkatan mutu Akreditasi Lintas Program Dinas Kesehatan	jumlah tenaga yang paham mutu akreditasi	50 orang	Dinas Kesehatan	-	50 orang	-	
1.02.1.02.01.017.026.	Penilaian Puskesmas Berprestasi	Jumlah Puskesmas yang dinilai	14 puskesmas	Dinas Kesehatan	-	14 Puskesmas	-	
1.02.1.02.01.017.027.	Workshop Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Workshop Akreditasi Puskesmas	32 Orang	Dinas Kesehatan	458.300.000,00	32 Orang	500.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.028.	Pendampingan Pasca survey Akreditasi (DAK NF)	Jumlah Puskesmas Yang didampingi Pasca survey akreditasi	14 Puskesmas	Dinas Kesehatan	279.400.000,00	14 Puskesmas	279.400.000,00	
1.02.1.02.01.017.029.	Survei re-Akreditasi Puskesmas (DAK NF)	Jumlah Puskesmas Yang akan di Survey re-Akreditasi	5 Puskesmas	Dinas Kesehatan	346.884.000,00	5 Puskesmas	346.884.000,00	
1.02.1.02.01.017.030.	Peningkatan Kapasitas Petugas Perkesmas	Jumlah Petugas yang mengikuti Workshop	402 orang	Dinas Kesehatan	-	402 orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.017.031.	Workshop rekrutmen dan seleksi calon pendonor darah bagi bidan puskesmas	Jumlah Peserta Workshop	56 orang	Dinas Kesehatan	-	56 orang	-	
1.02.1.02.01.017.032.	Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran UPT	Jumlah Puskesmas Yang Menyediakan Dukungan Manajemen Perkantoran UPT	14 Puskesmas	Dinas Kesehatan	-	14 Puskesmas	-	
1.02.1.02.01.017.033.	Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang memanfaatkan dan megebangkan Sistem Informasi Kesehatan	14 Puskesmas	Dinas Kesehatan	-	14 Puskesmas	594.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.034.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	7.900.000,00	12 Dokumen	8.690.000,00	
1.02.1.02.01.017.035.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Maros Baru (DAK NF- BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	9.100.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.036.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	6.500.000,00	12 Dokumen	7.100.000,00	
1.02.1.02.01.017.037.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	6.000.000,00	12 Dokumen	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.017.038.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	8.900.000,00	12 Dokumen	9.800.000,00	
1.02.1.02.01.017.039.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Mallawa	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	7.300.000,00	12 Dokumen	8.100.000,00	
1.02.1.02.01.017.040.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Tanralili (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Tanralili	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	8.700.000,00	12 Dokumen	9.500.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.017.041.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	7.300.000,00	12 Dokumen	8.100.000,00	
1.02.1.02.01.017.042.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Moncongloe	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	8.900.000,00	12 Dokumen	9.800.000,00	
1.02.1.02.01.017.043.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Tompobulu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	17.500.000,00	12 Dokumen	18.300.000,00	
1.02.1.02.01.017.044.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	9.200.000,00	12 Dokumen	10.200.000,00	
1.02.1.02.01.017.045.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Turikale (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	17.400.000,00	12 Dokumen	18.100.000,00	
1.02.1.02.01.017.046.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Cenrana (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	10.100.000,00	12 Dokumen	11.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.047.	Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Camba (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional diwilayah kerja Puskesmas Camba	12 Dokumen	Kecamatan Camba	7.800.000,00	12 Dokumen	8.500.000,00	
1.02.1.02.01.017.048.	Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat di Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut diwilayah kerja Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	17.450.000,00	12 Dokumen	17.450.000,00	
1.02.1.02.01.017.049.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Lau	84.814.000,00	12 Dokumen	84.814.000,00	
1.02.1.02.01.017.049.	Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat di Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut diwilayah kerja Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	16.800.000,00	12 Dokumen	16.800.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.017.050.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Maros Baru (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	136.374.000,00	12 Dokumen	136.374.000,00	
1.02.1.02.01.017.051.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	100%	Kecamatan Bantimurung	79.752.000,00	100%	79.752.000,00	
1.02.1.02.01.017.052.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	86.774.000,00	12 Dokumen	86.774.000,00	
1.02.1.02.01.017.053.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	81.674.000,00	12 Dokumen	81.674.000,00	
1.02.1.02.01.017.054.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	144.294.000,00	12 Dokumen	144.294.000,00	
1.02.1.02.01.017.055.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Tanralilli (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tanralilli	80.206.400,00	12 Dokumen	80.206.400,00	
1.02.1.02.01.017.056.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	47.474.000,00	12 Dokumen	47.474.000,00	
1.02.1.02.01.017.057.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	83.774.000,00	12 Dokumen	83.774.000,00	
1.02.1.02.01.017.058.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Tompobulu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	72.884.000,00	12 Dokumen	72.884.000,00	
1.02.1.02.01.017.059.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	140.424.000,00	12 Dokumen	140.424.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.017.060.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Turikale (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	74.914.000,00	12 Dokumen	74.914.000,00	
1.02.1.02.01.017.061.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Cenrana (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	95.834.000,00	12 Dokumen	95.834.000,00	
1.02.1.02.01.017.062.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Camba (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	12 Dokumen	Kecamatan Camba	97.014.000,00	12 Dokumen	97.014.000,00	
1.02.1.02.01.017.063.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Lau	64.207.000,00	12 Dokumen	64.207.000,00	
1.02.1.02.01.017.064.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Maros Baru (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	215.538.000,00	12 Dokumen	215.538.000,00	
1.02.1.02.01.017.065.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	132.513.000,00	12 Dokumen	132.513.000,00	
1.02.1.02.01.017.066.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	164.650.000,00	12 Dokumen	164.650.000,00	
1.02.1.02.01.017.067.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	190.269.000,00	12 Dokumen	190.269.000,00	
1.02.1.02.01.017.068.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	167.590.800,00	12 Dokumen	167.590.800,00	
1.02.1.02.01.017.069.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Tanralili (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	94.103.000,00	12 Dokumen	94.103.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.017.070.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	181.063.000,00	12 Dokumen	181.063.000,00	
1.02.1.02.01.017.071.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	149.163.000,00	12 Dokumen	149.163.000,00	
1.02.1.02.01.017.072.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Tompobulu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	152.593.000,00	12 Dokumen	152.593.000,00	
1.02.1.02.01.017.073.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	252.263.000,00	12 Dokumen	252.263.000,00	
1.02.1.02.01.017.074.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Turikale (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	178.207.000,00	12 Dokumen	178.207.000,00	
1.02.1.02.01.017.075.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Cenrana (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	161.863.000,00	12 Dokumen	161.863.000,00	
1.02.1.02.01.017.076.	Pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas Camba (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Puskesmas Yang Melaksanakan PIS PK	12 Dokumen	Kecamatan Camba	90.966.000,00	12 Dokumen	90.966.000,00	
1.02.1.02.01.017.077.	Dukungan Manajemen BOK Kabupaten (DAK NF - BOK Kab)			Dinas Kesehatan	796.000.000,00		796.000.000,00	
1.02.1.02.01.017.78.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)			-	90.000.000,00		90.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-		67.649.893.900,00		68.526.166.990,00	DINAS KESEHATAN DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.001.	Pelatihan Manajemen Penanganan AFIKSIA dan BBLR (DAU/APBD)	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan	20 Orang	Dinas Kesehatan	-	25 Orang	-	
1.02.1.02.01.018.002.	Pembelajaran Hasil Review Maternal Perinatal (RMP) (DAK NON FISIK KAB)	Jumlah ASN (Kepala Puskesmas, Koordinator Bidan, Bidan Desa) yang mengikuti pertemuan	66 Orang	Dinas Kesehatan	23.700.000,00	66 Orang	26.070.000,00	
1.02.1.02.01.018.003.	Peningkatan Kapasitas Petugas tentang KB Pasca Persalinan (DAU/APBD)	Jumlah Petugas Pengelola KB, pengelola persalinan di puskesmas dan bidan desa yang Mengikuti Sosialisasi	38 Orang	Dinas Kesehatan	-	38 orang	-	
1.02.1.02.01.018.004.	Pengkajian kasus Review Maternal Perinatal (DAU/APBD)	Jumlah ASN (Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator dan Bidan Desa) yang mengikuti pertemuan	24 Orang	Dinas Kesehatan	-	24 Orang	-	
1.02.1.02.01.018.005.	Pelatihan Tim Asuhan Gizi (DAU/APBD)	Jumlah petugas yang tergabung dalam Tim Asuhan Gizi yang terampil dan mampu	45 Orang	Dinas Kesehatan	-	45 Orang	-	
1.02.1.02.01.018.006.	Pengkajian paripurna pasien geriatric (DAK NON FISIK KAB)	Jumlah ASN (petugas gizi) yang mengikuti Pertemuan	34 Orang	Dinas Kesehatan	6.850.000,00	34 Orang	7.535.000,00	
1.02.1.02.01.018.008.	Penguatan intervensi paket gizi pada 1000 HPK (DAK-NF KAB)	Jumlah Orang Yang Mengikuti pertemuan penguatan intervensi paket gizi pada 1000 HPK	35 Orang	Dinas Kesehatan	8.400.000,00	35 Orang	9.240.000,00	
1.02.1.02.01.018.009.	Peningkatan kapasitas dan pengetahuan konseling menyusui dan MP-ASI, konseling PMBA (DAK-NON FISIK KAB)	Jumlah Petugas Gizi yang mengikuti Pelatihan	32 Orang	Dinas Kesehatan	36.000.000,00	32 Orang	39.600.000,00	
1.02.1.02.01.018.010.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	29.215.000,00	12 Dokumen	58.150.000,00	
1.02.1.02.01.018.011.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Maros Baru (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	61.250.000,00	12 Dokumen	122.500.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.012.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	46.650.000,00	12 Dokumen	51.315.000,00	
1.02.1.02.01.018.013.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	41.200.000,00	12 Dokumen	45.320.000,00	
1.02.1.02.01.018.014.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	30.700.000,00	12 Dokumen	33.770.000,00	
1.02.1.02.01.018.015.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Mallawa	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	25.550.000,00	12 Dokumen	28.105.000,00	
1.02.1.02.01.018.016.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Tanralili (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Tanralili	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	52.400.000,00	12 Dokumen	57.640.000,00	
1.02.1.02.01.018.017.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	43.250.000,00	12 Dokumen	47.575.000,00	
1.02.1.02.01.018.018.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Moncongloe	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	18.850.000,00	12 Dokumen	20.735.000,00	
1.02.1.02.01.018.019.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Tompobulu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	49.987.000,00	12 Dokumen	54.985.700,00	
1.02.1.02.01.018.020.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	53.190.000,00	12 Dokumen	58.509.000,00	
1.02.1.02.01.018.021.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Turikale (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	41.890.000,00	12 Dokumen	46.079.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.022.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Cenrana (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	45.100.000,00	12 Dokumen	49.610.000,00	
1.02.1.02.01.018.023.	Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Camba (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Camba	12 Dokumen	Kecamatan Camba	35.350.000,00	12 Dokumen	38.885.000,00	
1.02.1.02.01.018.026.	WORKSHOP KESEHATAN KERJA (DAK NON FISIK KAB)	Jumlah ASN (Kepala Puskesmas, Pengelola Program dan Kader POS UKK) yang Mengikuti workshop Kesehatan Kerja	77 Orang	Dinas Kesehatan	63.120.000,00	77 Orang	69.432.000,00	
1.02.1.02.01.018.027.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	15.085.000,00	12 Dokumen	16.593.000,00	
1.02.1.02.01.018.028.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Maros Baru (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	24.415.000,00	12 Dokumen	26.856.500,00	
1.02.1.02.01.018.029.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	14.750.000,00	12 Dokumen	16.225.000,00	
1.02.1.02.01.018.030.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	13.120.000,00	12 Dokumen	14.432.000,00	
1.02.1.02.01.018.031.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	12.223.000,00	12 Dokumen	13.445.000,00	
1.02.1.02.01.018.032.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Mallawa	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	13.750.000,00	12 Dokumen	15.125.000,00	
1.02.1.02.01.018.033.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Tanralilli (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Tanralilli	12 Dokumen	Kecamatan Tanralilli	7.350.000,00	12 Dokumen	8.085.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.034.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	15.150.000,00	12 Dokumen	16.665.000,00	
1.02.1.02.01.018.035.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Moncongloe	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	12.750.000,00	12 Dokumen	14.025.000,00	
1.02.1.02.01.018.036.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Tompobulu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	15.400.000,00	12 Dokumen	16.940.000,00	
1.02.1.02.01.018.037.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	23.300.000,00	12 Dokumen	25.630.000,00	
1.02.1.02.01.018.038.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Turikale (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	25.950.000,00	12 Dokumen	28.545.000,00	
1.02.1.02.01.018.039.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Cenrana (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	17.460.000,00	12 Dokumen	19.206.000,00	
1.02.1.02.01.018.040.	Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Camba (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Camba	12 Dokumen	Kecamatan Camba	16.700.000,00	12 Dokumen	18.370.000,00	
1.02.1.02.01.018.042.	WORKSHOP KESEHATAN OLAHRAGA (DAK NON FISIK KABUPATEN)	Jumlah ASN (Kepala Puskesmas, Pengelola Program dan kader Kesorga) yang Mengikuti workshop Kesehatan Olahraga	91 Orang	Dinas Kesehatan	51.597.000,00	91 Orang	56.756.700,00	
1.02.1.02.01.018.043.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	34.200.000,00	12 Dokumen	37.620.000,00	
1.02.1.02.01.018.044.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Maros Baru (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	26.900.000,00	12 Dokumen	29.590.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.045.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	31.050.000,00	12 Dokumen	34.155.000,00	
1.02.1.02.01.018.046.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	21.155.000,00	12 Dokumen	23.270.500,00	
1.02.1.02.01.018.047.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	40.930.000,00	12 Dokumen	45.023.000,00	
1.02.1.02.01.018.048.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Mallawa	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	20.675.000,00	12 Dokumen	22.742.500,00	
1.02.1.02.01.018.049.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Tanralilli (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Tanralilli	12 Dokumen	Kecamatan Tanralilli	38.058.000,00	12 Dokumen	41.863.000,00	
1.02.1.02.01.018.050.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	29.700.000,00	12 Dokumen	32.670.000,00	
1.02.1.02.01.018.051.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Moncongloe	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	33.310.000,00	12 Dokumen	36.641.000,00	
1.02.1.02.01.018.052.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Tompobulu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga Di Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	22.000.000,00	12 Dokumen	24.200.000,00	
1.02.1.02.01.018.053.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	24.800.000,00	12 Dokumen	27.280.000,00	
1.02.1.02.01.018.054.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Turikale (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	33.850.000,00	12 Dokumen	37.235.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.055.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Cenrana (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	34.755.000,00	12 Dokumen	38.230.000,00	
1.02.1.02.01.018.056.	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Camba (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Camba	12 Dokumen	Kecamatan Camba	36.550.000,00	12 Dokumen	40.205.000,00	
1.02.1.02.01.018.058.	Peningkatan kapasitas tenaga bagi pengelola PKPR dan UKS (DAK NON FISIK KAB)	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas tenaga bagi pengelola PKPR dan UKS	66 Orang	Dinas Kesehatan	13.562.000,00	66 Orang	14.918.200,00	
1.02.1.02.01.018.059.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	4.750.000,00	12 Dokumen	5.225.000,00	
1.02.1.02.01.018.060.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Maros Baru (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	3.000.000,00	12 Dokumen	3.300.000,00	
1.02.1.02.01.018.061.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	10.700.000,00	12 Dokumen	11.770.000,00	
1.02.1.02.01.018.062.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	1.300.000,00	12 Dokumen	1.430.000,00	
1.02.1.02.01.018.063.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	4.700.000,00	12 Dokumen	5.170.000,00	
1.02.1.02.01.018.064.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	3.800.000,00	12 Dokumen	4.180.000,00	
1.02.1.02.01.018.065.	PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM (DAK NON FISIK KAB)	Jumlah SAB Yang memenuhi syarat kesehatan	220 Sarana	Kabupaten Maros	115.402.500,00	220 Sarana	126.942.750,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.066.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Tanralili (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Tanralili	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	16.000.000,00	12 Dokumen	17.600.000,00	
1.02.1.02.01.018.067.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	7.150.000,00	12 Dokumen	7.865.000,00	
1.02.1.02.01.018.068.	PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) (DAK NON FISIK KAB)	Jumlah dokumen penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	4 Laporan	Kabupaten Maros	135.955.000,00	4 Laporan	149.550.500,00	
1.02.1.02.01.018.069.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Lau	27.000.000,00	12 Dokumen	29.700.000,00	
1.02.1.02.01.018.070.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Maros Baru (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	31.500.000,00	12 Dokumen	34.650.000,00	
1.02.1.02.01.018.071.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	45.675.000,00	12 Dokumen	50.242.500,00	
1.02.1.02.01.018.072.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	25.475.000,00	12 Dokumen	28.022.500,00	
1.02.1.02.01.018.073.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	37.700.000,00	12 Dokumen	41.470.000,00	
1.02.1.02.01.018.074.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	29.977.500,00	12 Dokumen	32.975.250,00	
1.02.1.02.01.018.075.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Tanralili (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	28.075.000,00	12 Dokumen	30.882.500,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.076.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	41.975.000,00	12 Dokumen	46.172.500,00	
1.02.1.02.01.018.077.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	30.775.000,00	12 Dokumen	33.852.500,00	
1.02.1.02.01.018.078.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Tompobulu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Tompo Bulu	35.675.000,00	12 Dokumen	39.242.500,00	
1.02.1.02.01.018.079.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	34.475.000,00	12 Dokumen	37.922.500,00	
1.02.1.02.01.018.080.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Turikale (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	43.975.000,00	12 Dokumen	48.372.500,00	
1.02.1.02.01.018.081.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Cenrana (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	31.875.000,00	12 Dokumen	35.062.500,00	
1.02.1.02.01.018.082.	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Camba (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kecamatan Camba	26.875.000,00	12 Dokumen	29.562.500,00	
1.02.1.02.01.018.083.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN/ MINUMAN (DAK NON FISIK KAB)	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan dan pengawasan Hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman	4 Laporan	Kabupaten Maros	17.925.000,00	4 Laporan	19.717.500,00	
1.02.1.02.01.018.084.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Moncongloe	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	4.700.000,00	12 Dokumen	5.170.000,00	
1.02.1.02.01.018.085.	ORIENTASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN (DAK-NF KAB)	Jumlah ASN Yang mengikuti Orientasi Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes Tk. I	91 Orang	Dinas Kesehatan	46.850.500,00	91 Orang	51.535.550,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.086.	PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT (DAK-NF KAB)	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kabupaten sehat	4 Laporan	Kabupaten Maros	72.050.000,00	4 Laporan	79.255.000,00	
1.02.1.02.01.018.087.	PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (DAK NF KAB)	Jumlah Sarana Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13 Sarana	Kabupaten Maros	9.925.000,00	13 Sarana	10.917.500,00	
1.02.1.02.01.018.088.	MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS WEBSITE (DAK NF KAB)	Jumlah ASN (Petugas Kesling) Yang mengikuti monitoring dan Evaluasi	35 Orang	Dinas Kesehatan	16.000.000,00	35 Orang	17.600.000,00	
1.02.1.02.01.018.089.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Promkes dalam rangka percepatan desa/kel Siaga Aktif (DAK NF KAB.)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pertemuan	35 Orang	Dinas Kesehatan	4.087.000,00	35 Orang	4.495.700,00	
1.02.1.02.01.018.090.	Orientasi Kader Kesehatan dalam Saka Bhakti Husada (SBH) (DAK NF KAB)	Jumlah Orang yang mengikuti Orientasi Kader Kesehatan UKBM Lainnya (SBH)	280 Orang	Dinas Kesehatan	77.859.000,00	280 Orang	85.644.900,00	
1.02.1.02.01.018.091.	Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program dalam Percepatan Desa / Kelurahan Siaga Aktif (DAK NF KAB)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pertemuan	40 Orang	Dinas Kesehatan	7.612.000,00	40 Orang	8.373.200,00	
1.02.1.02.01.018.092.	Penyediaan media informasi kesehatan (DAK NF KAB)	Jumlah Media Yang tersedia	6 Media	Kabupaten Maros	323.000.000,00	6 Media	355.300.000,00	
1.02.1.02.01.018.093.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Toppobulu(DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Toppobulu	12 Dokumen	Kecamatan Toppobulu	4.550.000,00	12 Dokumen	5.005.000,00	
1.02.1.02.01.018.094.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Bontoa(DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	26.425.000,00	12 Dokumen	29.067.500,00	
1.02.1.02.01.018.095.	PEMERIKSAAN CHOLINESTERASE DARAH BAGI PETANI (DAK NF KAB)	Jumlah Petani yang diperiksa Cholinesterase darah	120 Orang	Kabupaten Maros	4.450.000,00	120 Orang	4.895.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.096.	Peningkatan kapasitas petugas lansia (DAK NON FISIK KAB)	Jumlah petugas Lansia puskesmas yang mengikuti Pertemuan	19 Orang	Dinas Kesehatan	4.000.000,00	19 Orang	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.018.097.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	51.400.000,00	12 Dokumen	56.540.000,00	
1.02.1.02.01.018.098.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Maros Baru (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	34.600.000,00	12 Dokumen	38.060.000,00	
1.02.1.02.01.018.099.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	30.000.000,00	12 Dokumen	33.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.100.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	63.640.000,00	12 Dokumen	70.004.000,00	
1.02.1.02.01.018.101.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	22.100.000,00	12 Dokumen	24.310.000,00	
1.02.1.02.01.018.102.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Mallawa	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	44.400.000,00	12 Dokumen	48.840.000,00	
1.02.1.02.01.018.103.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Tanralilli (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Tanralilli	12 Dokumen	Kecamatan Tanralilli	32.000.000,00	12 Dokumen	35.200.000,00	
1.02.1.02.01.018.104.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	51.400.000,00	12 Dokumen	56.540.000,00	
1.02.1.02.01.018.105.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Moncongloe	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	25.000.000,00	12 Dokumen	27.500.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.106.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Tompobulu(DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	42.900.000,00	12 Dokumen	47.190.000,00	
1.02.1.02.01.018.107.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	39.200.000,00	12 Dokumen	43.120.000,00	
1.02.1.02.01.018.108.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Turikale (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	17.800.000,00	12 Dokumen	19.580.000,00	
1.02.1.02.01.018.109.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Cenrana (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	26.700.000,00	12 Dokumen	29.370.000,00	
1.02.1.02.01.018.110.	Upaya kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Camba (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas Camba	12 Dokumen	Kecamatan Camba	30.700.000,00	12 Dokumen	33.770.000,00	
1.02.1.02.01.018.111.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Turikale(DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	3.950.000,00	12 Dokumen	4.345.000,00	
1.02.1.02.01.018.112.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Cenrana(DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	9.543.700,00	12 Dokumen	10.498.070,00	
1.02.1.02.01.018.113.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus Puskesmas Camba (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan STBM	12 Dokumen	Kecamatan Camba	7.500.000,00	12 Dokumen	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.018.114.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus Puskesmas Simbang(BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kegiatan STBM	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	7.500.000,00	12 Dokumen	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.018.115.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus Puskesmas Bantimurung(BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus di wilayah kerja Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	7.500.000,00	12 Dokumen	8.250.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.116.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus Puskesmas Lau(BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus di wilayah kerja Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	7.500.000,00	12 Dokumen	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.018.117.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus Puskesmas Turikale(BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus di wilayah kerja Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	7.500.000,00	12 Dokumen	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.018.118.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus Puskesmas Maros Baru(BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus di wilayah kerja Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	7.500.000,00	12 Dokumen	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.018.119.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus Puskesmas Mandai(BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus di wilayah kerja Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	7.500.000,00	12 Dokumen	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.018.120.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus Puskesmas Tanralilli (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus di wilayah kerja Puskesmas Tanralilli	12 Dokumen	Kecamatan Tanralilli	7.500.000,00	12 Dokumen	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.018.121.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus Puskesmas Tompo Bulu(BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus di wilayah kerja Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	7.500.000,00	12 Dokumen	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.018.122.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus Puskesmas Marusu(BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa Lokus di wilayah kerja Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	7.500.000,00	12 Dokumen	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.018.123.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Camba(DAK NF - BOK PKM)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.127.	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	Jumlah Dokumen Laporan Jampersal	4 Laporan	Dinas Kesehatan	662.999.000,00	4 Laporan	729.298.900,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.129.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	14.400.000,00	12 Dokumen	15.840.000,00	
1.02.1.02.01.018.130.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Maros Baru (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	16.800.000,00	12 Dokumen	18.480.000,00	
1.02.1.02.01.018.131.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	19.200.000,00	12 Dokumen	21.120.000,00	
1.02.1.02.01.018.132.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	7.200.000,00	12 Dokumen	7.920.000,00	
1.02.1.02.01.018.133.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	14.400.000,00	12 Dokumen	15.840.000,00	
1.02.1.02.01.018.134.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Mallawa	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	1.100.000,00	12 Dokumen	1.210.000,00	
1.02.1.02.01.018.135.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Tanralili (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Tanralili	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	26.000.000,00	12 Dokumen	28.600.000,00	
1.02.1.02.01.018.136.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	10.800.000,00	12 Dokumen	11.880.000,00	
1.02.1.02.01.018.137.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Moncongloe	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	6.000.000,00	12 Dokumen	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.018.138.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Tompobulu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	19.200.000,00	12 Dokumen	21.120.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.139.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	23.800.000,00	12 Dokumen	26.180.000,00	
1.02.1.02.01.018.140.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Turikale (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	21.000.000,00	12 Dokumen	23.100.000,00	
1.02.1.02.01.018.141.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Cenrana (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	16.800.000,00	12 Dokumen	18.480.000,00	
1.02.1.02.01.018.142.	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi di Puskesmas Camba (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Neonatus Dan Bayi di Puskesmas Camba	12 Dokumen	Kecamatan Camba	24.400.000,00	12 Dokumen	26.840.000,00	
1.02.1.02.01.018.143.	Monitoring dan evaluasi program gizi (DAU/APBD)	Jumlah Petugas Gizi Yang Dikunjungi	14 Orang	Dinas Kesehatan	-	14 Orang	-	
1.02.1.02.01.018.145.	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita (DAK NON FISIK KAB)	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	42 Orang	Dinas Kesehatan	82.850.000,00	42 Orang	91.135.000,00	
1.02.1.02.01.018.146.	Peningkatan kapasitas petugas surveilans gizi puskesmas (DAK NON FISIK KAB)	Jumlah petugas gizi yang mengikuti Pertemuan	35 Orang	Dinas Kesehatan	7.700.000,00	35 Orang	8.470.000,00	
1.02.1.02.01.018.147.	Peningkatan kapasitas tenaga dalam pelaksanaan SDIDTK (DAK NON FISIK KAB)	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	35 Orang	Dinas Kesehatan	15.750.000,00	35 Orang	17.325.000,00	
1.02.1.02.01.018.148.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Lau (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	42.400.000,00	12 Dokumen	46.640.000,00	
1.02.1.02.01.018.149.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Maros Baru (BOK PKM / DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	21.000.000,00	12 Dokumen	23.100.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.150.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Bantimurung (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	60.900.000,00	12 Dokumen	66.990.000,00	
1.02.1.02.01.018.151.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Simbang (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	21.300.000,00	12 Dokumen	23.430.000,00	
1.02.1.02.01.018.152.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Mandai (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	15.800.000,00	12 Dokumen	17.380.000,00	
1.02.1.02.01.018.153.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Mallawa (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Mallawa	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	57.600.000,00	12 Dokumen	63.360.000,00	
1.02.1.02.01.018.154.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Tanralili (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Tanralili	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	38.200.000,00	12 Dokumen	42.020.000,00	
1.02.1.02.01.018.155.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Marusu (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	32.000.000,00	12 Dokumen	35.200.000,00	
1.02.1.02.01.018.156.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Moncongloe (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Moncongloe	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	33.200.000,00	12 Dokumen	36.520.000,00	
1.02.1.02.01.018.157.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Tompobulu (BOK PKM / DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	71.600.000,00	12 Dokumen	78.760.000,00	
1.02.1.02.01.018.158.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Bontoa (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	45.600.000,00	12 Dokumen	50.160.000,00	
1.02.1.02.01.018.159.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Turikale (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	47.200.000,00	12 Dokumen	51.920.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.160.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Cenrana (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	32.010.000,00	12 Dokumen	35.211.000,00	
1.02.1.02.01.018.161.	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah di Puskesmas Camba (BOK PKM/ DAK-NF)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Camba	12 Dokumen	Kecamatan Camba	50.950.000,00	12 Dokumen	56.045.000,00	
1.02.1.02.01.018.162.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Lau (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	33.400.000,00	12 Dokumen	36.740.000,00	
1.02.1.02.01.018.163.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Maros Baru (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	41.700.000,00	12 Dokumen	45.870.000,00	
1.02.1.02.01.018.164.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Bantimurung (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	37.300.000,00	12 Dokumen	41.030.000,00	
1.02.1.02.01.018.165.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Simbang (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	55.700.000,00	12 Dokumen	61.270.000,00	
1.02.1.02.01.018.166.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Mandai (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	30.200.000,00	12 Dokumen	33.220.000,00	
1.02.1.02.01.018.167.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas di Mallawa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Mallawa	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	17.000.000,00	12 Dokumen	18.700.000,00	
1.02.1.02.01.018.168.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Tanralili (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Tanralili	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	37.000.000,00	12 Dokumen	40.700.000,00	
1.02.1.02.01.018.169.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Marusu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	50.490.000,00	12 Dokumen	55.539.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.170.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Moncongloe (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Moncongloe	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	29.600.000,00	12 Dokumen	32.560.000,00	
1.02.1.02.01.018.171.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Tompobulu (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	37.600.000,00	12 Dokumen	41.360.000,00	
1.02.1.02.01.018.172.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Bontoa (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	24.025.000,00	12 Dokumen	26.427.500,00	
1.02.1.02.01.018.173.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Turikale (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	21.600.000,00	12 Dokumen	51.920.000,00	
1.02.1.02.01.018.174.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Cenrana (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	32.500.000,00	12 Dokumen	35.750.000,00	
1.02.1.02.01.018.175.	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas Camba (DAK NF - BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Camba	12 Dokumen	Kecamatan Camba	28.800.000,00	12 Dokumen	31.680.000,00	
1.02.1.02.01.018.176.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontoa (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	90.361.250,00	12 Dokumen	99.397.375,00	
1.02.1.02.01.018.177.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Mandai (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	56.857.000,00	12 Dokumen	62.542.700,00	
1.02.1.02.01.018.178.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Tompo Bulu (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	79.665.000,00	12 Dokumen	87.631.500,00	
1.02.1.02.01.018.179.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Lau (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	70.922.500,00	12 Dokumen	78.014.750,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.180.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Tanralilli (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Tanralilli	12 Dokumen	Kecamatan Tanralilli	75.029.250,00	12 Dokumen	82.532.175,00	
1.02.1.02.01.018.181.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Moncongloe (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Moncongloe	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	60.065.300,00	12 Dokumen	66.071.830,00	
1.02.1.02.01.018.182.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Simbang (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	65.372.250,00	12 Dokumen	71.909.475,00	
1.02.1.02.01.018.183.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Cenrana (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	74.976.300,00	12 Dokumen	82.473.930,00	
1.02.1.02.01.018.184.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Turikale (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	81.166.000,00	12 Dokumen	89.282.600,00	
1.02.1.02.01.018.185.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Marusu (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	60.747.750,00	12 Dokumen	66.822.525,00	
1.02.1.02.01.018.186.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Mallawa (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Mallawa	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	58.263.250,00	12 Dokumen	64.089.575,00	
1.02.1.02.01.018.187.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Maros Baru(DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	67.716.000,00	12 Dokumen	74.487.600,00	
1.02.1.02.01.018.188.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Camba (DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Camba	12 Dokumen	Kecamatan Camba	75.081.000,00	12 Dokumen	82.589.100,00	
1.02.1.02.01.018.189.	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bantimurung(DAK Non Fisik-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya Promosi Kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	69.800.750,00	12 Dokumen	76.780.825,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.190.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Mandai (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	81.300.000,00	12 Dokumen	89.430.000,00	
1.02.1.02.01.018.191.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Moncongloe (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Moncongloe	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	48.207.000,00	12 Dokumen	53.027.000,00	
1.02.1.02.01.018.192.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Maros Baru (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	83.450.000,00	12 Dokumen	91.795.000,00	
1.02.1.02.01.018.193.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Lau (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	53.400.000,00	12 Dokumen	58.740.000,00	
1.02.1.02.01.018.194.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Marusu (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	91.567.500,00	12 Dokumen	100.724.250,00	
1.02.1.02.01.018.195.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Bantimurung (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	84.900.000,00	12 Dokumen	93.390.000,00	
1.02.1.02.01.018.196.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Simbang (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	48.850.000,00	12 Dokumen	53.735.000,00	
1.02.1.02.01.018.197.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Tanralili (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanralili	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	56.500.000,00	12 Dokumen	62.150.000,00	
1.02.1.02.01.018.198.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Tompobulu (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	72.100.000,00	12 Dokumen	79.310.000,00	
1.02.1.02.01.018.199.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Turikale (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	74.500.000,00	12 Dokumen	81.950.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.200.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Bontoa (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	83.000.000,00	12 Dokumen	91.300.000,00	
1.02.1.02.01.018.201.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Cenrana (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	60.386.300,00	12 Dokumen	66.424.930,00	
1.02.1.02.01.018.202.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Camba (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Camba	12 Dokumen	Kecamatan Camba	65.900.000,00	12 Dokumen	72.490.000,00	
1.02.1.02.01.018.203.	Upaya Kesehatan Ibu Puskesmas Mallawa (DAK Non fisik-BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Mallawa	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	60.216.300,00	12 Dokumen	67.337.930,00	
1.02.1.02.01.018.204.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Mandai (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wilayah Kerja Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	4.750.000,00	12 Dokumen	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.205.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Moncongloe (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wilayah Kerja Puskesmas Mandai	12 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	5.725.000,00	12 Dokumen	6.300.000,00	
1.02.1.02.01.018.206.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Maros Baru(DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wilayah Kerja Puskesmas Maros Baru	12 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	25.450.000,00	12 Dokumen	27.800.000,00	
1.02.1.02.01.018.207.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Lau (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wilayah Kerja Puskesmas Lau	12 Dokumen	Kecamatan Lau	4.600.000,00	12 Dokumen	5.100.000,00	
1.02.1.02.01.018.208.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Marusu (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wilayah Kerja Puskesmas Marusu	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	20.150.000,00	12 Dokumen	22.200.000,00	
1.02.1.02.01.018.209.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Bantimurung (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wilayah Kerja Puskesmas Bantimurung	12 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	23.600.000,00	12 Dokumen	26.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.01.018.210.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Simbang (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wlayah Kerja Puskesmas Simbang	12 Dokumen	Kecamatan Simbang	20.910.000,00	12 Dokumen	23.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.211.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Tanralili (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wlayah Kerja Puskesmas Tanralili	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	11.595.000,00	12 Dokumen	13.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.212.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Tompobulu (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wlayah Kerja Puskesmas Tompobulu	12 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	12.300.000,00	12 Dokumen	15.500.000,00	
1.02.1.02.01.018.213.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Turikale (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wlayah Kerja Puskesmas Turikale	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	10.800.000,00	12 Dokumen	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.214.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Bontoa (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wlayah Kerja Puskesmas Bontoa	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	19.700.000,00	12 Dokumen	22.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.215.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Cenrana (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wlayah Kerja Puskesmas Cenrana	12 Dokumen	Kecamatan Cenrana	39.000.000,00	12 Dokumen	42.090.000,00	
1.02.1.02.01.018.216.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Camba (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wlayah Kerja Puskesmas Camba	12 Dokumen	Kecamatan Camba	17.300.000,00	12 Dokumen	18.400.000,00	
1.02.1.02.01.018.217.	Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Mallawa (DAK NF-BOK PKM)	Jumlah Dokumen Laporan Upaya kesehatan Reproduksi di Wlayah Kerja Puskesmas Mallawa	12 Dokumen	Kecamatan Mallawa	19.940.000,00	12 Dokumen	21.900.000,00	
1.02.1.02.01.018.218.	Jambore Kader Posyandu Tingkat Kabupaten			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.219.	Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan (DAK)			-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

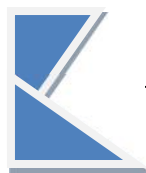
1.02.1.02.01.018.220.	Pembinaan Dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat-tempat Umum (DAK NF - BOK Kab)				-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.221.	Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Penyelenggaraan Klinik Sanitasi (DAK NF - BOK Kab)				-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.018.222.	Monitor, Evaluasi dan Supervisi Program Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Kerja (DAK NF - BOK Kab)				-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
1.02.1.02.02.019.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.	-	-			67.000.000.000,00		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG
1.02.1.02.02.019.001.	Pemenuhan Prasarana Alat Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	Jumlah alat kesehatan pada pelayanan kesehatan Rujukan (DAK)	7 UNIT	Kabupaten Maros		5.060.000.000,00	10 UNIT	-	
1.02.1.02.02.019.002.	Pemenuhan Sarana pada pelayanan kesehatan Rujukan (DAK)	Jumlah Sarana pelayanan kesehatan Rujukan yang akan dibangun	2 Paket	RSUD Salewangang		5.900.000.000,00	4 Paket	-	
1.02.1.02.02.019.003.	Pengembangan Kamar Operasi dan ICU RSUD Salewangang	Jumlah kamar operasi dan icu yang di kembangkan	1 Paket	RSUD Salewangang		6.000.000.000,00	1 Paket	-	
1.02.1.02.02.019.004.	Pengadaan Mobeleur RSUD	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	16 Paket	RSUD Salewangang		230.000.000,00	20 Paket	-	
1.02.1.02.02.019.005.	Desain Perencanaan Tahun 2020	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	RSUD Salewangang		200.000.000,00	1 Dokumen	-	
1.02.1.02.02.019.006.	Konsultansi Pengawasan	Jumlah Dokumen Pengawasan	1 Dokumen	RSUD Salewangang		150.000.000,00	1 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.02.019.007.	Pengadaan Lift Ruang	Jumlah Lift Ruang yang diadakan	1 Paket	RSUD Salewangang	3.250.000.000,00	1 Paket	-	
1.02.1.02.02.019.008.	Pembangunan gedung RSUD	Jumlah gedung yang akan di bangun	7 Paket	RSUD Salewangang	5.800.000.000,00	10 Paket	-	
1.02.1.02.02.019.009.	Promosi Layanan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Kegiatan Promosi layanan kesehatan Rumah Sakit	30 Kegiatan	Kabupaten Maros	-	30 Kegiatan	-	
1.02.1.02.02.019.010.	Pengadaan alat kesehatan Umum	Jumlah alat kesehatan umum yang diadakan	75 Paket	RSUD Salewangang	-	85 Paket	-	
1.02.1.02.02.019.011.	Konsultan Dokumen AMDAL Pengembangan	Jumlah Dokumen AMDAL Pengembangan	1 Dokumen	RSUD Salewangang	400.000.000,00	1 Dokumen	-	
1.02.1.02.02.019.012.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit	Jumlah Jenis kegiatan Pelayanan kesehatan Blud RSUD	25 layanan	RSUD Salewangang	36.000.000.000,00	25 Layanan	-	
1.02.1.02.02.019.013.	Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Jumlah Jenis pelayanan pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	1 Kegiatan	RSUD Salewangang	-	1 kegiatan	-	
1.02.1.02.02.019.014.	Pengadaan alat kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan (DAU)	Jumlah alat kesehatan penunjang	16 Paket	RSUD Salewangang	1.496.000.000,00	21 Paket	-	
1.02.1.02.02.019.015.	Renovasi gedung RSUD	Jumlah gedung RSUD dalam kondisi Baik	10 Paket	RSUD Salewangang	-	12 Paket	-	
1.02.1.02.02.019.016.	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Layanan RSUD	Jumlah Sarana prasarana pendukung layanan RSUD yang ditingkatkan	11 Paket	RSUD Salewangang	2.514.000.000,00	20 Paket	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.02.1.02.02.019.017.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis alat Tulis kantor	98 Jenis	RSUD Salewangang	-	98 Jenis	-	
1.02.1.02.02.019.018.	Penyediaan Bahan cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Bahan cetak dan penggandaan	42 Jenis	RSUD Salewangang	-	42 Jenis	-	
1.02.1.02.02.019.020.	Pengadaan alat tulis kantor dan cetakan rekam medis	Jumlah Perlengkapan rekam medis yang diadakan	2 Kegiatan	RSUD Salewangang	-	2 Kegiatan	-	
1.02.1.02.02.019.021.	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Medis BLUD RSUD	Jumlah Tenaga Kesehatan RSUD	61 orang	RSUD Salewangang	-	65 orang	-	
1.02.1.02.02.019.023.	Honorarium Tim Penyusun RKA/DPA	Jumlah Dokumen RKA/DPA	4 Dokumen	Kabupaten Maros	-	4 Dokumen	-	
1.02.1.02.02.019.024.	Honorarium Tim Penyusun RENJA	Jumlah Dokumen RENJA	1 Dokumen	RSUD Salewangang	-	1 Dokumen	-	
1.02.1.02.02.019.026.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Medis	Jumlah pelaksanaan kompetensi tenaga medis	6	kabupaten Maros	-	8	-	
1.02.1.02.02.019.027.	Pelatihan kompetensi Perawat	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Tenaga Perawat	22 Jenis	RSUD Salewangang	-	22 Jenis	-	
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				259.255.812.805,00		107.440.250.000,00	
1.03.1.03.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		1.300.545.500,00		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.03.1.03.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Layanan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	712.468.000,00	12 Layanan	-	
1.03.1.03.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	7 Layanan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	520.761.500,00	7 Layanan	-	
1.03.1.03.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Dan Administrasi Keuangan OPD	2 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	57.525.000,00	2 Dokumen	-	
1.03.1.03.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	9 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.826.000,00	9 Dokumen	-	
1.03.1.03.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Laporan Pengendalian Kegiatan OPD	42 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.766.000,00	42 Laporan	-	
1.03.1.03.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Nilai Hasil Survey Internal	1 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.199.000,00	1 Laporan	-	
1.03.1.03.01.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		892.800.000,00		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.1.03.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	6 Jenis	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	620.600.000,00	6 Jenis	-	
1.03.1.03.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.000.000,00	1 Unit	-	
1.03.1.03.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	1 Jenis	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.000.000,00	1 Jenis	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.03.1.03.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	3 Jenis	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19.600.000,00	3 Jenis	-	
1.03.1.03.01.002.008.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Alat Berat Dan Laboratorium Dalam Kondisi Yang Baik	19 Unit	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	222.600.000,00	19 Unit	-	
1.03.1.03.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	116					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.1.03.01.015.	Program Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Ketaatan Terhadap RTRW	283		406.500.000,00		406.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.1.03.01.015.001.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Revisi RTRW Kab. Maros	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	1 Dokumen	-	
1.03.1.03.01.015.002.	Revisi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Revisi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	1 Dokumen	-	
1.03.1.03.01.015.003.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Jumlah Jenis Layanan Penyelenggaraan Tata Ruang	2 Jenis	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	2 Jenis	-	
1.03.1.03.01.015.004.	Penataan Kawasan Khusus	Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan Perkantoran Bupati Maros dan Sekitarnya	1 Dokumen	Kec. Turikale	-	1 Dokumen	-	
1.03.1.03.01.015.005.	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Jenis Layanan Sosialisasi	1 Jenis	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	1 Jenis	-	
1.03.1.03.01.015.006.	Penyusunan Perancangan Kawasan	Jumlah Dokumen DED Kawasan Kuliner Kota Maros	1 Dokumen	Kec. Turikale	-	1 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.03.1.03.01.015.007.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	3 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	3 Dokumen	-	
1.03.1.03.01.015.008.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Papan Informasi Tata Ruang	14 Unit	14 Kecamatan	-	14 Unit	-	
1.03.1.03.01.015.009.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)			-	406.500.000,00		406.500.000,00	
1.03.1.03.01.016.	Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	69.45%		83.595.876.000,00		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.1.03.01.016.001.	Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Fisik Reguler)	Panjang Jalan Yang Dipelihara	-	Kabupaten Maros	24.550.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.016.002.	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (DAK Fisik Reguler)	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan	-	Kabupaten Maros	404.836.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.016.003.	Pembangunan Jalan (DAU)	Panjang Jalan Yang Terbangun	19,86 Km	Kabupaten Maros	31.172.800.000,00	19,86 Km	-	
1.03.1.03.01.016.004.	Pembangunan Jembatan (DAU)	Jumlah Jembatan Yang Terbangun	14 Unit	Kabupaten Maros	19.350.000.000,00	14 Unit	-	
1.03.1.03.01.016.005.	Pengadaan Alat Berat (DAU)	Jumlah Alat Berat	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	3 Unit	-	
1.03.1.03.01.016.006.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan	Jumlah Jenis Sarana Dan Prasana Penerangan Jalan	50 Jenis	Kabupaten Maros	1.118.240.000,00	50 Jenis	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.03.1.03.01.016.007.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Yang Ditingkatkan	8 Jenis	Kabupaten Maros	7.000.000.000,00	8 Jenis	-	
1.03.1.03.01.017.	Program Pengembangan Kinerja Layanan Air Minum, Sanitasi, Dan Penataan Lingkungan	-	-		118.137.931.305,00		105.433.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.1.03.01.017.001.	Penataan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Yang Dibangun	Meter	Kabupaten Maros	1.654.334.305,00	Meter	-	
1.03.1.03.01.017.001.	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (DAK Fisik Reguler)	Jumlah Prasarana Sanitasi	-	Kabupaten Maros	2.382.741.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.017.001.	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (DAK Fisik Reguler)	Jumlah Masyarakat Yang Mengakses Air Minum	Jiwa	Kabupaten Maros	-	Jiwa	-	
1.03.1.03.01.017.002.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Fisik Penugasan)	Jumlah Prasarana Sanitasi	Unit	Kabupaten Maros	2.452.178.000,00	Unit	-	
1.03.1.03.01.017.002.	Perluasan SPAM Perpipaian melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Fisik Reguler)	Jumlah Masyarakat Yang Mengakses Air Minum	Jiwa	Kabupaten Maros	-	Jiwa	-	
1.03.1.03.01.017.003.	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (DAK Fisik Penugasan)	Jumlah Masyarakat Yang Mengakses Air Minum	Jiwa	Kabupaten Maros	3.148.928.000,00	Jiwa	-	
1.03.1.03.01.017.003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (DAK Fisik Penugasan)	Jumlah Prasarana Sanitasi	Unit	Kabupaten Maros	1.000.000.000,00	Unit	-	
1.03.1.03.01.017.004.	Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong Yang Dibangun	-	Kabupaten Maros	2.066.000.000,00	-	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.03.1.03.01.017.004.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAU)	Jumlah Masyarakat Yang Mengakses Air Minum	Jiwa	Kabupaten Maros	-	Jiwa	-	
1.03.1.03.01.017.005.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAU)	Jumlah Prasarana Sanitasi	Unit	Kabupaten Maros	-	Unit	-	
1.03.1.03.01.017.011.	Penyediaan Bantuan MCK (Hibah Instalasi Air Limbah)			-	5.433.750.000,00		5.433.750.000,00	
1.03.1.03.01.017.012.	Pembangunan Drainase Lingkungan			Kabupaten Maros	100.000.000.000,00		100.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.018.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik	70.53%		22.283.697.000,00		1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.1.03.01.018.001.	Pembangunan dan Peningkatan Bangunan Prasarana Pengendali Banjir	Jumlah Sungai/Bantaran/Tanggul Sungai Yang Dinormalisasi/Rehabilitasi/Dipelihara	Lokasi	Kabupaten Maros	5.285.000.000,00	Lokasi	-	
1.03.1.03.01.018.001.	Pembangunan Embung/Penampungan Air/Sumur Dangkal	Jumlah Embung/Penampungan Air/Sumur Dangkal Yang Terbangun	Unit	Kabupaten Maros	-	Unit	-	
1.03.1.03.01.018.001.	Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK Fisik Penugasan)	Panjang Jaringan Irigasi Yang Ditingkatkan	Meter	Kabupaten Maros	5.000.000.000,00	Meter	-	
1.03.1.03.01.018.002.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK Fisik Penugasan)	Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi	Meter	Kabupaten Maros	3.050.697.000,00	Meter	-	
1.03.1.03.01.018.003.	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAU)	Panjang Jaringan Irigasi Yang Ditingkatkan/Terbangun	Meter	Kabupaten Maros	7.348.000.000,00	Meter	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.03.1.03.01.018.004.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Yang Telah Dibangun (DAU)	Luas Daerah Irigasi Yang Dioptimalisasi	3.505 Ha	Kabupaten Maros	-	3.505 Ha	-	
1.03.1.03.01.018.007.	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Antar Pulau			Kecamatan Bontoa	1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.019.	Program Peningkatan Kapasitas Dan Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	Kontribusi Sektor Konstruksi	-		-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.1.03.01.019.001.	Penyusunan Database Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang terbangun	1 Sistem	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	1 Sistem	-	
1.03.1.03.01.019.002.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	12 Dokumen	-	
1.03.1.03.01.019.003.	Penyelenggaraan Bina Jasa Konstruksi	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan Jasa Konstruksi	150 Orang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	150 Orang	-	
1.03.1.03.01.019.004.	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	Jumlah Pelanggaran Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	0 Kasus	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	0 Kasus	-	
1.03.1.03.01.019.005.	Penyusunan Standar Harga Konstruksi Daerah	Jumlah Dokumen Standar Harga Konstruksi Daerah	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	1 Dokumen	-	
1.03.1.03.01.019.006.	Updating dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen Updating Dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	1 Dokumen	-	
1.03.1.03.01.020.	Program Penyelenggaraan Bangunan Dan Gedung	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan bangunan	0.04		32.638.463.000,00		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.03.1.03.01.020.001.	Pembangunan Gedung	Jumlah Bangunan	28 Unit	Kabupaten Maros	32.638.463.000,00	28 Unit	-	
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				2.340.000.000,00		2.340.000.000,00	
1.04.1.04.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		547.200.000,00		547.200.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
1.04.1.04.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi umum Perkantoran	12 Layanan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	347.450.000,00	12 layanan	347.450.000,00	
1.04.1.04.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung administrasi umum Perkantoran	9 Layanan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	166.940.000,00	9 Layanan	166.940.000,00	
1.04.1.04.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	12 Dokumen	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.450.000,00	12 Dokumen	15.450.000,00	
1.04.1.04.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan OPD	10 Dokumen	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.000.000,00	10 Dokumen	5.000.000,00	
1.04.1.04.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan OPD	42 Dokumen	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.860.000,00	42 Dokumen	6.860.000,00	
1.04.1.04.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Laporan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	1 Dokumen	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.500.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.04.1.04.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	100 %		294.800.000,00		294.800.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
1.04.1.04.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	2 Jenis	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	150.000.000,00	2 Jenis	150.000.000,00	
1.04.1.04.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	4 Jenis	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	88.750.000,00	4 Jenis	88.750.000,00	
1.04.1.04.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias	1 Unit	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	
1.04.1.04.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor berada dalam kondisi baik	1 Unit	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Peretanahan	35.000.000,00	1 Unit	35.000.000,00	
1.04.1.04.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor berada dalam Kondisi Baik	4 Jenis	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	11.050.000,00	4 Jenis	11.050.000,00	
1.04.1.04.01.015.	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang sehat dan aman sesuai SPM	0,96 %		901.000.000,00		901.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
1.04.1.04.01.015.001.	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Jumlah Dokumen RP3KP	1 Dokumen	Kecamatan Mallawa, Camba, Cenrana, Simbang, Bantimuring, Mandai, Tanralili tompobulu dan Moncongloe	101.000.000,00	1 Dokumen	101.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.04.1.04.01.015.002.	Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Infrastruktur Sesuai Dengan Fungsinya	16 Lokasi	Kel, Taroda, Adatongeng, Desa Lekopacing	400.000.000,00	16 Lokasi	400.000.000,00	
1.04.1.04.01.015.003.	Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Jumlah Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh	1 Lokasi	Lingk, Pangkajene Ke, Pallantikang Kec. Maros Baru	400.000.000,00	1 Lokasi	400.000.000,00	
1.04.1.04.01.016.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kontribusi Sektor perumahan terhadap PDRB	6,30 %		597.000.000,00		597.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
1.04.1.04.01.016.001.	Penyediaan dan Rhabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Jumlah Rumah Rehabilitasi akibat Bencana	1 Dokumen	Kec. Bontoa, Kec. Bantimurung, Kec. Lau, Kec. Simbang dan Kec. Marusu	30.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	
1.04.1.04.01.016.002.	Profil Perumahan	Buku Profil Perumahan	1 Dokumen	Kabupaten Maros	89.000.000,00	1 Dokumen	89.000.000,00	
1.04.1.04.01.016.003.	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah secara Swadaya dikawasan Permukiman Kumuh dengan memperbaiki rumah tidak Layak Huni	Jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang	0,1 %	Kabupaten Maros	78.000.000,00	0,1 %	78.000.000,00	
1.04.1.04.01.016.005.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah	1 Dokumen	Kabupaten Maros	82.000.000,00	1 Dokumen	82.000.000,00	
1.04.1.04.01.016.006.	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Kawasan Permukiman kumuh dengan Memperbaiki Rumah tidak Layak Huni (DAK Fisik Reguler)			-	-		-	
1.04.1.04.01.016.007.	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan	Jumlah pengembang yang menyerahkan asset PSU ke Pemda	1,00	Kabupaten Maros	318.000.000,00	1,00	318.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.10.	PERTANAHAN					360.000.000,00		360.000.000,00	
1.10.1.04.01.015.	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	24,15 %			360.000.000,00		360.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
1.10.1.04.01.015.001.	Survey, Penerbitan Rekomendasi Surat Poenguasaan Fisik Bidang Tanah	Jumlah Laporan Hasil Survey Rekomendasi Surat Penguasaan Tanah	11 Laporan	Kec. Turikale, Maros Baru, Lau, Bontoa, Simbang, Cenrana, Bantimurung, Camba, Mallawa, Mandai, Tanralili, Tompobutu, Moncongloe, dan Marusu		172.000.000,00	11 Laporan	172.000.000,00	
1.10.1.04.01.015.002.	Fasilitasi Pendampingan Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional di kabupaten Maros	Jumlah Laporan / Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan PSN di Kabupaten Maros	12 Kali	Kabupaten Maros		84.400.000,00	12 Kali	84.400.000,00	
1.10.1.04.01.015.003.	Fasilitasi Penyelesaian konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Konfli-Konflik Pertanahan	11 Laporan	Kab, Maros		71.800.000,00	11 Laporan	71.800.000,00	
1.10.1.04.01.015.004.	Soisialisasi Tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah Pesoreta yang Mengikuti Kegiatan Penyelesaian Konfli-Konflik Pertanahan	170 Orang	Kecamatan Turikale		31.800.000,00	170)rang	31.800.000,00	
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.336.530.000,00		2.400.000.000,00	
1.05.1.05.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi			618.280.000,00		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.05.1.05.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Layanan	Sat. Pol PP dan Damkar	91.257.150,00	12 Layanan	-	
1.05.1.05.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	12 Layanan	Sat. Pol PP dan Damkar	461.900.050,00	12 Layanan	-	
1.05.1.05.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	12 Dokumen	Sat. Pol PP dan Damkar	53.310.000,00	12 Dokumen	-	
1.05.1.05.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	4 Dokumen	Sat. Pol PP dan Damkar	7.312.800,00	4 Dokumen	-	
1.05.1.05.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Kegiatan OPD	6 Jenis	Sat. Pol PP dan Damkar	2.350.000,00	6 Jenis	-	
1.05.1.05.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Cakupan Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	3 Kali	Sat. Pol PP dan Damkar	2.150.000,00	3 Kali	-	
1.05.1.05.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		92.400.000,00		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
1.05.1.05.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Sat. Pol PP dan Damkar	75.100.000,00	5 Jenis	-	
1.05.1.05.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	1 Unit	Sat. Pol PP dan Damkar	10.000.000,00	1 Unit	-	
1.05.1.05.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah (Jenis) Cakupan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	2 Jenis	Sat. Pol PP dan Damkar	7.300.000,00	2 Jenis	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.05.1.05.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-		130.000.000,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
1.05.1.05.01.003.001.	Kursus/Pelatihan Singkat Aparatur	Jumlah Peserta Kursus/Pelatihan/Workshop/Bimtek	12 Orang	Sat. Pol PP dan Damkar	100.000.000,00	12 Orang	-	
1.05.1.05.01.003.006.	Diklat Teknis/Fungsional	Jumlah Peserta Diklat Teknis/Fungsional	10 Orang	Sat. Pol PP dan Damkar	30.000.000,00	10 Orang	-	
1.05.1.05.01.015.	Program Penegakan Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Daerah	Persentase Penegakan Perda	100 Persen		160.880.000,00		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
1.05.1.05.01.015.001.	Pelaksanaan operasi Yustisi dan Inspeksi Mendadak	Jumlah Pelaksanaan Operasi Yustisi	4 kali	kabupaten maros	115.000.000,00	4 kali	-	
1.05.1.05.01.015.002.	Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran Perda	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang mendapatkan proses penyelidikan dan penyidikan	20 Kasus	Kabupaten Maros	13.000.000,00	20 Kasus	-	
1.05.1.05.01.015.003.	Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Perda Rokok dan Cukai Ilegal	Jumlah Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Perda Rokok dan Cukai Ilegal	100%	Kabupaten Maros	13.550.000,00	100%	-	
1.05.1.05.01.015.004.	Monitoring terhadap kasus pelanggaran Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda	5 Kasus	Kabupaten Maros	13.600.000,00	5 Kasus	-	
1.05.1.05.01.015.005.	Penindakan dan pembinaan terhadap kasus pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Mendapatkan Penindakan dan Pembinaan	20 Kasus	Kabupaten Maros	5.730.000,00	20 Kasus	-	
1.05.1.05.01.016.	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Cakupan Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman, Ketertiban Umum yang Memenuhi Target	100 Persen		2.339.500.000,00		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

								DAERAH
1.05.1.05.01.016.001.	Kesiapsiagaan Sat.Linmas Dalam Rangka PILKADA	Jumlah Petugas Sat.Linmas yang Melakukan Pengamanan Pilkada	-	Kabupaten Maros	13.800.000,00	-	-	
1.05.1.05.01.016.002.	Pembentukan Sat. Linmas dan ketertiban lingkungan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Keamanan Lingkungan	360 Kali	12 Desa/Kelurahan	8.400.000,00	360 Kali	-	
1.05.1.05.01.016.003.	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Hari Besar Keagamaan	360 Kali	Kabupaten Maros	2.192.600.000,00	360 Kali	-	
1.05.1.05.01.016.004.	Keikutsertaan Jambore Sat. Pol PP	Jumlah Aparatur yang Jambore HUT Sa. Pol PP	30 orang	Kabupaten Maros	124.700.000,00	100 Orang	-	
1.05.1.05.01.017.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	100 Persentase		4.395.470.000,00		2.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
1.05.1.05.01.017.001.	Keikutsertaan kompetensi kemampuan pemadam kebakaran pada peringatan HUT Pemadam Kebakaran	Jumlah Personil Anggota Damkar yang Mengikuti skill Competition Pemadam Kebakaran	10 Orang	Sat. Pol PP dan Damkar	66.160.000,00	15 orang	-	
1.05.1.05.01.017.002.	Peningkatan layanan tindak penyelamatan/rescue dan bahan berbahaya (Non Kebakaran)			Kabupaten Maros	-		-	
1.05.1.05.01.017.003.	Bimbingan Teknis dan Seminar Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK dan Seminar Pemadam Kebakaran	100 Orang	Kabupaten Maros	34.500.000,00	200 orang	-	
1.05.1.05.01.017.004.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pendukung pemadam kebakaran	Jumlah Peralatan yang berada dalam kondisi baik	32 Jenis	Sat. Pol PP dan Damkar	50.000.000,00	32 Jenis	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.05.1.05.01.017.005.	Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran			-	2.400.000.000,00		2.400.000.000,00	
1.05.1.05.01.017.006.	Penyediaan informasi tentang penanggulangan/ pencegahan dini bahaya kebakaran	Jumlah Jenis Informasi tentang Penanggulangan dan Pencegahan yang tersedia	3 Jenis	Kabupaten Maros	15.000.000,00	3 Jenis	-	
1.05.1.05.01.017.007.	Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung	Jumlah Instansi/ Perusahaan yang diperiksa	20 Instansi	Kabupaten Maros	39.660.000,00	20 Instansi	-	
1.05.1.05.01.017.008.	Penyelenggaraan Pembinaan Rohani dan Monitoring Satuan Tugas Pemadam Kebakaran pada Wilayah Manajemen Kebakaran			Bidang Damkar	42.250.000,00		-	
1.05.1.05.01.017.009.	Pengenalan dini profesi Pemadam Kebakaran pada Anak Usia PAUD	Jumlah Pelaksanaan Pengenalan Dini Profesi Pemadam Kebakaran pada Anak Usia PAUD	10 Kali	Kabupaten Maros	-	10 Kali	-	
1.05.1.05.01.017.010.	Pemetaan daerah rawan Bencana	Jumlah Pelaksanaan Pemetaan Daerah Rawan Bencana	1 Kali	-	-	1 Kali	-	
1.05.1.05.01.017.012.	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat tentang Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat tentang pencegahan kebakaran	300 Orang	Kabupaten Maros	38.000.000,00	450 Orang	-	
1.05.1.05.01.017.013.	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah cakupan layanan penanggulangan bahaya kebakaran yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	Kabupaten Maros	1.709.900.000,00	100%	-	
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.336.530.000,00		2.400.000.000,00	
1.05.1.05.02.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		1.567.628.000,00		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.05.1.05.02.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran	12 Layanan	-	660.886.000,00	12 Layanan	-	
1.05.1.05.02.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah layanan pendukung administrasi perkantoran yang dilaksanakan	9 layanan	-	869.460.000,00	9 layanan	-	
1.05.1.05.02.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah layanan penatausahaan keuangan yang dilaksanakan	1 Layanan	-	21.010.000,00	1 Layanan	-	
1.05.1.05.02.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	50 Dokumen	-	5.745.000,00	50 Dokumen	-	
1.05.1.05.02.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah laporan pengendalian kegiatan OPD	5 Laporan	-	5.933.000,00	5 Laporan	-	
1.05.1.05.02.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah laporan kegiatan survey internal penilaian kapasitas organisasi	1 Laporan	-	4.594.000,00	1 Laporan	-	
1.05.1.05.02.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		935.322.000,00		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.1.05.02.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang tersedia	3 Jenis	-	-	3 Jenis	-	
1.05.1.05.02.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	-	383.750.000,00	10 jenis	-	
1.05.1.05.02.002.003.	Penyediaan Ruang Kantor	Jumlah ruangan kantor yang tersedia	2 Ruang	-	101.500.000,00	2 Ruang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.05.1.05.02.002.004.	Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional			-	-		-	
1.05.1.05.02.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	1 Unit	-	-	1 Unit	-	
1.05.1.05.02.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	3 Jenis	-	50.000.000,00	3 Jenis	-	
1.05.1.05.02.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Yang Berada Dalam Konsisib yang Baik	4 Jenis	-	53.050.000,00	4 Jenis	-	
1.05.1.05.02.002.008.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			-	-		-	
1.05.1.05.02.002.009.	Rehabilitasi Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor			-	-		-	
1.05.1.05.02.002.010.	Rehabilitasi Ruang Kantor	Jumlah Ruang Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	2 Ruang	-	347.022.000,00	2 Ruang	-	
1.05.1.05.02.002.011.	Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional			-	-		-	
1.05.1.05.02.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-	-	-	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.1.05.02.003.001.	Kursus/Pelatihan Singkat Aparatur			-	-		-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.05.1.05.02.003.002.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur			-	-	-	
1.05.1.05.02.003.003.	Pelatihan Kantor Sendiri			-	-	-	
1.05.1.05.02.003.004.	Pelatihan Mandiri			-	-	-	
1.05.1.05.02.003.005.	Penyelenggaraan Sosialisasi/Ceramah Umum/Seminar			-	-	-	
1.05.1.05.02.003.006.	Diklat Teknis/Fungsional			-	-	-	
1.05.1.05.02.018.	Program Peningkatan Efektifitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Alam	-	-		322.625.000,00	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.1.05.02.018.001.	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 5 Desa	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	70 Desa	-	114.850.000,00	70 Desa	-
1.05.1.05.02.018.002.	Penyebaran Informasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Jenis Media Informasi Penanggulangan Bencana	2 Jenis	-	-	4 Jenis	-
1.05.1.05.02.018.003.	Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Alam	150 orang	-	-	300 orang	-
1.05.1.05.02.018.004.	Koordinasi dan Konsultasi Pengurangan Resiko Bencana			-	-	-	-



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.05.1.05.02.018.005.	Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB)			-	-	-	
1.05.1.05.02.018.006.	Pengadaan Peralatan Penanganan Pasca Bencana Pada Lokasi Bencana	Jumlah perahu evakuasi	3 Unit	-	-	3 Unit	-
1.05.1.05.02.018.007.	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana			-	-		-
1.05.1.05.02.018.008.	Penyediaan Dan Pemasangan Rambu Evakuasi Dan Papan Informasi Publik	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dan Aparatur Mengenai Pencegahan, Kesiapsiagaan Dan Resiko Bencana	1 Paket	-	163.500.000,00	1 Paket	-
1.05.1.05.02.018.009.	Peningkatan Efektifitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Alam	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Dan Mitigasi Dampak/ Resiko Bencana	150	-	44.275.000,00	150	-
1.05.1.05.02.019.	Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Dan Logistik Kebencanaan	-	-		562.050.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.1.05.02.019.001.	Pembentukan Pos Komando/Pos Siaga Tangkap Darurat Bencana	Berfungsinya Secara Optimal Pos Komando dan Pos Siaga Tanggap Darurat	1 Pos	-	-	2 Pos	-
1.05.1.05.02.019.002.	Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Penanganan Darurat Bencana			-	-		-
1.05.1.05.02.019.003.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kedaruratan	Jumlah Sarana dan Prasarana kedaruratan yang tersedia	1 Jenis	-	78.750.000,00	1 Jenis	-
1.05.1.05.02.019.004.	Penguatan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana	Jumlah Pos Komando dan Siaga Tanggap Darurat	1 Pos	-	-	1 pos	-



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.05.1.05.02.019.005.	Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			-	-	-	
1.05.1.05.02.019.006.	Peningkatan Mutu Layanan Pos Komando/Pos Siaga Tangkap Darurat Bencana	Jumlah Pos Komando/Pos Siaga Tanggap Darurat Bencana	1 Unit	-	202.300.000,00	1 Unit	-
1.05.1.05.02.019.007.	Penyediaan penyaluran Kebutuhan Dasar Pada Lokasi Bencana	Jumlah Lokasi Bencana Yang Mendapatkan Penyaluran Kebutuhan Dasar	14 Lokasi / Kecamatan	-	251.000.000,00	14 Lokasi / Kecamatan	-
1.05.1.05.02.019.008.	Sertifikasi Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana			-	30.000.000,00		-
1.05.1.05.02.020.	Program Peningkatan Kapasitas Pemulihan Akibat Bencana	-	-		212.375.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.1.05.02.020.001.	Pembuatan Dokumen Perencanaan Rekonstruksi			-	-		-
1.05.1.05.02.020.002.	Analisis Penyebab Kerusakan Infrastruktur di Kabupaten Maros			-	-		-
1.05.1.05.02.020.003.	Bimbingan teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Tentang Kajian Bencana	1 Dokumen	-	80.050.000,00	1 Dokumen	-
1.05.1.05.02.020.004.	Identifikasi Dampak Bencana Dan Analisis Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemulihan Akibat Bencana	1 Dokumen	-	132.325.000,00	1 Dokumen	-
1.05.1.05.02.020.005.	Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih			-	-		-



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.05.1.05.02.020.006.	Monitoring dan Evaluasui Kegiatan Rehabilitasi				-	-	-	
1.05.1.05.02.020.007.	Monitoring dan Evaluasui Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana				-	-	-	
1.06.	SOSIAL					1.985.444.423,00	2.473.900.000,00	
1.06.1.06.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Nilai SAKIP	A		393.365.200,00		434.700.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.1.06.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	14 Layanan	Kab. Maros	128.340.200,00	14 Layanan	150.000.000,00	
1.06.1.06.01.001.002.	Pelayanan Dan Penatausahaan Kepegawaian				-	-	-	
1.06.1.06.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	9 layanan	kab maros	120.375.000,00	9 layanan	130.000.000,00	
1.06.1.06.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan OPD	-	kab. Maros	135.700.000,00	-	145.000.000,00	
1.06.1.06.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan	59	-	8.950.000,00	59	9.700.000,00	
1.06.1.06.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD				-	-	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.06.1.06.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi				-		-	
1.06.1.06.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Nilai Kapasitas Organisasi	3,0			202.479.023,00	277.000.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.1.06.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor				-	-	-	
1.06.1.06.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Perlengkapan Kantor	4 Jenis	kab maros	148.779.023,00	4 Jenis	200.000.000,00	
1.06.1.06.01.002.003.	Penyediaan Ruang Kantor				-	32.000.000,00	52.000.000,00	
1.06.1.06.01.002.004.	Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional				-	-	-	
1.06.1.06.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai			kab maros	10.000.000,00		10.000.000,00	
1.06.1.06.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor				-	-	-	
1.06.1.06.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Perlengkapan Kantor yang berada dalam kondisi baik	8 Jenis	kab maros	11.700.000,00	8 Jenis	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.002.008.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	-	-	6 Unit	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.06.1.06.01.002.009.	Rehabilitasi Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor			-	-	-	
1.06.1.06.01.002.010.	Rehabilitasi Ruang Kantor			-	-	-	
1.06.1.06.01.002.011.	Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional			-	-	-	
1.06.1.06.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	47		-	-	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.1.06.01.003.001.	Kursus/Pelatihan Singkat Aparatur			-	-	-	
1.06.1.06.01.003.002.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur			-	-	-	
1.06.1.06.01.003.003.	Pelatihan Kantor Sendiri			-	-	-	
1.06.1.06.01.003.004.	Pelatihan Mandiri			-	-	-	
1.06.1.06.01.003.005.	Penyelenggaraan Sosialisasi/Ceramah Umum/Seminar			-	-	-	
1.06.1.06.01.003.006.	Diklat Teknis/Fungsional			-	-	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.06.1.06.01.015.	Program Peningkatan Upaya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 persen		716.295.200		845.000.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.1.06.01.015.001.	Pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Laporan hasil Pendataan	6 Dokumen	--	197.325.200,00	6 Dokumen	250.000.000,00	
1.06.1.06.01.015.002.	Pengelolaan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Maros	Jumlah TPU yang Terkelola dengan baik	20 Orang	--	49.350.000,00	20 Orang	65.000.000,00	
1.06.1.06.01.015.003.	Pengelolaan PKH	Jumlah Pendamping PKH	612 Orang	-	314.100.000,00	612 Orang	320.000.000,00	
1.06.1.06.01.015.004.	Akreditasi Lembaga Sosial Anak di Kabupaten Maros	Jumlah Dokumen Laporan hasil Moitoring dan Evaluasi Lembaga kesejahteraan sosial anak	1 Dokumen	-	15.420.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	
1.06.1.06.01.015.005.	Pengendalian dan Pemberdayaan taruna Siaga bencana	Jumlah Tagana	10 Orang	-	99.100.000,00	10 Orang	150.000.000,00	
1.06.1.06.01.015.006.	Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Korban bencana Alam dan bencana Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial	100 %	-	20.780.000,00	100 %	35.000.000,00	
1.06.1.06.01.015.007	Labelisasi Keluarga Miskin Penerima Manfaat	Persentase Keluarga Miskin Yang Telah Terlabeli	100%		82.200.000	100 %		
1.06.1.06.01.016.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	80 persen		317.622.500,00		352.200.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.1.06.01.016.002.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			kab maros	23.740.000,00		30.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.06.1.06.01.016.004.	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)	Jumlah ABH, Anak jalanan dan anak binaan LKSA	150 Anak	kab Maros	61.900.000,00	150 Anak	65.000.000,00	
1.06.1.06.01.016.005.	Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lnjut Usia	Jumlah Penyandang disabilitas dan lansia yang mendapatkan bantuan	20 Orang	Kab Maros	50.000.000,00	20 Orang	60.000.000,00	
1.06.1.06.01.016.006.	Rehabilitasi Sosial dan bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Yang Memiliki Keterampilan / Produktif	Jumlah penyandang disabilitas dan lansia yang mendapatkan bantuan	20 orang	kab maros	12.192.500,00	20 orang	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.016.007.	Penanganan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani	70 orang	kab maros	77.390.000,00	70 orang	80.000.000,00	
1.06.1.06.01.016.009.	Pelayanan Rumah Penampungan dan Trauma Center	Jumlah pasien yang tertangani	50 Org	Kab Maros	10.200.000,00	50 Org	20.000.000,00	
1.06.1.06.01.016.10.	Labelisasi Keluarga Miskin Penerima Manfaat	Jumlah keluarga miskin penerima manfaat yang mendapatkan label	10.000 Rumah	14 Kecamatan	82.200.000,00	10.000 Rumah	82.200.000,00	
1.06.1.06.01.017.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	62 persen		375.902.500,00		565.000.000,00	DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.1.06.01.017.001.	Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah tenaga pendamping BPNT	49 Orang	-	49.130.000,00	49 Orang	150.000.000,00	
1.06.1.06.01.017.002.	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui SLRT	Jumlah PMKS yang mendapat layanan kesejahteraan sosial melalui SLRT	300 Orang	-	265.300.000,00	300 Orang	280.000.000,00	
1.06.1.06.01.017.003.	Sosialisasi dan Pelayanan LK3	Jumlah peserta sosialisasi dan PMKS yang tertangani	30 Orang	-	23.477.500,00	30 Orang	35.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.06.1.06.01.017.004.	Pelestarian Nilai nilai Kepahlawanan, Pemberdayaan Sosial			-	11.290.000,00		25.000.000,00	
1.06.1.06.01.017.005.	Penanaman Nilai Nilai kepahlawanan,Keperintisan dan kesetiakawanan Sosial	Kelancaran pelaksanaan hari pahlawan dan Jumlah TMP	2 TMP	-	26.705.000,00	2 TMP	75.000.000,00	
1.07.	TENAGA KERJA				1.404.210.000,00		181.530.000,00	
1.07.1.07.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		464.958.700,00		-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
1.07.1.07.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Layanan administrasi umum perkantoran	12 Layanan	-	265.281.700,00	12 Layanan	-	
1.07.1.07.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran	12 Layanan	-	160.047.000,00	12 Layanan	-	
1.07.1.07.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran	12 Layanan	-	11.740.000,00	12 Layanan	-	
1.07.1.07.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja erangkat Daerah	32 Dokumen	-	16.000.000,00	32 Dokumen	-	
1.07.1.07.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Kegiatan OPD	6 Dokumen	-	3.140.000,00	6 Dokumen	-	
1.07.1.07.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Nilai kapasitas organisasi Disnakertrans (Nilai Survey)	3,0	-	8.750.000,00	3,0	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.07.1.07.01.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-	-	10.000.000,00	-	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
1.07.1.07.01.002.002	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	8 Jenis	-	-	8 Jenis	-	
1.07.1.07.01.002.005	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Karnaval	1 Unit	-	10.000.000,00	1 Unit	-	
1.07.1.07.01.003	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-	-	-	-	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
1.07.1.07.01.015	Program Pelayanan Penempatan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	-	-	-	556.780.000,00	-	181.530.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
1.07.1.07.01.015.001	Pelaksanaan Bursa Kerja (Job Fair)	Jumlah kegiatan	3 Kali	-	155.100.000,00	3 Kali	-	
1.07.1.07.01.015.001	Pelatihan Teknik Pertukangan (Meubel)	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	30 orang	-	18.600.000,00	30 orang	-	
1.07.1.07.01.015.001	Pelayanan Kartu Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	2.000 Orang	-	9.500.000,00	2.000 Orang	-	
1.07.1.07.01.015.002	Evaluasi Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan	Lama Kegiatan	1 Bulan	-	27.450.000,00	1 Bulan	-	
1.07.1.07.01.015.002	Pelatihan Teknik Pendingin (Air Conditioner)	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	30 Orang	-	17.100.000,00	30 Orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.07.1.07.01.015.003.	Pelatihan Teknik Pendingin (Kulkas)	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	30 Orang	-	18.600.000,00	30 Orang	-	
1.07.1.07.01.015.004.	Pelatihan Servis Ponsel	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	30 Orang	-	18.100.000,00	30 Orang	-	
1.07.1.07.01.015.005.	Pelatihan Servis Otomotif (Motor)	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	30 Orang	-	18.100.000,00	30 Orang	-	
1.07.1.07.01.015.006.	Pelatihan Teknik Sablon	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	30 Orang	-	19.100.000,00	30 Orang	-	
1.07.1.07.01.015.007.	Pelatihan Teknik Tata Boga	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	30 Orang	-	17.800.000,00	30 Orang	-	
1.07.1.07.01.015.008.	Pelatihan Teknik Tata Rias	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	30 Orang	-	17.900.000,00	30 Orang	-	
1.07.1.07.01.015.009.	Pelatihan Menjahit	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	30 Orang	-	20.900.000,00	30 Orang	-	
1.07.1.07.01.015.010.	Pemeliharaan Sarana BLK	Jumlah jenis peralatan pelatihan	6 Jenis	-	17.000.000,00	6 Jenis	-	
1.07.1.07.01.015.13.	Pembinaan Dan Pelatihan Calon Anggota Polri			Kabupaten Maros	181.530.000,00		181.530.000,00	
1.07.1.07.01.016.	Program Pengembangan Hubungan Industrial, Pengawasan, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-		372.471.300,00		-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.07.1.07.01.016.001.	Lembaga Kerja Sama Tripartit	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui LKS Tripartit	1 Tahun	-	141.197.000,00	1 Tahun	-	
1.07.1.07.01.016.002.	Peringatan Hari Buruh	Jumlah pelaksanaan Hari Buruh	1 kali	-	38.750.000,00	1 kali	-	
1.07.1.07.01.016.003.	Profil Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	2.550.000,00	1 dokumen	-	
1.07.1.07.01.016.004.	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	-	58.600.000,00	1 Dokumen	-	
1.07.1.07.01.016.005.	Pelaksanaan Posko Pengaduan THR	Jumlah kegiatan	1 Kali	-	8.005.000,00	1 Kali	-	
1.07.1.07.01.016.006.	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	-	39.690.800,00	1 Dokumen	-	
1.07.1.07.01.016.007.	Sosialisasi Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta	50 Orang	-	37.903.500,00	50 Orang	-	
1.07.1.07.01.016.008.	Pelatihan Struktural Skala Upah	Jumlah Kegiatan	1 kali	-	26.150.000,00	1 kali	-	
1.07.1.07.01.016.009.	Pengawasan Jamsostek dan Pengupahan			-	-		-	
2.08.	TRANSMIGRASI				177.320.000,00		-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

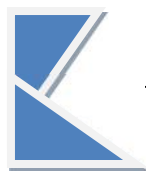
2.08.1.07.01.015.	Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	-		177.320.000,00		-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
2.08.1.07.01.015.001.	Sosialisasi Penataan Kawasan Transmigrasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 Kali	-	45.670.000,00	1 Kali	-	
2.08.1.07.01.015.002.	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	-	122.000.000,00	1 Dokumen	-	
2.08.1.07.01.015.003.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	Jumlah pertemuan	10 Kali	-	9.650.000,00	10 Kali	-	
1.08.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.950.000.000,00		6.033.835.000,00	
1.08.1.08.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		513.264.400,00		554.708.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
1.08.1.08.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	DPPPA	286.265.400,00	12 Layanan	262.874.700,00	
1.08.1.08.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	9 Layanan	DPPPA	159.213.000,00	9 Layanan	150.868.300,00	
1.08.1.08.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	12 Dokumen	DPPPA	41.250.000,00	12 Dokumen	127.435.000,00	
1.08.1.08.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan OPD	7 Dokumen	DPPPA	14.636.000,00	7 Dokumen	8.140.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.08.1.08.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah dokumen Laporan atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	DPPPA	6.000.000,00	5 Dokumen	-	
1.08.1.08.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Dokumen Pelaksaaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	1 Dokumen	DPPPA	5.900.000,00	1 Dokumen	5.390.000,00	
1.08.1.08.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		5.010.000.000,00		5.011.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
1.08.1.08.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor			-	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
1.08.1.08.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	100 Unit	DPPPA	10.000.000,00	100 Unit	11.000.000,00	
1.08.1.08.01.015.	Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender	-	-		146.546.000,00		161.298.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
1.08.1.08.01.015.001.	Pelatihan Pemberdayaan kelompok Perempuan	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Perempuan	20 Orang	DPPPA	28.685.000,00	20 Orang	31.663.500,00	
1.08.1.08.01.015.002.	Fasilitasi Pembinaan Peingkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)	Jumlah Peserta Pembinaan Peran Keluarga Menuju Kesejahteraan	100 Orang	DPPPA	15.350.000,00	100 Orang	16.885.000,00	
1.08.1.08.01.015.004.	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah Layanan PUSPAGA	1 Layanan	DPPPA	20.200.000,00	1 Layanan	22.220.000,00	
1.08.1.08.01.015.010.	Penyusunan Profil Gender	Jumlah Buku Profil Data Gender	50 Buku	DPPPA	19.750.000,00	50 Buku	21.725.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.08.1.08.01.015.011.	TOT PPRG Bagi Tim Pokja dan Focal Point	Jumlah Peserta TOT PPRG Tim POKJA dan Tim Focal Point	70 Orang	DPPPA	22.050.000,00	70 Orang	24.255.000,00	
1.08.1.08.01.015.012.	Sosialisasi PERBUP Pengarus utamaan Gender (PUG)	Jumlah Peserta Sosialisasi PERBUP PUG	80 Orang	DPPPA	7.210.000,00	80 Orang	7.920.000,00	
1.08.1.08.01.015.016.	Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	DPPPA	33.301.000,00	1 Dokumen	36.630.000,00	
1.08.1.08.01.016.	Program Peningkatan Kualitas Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak	-	-		180.689.600,00		200.029.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
1.08.1.08.01.016.001.	Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak TK Desa dan Kelurahan	Jumlah Forum anak Yang terbentuk dan Terlatih	100 Orang	DPPPA	23.469.800,00	100 Orang	26.147.000,00	
1.08.1.08.01.016.002.	Festival Forum Anak Kabupaten Maros	Jumlah Peserta Kongres Anak	100 Orang	DPPPA	24.149.800,00	100 Orang	27.115.000,00	
1.08.1.08.01.016.003.	Fasilitasi Forum Anak TK. Provinsi dan Nasional	Jumlah Forum anak Yang terfasilitasi ke tingkat Provinsi dan Tk, Nasional	20 Orang	DPPPA	35.650.000,00	20 Orang	39.314.000,00	
1.08.1.08.01.016.004	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang terbentuk		DPPPA	16.410.000,00			
1.08.1.08.01.016.005.	Monitoring Evaluasi Puskesmas Ramah Anak	Jumlah PATBM	3 Unit	DPPPA	22.410.000,00	3 Unit	24.656.500,00	
1.08.1.08.01.016.010.	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	DPPPA	15.710.000,00	1 Dokumen	17.253.500,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.08.1.08.01.016.011.	Penyusunan Profil Data Anak	Jumlah Profil Data Anak	50 Buku	DPPPA	15.000.000,00	50 Buku	16.390.000,00	
1.08.1.08.01.016.013.	Evaluasi Penilaian KLA	Jumlah Dokumen KLA	1 Dokumen	DPPPA	33.690.000,00	1 Dokumen	37.180.000,00	
1.08.1.08.01.016.015.	Sosialisasi Sistem Perlindungan anak	Jumlah Peserta Sosialisasi PERDA Sistem Perlindungan Anak	100 Orang	DPPPA	10.610.000,00	100 Orang	11.973.500,00	
1.08.1.08.01.017.	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	-	-		99.500.000,00		106.799.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
1.08.1.08.01.017.001.	Profil Perempuan Kabupaten Maros	Jumlah Profil Perempuan	50 Buku	DPPPA	19.700.000,00	50 Buku	21.725.000,00	
1.08.1.08.01.017.003.	Pembentukan dan Pelatihan Kelompok P2TP2A di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Peserta Pelatihan Kelompok P2TP2A	100 Orang	DPPPA	11.660.000,00	100 Orang	12.760.000,00	
1.08.1.08.01.017.005.	Sosialisasi PERDA Perlindungan Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi PERDA Perlindungan Perempuan	100 Orang	DPPPA	12.300.000,00	100 Orang	10.835.000,00	
1.08.1.08.01.017.006.	Pelayanan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jumlah Layanan Hukum terhadap Perempuan dan anak Korban Kekerasan	24 Kasus	DPPPA	19.290.000,00	24 Kasus	21.274.000,00	
1.08.1.08.01.017.007.	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Layanan P2TP2A	1 Layanan	DPPPA	19.950.000,00	1 Layanan	21.945.000,00	
1.08.1.08.01.017.009.	Pelatihan tenaga Kesehatan di puskesmas Yang Mampu melayani Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak	Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih yang mampu melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	30 Orang	DPPPA	16.600.000,00	30 Orang	18.260.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.11.	LINGKUNGAN HIDUP				9.095.175.500,00		65.750.500,00	
1.11.1.11.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		674.620.000,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.11.1.11.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Dinas Lingkungan Hidup	420.150.500,00	12 Layanan	-	
1.11.1.11.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	20 Layanan	Dinas Lingkungan Hidup	217.670.000,00	20 Layanan	-	
1.11.1.11.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	12 Layanan	Dinas Lingkungan Hidup	16.800.000,00	12 Layanan	-	
1.11.1.11.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan OPD	9 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	8.500.000,00	9 Dokumen	-	
1.11.1.11.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Kegiatan	27 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup	6.249.500,00	27 Laporan	-	
1.11.1.11.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Aparatur Yang Melaksanakan Survey	3 Nilai Survey	Dinas Lingkungan Hidup	5.250.000,00	3 Nilai Survey	-	
1.11.1.11.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	5 Jenis		246.305.000,00		20.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.11.1.11.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	1Jenis	Dinas Lingkungan Hidup	15.000.000,00	1 Jenis	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.11.1.11.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	5Jenis	Dinas Lingkungan Hidup	165.000.000,00	5 Jenis	-	
1.11.1.11.01.002.004.	Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua	2 Unit	Dinas Lingkungan Hidup	-	2 Unit	500.000,00	
1.11.1.11.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/ Devile/ Kamaval	1 Unit	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	
1.11.1.11.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Berada Dalam Kondisi Yang Baik	2 Jenis	Dinas Lingkungan Hidup	40.000.000,00	2 Jenis	10.000.000,00	
1.11.1.11.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Baik	7 Jenis	Dinas Lingkungan Hidup	16.305.000,00	7 Jenis	-	
1.11.1.11.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	2 Orang					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.11.1.11.01.015.	Program Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha dan atau Kegiatan	100%		241.550.500,00		20.200.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.11.1.11.01.015.001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Lingkungan Hidup D3TLH	1 Dokumen	Kabupaten Maros	100.000.000,00	1 Dokumen	-	
1.11.1.11.01.015.002.	Pengawasan Lingkungan	Jumlah Jenis Usaha dan atau Kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan Kebijakan dan Kualitas Lingkungan	147 usaha dan atau Kegiatan	Wilayah Kabupaten Maros	100.000.000,00	147 usaha dan atau Kegiatan	-	
1.11.1.11.01.015.003.	Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan yang di tangani	15 Pengaduan	Kabupaten Maros	21.350.000,00	15 Pengaduan	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.11.1.11.01.015.004.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Laporan atas Hasil Pelaksanaan Monev terhadap Pengelolaan Limbah B3	2 Laporan	Kabupaten Maros	20.200.500,00	2 Laporan	20.200.500,00	
1.11.1.11.01.016.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dan Limbah B3	Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani	89,09 %		7.583.700.000,00		25.050.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.11.1.11.01.016.001.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA	Terpeliharanya Sarana Prasarana TPA	2 Jenis	Kabupaten Maros	150.000.000,00	2 Jenis	-	
1.11.1.11.01.016.002.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Tersedianya Penunjang Teknologi Tempat Pengelolaan Sampah	27 Jenis	Kabupaten Maros	145.000.000,00	27 Jenis	-	
1.11.1.11.01.016.003.	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang berfungsi dalam Kondisi Baik	2 Jenis	Kabupaten Maros	900.000.000,00	2 Jenis	-	
1.11.1.11.01.016.004.	Penyediaan Tenaga Operasional Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tenaga Operasional Pengelolaan Persampahan	420 Orang	Kabupaten Maros	4.857.500.000,00	420 Orang	-	
1.11.1.11.01.016.005.	Lomba Adipura Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Berpartisipasi dalam Lomba Kecamatan Bersih	14 Kecamatan	Kabupaten Maros	25.050.000,00	14 Kecamatan	25.050.000,00	
1.11.1.11.01.016.006.	Sosialisasi dan Kontestasi Sekolah pada Program Adiwiyata	Jumlah sekolah yang Berpartisipasi pada Program adiwiyata	100 Sekolah	Kabupaten	51.900.000,00	100 sekolah	-	
1.11.1.11.01.016.007.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura	Jumlah Titik Pantau Penilaian Adipura yang di Koordinasikan	20 Titik Pantau	Kabupaten	104.250.000,00	20 Titik Pantau	-	
1.11.1.11.01.016.008.	Pengadaan Mobil Alat Angkut Sampah Arm Roll (DAK)	Jumlah Mobil Arm Roll	2 Unit	Dinas Lingkungan Hidup	1.000.000.000,00	2 Unit	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.11.1.11.01.016.009.	Pengadaan Alat Angkut Motor Sampah Roda Tiga (DAK)	Jumlah Motor Sampah Roda Tiga	5 Unit	Kabupaten Maros	200.000.000,00	5 Unit	-	
1.11.1.11.01.016.010.	Pengadaan Kontainer Sampah (DAK)	Tersedianya Penunjang Teknologi Tempat Pengelolaan Sampah	5 Unit	Kabupaten Maros	150.000.000,00	5 Unit	-	
1.11.1.11.01.017.	Program Peningkatan Upaya Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnyat Skor IKLH	60,59 Nilai Indeks		349.000.000,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.11.1.11.01.017.002.	Pengambilan Sampel Bahan Pengujian Polusi Limbah Padat dan Cair	Jumlah Laporan Hasil Pengujian	51 IKA	Kabupaten Maros	10.850.000,00	51 IKA	-	
1.11.1.11.01.017.003.	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Tersedianya data hasil Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	100 Kendaraan	Kabupaten Maros	21.000.000,00	100 Kendaraan	-	
1.11.1.11.01.017.004.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersedianya Data dan Informasi Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan	1 Laporan	Kabupaten	101.000.000,00	1 Laporan	-	
1.11.1.11.01.017.005.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah Buku Profil Keanekaragaman Hayati	1 Buku Profil	Kabupaten Maros	22.000.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.017.006.	Penyelenggaraan Program Kampung Iklim (Proklim)	Jumlah LOKasi Program Kampung Iklim	2 Lokasi	Kabupaten Maros	44.150.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.017.007.	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Taman Yang Terpelihara	16 Taman	Kabupaten Maros	150.000.000,00	16 Taman	-	
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.296.425.500,00		-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.12.1.12.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		408.263.500,00		-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
1.12.1.12.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	214.783.500,00	12 Layanan	-	
1.12.1.12.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	176.802.000,00	9 Layanan	-	
1.12.1.12.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Cakupan Layanan Kepegawaian yang Dilaksanakan	10 Layanan	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.000.000,00	10 Layanan	-	
1.12.1.12.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD			Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.178.000,00		-	
1.12.1.12.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD			Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.000.000,00		-	
1.12.1.12.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi			Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.500.000,00		-	
1.12.1.12.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	22 Unit		259.350.000,00		-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
1.12.1.12.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	5 Jenis	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.000.000,00	5 Jenis	-	
1.12.1.12.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	6 Jenis	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	214.500.000,00	6 Jenis	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.12.1.12.01.002.003.	Penyediaan Ruang Kantor			Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-		-	
1.12.1.12.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai			Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.000.000,00		-	
1.12.1.12.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor			Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-		-	
1.12.1.12.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	20 Jenis	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	29.850.000,00	20 Jenis	-	
1.12.1.12.01.002.010.	Rehabilitasi Ruang Kantor	Jumlah Jenis Ruang Kantor yang Berada Dalam Kondisi yang Baik	2 Ruang	Ruang	-	2 Ruang	-	
1.12.1.12.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	40 Orang		395.000,00		-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
1.12.1.12.01.003.003.	Pelatihan Kantor Sendiri			Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	395.000,00		-	
1.12.1.12.01.015.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	98 Persen		704.686.500,00		-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
1.12.1.12.01.015.001.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	90.000	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	26.550.000,00	90.000	-	
1.12.1.12.01.015.002.	Penyediaan Formulir Pendaftaran Penduduk	Jumlah Formulir Pendaftaran Penduduk Yang Diadakan	200.000	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	172.050.000,00	200.000	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.12.1.12.01.015.003.	Penyediaan Sarana Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Perekaman dan KTP Elektronik, KK, SUKET, SKPM Yang Diterbitkan	50.400 Dokumen	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	266.200.000,00	50.400 Dokumen	-	
1.12.1.12.01.015.004.	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Jumlah Perekaman dan KTP Elektronik Yang Diterbitkan	10.300	103 Desa	62.462.500,00	10.300	-	
1.12.1.12.01.015.005.	Penyediaan dan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Kartu Identitas Anak Yang Diterbitkan	10.000	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	177.424.000,00	10.000	-	
1.12.1.12.01.016.	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	95%		363.867.500,00		-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
1.12.1.12.01.016.001.	Penerapan Inovasi Layanan Akte Kelahiran "ANAKKU BERSURAT"	Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Untuk anak umur 0 s/d 1 Tahun	5000	14 Kecamatan	19.708.000,00	6000	-	
1.12.1.12.01.016.002.	Penyediaan Formulir dan Buku Register Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Blangko Akte kelahiran Dan Buku Regiater Pencatatan sipil yang disediakan	31400 lembar	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	193.400.000,00	31400 lembar	-	
1.12.1.12.01.016.003.	Peningkatan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil Yang diterbitkan	25.200	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	26.250.000,00	30.000	-	
1.12.1.12.01.016.004.	Pemutahiran Data Pencatatan Sipil			Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-		-	
1.12.1.12.01.016.005.	Kerja Sama Lintas Sektor Kepemilikan Akte Nikah	Jumlah Akte Perkawinan yang di entri ke Data base kependudukan	15.000	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	78.474.000,00	20.000	-	
1.12.1.12.01.016.006.	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	Jumlah Akte Kelahiran Yang Diterbitkan	7725	103 Desa	46.035.500,00	7725	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.12.1.12.01.017.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyediaan Data Base Kependudukan Berskala Kabupaten	100 Persen		188.674.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
1.12.1.12.01.017.001.	Pengelolaan Pemanfaatan Database Kependudukan	Jumlah Aplikasi Data Base Kependudukan Yang Terkelola	1 Aplikasi	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	156.350.000,00	115.000	-	
1.12.1.12.01.017.002.	Pemutakhiran Data Base Kependudukan	Jumlah Kartu Keluarga Yang Dimutakhirkan Elemn datanya	114.000	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	156.350.000,00	115.000	-	
1.12.1.12.01.017.003.	Penyediaan Aplikasi Data Base Kependudukan	Jumlah Aplikasi Penyediaan Data Base Kependudukan Berskala Kabupaten	1 Aplikasi	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	32.324.000,00	1 Aplikasi	-	
1.12.1.12.01.017.004	Implementasi SIAK	Jumlah peralatan yang berfungsi dengan baik untuk mendukung versi aplikasi SIAK yang diajukan	5	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	5	-	
1.12.1.12.01.018.	Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Dan Pemanfaatan Data Dokumen Kependudukan	Nilai Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	4,55 (A) Pelayanan Prima		371.189.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
1.12.1.12.01.018.001.	Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang menandatangani MOU	46 OPD	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.750.000,00	46 OPD	-	
1.12.1.12.01.018.002.	Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen yang diarsipkan sesuai tata kelola arsip	500 / hari	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	33.358.000,00	550 / hari	-	
1.12.1.12.01.018.003.	Sosialisasi Standar Pelayanan dan Kebijakan Kependudukan Lewat Media	Jumlah Jenis Media Yang digunakan dalam sosialisasi administrasi kependudukan	8 Media	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	46.750.000,00	10 Media	-	
1.12.1.12.01.018.004.	Penyusunan PERDA Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros	Jumlah PERDA ADMINDUK yang diberlakukan	1 PERDA	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	58.000.000,00	1 PERDA	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.12.1.12.01.018.005.	Peningkatan Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Nilai 6 Aspek indikator Penyelenggaraan Pelayanan Publik	BAIK	Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	25.973.000,00	BAIK	-	
1.12.1.12.01.018.006.	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan Publik	-	Dirjen Adminduk, Makassar	172.758.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.018.007.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan			Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	18.600.000,00		-	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.329.967.500,00		-	
1.13.1.13.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		694.726.500,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
1.13.1.13.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah cakupan layanan administrasi umum perkantoran	8 Layanan	Maros	361.640.500,00	8 Layanan	-	
1.13.1.13.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah cakupan layanan pendukung administrasi umum perkantoran	100%	Maros	205.686.000,00	100%	-	
1.13.1.13.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen SPJ fungsional dan administrasi keuangan OPD	32 Dokumen	Maros	54.260.000,00	32 Dokumen	-	
1.13.1.13.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah dokumen Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	8 Dokumen	Maros	31.920.000,00	8 Dokumen	-	
1.13.1.13.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Kegiatan OPD	8 Dokumen	Maros	41.220.000,00	8 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.13.1.13.01.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		500.840.000,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
1.13.1.13.01.002.002	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	20 Jenis	Maros	460.840.000,00	20 Jenis	-	
1.13.1.13.01.002.005	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah kendaraan hias/devile/kamaval/pawai	1 Unit	Maros	10.000.000,00	1 Unit	-	
1.13.1.13.01.002.006	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan bangunan gedung kantor yang berada dalam kondisi yang baik	3 Jenis	Maros	30.000.000,00	3 Jenis	-	
1.13.1.13.01.003	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-		75.750.000,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
1.13.1.13.01.003.002	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur	Jumlah aparatur Dinas PMD yang mengikuti bimtek pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur	50 Orang	Maros	75.750.000,00	50 Orang	-	
1.13.1.13.01.015	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Mandiri/Maju	6,25%		685.155.000,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
1.13.1.13.01.015.001	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Jumlah peserta peningkatan kapasitas pemerintah desa	240 Orang	Maros	25.720.000,00	240 Orang	-	
1.13.1.13.01.015.004	Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas BPD	160 Orang	Maros	23.110.000,00	160 Orang	-	
1.13.1.13.01.015.006	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Jumlah peserta peningkatan kapasitas perangkat desa	320 Orang	Maros	44.240.000,00	320 Orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.13.1.13.01.015.008.	Penyusunan Perda BPD dan Perubahan Perda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Maros	-		-	
1.13.1.13.01.015.009.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa	160 Orang	Maros	31.120.000,00	160 Orang	-	
1.13.1.13.01.015.019.	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi (SISKEUDES)	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi (SISKEUDES)	160 Orang	Maros	36.360.000,00	160 Orang	-	
1.13.1.13.01.015.020.	Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah peserta koordinasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	230 Orang	Maros	97.560.000,00	230 Orang	-	
1.13.1.13.01.015.024.	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan ADD, Dana Desa, Dan Siskeudes	Jumlah dokumen laporan atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan ADD, Dana Desa, dan Siskeudes	1 Dokumen	Maros	97.440.000,00	1 Dokumen	-	
1.13.1.13.01.015.026.	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa berprestasi	13 Desa	Maros	199.645.000,00	13 Desa	-	
1.13.1.13.01.015.030.	Pembinaan Pendampingan Desa	Jumlah pembinaan pendampingan desa	1 Tahun	Maros	129.960.000,00	1 Tahun	-	
1.13.1.13.01.016.	Program Pengembangan Kelembagaan Sosial Ekonomi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Jumlah Desa Mandiri/Maju dan Persentase BUM Desa Sehat	6,25% dan 71,43%		726.540.000,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
1.13.1.13.01.016.003.	Bimtek dan Pembinaan Kewirausahaan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah peserta bimtek dan pembinaan kewirausahaan BUM Desa	240 Orang	Maros	30.260.000,00	240 Orang	-	
1.13.1.13.01.016.005.	Bimtek dan Pembinaan Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah peserta bimtek dan pembinaan penerapan aplikasi pengelolaan keuangan BUMDesa	240 Orang	Maros	27.460.000,00	240 Orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.13.1.13.01.016.011.	Penyelenggaraan Lomba Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUM Desa yang mengikuti lomba BUM Desa berprestasi	13 BUM Desa	Maros	269.295.000,00	13 BUM Desa	-	
1.13.1.13.01.016.012.	Temu Kader PKK	Jumlah peserta temu Kader PKK	371 Orang	Maros	180.005.000,00	371 Orang	-	
1.13.1.13.01.016.014.	Penyelenggaraan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Lomba Dasawisma	Jumlah peserta penyelenggaraan HKG PKK dan lomba Dasawisma	1300 Orang	Maros	119.510.000,00	1300 Orang	-	
1.13.1.13.01.016.024.	Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kader dan Kelembagaan Posyandu	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan keterampilan kader dan kelembagaan Posyandu	160 Orang	Maros	100.010.000,00	160 Orang	-	
1.13.1.13.01.016.028.	Lomba Posyandu	Jumlah Posyandu Yang mengikuti Lomba Posyandu Berprestasi	14 Posyandu	Maros	-	14 Posyandu	-	
1.13.1.13.01.017.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Jumlah Desa Mandiri/Maju	6,25%		646.956.000,00		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
1.13.1.13.01.017.004.	Bimtek dan Pembinaan Penyusunan Desain dan RAB Sarana Prasarana Perdesaan	Jumlah peserta bimtek dan pembinaan penyusunan desain dan RAB sarana prasarana perdesaan	160 Orang	Maros	22.760.000,00	160 Orang	-	
1.13.1.13.01.017.005.	Penyusunan Perda dan Master Plan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen master plan dan perda pengembangan kawasan perdesaan	1 Dokumen	Maros	102.755.000,00	1 Dokumen	-	
1.13.1.13.01.017.006.	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)			Maros	-		-	
1.13.1.13.01.017.008.	Workshop Pengembangan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Pesisir	Jumlah desa dalam pengembangan kawasan perdesaan di wilayah pesisir	160 Orang	Maros	30.706.000,00	160 Orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.13.1.13.01.017.009.	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Teknologi Tepat Guna dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam	Jumlah peserta pelatihan peningkatan keterampilan TTG dan pemanfaatan SDA	90 Orang	Maros	20.960.000,00	90 Orang	-	
1.13.1.13.01.017.017.	Gelar Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa	Jumlah penyelenggaraan gelar TTG dan inovasi desa	1 Kali	Maros	190.470.000,00	1 Kali	-	
1.13.1.13.01.017.024.	Penyusunan Perda Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan SDA	Jumlah dokumen perda pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA	1 Dokumen	Maros	39.235.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.017.025.	Monitoring dan Supervisi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen laporan atas hasil pelaksanaan monitoring dan supervisi pelaksanaan pembangunan desa	1 Dokumen	Maros	97.440.000,00	1 Dokumen	-	
1.13.1.13.01.017.029.	Bimtek Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)	Jumlah peserta bimtek penerapan aplikasi sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat	80 Orang	Maros	93.810.000,00	80 Orang	-	
1.13.1.13.01.017.030.	Pembentukan Labsite Desa	Jumlah Laboratorium Lapangan (Labsite Desa) yang terbentuk dan dibina	2 Desa	Maros	15.060.000,00	2 Desa	-	
1.13.1.13.01.017.032.	Workshop Pengembangan Desa Dalam Peningkatan Status Desa	Jumlah peserta workshop pengembangan dan peningkatan status desa	250 Orang	Maros	33.760.000,00	250 Orang	-	
1.14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.982.905.767,00		200.000.000,00	
1.14.1.14.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		830.346.000,00		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
1.14.1.14.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	DPPKB	504.460.000,00	12 Layanan	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.14.1.14.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	DPPKB	263.486.000,00	12 Layanan	-	
1.14.1.14.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan	19 Dokumen	DPPKB	48.450.000,00	19 Dokumen	-	
1.14.1.14.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan OPD	59 Dokumen	DPPKB	3.950.000,00	59 Dokumen	-	
1.14.1.14.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Kegiatan	5 Dokumen	DPPKB	4.700.000,00	5 Dokumen	-	
1.14.1.14.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Survey	1 Dokumen	DPPKB	5.300.000,00	1 Dokumen	-	
1.14.1.14.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		574.250.000,00		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
1.14.1.14.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Yang Berada dalam Kondisi yang Baik	8 Unit	DPPKB	107.000.000,00	10 Unit	-	
1.14.1.14.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	8 Jenis	DPPKB	187.500.000,00	10 Jenis	-	
1.14.1.14.01.002.003.	Penyediaan Ruang Kantor	Jumlah Ruang Kantor	1 Unit	DPPKB	156.750.000,00	1 Unit	-	
1.14.1.14.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	1 Unit	DPPKB	10.000.000,00	1 Unit	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.14.1.14.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor yang Berada dalam Kondisi Baik	6 Unit	DPPKB	103.000.000,00	6 Unit	-	
1.14.1.14.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Berada dalam Kondisi Baik	8 Jenis	DPPKB	10.000.000,00	10 Jenis	-	
1.14.1.14.01.015.	Program Pengembangan Kelembagaan Dan Pengendalian Penduduk	-	-		1.945.933.300,00		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
1.14.1.14.01.015.005.	Penyusunan Profil Kependudukan dan KB	Jumlah dokumen profil kependudukan	1 Dokumen	-	6.080.000,00	2 Dokumen	-	
1.14.1.14.01.015.008.	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik)	Jumlah Desa/Kelurahan (Kampung KB) yang mendapat pembinaan	14 Kampung KB	-	1.527.800.000,00	38 Kampung KB	-	
1.14.1.14.01.015.009.	Pemutakhiran Data Base Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera Yang Terdata	90,673 KK	-	69.200.000,00	90,673 KK	-	
1.14.1.14.01.015.010.	Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan	12 Dokumen	-	129.603.300,00	36 Dokumen	-	
1.14.1.14.01.015.011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK Fisik)	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Data	5 Jenis	-	36.500.000,00	5 Jenis	-	
1.14.1.14.01.015.012.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Kampung KB	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang tersedia di Kampung KB	5 Jenis	-	176.750.000,00	5 Jenis	-	
1.14.1.14.01.016.	Program Penyuluhan Dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Kependudukan Dan KB	-	-		2.725.421.900,00		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

								BERENCANA DAERAH
1.14.1.14.01.016.002.	Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK Non Fisik)	Jumlah pembangunan BKB Holistik Integratif (BKB-Posyandu-Paud)	412 Orang	-	618.000.000,00	412 Orang	-	
1.14.1.14.01.016.004.	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK FISIK)	Jumlah Sarana Penunjang Petugas Lapangan Keluarga Berencana	29 Unit	-	537.950.000,00	29 Unit	-	
1.14.1.14.01.016.005.	Pengadaan Sarana Pendataan (DAK Fisik)	Jumlah jenis sarana pendataan yang tersedia di Balai KB	3 Jenis	-	530.000.000,00	3 Jenis	-	
1.14.1.14.01.016.006.	Bimbingan Teknis Aplikasi SIGA	Jumlah Petugas yang Memahami aplikasi SIGA	150 Orang	DPPKB	47.181.900,00	150 Orang	-	
1.14.1.14.01.016.007.	Pengadaan Sarana PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Fisik)	Jumlah Sarana Penunjang PPKBD dan Sub PPKBD	34	DPPKB	136.000.000,00	0	-	
1.14.1.14.01.016.008.	Pendidikan kependudukan bagi Tenaga Pendidik SMP/SMA	Jumlah sekolah yang tenaga pendidiknya sudah memahami sekolah siaga kependudukan	14 Sekolah	-	74.890.000,00	15 Sekolah	-	
1.14.1.14.01.016.011.	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang terlatih	392 Orang	-	56.000.000,00	392 Orang	-	
1.14.1.14.01.016.012.	Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan (DAK Fisik)	Jumlah Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	60 Unit	-	363.000.000,00	60 Unit	-	
1.14.1.14.01.016.013.	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Paud	Jumlah keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tumbuh kembang anak	560 Orang	-	162.400.000,00	1120 Orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.14.1.14.01.016.015.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kerja PPKBD Dan Sub PPKBD (DAK Fisik)	Jumlah Sarana Penunjang Petugas Lapangan Keluarga Berencana	34 Unit	Kec. Tompobulu, Kec. Cenrana, Kec. Camba, Kec. Mallawa	200.000.000,00	34 Unit	200.000.000,00	
1.14.1.14.01.017.	Program Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	-	-		1.301.370.000,00		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
1.14.1.14.01.017.001.	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Jumlah kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan	14 Klp	-	157.150.000,00	14 Klp	-	
1.14.1.14.01.017.003.	Sosialisasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Jumlah masyarakat usia 15 - 19 Thn yang mengetahui dan memahami tentang resiko kawin pada usia dini.	800 Orang	-	99.850.000,00	800 Orang	-	
1.14.1.14.01.017.004.	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia yang mendapatkan pembinaan	84 Klp	-	187.950.000,00	84 Klp	-	
1.14.1.14.01.017.006.	Pembinaan Kelompok Bina Balita	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita yang mendapatkan pembinaan	14 Klp	-	104.020.000,00	14 Klp	-	
1.14.1.14.01.017.007.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengembangan Model BKB-Posyandu-PAUD	Jumlah pembangunan BKB Holistik Integratif (BKB-Posyandu-Paud)	2 Unit	-	313.500.000,00	2 Unit	-	
1.14.1.14.01.017.009.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan	4 Unit	-	438.900.000,00	10 Unit	-	
1.14.1.14.01.018.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	-	-		605.584.567,00		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.14.1.14.01.018.003.	Penyebarluasan Informasi Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	Jumlah penyebarluasan informasi Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui Media Radio dan secara langsung	26 Kali	-	54.050.000,00	26 Kali	-	
1.14.1.14.01.018.005.	Penyediaan Dukungan Media KIE dan Manajemen BCKB (DAK Non Fisik)	Jumlah Peserta KB Baru	10966 Orang	-	174.620.000,00	10966 Orang	-	
1.14.1.14.01.018.006.	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB yang mendapatkan pembinaan	54422 PUS	-	13.250.000,00	54422 PUS	-	
1.14.1.14.01.018.007.	Operasional Distribusi Alokasi (DAK Non Fisik)	Jumlah Jenis Alat dan Obat Kontrasepsi yang Didistribusikan	5 Jenis	-	60.900.000,00	5 Jenis	-	
1.14.1.14.01.018.008.	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB (DAK Fisik)	Jumlah Tempat Penyimpanan Alat Dan Obat Kontrasepsi	3 Unit	-	45.000.000,00	3 Unit	-	
1.14.1.14.01.018.009.	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB	420 PUS	-	45.141.281,00	420 PUS	-	
1.14.1.14.01.018.010.	Penyelenggaraan Bhakti Sosial KB Kesehatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bhakti Sosial KB - Kes	400 Orang	-	18.388.286,00	400 Orang	-	
1.14.1.14.01.018.011.	Pelayanan Konseling KB	Jumlah PUS yang mendapatkan bimbingan KB	280 Orang	-	25.000.000,00	280 Orang	-	
1.14.1.14.01.018.013.	Penyuluhan KIE	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan KIE	1400 Orang	Kecamatan	24.150.000,00	1400 Orang	-	
1.14.1.14.01.018.014.	Jambore Saka Kencana dan PIK R/M	Jumlah remaja yang memiliki pengetahuan tentang Kesatuan Reproduksi dan Kesatuan Karya	252 Orang	-	145.085.000,00	252 Orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.15.	PERHUBUNGAN				3.392.773.300,00		-	
1.15.1.15.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		727.600.000,00		-	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
1.15.1.15.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah cakupan layanan administrasi umum	12 Layanan	Dinas Perhubungan	362.221.000,00	12 Layanan	-	
1.15.1.15.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah cakupan layanan pendukung administrasi umum perkantoran	9 layanan	Dinas Perhubungan	340.305.000,00	9 layanan	-	
1.15.1.15.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	12 Dokumen	Dinas Perhubungan	8.460.000,00	12 Dokumen	-	
1.15.1.15.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	10 Dokumen	Dinas Perhubungan	5.689.000,00	10 Dokumen	-	
1.15.1.15.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah dokumen laporan atas hasil pelaksanaan kegiatan OPD	42 Dokumen	Dinas Perhubungan	3.225.000,00	42 Dokumen	-	
1.15.1.15.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah laporan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	1 Dokumen	Dinas Perhubungan	7.700.000,00	1 Dokumen	-	
1.15.1.15.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		722.100.000,00		-	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
1.15.1.15.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan bangunan gedung kantor	2 Jenis	Dinas Perhubungan	251.900.000,00	2 Jenis	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.15.1.15.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	6 Jenis	Dinas Perhubungan	385.700.000,00	7 Jenis	-	
1.15.1.15.01.002.003.	Penyediaan Ruang Kantor	Jumlah jenis ruangan kantor	1 Jenis	Dinas Perhubungan	31.500.000,00	2 Jenis	-	
1.15.1.15.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah kendaraan hias	1 Unit	Dinas Perhubungan	13.000.000,00	1 Unit	-	
1.15.1.15.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan bangunan gedung kantor berada dalam kondisi yang baik	1 Unit	Dinas Perhubungan	10.000.000,00	1 Unit	-	
1.15.1.15.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor berada dalam kondisi baik	6 Jenis	Dinas Perhubungan	30.000.000,00	7 Jenis	-	
1.15.1.15.01.015.	Program Pengelolaan Angkutan Dan Lalu Lintas Darat	Persentase tingkat kecelakaan	-		343.328.000,00		-	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
1.15.1.15.01.015.001.	Pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang lulus uji emisi	50 Unit	Dinas Perhubungan	4.450.000,00	50 Unit	-	
1.15.1.15.01.015.002.	Operasi Penertiban KIR dan Trayek Angkutan	Jumlah kendaraan yang tidak memiliki KIR dan Izin Trayek	50 Unit	Dinas Perhubungan	25.515.000,00	50 Unit	-	
1.15.1.15.01.015.003.	Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Jumlah Pengembang yang tidak memiliki Dokumen Andalalin	25 perusahaan	Dinas Perhubungan	5.655.000,00	25 perusahaan	-	
1.15.1.15.01.015.004.	Koordinasi Antar Instansi/Lembaga Penyelenggara Lalu Lintas Angkutan Jaln (Forum LLAJ)	Jumlah instansi yang terkait dalam penanganan dampak penyelenggara LLAJ	8 Instansi	Dinas Perhubungan	15.481.000,00	8 Instansi	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.15.1.15.01.015.005.	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah pengendara yang akan disurvei	100 orang	Dinas Perhubungan	1.532.000,00	100 orang	-	
1.15.1.15.01.015.006.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas			Dinas Perhubungan	-		-	
1.15.1.15.01.015.007.	Pemeliharaan Fasilitas Terminal dan Area Parkir	Jumlah fasilitas terminal dan area parkir dalam kondisi baik	1 Unit	Dinas Perhubungan	5.925.000,00	1 Unit	-	
1.15.1.15.01.015.008.	Posko Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Jumlah petugas yang melaksanakan posko pengamanan natal dan tahun baru	35 Orang	Dinas Perhubungan	20.059.000,00	35 Orang	-	
1.15.1.15.01.015.009.	Posko Pengamanan Operasi Ketupat	Jumlah petugas yang melaksanakan posko pengamanan operasi ketupat	35 Orang	Dinas Perhubungan	20.369.000,00	35 Orang	-	
1.15.1.15.01.015.010.	Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah petugas lapangan yang melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas	21 Orang	Dinas Perhubungan	21.600.000,00	21 Orang	-	
1.15.1.15.01.015.011.	Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Kegiatan Pengaturan dan Penertiban Lalu Lintas			Dinas Perhubungan	209.150.000,00		-	
1.15.1.15.01.015.012.	Sosialisasi Zona Selamat Sekolah	Jumlah peserta sosialisasi zona selamat sekolah	100 Orang	Dinas Perhubungan	13.592.000,00	100 Orang	-	
1.15.1.15.01.016.	Program Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan	Pemasangan rambu-rambu	-		1.156.990.300,00		-	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
1.15.1.15.01.016.001.	Pengandaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAU)	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan	8 Jenis	Dinas Perhubungan	172.400.000,00	8 Jenis	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.15.1.15.01.016.002.	Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan berada dalam kondisi baik	5 Jenis	Dinas Perhubungan	88.500.000,00	5 Jenis	-	
1.15.1.15.01.016.003.	Pengadaan Pengaman Jalan dan Zona Selamat Sekolah	Jumlah pengaman jalan dan Zona Selamat Sekolah	3 Jenis	Dinas Perhubungan	431.417.000,00	3 Jenis	-	
1.15.1.15.01.016.004.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ASDP	Jumlah sarana dan prasarana ASDP yang berada dalam kondisi baik	2 Jenis	Dinas Perhubungan	71.900.000,00	2 Jenis	-	
1.15.1.15.01.016.005.	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK)	Jumlah rambu-rambu yang terpasang	2 Jenis	Dinas Perhubungan	392.773.300,00	2 Jenis	-	
1.15.1.15.01.017.	Program Pengelolaan Angkutan Dan Lalu Lintas Sungai, Laut, Dan Udara	-	-		442.755.000,00		-	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
1.15.1.15.01.017.002.	Sosialisasi dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai, dan Penyeberangan	Jumlah peserta sosialisasi dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan	200 Orang	Dinas Perhubungan	14.075.000,00	200 Orang	-	
1.15.1.15.01.017.003.	Patroli dan Pengawasan Angkutan Sungai	Jumlah kelengkapan kapal patroli dan pengawasan angkutan sungai	3 Jenis	Dinas Perhubungan	98.000.000,00	3 Jenis	-	
1.15.1.15.01.017.004.	Sosialisasi dan Penyuluhan Keselamatan Pelayaran, Laut, dan Sungai	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Keselamatan Pelayaran, Laut dan sungai	200 Orang	Dinas Perhubungan	7.600.000,00	200 Orang	-	
1.15.1.15.01.017.005.	Digitalisasi Data Angkutan Laut dan Sungai dengan Kapasitas GT-1-GT7	Jumlah Dokumen Digitalisasi Data angkutan laut dan sungai dengan kapasitas GT.1 - GT.7	500 Dokumen	Dinas Perhubungan	4.350.000,00	500 Dokumen	-	
1.15.1.15.01.017.006.	Pembangunan Dermaga Apung HDPE	Jumlah Dermaga Apung HDPE	1 Unit	Dinas Perhubungan	301.900.000,00	1 Unit	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.15.1.15.01.017.007.	Sosialisasi Kedermagaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan dan Manajamen Dermaga	100 Orang	Dinas Perhubungan	16.830.000,00	100 Orang	-	
1.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.264.034.900,00		7.612.955.350,00	
1.16.1.16.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		407.035.900,00		463.793.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
1.16.1.16.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan	12 Layanan	Kominfo	197.521.500,00	12 Layanan	191.277.350,00	
1.16.1.16.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran	12 Layanan	Kominfo	144.244.000,00	12 Layanan	151.734.000,00	
1.16.1.16.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran	12 Layanan	Kominfo	55.200.000,00	12 Layanan	95.535.000,00	
1.16.1.16.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	32 Dokumen	Kominfo	3.932.000,00	32 Dokumen	11.497.200,00	
1.16.1.16.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Kegiatan OPD	6 Dokumen	Kominfo	3.750.000,00	6 Dokumen	2.750.000,00	
1.16.1.16.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi			Kominfo	2.388.400,00		11.000.000,00	
1.16.1.16.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		348.022.500,00		390.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.16.1.16.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis	Kominfo	121.022.500,00	5 Jenis	104.500.000,00	
1.16.1.16.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Karnaval	1 Unit	Kominfo	10.000.000,00	1 Unit	11.000.000,00	
1.16.1.16.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Berada dalam Kondisi Baik	20 Unit	kominfo	17.000.000,00	20 Unit	55.000.000,00	
1.16.1.16.01.002.010.	Rehabilitasi Ruang Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi dan Berfungsi Dengan Baik	1 Unit	Kominfo	200.000.000,00	1 Unit	220.000.000,00	
1.16.1.16.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-		115.000.000,00		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
1.16.1.16.01.003.001.	Kursus/Pelatihan Singkat Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kominfo	115.000.000,00	10 Orang	165.000.000,00	
1.16.1.16.01.015.	Program Pengembangan Sarana Prasarana TIK	-	-		2.719.470.000,00		1.848.957.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
1.16.1.16.01.015.002.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK dan Data Center	Jumlah OPD Yang Tercover Jaringan Internet Dan Data Center	45 OPD	Kominfo	247.270.000,00	45 OPD	308.957.000,00	
1.16.1.16.01.015.002.	Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana TIK	Luas Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan Yang Tercover Jaringan Internet	148,75 Km ²	Kominfo	2.472.200.000,00	148,75 Km ²	1.540.000.000,00	
1.16.1.16.01.016.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	-	-		576.186.000,00		699.239.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.16.1.16.01.016.001.	Peliputan Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah dan Kegiatan Masyarakat	Jumlah Peliputan Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah	480 Peliputan	Kominfo	409.084.000,00	480 Peliputan	491.559.200,00	
1.16.1.16.01.016.002.	Pengelolaan Radio Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Radio Milik Pemerintah yang Dikelola Dengan Baik	1 Unit	Kominfo	118.800.000,00	1 Unit	152.680.000,00	
1.16.1.16.01.016.003.	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	14 Kelompok	Kecamatan	48.302.000,00	14 Kelompok	55.000.000,00	
1.16.1.16.01.017.	Program Pembinaan dan Pengembangan E - Government	-	-		3.098.320.500,00		4.045.465.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
1.16.1.16.01.017.001.	Sosialisasi Aplikasi	Jumlah Aplikasi Yang Terbangun	7 Aplikasi	Kominfo	2.985.845.500,00	7 Aplikasi	3.935.465.600,00	
1.16.1.16.01.017.002.	Pengelolaan, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	Aplikasi	7 Aplikasi	Kominfo	112.475.000,00	7 Aplikasi	110.000.000,00	
1.20.	STATISTIK				282.716.000,00		193.343.700,00	
1.20.1.16.01.015.	Program Pengembangan Ketersediaan Data/Informasi Sektoral Daerah	-	-		282.716.000,00		193.343.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
1.20.1.16.01.015.001.	Bimtek Pengelola Data	Jumlah PPID Pembantu	45 Orang	Kominfo	52.575.000,00	45 Orang	60.491.750,00	
1.20.1.16.01.015.002.	Sosialisasi E-Lapor	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi	350 Orang	Kominfo	89.300.000,00	350 Orang	6.600.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.20.1.16.01.015.003.	Pengembangan Ketersediaan Data Informasi Berbasis Elektronik	Jumlah Pengelola Data yang Mengikuti Birntek	45 orang	Kominfo	55.000.000,00	45 Orang	62.999.200,00	
1.20.1.16.01.015.004.	Penyediaan Dokumen Profil Daerah Kabupaten Maros	Jumlah Dokumen Profil Daerah	50 Exemplar	Kominfo	29.721.000,00	50 Exemplar	63.252.750,00	
1.20.1.16.01.015.006.	Pembentukan Kampung Statistik	Jumlah Kampung Statistik yang Dibentuk	1	Kelurahan Soreang	56.120.000,00	1	-	
1.21.	PERSANDIAN				78.436.000,00		74.091.600,00	
1.21.1.16.01.015.	Program Pengamanan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	-	-		78.436.000,00		74.091.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
1.21.1.16.01.015.001.	Pengelolaan jaring komunikasi sandi	Laporan Penyelenggaraan Persandian	13 Laporan	Kominfo	53.136.000,00	13 Laporan	46.371.600,00	
1.21.1.16.01.015.002.	Pengaplikasian Penandatanganan Elektronik	Tanda Tangan Elektronik	45 OPD	Kominfo	25.300.000,00	45 OPD	27.720.000,00	
1.17.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				2.371.504.000,00		-	
1.17.1.17.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		807.544.000,00		-	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAERAH
1.17.1.17.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah cakupan layanan administrasi umum perkantoran	12 Layanan	Kabupaten Maros	486.243.500,00	12 Layanan	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.17.1.17.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah cakupan layanan pendukung administrasi umum perkantoran	9 Layanan	Kabupaten Maros	212.260.500,00	9 Layanan	-	
1.17.1.17.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen SPJ Fungsional dan administrasi keuangan OPD	12 Dokumen	Kabupaten Maros	89.700.000,00	12 Dokumen	-	
1.17.1.17.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	-	Kabupaten Maros	8.546.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah dokumen pelaporan OPD	7 Dokumen	Kabupaten Maros	5.544.000,00	7 Dokumen	-	
1.17.1.17.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah laporan survey internal penilaian kapasitas organisasi	1 Dokumen	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros	5.250.000,00	1 Dokumen	-	
1.17.1.17.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		430.235.000,00		-	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAERAH
1.17.1.17.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan bangunan gedung kantor	2 jenis	Dinas Kopumdag Kab. Maros	-	2 jenis	-	
1.17.1.17.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	5 jenis	Dinas Kopumdag Kab. Maros	375.235.000,00	5 jenis	-	
1.17.1.17.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah kendaraan hias/devile/kamaval/pawai	1 unit	Dinas Kopumdag Kab. Maros	10.000.000,00	1 unit	-	
1.17.1.17.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang berada dalam kondisi yang baik	1 jenis	Dinas Kopumdag Kab. Maros	10.000.000,00	1 jenis	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.17.1.17.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang berada dalam kondisi yang baik	10 jenis	Dinas Kopumdag Kab. Maros	35.000.000,00	10 jenis	-	
1.17.1.17.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-		31.170.000,00		-	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAERAH
1.17.1.17.01.003.001.	Kursus/Pelatihan Singkat Aparatur	Jumlah ASN Pengelola Pasar yang mengikuti Pelatihan Teknis Uji Timbangan	25 orang	Kabupaten Maros	31.170.000,00	25 orang	-	
1.17.1.17.01.015.	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM/UKM	Persentase Usaha Mikro Kecil	100%		842.860.000,00		-	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAERAH
1.17.1.17.01.015.001.	Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang bermitra dengan BUMN, BUMD, dan BUMS	100 UMKM	Kabupaten Maros	24.400.000,00	100 UMKM	-	
1.17.1.17.01.015.002.	Sosialisasi Pangan Industri Rumah Tangga dan Izin Usaha Mikro Kecil bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi PIRT dan IUMK	75 UMKM	Kabupaten Maros	88.325.000,00	75 UMKM	-	
1.17.1.17.01.015.003.	Pelatihan Pembuatan Desain Kemasan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan desain kemasan	40 UMKM	Kabupaten Maros	135.120.000,00	40 UMKM	-	
1.17.1.17.01.015.004.	Keikutsertaan Promosi Produk UMKM	Jumlah UMKM yang ikut serta dalam promosi produk	23 UMKM	Makassar, Jakarta, Malang	192.100.000,00	23 UMKM	-	
1.17.1.17.01.015.005.	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	150 Orang	Kabupaten Maros	27.120.000,00	150 Orang	-	
1.17.1.17.01.015.006.	Update dan Validasi Data UMKM	Jumlah UMKM baru yang terdata	240 UMKM	14 Kecamatan	39.720.000,00	240 UMKM	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

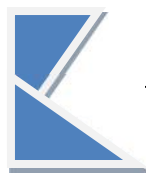
1.17.1.17.01.015.009.	Sosialisasi Wirausaha dan Pengembangan UMKM	Jumlah wirausaha dan calon wirausaha yang mengikuti sosialisasi	100 orang	Kabupaten Maros	18.850.000,00	100 orang	-	
1.17.1.17.01.015.010.	Sosialisasi HakI bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HakI	100 UMKM	Kabupaten Maros	317.225.000,00	100 UMKM	-	
1.17.1.17.01.016.	Program Peningkatan Kualitas Dan Pemberdayaan Lembaga Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	70,82%		259.695.000,00		-	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAERAH
1.17.1.17.01.016.008.	Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Koperasi Berprestasi dan Tokoh Koperasi	Jumlah calon koperasi berprestasi dan tokoh koperasi yang dinilai	80 koperasi	Kabupaten Maros	41.930.000,00	80 koperasi	-	
1.17.1.17.01.016.018.	Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif yang dikembangkan usahanya	75 koperasi	Kabupaten Maros	26.065.000,00	75 koperasi	-	
1.17.1.17.01.016.019.	Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi aktif yang diawasi	200 lembaga	14 Kecamatan se-Kabupaten Maros	122.900.000,00	200 lembaga	-	
1.17.1.17.01.016.020.	Bimbingan Teknis Perkoperasian	Jumlah koperasi aktif yang mengikuti bimtek perkoperasian	120 koperasi	Kabupaten Maros	68.800.000,00	120 koperasi	-	
2.06.	PERDAGANGAN				20.628.496.000,00		-	
2.06.1.17.01.015.	Program Peningkatan Efisiensi Dan Pengamanan Perdagangan Serta Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang Informal / Usaha Informal	100%		20.628.496.000,00		-	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAERAH
2.06.1.17.01.015.001.	Layanan Tera / Tera Ulang Alat UTTP di Kabupaten Maros	Jumlah pedagang yang mendapat layanan tera/tera ulang alat UTTP	1.500 pedagang	14 kecamatan	28.350.000,00	1.500 pedagang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.06.1.17.01.015.002.	Pelayanan Pos Ukur Ulang	Jumlah pedagang yang tertib ukur	800 pedagang	Kec. Mandai, Kec. Lau, Kec. Turikale, Kec. Marusu, Kec. Tanralili, Kec. Camba, Kec. Cenrana, Kec. Mallawa	93.000.000,00	800 pedagang	-	
2.06.1.17.01.015.003.	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah pedagang di 14 kecamatan se-Kabupaten Maros yang mendapatkan fasilitas/sarana prasarana pasar rakyat	16.058 pedagang	14 Kecamatan	19.561.136.000,00	16.058 pedagang	-	
2.06.1.17.01.015.004.	Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Pedagang Kaki Lima yang dibina	65 pedagang	Kab. Maros	9.025.000,00	65 pedagang	-	
2.06.1.17.01.015.005.	Monitoring dan pendataan perizinan Badan Usaha Perdagangan	Jumlah badan usaha perdagangan yang didata dan diawasi	350 Badan Usaha	-	6.337.500,00	350 Badan Usaha	-	
2.06.1.17.01.015.006.	Sosialisasi relokasi dan pasca relokasi pembangunan pasar	Jumlah Pedagang yang mengikuti sosialisasi	50 Pedagang	Kab. Maros	17.137.500,00	50 Pedagang	-	
2.06.1.17.01.015.007.	Penyelenggaraan Pasar Murah	Jumlah masyarakat pra sejahtera yang mendapatkan sembako murah	2500 KK	14 Kecamatan se-Kabupaten Maros	331.425.000,00	2500 KK	-	
2.06.1.17.01.015.009.	Layanan informasi harga kebutuhan pokok	Jumlah pedagang yang disurvei	2.400 pedagang	Kabupaten Maros	27.375.000,00	2.400 pedagang	-	
2.06.1.17.01.015.010.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan penyediaan prasarana Pasar Butta Salewangang	Jumlah pedagang Pasar Rakyat Butta Salewangang Maros yang mendapatkan fasilitas/sarana prasarana pasar	1.305 Pedagang	Kabupaten Maros	150.000.000,00	1.305 Pedagang	-	
2.06.1.17.01.015.011.	Pengelolaan dan pelayanan pasar rakyat	Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Butta Salewangang Maros yang mendapatkan pelayanan pasar	1.305 Pedagang	Dinas Kopumdag Kab. Maros	330.150.000,00	1.305 Pedagang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.06.1.17.01.015.015.	Pemantauan dan Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah pedagang/pemilik UTTP yang dipantau dan diawasi	1500 Pedagang	Kabupaten Maros	30.790.000,00	1500 Pedagang	-	
2.06.1.17.01.015.016.	Sosialisasi Metrologi Legal di Kabupaten Maros	Jumlah pedagang yang mengikuti Sosialisasi Metrologi Legal	100 orang	Kabupaten Maros	43.770.000,00	100 orang	-	
1.18.	PENANAMAN MODAL				2.961.397.200,00		2.957.152.920,00	
1.18.1.18.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		1.116.818.300,00		1.136.376.670,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
1.18.1.18.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah cakupan layanan administrasi perkantoran	12 Layanan	DPMPPTSP	610.856.300,00	12 Layanan	616.351.670,00	
1.18.1.18.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah cakupan layanan pendukung administrasi umum perkantoran	9 Layanan	DPMPPTSP	241.712.000,00	9 Layanan	199.925.000,00	
1.18.1.18.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen SPJ fungsional dan administrasi keuangan OPD	12 Dokumen	DPMPPTSP	238.050.000,00	12 Dokumen	280.225.000,00	
1.18.1.18.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan OPD	7 Dokumen	DPMPPTSP	16.200.000,00	7 Dokumen	28.875.000,00	
1.18.1.18.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	5 Dokumen	DPMPPTSP	5.000.000,00	5 Dokumen	5.500.000,00	
1.18.1.18.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah dokumen hasil survey	1 Dokumen	DPMPPTSP	5.000.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.18.1.18.01.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		463.454.000,00		462.858.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
1.18.1.18.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor				200.000.000,00		200.000.000,00	
1.18.1.18.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	13 Jenis	DPMPTSP	208.000.000,00	15 Jenis	201.859.350,00	
1.18.1.18.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah kendaraan hias/devile/kamaval/pawai	1 Unit	DPMPTSP	10.000.000,00	1 Unit	11.000.000,00	
1.18.1.18.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang berada dalam kondisi yang baik	7 Jenis	DPMPTSP	45.454.000,00	7 Jenis	49.999.400,00	
1.18.1.18.01.015.	Program Peningkatan Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Perizinan Daerah	-	-		507.424.900,00		557.617.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
1.18.1.18.01.015.002.	Pemeliharaan Jaringan Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan (SIMPEL)	Jumlah system aplikasi pelayanan perizinan yang berada dalam kondisi yang baik	1 Sistem	DPMPTSP	30.000.000,00	1 Sistem	33.000.000,00	
1.18.1.18.01.015.003.	Sosialisasi standar Pelayanan dan SOP Perizinan Melalui Media Cetak/Radio/Televisi	Jumlah SOP Perizinan yang disebarluaskan melalui media cetak/radio/televisi	20 SOP	DPMPTSP	20.000.000,00	20 SOP	22.000.000,00	
1.18.1.18.01.015.004.	Pemantauan dan Pengawasan Perizinan	Jumlah Dokumen Laporan atas hasil pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan	12 Dokumen	DPMPTSP	68.524.900,00	12 Dokumen	75.377.500,00	
1.18.1.18.01.015.006.	Sosialisasi dan Pelayanan Perizinan Keliling (Mobile Perizinan)	Jumlah kecamatan yang terjangkau pelayanan perizinan	14 Kecamatan	DPMPTSP	50.000.000,00	14 Kecamatan	55.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.18.1.18.01.015.008.	Forum Koordinasi dan Konsultasi serta penyusunan SOP dan SP perizinan	Jumlah penyusun pelayanan perizinan	4 Orang	DPMPPTSP	6.900.000,00	4 Orang	7.590.000,00	
1.18.1.18.01.015.009.	Bimtek Peningkatan kompetensi terkait perilaku aparatur pelayanan perizinan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	30 Orang	DPMPPTSP	60.750.000,00	30 Orang	66.825.000,00	
1.18.1.18.01.015.010.	Bimtek peningkatan kompetensi terkait ketentuan SOP dan standar pelayanan perizinan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek pelayanan perizinan	30 Orang	DPMPPTSP	60.750.000,00	30 Orang	66.825.000,00	
1.18.1.18.01.015.011.	Study komparatif penerapan mall pelayanan	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kualitas SDM	8 Orang	DPMPPTSP	50.500.000,00	8 Orang	55.000.000,00	
1.18.1.18.01.015.012.	Penerapan dan pengembangan system Aplikasi SIMPEL di Kecamatan	Jumlah system aplikasi SIMPEL yang berada dalam kondisi yang baik	1 Sistem	DPMPPTSP	160.000.000,00	1 Sistem	176.000.000,00	
1.18.1.18.01.016.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Penanaman Modal	-	-		82.700.000,00		77.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
1.18.1.18.01.016.005.	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah dokumen laporan atas hasil pelaksanaan pengawasan penanaman modal	12 Dokumen	DPMPPTSP	24.000.000,00	12 Dokumen	22.000.000,00	
1.18.1.18.01.016.009.	Bimtek Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah Pengusaha yang mampu membuat/menyusun LKPM	100 Orang	DPMPPTSP	28.700.000,00	100 Orang	22.550.000,00	
1.18.1.18.01.016.010.	Penyusunan Dokumen Investasi Daerah	Jumlah Dokumen realisasi investasi	12 Dokumen	DPMPPTSP	30.000.000,00	12 Dokumen	33.000.000,00	
1.18.1.18.01.017.	Program Pengembangan Promosi Dan Kerjasama Investasi	-	-		791.000.000,00		722.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.18.1.18.01.017.003.	Pameran Potensi Investasi Penanaman Modal	Jumlah pameran yang diikuti dalam mempromosikan potensi daerah Kab. Maros	1 Kali	DPMPTSP	150.000.000,00	1 Kali	165.000.000,00	
1.18.1.18.01.017.007.	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPID	Jumlah system aplikasi SIPID	1 Sistem	DPMPTSP	20.500.000,00	1 Sistem	22.550.000,00	
1.18.1.18.01.017.008.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPID	Presentase PMDN berskala nasional	93,86 Persen	DPMPTSP	120.500.000,00	93,86 Persen	35.200.000,00	
1.18.1.18.01.017.009.	Pengelolaan Gedung Pusat Pemasaran Produk Unggulan Daerah			Kecamatan Turikale	500.000.000,00		500.000.000,00	
2.07.	PERINDUSTRIAN				477.825.000,00		495.161.500,00	
2.07.1.18.01.015.	Program Pengembangan Sentra Industri Potensial Dan Industri Kecil Menengah	-	-		477.825.000,00		495.161.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
2.07.1.18.01.015.001.	Pengembangan Sentra Industri Potensial	Jumlah Pelaku sentra industry potensial	45 Orang	DPMPTSP	15.020.000,00	45 Orang	16.522.000,00	
2.07.1.18.01.015.002.	Peningkatan Daya Saing Produk Bagi Pelaku IKM	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti studi banding	13 IKM, 2 Pendamping	DPMPTSP	100.340.000,00	20 IKM	110.374.000,00	
2.07.1.18.01.015.003.	Promosi Hasil Produksi Industri Kecil dan Menengah (Dekranasda Ina Craft)	Jumlah hasil produksi IKM yang dipromosikan	15 Jenis	DPMPTSP	150.000.000,00	15 Jenis	165.000.000,00	
2.07.1.18.01.015.004.	Penyediaan Data dan Informasi Tentang Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah Dokumen data dan informasi tentang IKM	2 Dokumen	DPMPTSP	9.400.000,00	2 Dokumen	10.340.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.07.1.18.01.015.006.	Sosialisasi Penerapan Peraturan Daerah RPIK dan Kawasan Industri serta Koordinasi dan Konsultasi Lintas Sektoral	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	40 Orang	DPMPTSP	57.205.000,00	40 Orang	62.925.500,00	
2.07.1.18.01.015.007.	Pengembangan Pusat-pusat Etalase/Eksibisi/Pameran atas hasil Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Showroom hasil olahan yang dikembangkan	2 Unit	DPMPTSP	15.860.000,00	2 Unit	-	
2.07.1.18.01.015.008.	Pendirian/Revitalisasi rumah kemasan serta peralatan lainnya yang diperlukan dalam sentra IKM (DAK)	Jumlah Rumah Kemasan dan Peralatannya	1 Unit	-	-	1 Unit	-	
2.07.1.18.01.015.010.	Pengadaan Peralatan Dapur Dan Alat Kemasan			Kecamatan Turikale	100.000.000,00		100.000.000,00	
2.07.1.18.01.015.011.	Penyusunan Dokumen Pendirian Rumah Kemasan			-	30.000.000,00		30.000.000,00	
1.19.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				2.745.975.000,00		3.760.019.750,00	
1.19.1.19.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		434.314.790,00		506.341.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH
1.19.1.19.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Dispora	213.935.500,00	15 Layanan	229.116.500,00	
1.19.1.19.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	Dispora	170.172.000,00	9 Layanan	153.176.000,00	
1.19.1.19.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	10 Layanan	Dispora	19.900.000,00	10 Layanan	90.978.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.19.1.19.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang terlaksana dengan baik	47 Dokumen	Dispora	22.345.500,00	47 Dokumen	20.545.500,00	
1.19.1.19.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang terlaksana dengan baik	1 Dokumen	Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	4.900.000,00	
1.19.1.19.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang terlaksana dengan baik	1 Laporan	Laporan	6.861.790,00	1 Laporan	7.625.000,00	
1.19.1.19.01.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		230.871.460,00		214.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH
1.19.1.19.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Tersedia	1 Unit	Dispora	90.500.000,00	1 Unit	94.500.000,00	
1.19.1.19.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	Dispora	120.571.460,00	12 Unit	90.000.000,00	
1.19.1.19.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Hasil Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	1 Unit	Kab. Maros	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	
1.19.1.19.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Tersedia	1 Unit	Dispora	5.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	
1.19.1.19.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	16 Jenis	Dispora	4.800.000,00	16 Jenis	9.800.000,00	
1.19.1.19.01.015.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Berolahraga	-	-		427.985.000,00		627.725.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.19.1.19.01.015.001.	Penyelenggaraan Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rohani	Jumlah cabang olahraga yang di bina	2 Cabang	Jl. Asoka Area Car Free Day	77.150.000,00	2 Cabang	166.760.000,00	
1.19.1.19.01.015.002.	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi/Senam Jantung Sehat	Jumlah Anggota Korps ASN Yang mengikuti Senam	4000 orang	Turikale	33.765.000,00	8000 orang	48.065.000,00	
1.19.1.19.01.015.003.	Penyelenggaraan Olahraga Bagi Anggota Korp ASN	Jumlah Anggota Korps ASN Yang mengikuti Olahraga	2.500 orang	Turikale	99.375.000,00	8.000 orang	184.775.000,00	
1.19.1.19.01.015.004.	Penyelenggaraan Olahraga Tradisional	Jumlah Peserta Olahraga Tradisional	30 Atlet	Turikale	72.600.000,00	30 Atlet	76.250.000,00	
1.19.1.19.01.015.005.	Penyelenggaraan Olahraga Usia Lanjut (Lansia)	Jumlah lansia yang mengikuti olahraga	100 Orang	Kabupaten Maros	24.620.000,00	100 Orang	31.400.000,00	
1.19.1.19.01.015.006.	Pekan olahraga antar pelajar tingkat propinsi (POPDA)	Jumlah pelajar yang mengikuti POPDA	100 Orang	Propinsi Sulawesi Selatan	120.475.000,00	150 Orang	120.475.000,00	
1.19.1.19.01.016.	Program Pembinaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga Unggulan Daerah	-	-		579.218.000,00		1.075.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH
1.19.1.19.01.016.001.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Lapangan Yang Terbangun/Rehab	3 Lapangan	Kabupaten Maros	100.000.000,00	3 Lapangan	300.000.000,00	
1.19.1.19.01.016.002.	Pemeliharaan Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Lapangan Yang Terpelihara	5 Lapangan	Kabupaten Maros	15.000.000,00	6 Lapangan	200.000.000,00	
1.19.1.19.01.016.003.	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (HAORNAS 2020)	Jumlah cabor yang mengikuti kompetisi olahraga	6 Cabor	Lapangan Pallantikang Maros	81.320.000,00	7 Cabor	165.106.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.19.1.19.01.016.004.	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Bupati Cup 2020)	Jumlah Tim Kesebelasan Yang Mengikuti Kompetisi Olahraga	14 Tim	14 Kecamatan	157.420.000,00	14 Tim	160.194.000,00	
1.19.1.19.01.016.005.	Pembinaan Atlet Berprestasi	Jumlah SK Penetapan Atlet Berprestasi	25 Orang	Kabupaten Maros	88.000.000,00	30 Orang	100.000.000,00	
1.19.1.19.01.016.006.	Pembinaan Bibit Atlet Unggulan	Jumlah SK Penetapan Bibit Atlet Berprestasi	150 SK	Turikale	137.478.000,00	150 SK	150.000.000,00	
1.19.1.19.01.017.	Program Pemberdayaan Kepemudaan	-	-		353.711.250,00		144.825.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH
1.19.1.19.01.017.001.	Pembinaan KORSIK Maros	Jumlah Anggota Korsiik Yang Dibina	38 Orang	Orang	263.165.000,00	40 Orang	39.005.000,00	
1.19.1.19.01.017.002.	Peningkatan Kapasitas dan wawasan Kebangsaan/Hari Sumpah Pemuda	Jumlah Organisasi Yang Memiliki Peningkatan Kapsitas Wawasan Kebangsaan	75 Organisasi	Baruga kantor Bupati	30.855.000,00	75 Organisasi	38.005.000,00	
1.19.1.19.01.017.003.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Yang Mendapatkan Pembinaan	10 OKP	14 Kecamatan	33.455.000,00	15 OKP	39.115.000,00	
1.19.1.19.01.017.004.	Sosialisasi Bahaya Narkoba	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Pembinaan	300 Orang	SMA/MA/SMK/OKP Kabupaten Maros	26.236.250,00	400 Orang	28.700.000,00	
1.19.1.19.01.018.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda	-	-		719.874.500,00		1.191.528.750,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH
1.19.1.19.01.018.001.	Pembinaan Paskibraka Tingkat Kab. Maros	Jumlah Pemuda Yang Dilatih	74 Orang	Kabupaten Maros	546.487.000,00	60 Orang	867.078.750,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.19.1.19.01.018.002.	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda Terampil Pada Organisasi Pemuda	50 Orang	BLK	74.537.500,00	60 Orang	214.450.000,00	
1.19.1.19.01.018.003.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Kepramukaan (Apel Akbar)	Jumlah Anggota Pramuka Yang Mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Pramuka	1.250 Orang	Turikale	98.850.000,00	1.250 Orang	110.000.000,00	
1.19.1.19.01.018.004.	Perkemahan Wirakarya Nasional			Keg	-		-	
1.22.	KEBUDAYAAN				2.798.847.500,00		2.758.918.000,00	
1.22.1.22.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		894.572.500,00		966.608.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH
1.22.1.22.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Persentase Fungsi OPD yang Dilaksanakan	100 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	419.807.000,00	100 %	610.908.500,00	
1.22.1.22.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Fungsi OPD yang Dilaksanakan	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	234.099.500,00	100%	224.099.500,00	
1.22.1.22.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Fungsi Manajemen OPD yang Dilaksanakan	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	182.000.000,00	100%	131.600.000,00	
1.22.1.22.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD Terhadap Renstra OPD	100 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	54.200.000,00	100 %	-	
1.22.1.22.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah kinerja kegiatan OPD yang dilaporkan	4 Laporan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.141.000,00	4 Laporan	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.22.1.22.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah dokumen survey internal	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.325.000,00	100%	-	
1.22.1.22.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		808.000.000,00		844.335.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH
1.22.1.22.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Fungsi OPD yang Dilaksanakan	9 Layanan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	245.000.000,00	9 Layanan	162.500.000,00	
1.22.1.22.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Fungsi OPD yang Dilaksanakan	9 Layanan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	30.000.000,00	9 Layanan	129.000.000,00	
1.22.1.22.01.002.003.	Penyediaan Ruangan Kantor	Jumlah Fungsi OPD yang Dilaksanakan	9 Layanan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500.000.000,00	9 Layanan	500.000.000,00	
1.22.1.22.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Fungsi OPD yang Dilaksanakan	9 Layanan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.000.000,00	9 Layanan	10.000.000,00	
1.22.1.22.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Fungsi OPD yang Dilaksanakan	9 Layanan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.000.000,00	9 Layanan	15.000.000,00	
1.22.1.22.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Fungsi OPD yang Dilaksanakan	9 Layanan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.000.000,00	9 Layanan	27.835.000,00	
1.22.1.22.01.015.	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah	-	-		727.225.000,00		824.825.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH
1.22.1.22.01.015.001.	Penyelenggaraan Event Katto Bokko dan Appalili	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam event katto boko dan appalili	1000 orang	Kab. maros	39.000.000,00	1500 orang	41.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.22.1.22.01.015.001.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	2 Cagar	Kecamatan Turikale	49.600.000,00	3 Cagar	141.200.000,00	
1.22.1.22.01.015.002.	Lomba Cerita dan Legenda Rakyat Maros	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam Lomba Cerita dan legenda rakyat	200 orang	Kab. Maros	18.500.000,00	300 orang	22.500.000,00	
1.22.1.22.01.015.003.	Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat yang di bina	1 Lembaga	Denpasar, Bali	20.125.000,00	1 Lembaga	20.125.000,00	
1.22.1.22.01.015.003.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Museum (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan	-	Kec. Turikale	600.000.000,00	-	600.000.000,00	
1.22.1.22.01.016.	Program Pengembangan Kesenian Dan Nilai Seni Daerah	-	-		369.050.000,00		123.150.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH
1.22.1.22.01.016.001.	Festival Gendang dan Kecapi	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam festival gendang dan kecapi	200 Orang	Kec. Turikale	14.900.000,00	300 orang	17.200.000,00	
1.22.1.22.01.016.001.	Penyelenggaraan Festival Akustik	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan festival music akustik	200 orang	Kab. Maros	20.000.000,00	300 orang	29.250.000,00	
1.22.1.22.01.016.002.	Pagelaran Kesenian	Jumlah masyarakat terlibat dalam pagelaran kesenian	200 Orang	Kec. Turikale	24.800.000,00	250 orang	26.550.000,00	
1.22.1.22.01.016.002.	Pemilihan Dara Daeng	Jumlah Peserta Pemilihan Dara Dan Daeng	100 Orang	Kec. Turikale	61.300.000,00	100 Orang	-	
1.22.1.22.01.016.003.	Paduan Suara PEMKAB	Jumlah anggota paduan suara PEMKAB yang di bina	40 Orang	Kec. Turikale	92.600.000,00	40 Orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.22.1.22.01.016.003.	Penyelenggaraan Kesenian Tradisional Daerah	Jumlah masyarakat yang terlibat pada festival kesenian tradisional daerah	100 Orang	Kec. Turikale	105.000.000,00	200 Orang	-	
1.22.1.22.01.016.004.	Pengadaan sarana Dan Parasaran Kesenian	Jumlah Jenis Perlatan kesenian	3	Kec. Turikael	35.000.000,00	5	35.000.000,00	
1.22.1.22.01.016.005.	Festival Dangdut	Jumlah Festival/even yang dilaksanakan	4	Kec.Turikale	15.450.000,00	4	15.150.000,00	
2.02.	PARIWISATA				4.362.552.500,00		1.610.292.500,00	
2.02.1.22.01.015.	Program Pengelolaan Destinasi Dan Usaha Kepariwisataaan Daerah	-	-		3.593.272.500,00		899.662.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH
2.02.1.22.01.015.001.	Pemeliharaan perahu wisata	Jumlah Perahu yang berada dalam pemeliharaan	2 Unit	Kab. Maros	31.500.000,00	2 Unit	-	
2.02.1.22.01.015.001.	Peningkatan kualitas pengelolaan obyek wisata	Jumlah Dokumen Atas Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatana Kualitas Pengelolaan Obyek WIsata	1 Dokumen	Kecamatan Bantimurung	1.253.650.000,00	1 Dokumen	-	
2.02.1.22.01.015.001.	Penyusunan RIPPDA	Jumlah Dokumen Perencanaan RIPPDA	1 Dokumen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	175.000.000,00	-	-	
2.02.1.22.01.015.001.	Promosi wisata dan kebudayaan daerah melalui APKASI OTONOMI EXPO	Terselenggaranya Promosi WIsata Kab. Maros Melalui APKASI OTONOMI EXPO	1 Kegiatan	Jakarta	401.150.000,00	1 Kegiatan	-	
2.02.1.22.01.015.002.	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Jenis Sarana dan prasarama objek wisata	36 Jenis	Kab. Maros	271.500.000,00	36 jenis	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.02.1.22.01.015.002.	Perencanaan pengembangan desa wisata	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	7 Desa	Kec. Cenrana, Kec. Tompobulu, Kec. Bontoa, Kec. Mallawa, Kec. Marusu	227.000.000,00	7 Desa	-	
2.02.1.22.01.015.002.	Study Pengembangan Objek Wisata			-	201.310.000,00		51.000.000,00	
2.02.1.22.01.015.003.	Penyelenggaraan Maros Half Marathon			Kab. Maros	151.858.500,00		151.858.500,00	
2.02.1.22.01.015.003.	Promosi dan publikasi pariwisata melalui media	Jumlah promosi dan publikasi pariwisata yang dilakukan	1 kegiatan	Kab. Maros	183.500.000,00	1 Kegiatan	-	
2.02.1.22.01.015.004.	Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing destinasi Wisata Daerah (DAK Non Fisik)	Tercapainya kegiatan	-	Kec. Bantimurung	696.804.000,00	-	696.804.000,00	
2.02.1.22.01.016.	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	-	-		769.280.000,00		710.630.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH
2.02.1.22.01.016.001.	Pemeliharaan kawasan wisata kuliner	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Wisata Kuliner PTB	1 Kawasan	Kec. Turikale	25.000.000,00	1 Kawasan	-	
2.02.1.22.01.016.002.	Pameran Lukisan dan Fotografi	Jumlah Kegiatan Pameran	1	Kec. Turikale	27.200.000,00	1	27.750.000,00	
2.02.1.22.01.016.002.	Pengelolaan kawasan wisata kuliner	Jumlah Data Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	1000 kelompok	Kec. Turikale	90.000.000,00	1500 kelompok	124.300.000,00	
2.02.1.22.01.016.003.	Kepesertaan pada pameran tingkat nasional	Jumlah Penyelenggaraan Pameran	1	Jakarta	280.180.000,00	1	180.180.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.02.1.22.01.016.004.	Pengembangan Sarana Dan Prasaran Pada Pusat ole ole	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibuat	28 Jenis	Kec.Turikale	120.500.000,00	28 Jenis	153.500.000,00	
2.02.1.22.01.016.005.	Kegiatan Maros Creative And Culture Carnaval	Jumlah Kegiatan Maros Creatif And Culture Carnaval	1	Kec. Turikale	35.350.000,00	1	33.850.000,00	
2.02.1.22.01.016.006.	Festival Film Pendek	Jumlah Pelaku seni Dalam Fetival	10 Sineas	Kec. Turikale	29.650.000,00	20	29.650.000,00	
2.02.1.22.01.016.008.	Pengembangan Rumah Makan / Warung Sehat dan Halal			Kabuapeten Maros	161.400.000,00		161.400.000,00	
1.23.	PERPUSTAKAAN				1.165.544.000,00		1.099.473.000,00	
1.23.1.23.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang terlaksana dengan baik	-		455.298.000,00		528.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.23.1.23.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen OPD yang dilaksanakan	12	Kecamatan Turikale	182.900.000,00	12	172.000.000,00	
1.23.1.23.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah cakupan layanan pendukung administrasi umum perkantoran	9 layanan	Kecamatan Turikale	165.200.000,00	9 layanan	178.000.000,00	
1.23.1.23.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen SPJ Fungsional dan administrasi keuangan OPD	12 dokumen	Kecamatan Turikale	94.598.000,00	12 dokumen	96.000.000,00	
1.23.1.23.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	8 dokumen	Kecamatan Turikale	5.600.000,00	8 dokumen	70.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.23.1.23.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 kali	Kecamatan Turikale	2.500.000,00	1 kali	6.000.000,00	
1.23.1.23.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah dokumen pelaporan OPD	4 dokumen	Kecamatan Turikale	4.500.000,00	4 dokumen	6.000.000,00	
1.23.1.23.01.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		186.600.000,00		111.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.23.1.23.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis penyediaan perlengkapan bangunan gedung kantor	3 jenis	Kecamatan Turikale	17.000.000,00	3 jenis	-	
1.23.1.23.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	5 jenis	Kecamatan Turikale	31.000.000,00	5 jenis	32.000.000,00	
1.23.1.23.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah kendaraan hias	1 unit	Kabupaten Maros	10.000.000,00	1 unit	12.000.000,00	
1.23.1.23.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan bangunan gedung kantor	5 jenis	Kecamatan Turikale	88.600.000,00	5 jenis	20.000.000,00	
1.23.1.23.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan kantor	5 jenis	Kecamatan Turikale	10.000.000,00	5 jenis	12.000.000,00	
1.23.1.23.01.002.010.	Rehabilitasi Ruang Kantor	Jumlah ruangan kantor yang direhabilitasi	1 ruangan	Kecamatan Turikale	30.000.000,00	1 ruangan	35.000.000,00	
1.23.1.23.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-		17.260.000,00		8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.23.1.23.01.003.001.	Kursus/Pelatihan Singkat Aparatur	Jumlah aparatur DPK yang mengikuti kursus-kursus singkat, pelatihan, dan bimbingan teknis	4 orang	-	10.000.000,00	4 orang	-	
1.23.1.23.01.003.005.	Penyelenggaraan Sosialisasi/Ceramah Umum/Seminar	Jumlah aparatur DPK Yang mengikuti sosialisasi	57 orang	Kecamatan Turikale	7.260.000,00	57 orang	8.000.000,00	
1.23.1.23.01.015.	Program Pengelolaan Sumber Daya Perpustakaan Daerah	-	-		268.564.000,00		183.473.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.23.1.23.01.015.002.	Penyediaan Koleksi Buku Digital (E-Book)	Jumlah koleksi e-book	1 paket	Kecamatan Turikale	50.423.000,00	1 paket	(55.000.000,00)	
1.23.1.23.01.015.003.	Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah	Jumlah koleksi bahan pustaka	1 paket	Kecamatan Turikale	150.170.000,00	1 paket	160.000.000,00	
1.23.1.23.01.015.004.	Bimbingan Teknis Aplikasi Perpustakaan Inlislite V.31	Jumlah peserta bimbingan teknis	60 orang	Kecamatan Turikale	10.536.000,00	60 orang	12.000.000,00	
1.23.1.23.01.015.004.	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah	-	Kecamatan Turikale	10.000.000,00	-	12.000.000,00	
1.23.1.23.01.015.005.	Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	-	Kecamatan Turikale	7.007.000,00	-	10.000.000,00	
1.23.1.23.01.015.009.	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola perpustakaan	10 kegiatan	Kecamatan Turikale	40.428.000,00	10 kegiatan	44.473.000,00	
1.23.1.23.01.015.010.	Pembangunan Perpustakaan Ibu dan Anak (DAK)	Jumlah perpustakaan ibu dan anak	1 Unit	Kecamatan Turikale	-	1 Unit	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.23.1.23.01.016.	Program Pengembangan Dan Pembinaan Layanan Perpustakaan	-	-		237.822.000,00		269.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.23.1.23.01.016.001.	Gerakan Gemar Membaca	Jumlah peserta	2000 orang	Kecamatan Turikale	30.956.000,00	2000 orang	33.000.000,00	
1.23.1.23.01.016.001.	Pelayanan Perpustakaan Malam	Jumlah pemustaka yang terlayani	-	Kecamatan Turikale	5.150.000,00	-	13.000.000,00	
1.23.1.23.01.016.002.	Pameran Perpustakaan Tingkat Provinsi	Jumlah pelaksanaan pameran	1 kali	Makassar	14.566.000,00	1 kali	16.000.000,00	
1.23.1.23.01.016.002.	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah pemustaka yang terlayani	-	Kabupaten Maros	68.320.000,00	-	70.000.000,00	
1.23.1.23.01.016.003.	Pekan Perpustakaan dan Wisata Baca Pelajar	Jumlah kegiatan pekan perpustakaan dan wisata baca pelajar	5 kegiatan	Kecamatan Turikale	51.530.000,00	7 kegiatan	55.000.000,00	
1.23.1.23.01.016.003.	Pelayanan Perpustakaan Bandara	Jumlah pemustaka yang terlayani	-	Kecamatan Mandai	6.500.000,00	-	15.000.000,00	
1.23.1.23.01.016.004.	Pelayanan Perpustakaan Car Free Day	Jumlah pemustaka yang terlayani	-	Kecamatan Turikale	10.800.000,00	-	12.000.000,00	
1.23.1.23.01.016.005.	Penyediaan Peralatan Penunjang Perpustakaan	Jumlah jenis peralatan penunjang perpustakaan	5 jenis	Kecamatan Turikale	50.000.000,00	5 jenis	55.000.000,00	
1.24.	KEARSIPAN				142.919.000,00		156.392.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.24.1.23.01.015.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kearsipan Daerah.	-	-		100.000.000,00		102.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.24.1.23.01.015.008.	Penyediaan Peralatan Penunjang Kearsipan	Jumlah jenis peralatan penunjang kearsipan	10 jenis	Kecamatan Turikale	70.000.000,00	10 jenis	70.000.000,00	
1.24.1.23.01.015.009.	Pengumpulan Arsip Dinamis Inaktif Perangkat Daerah	Jumlah arsip dinamis inaktif perangkat daerah	45 arsip	Kabupaten Maros	15.000.000,00	45 arsip	16.000.000,00	
1.24.1.23.01.015.010.	Penarikan Arsip Statis Perangkat Daerah	Jumlah arsip statis perangkat daerah	45 arsip	Kecamatan Turikale	15.000.000,00	45 arsip	16.000.000,00	
1.24.1.23.01.016.	Program Pengelolaan Sumber Daya Kearsipan Daerah.	-	-		42.919.000,00		54.392.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.24.1.23.01.016.009.	Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Kearsipan Lingkup Sekolah	Jumlah pengelola arsip lingkup sekolah yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sistem pengelolaan arsip	50	Kecamatan Turikale	8.466.000,00	70	10.000.000,00	
1.24.1.23.01.016.010.	Bimbingan Teknis Kearsipan	Jumlah peserta bimbingan teknis	60 orang	Kecamatan Turikale	34.453.000,00	70 orang	44.392.000,00	
2.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN				9.079.451.900,00		12.507.349.000,00	
2.01.2.01.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		573.047.500,00		552.974.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
2.01.2.01.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 layanan	Dinas Perikanan	259.552.500,00	12 layanan	243.210.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.01.2.01.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Lyanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	12 layanan	Dinas Perikanan	222.835.000,00	12 layanan	224.414.000,00	
2.01.2.01.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan periodik SKPD	9 layanan	Dinas Perikanan	70.160.000,00	9 layanan	75.750.000,00	
2.01.2.01.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan OPD	10 Dokumen	Dinas Perikanan	12.000.000,00	10 Dokumen	9.600.000,00	
2.01.2.01.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Kegiatan	5 Dokumen	Dinas Perikanan	3.500.000,00	5 Dokumen	-	
2.01.2.01.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah pelaksanaan internal yang dilaksanakan	2 Dokumen	Dinas Perikanan	5.000.000,00	2 Dokumen	-	
2.01.2.01.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		78.736.400,00		67.630.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
2.01.2.01.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor			Dinas Perikanan	22.736.400,00		35.630.000,00	
2.01.2.01.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	3 Jenis	Dinas Perikanan	35.000.000,00	3 Jenis	-	
2.01.2.01.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile	1 unit	Dinas Perikanan	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan bangunan gedung kantor	1 Unit	Dinas Perikanan	6.000.000,00	1 Unit	12.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.01.2.01.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	Dinas Perikanan	5.000.000,00	3 Jenis	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-					DINAS PERIKANAN DAERAH
2.01.2.01.01.015.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Produksi perikanan	100 %		4.962.552.000,00		7.130.100.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
2.01.2.01.01.015.001.	Monitoring Parameter Kualitas Air dan Hama Penyakit pada Tambak Budidaya	Jumlah Laporan Kualitas Air, Hama dan Penyakit Ikan yang tersedia	12 Laporan	Kab.Maros	24.000.000,00	24 Laporan	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.002.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kualitas Air, Hama dan Penyakit Ikan	Jumlah Peserta Birteknik Pengelolaan Kualitas Air, Hama dan Penyakit Ikan	60 orang	Kecamatan Bontoa, Marusu, Lau dan Maros Baru	19.000.000,00	120 orang	2.500.000,00	
2.01.2.01.01.015.003.	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)/Kunjungan Lokasi Pengembangan Budidaya	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	20 orang	Sukabuni	120.000.000,00	40 orang	240.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.004.	Pembangunan Sarana dan Prasarana/Rehabilitasi Posikandu	Jumlah Sarana dan Prasarana Posikandu yang dibangun/direhabilitasi	5 Unit	Kecamatan Bontoa	122.627.000,00	6 Unit	150.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.006.	Pelatihan Budidaya Penggemukan Kepiting	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan teknis Penggemukan Kepiting	60 orang	Kab.Maros	18.933.000,00	120 orang	37.600.000,00	
2.01.2.01.01.015.007.	Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak	Panjang Saluran Irigasi Tambak yang direhabilitasi	625 meter	Kecamatan Maros Baru, Marusu, Lau dan Bontoa	500.000.000,00	935 meter	748.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.009.	Pelatihan Teknis Pengembangan Budidaya dengan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pengembangan Budidaya Perikanan	180 orang	Kab.Maros	56.700.000,00	200 orang	63.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.01.2.01.01.015.010.	Penyediaan operasional Balai Benih Ikan	Jumlah Layanan Operasional UPTD BBI	4 layanan	Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili	59.400.000,00	4 layanan	60.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.011.	Penyediaan jalan Produksi Perikanan (DAU)	Panjang Jalan Produksi Perikanan yang disediakan	807,50 meter	Kab.Maros	850.000.000,00	1.000 meter	1.000.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.012.	Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan Produksi Perikanan	Jumlah Jembatan Penghubung Jalan Produksi Yang dibangun	5 Unit	Kab.Maros	250.000.000,00	10 unit	500.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.013.	Penyediaan Jalan Produksi Perikanan (DAK)	Panjang Jalan Produksi Perikanan yang disediakan	1.705,5 meter	Kab.Maros	832.467.000,00	2000 meter	1.000.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.014.	Pembangunan Kolam Percontohan Ikan Air tawar	Jumlah Kolam Air Tawar yang disediakan	5 Unit	Kab.Maros	204.500.000,00	10 Unit	409.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.015.	Demfarm/Tambak Percontohan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Bandeng, udang dan rumput laut yang dihasilkan perhektar yang dihasilkan	12 Ha	Kab.Maros	120.000.000,00	24 Ha	240.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.016.	Penyediaan Sarana Budidaya (Karamba Jaring Apung)	Jumlah Karamba yang disediakan	5 Unit	Kab Maros	150.000.000,00	10 unit	250.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.017.	Pengembangan budidaya dengan sistem Minapadi	Luas Lahan Sawah yang digunakan untuk budidaya ikan	3 Ha	Kab. Maros	37.500.000,00	5 Ha	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.018.	Pengembangan Budidaya Sistem Bioflok	Jumlah Budidaya Bioflok yang disediakan	10 unit	Kab.Maros	25.000.000,00	25 unit	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.020.	Penyediaan Bibit Unggul	Jumlah Bibit Unggul ikan Bandeng, udang, Nila Salin dan Kakap	375.000 ekor	Kab.Maros	100.000.000,00	500.000 ekor	135.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.01.2.01.01.015.021.	Penyediaan Indukan Non Konsumsi	Jumlah Indukan Non Konsumsi yang tersedia	24 ekor	Kab.Maros	60.000.000,00	30 ekor	75.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.022.	Pengadaan Sumur Bor dan Pompanisasi Untuk Pengairan Tambak	Jumlah sumur bor dan pompanisasi pengairan tambak	8 unit	Kab.Maros	125.000.000,00	16 unit	250.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.023.	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	170 orang	Kabupaten Maros	97.500.000,00	340 orang	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.024.	Pengadaan Alat Ukur Kualitas Air	Jumlah Pengukur Alat Kualitas Air	30 unit	Kab.Maros	64.925.000,00	35 Unit	75.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.025.	Penyediaan Alat Panen Rumput Laut dan Bibit Rumput Laut	Jumlah Alat Panen Rumput Laut dan Bibit Rumput Laut	15 Unit	Kab.Maros	125.000.000,00	20 unit	165.000.000,00	
2.01.2.01.01.015.026.	Penyediaan Sarana Perbenihan	Jumlah Sarana Perbenihan yang disediakan	7 Jenis	Kecamatan Tanralili	1.000.000.000,00	10 Jenis	1.500.000.000,00	
2.01.2.01.01.016.	Program Pembinaan Dan Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan	Persentase Produksi perikanan	100 %		948.658.900,00		1.347.375.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
2.01.2.01.01.016.002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengolah Hasil Perikanan	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengolah Hasil Perikanan	40 orang	Kabupaten Maros	230.000.000,00	45 Orang	260.000.000,00	
2.01.2.01.01.016.005.	Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Pengolahan yang disediakan	10 Paket	Kecamatan Bontoa, Maros Baru, Lau, Marusu	66.875.000,00	10 Paket	70.000.000,00	
2.01.2.01.01.016.006.	Rehabilitasi Rumah Olahan untuk Kelompok Pengolah	Jumlah rumah olahan yang direhabilitasi	1 Unit	Kecamatan Tanralili	150.000.000,00	2 Unit	315.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.01.2.01.01.016.007.	Monitoring Evaluasi Perkembangan Usaha Pengolahan Hasil perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	1100,4 ton	Kab. Maros	18.000.000,00	1210,4 ton	36.000.000,00	
2.01.2.01.01.016.008.	Pemantauan Stok dan distribusi produk perikanan dan penyebaran informasi pasar	Jumlah frekwensi penyebaran informasi harga dan penyediaan stok produk perikanan melalui media elektronik	96 Kali	Kabupaten Maros	42.600.000,00	96 Kali	42.600.000,00	
2.01.2.01.01.016.010.	Bimbingan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	400 orang	Kecamatan Bontoa, Maros Baru, Lau, Marusu	51.020.000,00	500 orang	63.775.000,00	
2.01.2.01.01.016.013.	Diversifikasi hasil Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Peserta Diversifikasi Hasil Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	240 Orang	Kecamatan Bontoa, Maros Baru, Lau, Marusu	34.513.900,00	240 Orang	35.000.000,00	
2.01.2.01.01.016.014.	Pameran Hasil Perikanan	Jumlah dan Jenis Produk Yang di Pamerkan	10 Jenis	Jakarta	76.450.000,00	15 Jenis	80.000.000,00	
2.01.2.01.01.016.016.	Pengadaan Sarana dan Praarana Pengolahan rumput Laut (Pemabgnunan Gudang dan Tempat Penjemuran Rumput	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Rumput Laut yang disediakan	1 Unit	Kecamatan Bontoa	150.000.000,00	2 Unit	275.000.000,00	
2.01.2.01.01.016.017.	Pengadaan Cool Box Selempang dan Freezer untuk Menjaga Mutu Hasil Olahan Perikanan	Jumlah Pengadaan Cool Box selempang dan frezer Untuk Menjaga Mutu Hasil Olahan Perikanan	10 Jenis	Kabupaten Maros	100.000.000,00	12 Jenis	120.000.000,00	
2.01.2.01.01.016.021.	Bimbingan teknis Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	1.100, 4 ton	Kab.Maros	29.200.000,00	1.210,4 ton	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.017.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi perikanan	100 %		2.516.457.100,00		3.409.270.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
2.01.2.01.01.017.004.	Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Kelompok Nelayan	60 Orang	Kabupaten Maros	49.460.000,00	70 Orang	98.920.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.01.2.01.01.017.005.	Rehabilitasi Pembangunan Kedai Pesisir	Jumlah Kedai Pesisir yang Direhabilitasi	5 Unit	TPI Labuang, Kec. Turikale	408.936.000,00	6 Unit	600.000.000,00	
2.01.2.01.01.017.010.	Penyediaan sarana TPI Labuang	Jumlah Sarana TPI yang tersedia	1 Unit	TPI Labuang, Kec. Turikale	200.000.000,00	2 Unit	280.000.000,00	
2.01.2.01.01.017.011.	Penyediaan Operasional UPTD TPI Labuang	Jumlah Layanan Operasional UPTD	4 Layanan	TPI Labuang, Kec. Turikale	36.400.000,00	4 Layanan	37.000.000,00	
2.01.2.01.01.017.012.	Pembangunan Tambatan Perahu	Tersedianya Tambatan Perahu untuk Nelayan Sebagai Sarana untuk Memasarkan Hasil Tangkapan Ikan	2 Unit	Kec. Maros Baru, Kec. Bontoa	500.000.000,00	3 Unit	750.000.000,00	
2.01.2.01.01.017.013.	Penyediaan Peralatan Tangkap	Jumlah Alat Tangkap (Jaring Ikan)	600 Pieces	Kec. Marusu, Kec. Maros Baru, Kec. Lau, Kec. Bontoa, Kec. Turikale	109.986.100,00	600 Pieces	110.000.000,00	
2.01.2.01.01.017.014.	Pengadaan Perahu Kapal Penangkap Ikan Berukuran Kecil dari 3 GT beserta Mesin Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Peangkapan Ikan (DAK)	Jumlah Perahu Kapal Penangkap Ikan Berukuran 3 GT Bermesin	3 Unit	Kec. Bontoa, Kec. Marusu	360.000.000,00	4 Unit	480.000.000,00	
2.01.2.01.01.017.015.	Pembangunan Jalan Beton TPI Labuang	Panjang Jalan Beton yang disediakan	1 Unit	TPI Labuang, Kec. Turikale	550.000.000,00	1 Unit	600.000.000,00	
2.01.2.01.01.017.018.	Pengawasan Pelaksanaan Usaha Perikanan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pengawasan	60 orang	Kab. Maros	11.675.000,00	120 orang	23.350.000,00	
2.01.2.01.01.017.019.	Pengadaan Perahu Penangkap Ikan	Jumlah Perahu penangkap Ikan yang tersedia	3 unit	Kab Maros	90.000.000,00	6 unit	180.000.000,00	
2.01.2.01.01.017.020.	Peningkatan Kualitas Pembangunan Dermaga	Jumlah Dermaga yang ditingkatkan kualitasnya	2 unit	Kab. Maros	200.000.000,00	4 unit	250.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.03.	PERTANIAN				17.523.787.000,00		51.600.000,00	
2.03.2.03.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		954.861.400,00		51.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
2.03.2.03.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen OPD Yang dilaksanakan	12 Layanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	455.705.400,00	12 Layanan	-	
2.03.2.03.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah cakupan layanan pendukung administrasi umum perkantoran	7 Layanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	445.156.000,00	7 Layanan	-	
2.03.2.03.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Pelaporan	62 Dokumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	41.700.000,00	62 Dokumen	41.700.000,00	
2.03.2.03.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.300.000,00		9.900.000,00	
2.03.2.03.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		1.546.400.000,00		-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
2.03.2.03.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	4 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.025.000.000,00	4 Unit	-	
2.03.2.03.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	68 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	511.400.000,00	68 Unit	-	
2.03.2.03.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Karnaval	1 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.000.000,00	1 Unit	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.03.2.03.01.015.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	-	-		3.601.584.000,00		-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
2.03.2.03.01.015.001.	Penyusunan RDK/RDCK	Jumlah Dokumen RDCK	15 Dokumen	14 Kecamatan	88.550.000,00	15 Dokumen	-	
2.03.2.03.01.015.002.	Penyusunan perencanaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dan desa/kelurahan	Jumlah Dokumen perencanaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dan desa/kelurahan	117 Dokumen	Kab. Maros	62.650.000,00	117 Dokumen	-	
2.03.2.03.01.015.003.	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya Rehab BPP dan terpenuhinya sarana pendukungnya	3 Unit	Kab. Maros	64.475.000,00	3 Unit	-	
2.03.2.03.01.015.004.	Rehabilitasi BPP dan Sarana Pendukungnya (DAK Fisik)	Terlaksananya Rehab BPP dan terpenuhinya sarana pendukungnya	3 Unit	Kecamatan Tompobulu, Cenrana dan Lau	1.425.000.000,00	3 Unit	-	
2.03.2.03.01.015.005.	Kaji Terap Komoditi Pengaruh Penggunaan Pupuk PGPR pada Produksi Tanaman Cabe	Terlaksananya Demplot/ percontohan budidaya tanaman spesifik lokalita	280 Orang	14 Kecamatan	249.889.000,00	280 Orang	-	
2.03.2.03.01.015.006.	Pemetaan Partisipatif Data Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang terlibat dalam penyelenggaraan pemetaan partisipatif	40 Kelompok Tani	Kabupaten Maros	171.200.000,00	40 Kelompok Tani	-	
2.03.2.03.01.015.007.	Tudang Sipulung Tingkat Kabupaten	Jumlah Kelompok Tani yang berkontribusi dalam produk unggulan	10 Kelompok Tani	Maros	66.050.000,00	10 Kelompok Tani	-	
2.03.2.03.01.015.008.	Pekan Daerah (PEDA) dan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVI	Jumlah petani nelayan dan petani hutan yang terlibat dalam pelaksanaan pekan daerah dan pekan nasional petani nelayan	30 Orang	Kab. Maros	444.850.000,00	30 Orang	-	
2.03.2.03.01.015.009.	Kaji Terap Komoditi Pengaruh Penggunaan Pupuk PGPR pada Produksi Tanaman Cabe	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan biaya kaji terap	12 Kelompok Tani	6 Kecamatan	126.950.000,00	12 Kelompok Tani	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.03.2.03.01.015.010.	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian dalam Fasilitas Komoditi Unggulan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang meningkatkan kapasitas SDM dalam fasilitas komoditi unggulan pertanian	150 Orang	6 Kecamatan	161.875.000,00	150 Orang	-	
2.03.2.03.01.015.011.	Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang dinilai angka kreditnya untuk kenaikan pangkat	-	Kabupaten Maros	26.750.000,00	-	-	
2.03.2.03.01.015.012.	Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti bimtek penulisan karya tulis ilmiah (KTI)	75 Orang	Kabupaten Maros	98.310.000,00	75 Orang	-	
2.03.2.03.01.015.013.	Penilaian Penyuluh Berprestasi	Jumlah tenaga penyuluh berprestasi	6 Orang	Kabupaten Maros	28.065.000,00	6 Orang	-	
2.03.2.03.01.015.014.	Lomba Kelompok Tani Berprestasi	Jumlah kelompok tani berprestasi	6 Kelompok	Kabupaten Maros	27.975.000,00	6 Kelompok	-	
2.03.2.03.01.015.015.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang naikan kelas kelompoknya	550 Kelompok	Kabupaten Maros	211.400.000,00	550 Kelompok	-	
2.03.2.03.01.015.016.	Penyediaan Posluhan dan Sanggar Tani	Tersedianya posluhan dan sanggar tani	7 Unit	Kabupaten Maros	347.595.000,00	7 Unit	-	
2.03.2.03.01.016.	Program Peningkatan Produksi Peternakan Dan Pencegahan Penyakit Hewan	-	-		2.664.521.600,00		-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
2.03.2.03.01.016.001.	Pengembangan temak unggas	Jumlah Jenis temak unggas yang tersedia	2150 Ekor	Kabupaten Maros	314.725.000,00	2150 Ekor	-	
2.03.2.03.01.016.002.	Penyediaan sarana dan prasarana tempat potong hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan Yang Diperbaiki	1 Unit	Kab. Maros	342.000.000,00	1 Unit	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.03.2.03.01.016.003.	Pengembangan inseminasi buatan	Jumlah kelahiran sapi	1000 Ekor	Kab. Maros	20.000.000,00	1000 Ekor	-	
2.03.2.03.01.016.004.	Pengembangan perbibitan dan hijauan makanan ternak	Jumlah Perbibitan dan hijauan pakan ternak	2 Unit	Kab. Maros	1.031.000.000,00	2 Unit	-	
2.03.2.03.01.016.005.	Pengembangan perbibitan ternak	Jumlah bibit ternak	103 Ekor	Kab. Maros	558.000.000,00	103 Ekor	-	
2.03.2.03.01.016.006.	Penyediaan dukungan manajemen pusat kesehatan hewan	Jasa Operasional petugas Puskesmas	12 Orang	Kab. Maros	48.000.000,00	12 Orang	-	
2.03.2.03.01.016.007.	Pengendalian dan pencegahan penyakit menular	Jumlah hewan ternak yang terbebas dari penyakit hewan menular	2400 Ekor	Kab. Maros	119.096.600,00	2400 Ekor	-	
2.03.2.03.01.016.008.	Penyediaan sarana dan prasarana UPTD Hewan	Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas	1 Unit	UPTD Puskesmas Kab. Maros	231.700.000,00	1 Unit	-	
2.03.2.03.01.017.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	-	-		4.095.570.000,00		-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
2.03.2.03.01.017.001.	Pembangunan jaringan irigasi pendukung produksi pertanian	Jumlah Luas Areal Pertanian Yang Dapat Terairi Melalui Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	300 Ha	Kab. Maros	223.560.000,00	300 Ha	-	
2.03.2.03.01.017.002.	Pengembangan tanaman buah-buahan tahunan	Luas Areal Pengembangan Tanaman Buah-Buahan Tahunan	-	Kab. Maros	176.900.000,00	-	-	
2.03.2.03.01.017.003.	Pengembangan sumber-sumber air pendukung sub sektor tanaman pangan (DAK Fisik)	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Irigasi Pertanian	13 Unit	13 Kecamatan	1.765.000.000,00	13 Unit	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.03.2.03.01.017.004.	Pengembangan tanaman sayur-sayuran	Produksi Tanaman Padi yang Dikembangkan	11051 Ton	Kab. Maros	89.450.000,00	11051 Ton	-	
2.03.2.03.01.017.005.	Pembangunan jalan pertanian	Jumlah jalan Pertanian Yang Tersedia	3 Unit	Kab. Maros	966.000.000,00	3 Unit	-	
2.03.2.03.01.017.006.	pengembangan tanaman kacang hijau			Kab. Maros	30.220.000,00		-	
2.03.2.03.01.017.007.	Pengawasan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi			Kab. Maros	15.500.000,00		-	
2.03.2.03.01.017.008.	Perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman padi			Kab. Maros	361.250.000,00		-	
2.03.2.03.01.017.009.	Pengembangan benih padi varietas unggul	Produksi Tanaman Padi Yang Dikembangkan	-	Kab. Maros	159.000.000,00	-	-	
2.03.2.03.01.017.010.	Pengembangan budidaya padi organik	-	-	Kab. Maros	111.400.000,00	-	-	
2.03.2.03.01.017.011.	Bantuan alat tanam jagung	Tersedianya Alat Tanam Jagung	54 Unit	Kab. Maros	170.000.000,00	54 Unit	-	
2.03.2.03.01.017.012.	Sinkronisasi data statistik			Kab. Maros	17.390.000,00		-	
2.03.2.03.01.017.013.	Akses Permodalan Usaha Tani			Kab. Maros	9.900.000,00		-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.03.2.03.01.018.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-	-		585.100.000,00		-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
2.03.2.03.01.018.001.	Intensifikasi tanaman perkebunan	Cakupan intensifikasi tanaman perkebunan	15 Ha	Kec. Camba, Mallawa, Cenrana	116.000.000,00	15 Ha	-	
2.03.2.03.01.018.002.	Pelatihan pengembangan budidaya tanaman perkebunan (Nilam)	Jumlah Petani yang mendapat pembinaan	6 Orang	Kec Cenrana	13.250.000,00	6 Orang	-	
2.03.2.03.01.018.003.	Pembinaan, perlindungan dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan pembinaan	6 Orang	Kab. Maros	97.350.000,00	6 Orang	-	
2.03.2.03.01.018.004.	Peningkatan optimalisasi lahan perkebunan	Luas lahan terlantar yang dimanfaatkan tanaman perkebunan	15 Ha	Kec. Camba, Cenrana, Mallawa	358.500.000,00	15 Ha	-	
2.03.2.03.01.019.	Program Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang Produksi Dan Agribisnis	-	-		4.075.750.000,00		-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
2.03.2.03.01.019.001.	Penyediaan alat dan mesin pertanian	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian	6 Unit	Kab. Maros	1.492.750.000,00	6 Unit	-	
2.03.2.03.01.019.002.	Pengadaan sarana dan perlengkapan panen dan pasca panen pendukung pengembangan agribisnis	Jumlah sarana perlengkapan panen (karung) yang tersedia	50000 Karung	Kab. Maros	204.050.000,00	50000 Karung	-	
2.03.2.03.01.019.003.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung agribisnis pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian pendukung Agribisnis pertanian	5 Unit	Kab. Maros	2.193.750.000,00	5 Unit	-	
2.03.2.03.01.019.004.	Pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan penanganan pasca panen	20 Kelompok	Kab. Maros	17.200.000,00	20 Kelompok	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

2.03.2.03.01.019.005.	Penyediaan jasa pendukung operasional kantor UPTD Agribisnis	Jumlah tenaga pengelola UPTD Agribisnis	3 Orang	Kab. Maros	18.000.000,00	3 Orang	-	
2.03.2.03.01.019.006.	Penyediaan belanja barang dan jasa pemeliharaan ALSIN UPTD Agribisnis	Jumlah Perlengkapan Alsintan	25 Buah	Kab. Maros	150.000.000,00	25 Buah	-	
1.09.	PANGAN				1.476.213.000,00		-	
1.09.2.03.01.015.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-	-		1.476.213.000,00		-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
1.09.2.03.01.015.001.	Pemantauan dan analisis perkembangan harga pangan strategis	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan analisis perkembangan harga pangan strategis	4 Dokumen	Kabupaten Maros	35.562.000,00	4 Dokumen	-	
1.09.2.03.01.015.002.	Penguatan kelembagaan pangan daerah	Jumlah Dokumen laporan penguatan kelembagaan pangan daerah	4 Dokumen	Kabupaten Maros	22.320.000,00	4 Dokumen	-	
1.09.2.03.01.015.003.	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan	Jumlah dokumen daerah rawan pangan dalam bentuk peta	1 Dokumen	Kabupaten Maros	31.920.000,00	1 Dokumen	-	
1.09.2.03.01.015.004.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah daerah/wilayah rawan pangan yang teridentifikasi dan tertangani secara cepat	-	Kecamatan	49.520.000,00	-	-	
1.09.2.03.01.015.005.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan	4 Desa	Kab. Maros	65.401.000,00	4 Desa	-	
1.09.2.03.01.015.006.	Pembangunan lumbung pangan masyarakat	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	3 Unit	Kabupaten Maros	551.250.000,00	3 Unit	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

1.09.2.03.01.015.007.	Penyusunan neraca bahan makanan (NBM) Kabupaten Maros	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan Kab. Maros	1 Dokumen	Kab. maros	26.200.000,00	1 Dokumen	-	
1.09.2.03.01.015.008.	Penyediaan lantai jemur	Jumlah Lantai Jemur	6 Unit	Kabupaten Maros	631.500.000,00	6 Unit	-	
1.09.2.03.01.015.009.	Lomba cipta menu B2SA Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Jumlah kelompok wanita tani aktif	180 KWT	Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan	62.540.000,00	180 KWT	-	
3.01.	SEKRETARIAT DAERAH				103.480.236.500,00		103.690.951.300,00	
3.01.3.01.02.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		4.047.150.000,00		3.363.745.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	12 Layanan	Turikale	1.843.700.000,00	12 Layanan	1.921.370.000,00	
3.01.3.01.02.001.002.	Pelayanan Dan Penatausahaan Kepegawaian	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	12 Bulan	Turikale	427.050.000,00	12 Bulan	469.755.000,00	
3.01.3.01.02.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	9 Layanan	Turikale	1.689.200.000,00	9 Layanan	961.620.000,00	
3.01.3.01.02.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	Turikale	87.200.000,00	4 Dokumen	11.000.000,00	
3.01.3.01.02.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		7.802.700.000,00		6.942.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor yang Tersedia	2 Paket	Turikale	200.000.000,00	2 Paket	220.000.000,00	
3.01.3.01.02.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia	11 Jenis	Turikale	1.401.000.000,00	11 Jenis	554.400.000,00	
3.01.3.01.02.002.003.	Penyediaan Ruang Kantor			KECAMATAN TURIKALE	5.210.000.000,00		5.210.000.000,00	
3.01.3.01.02.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai			Turikale	15.000.000,00		16.500.000,00	
3.01.3.01.02.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	5 Jenis	Turikale	776.700.000,00	5 Jenis	721.160.000,00	
3.01.3.01.02.002.010.	Rehabilitasi Ruang Kantor	Jumlah Ruang Kantor yang Direhabilitasi	7 Paket	Turikale	200.000.000,00	7 Paket	220.000.000,00	
3.01.3.01.02.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	100					SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.016.	PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PERANGKAT DAERAH	100	-		10.764.875.000,00		10.724.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.016.001.	Bimbingan Teknis SAKIP dan Pendampingan Penyusunan Dokumen SAKIP	Jumlah Peserta Birntek	90 Orang	turikale	283.600.000,00	90 Orang	147.620.000,00	
3.01.3.01.02.016.002.	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja (Lkj) dan Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Lkj) dan Perjanjian Kinerja PK) Kabupaten	2 Dokumen	Turikale	22.950.000,00	2 Dokumen	25.245.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.016.005.	Pembinaan Unit Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Publik	1 Dokumen	turikale	13.650.000,00	1 Dokumen	7.205.000,00	
3.01.3.01.02.016.006.	Evaluasi Penyusunan Road Map dan Pengisian Laporan PMPRB Online	Jumlah Dokumen Evaluasi Penyusunan Road Map dan Pengisian Laporan PMPRB	2 Dokumen	turikale	66.300.000,00	2 Dokumen	56.100.000,00	
3.01.3.01.02.016.007.	Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Birtek Penyusunan Peta Proses Bisnis	45 Orang	turikale	44.650.000,00	45 Orang	74.415.000,00	
3.01.3.01.02.016.008.	Pembinaan dan Monitoring SOP Pemerintah Kabupaten Maros			turikale	4.200.000,00		4.620.000,00	
3.01.3.01.02.016.009.	Penyusunan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)			turikale	10.750.000,00		11.825.000,00	
3.01.3.01.02.016.010.	Penyusunan Analisis Jabatan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan ASN Lingkup Pemkab Maros	45 Dokumen	turikale	39.425.000,00	45 Dokumen	93.555.000,00	
3.01.3.01.02.016.011.	Penyusunan Evaluasi Jabatan Seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan ASN Lingkup Pemkab Maros	45 Dokumen	turikale	72.500.000,00	45 Dokumen	96.030.000,00	
3.01.3.01.02.016.012.	Penyusunan Evaluasi Kelembagaan (SOTK)			turikale	6.850.000,00		7.535.000,00	
3.01.3.01.02.016.013.	Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja ASN	Jumlah Dokumen Analisis Beban Kerja ASN	45 Dokumen	Kabupaten Maros	5.100.000.000,00	45 Dokumen	5.100.000.000,00	
3.01.3.01.02.016.014.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan ASN	45 Dokumen	Kabupaten Maros	5.100.000.000,00	45 Dokumen	5.100.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.017.	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	100	-		21.939.570.000,00		22.025.897.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.017.001.	Pembuatan juknis pengelolaan dana kelurahan			Turikale	50.130.000,00		54.065.000,00	
3.01.3.01.02.017.002.	Penegasan batas daerah kecamatan dan desa/kelurahan			Turikale	78.570.000,00		84.287.500,00	
3.01.3.01.02.017.003.	Penataan Administrasi Batas Wilayah Daratan Antar Kabupaten			Kabupaten Maros	638.050.000,00		706.750.000,00	
3.01.3.01.02.017.004.	Pelaksanaan desk PILKADA 2020	Jumlah Laporan Pelaksanaan PILKADA 2020	1 Dokumen	turikale	48.175.000,00	1 Dokumen	31.982.500,00	
3.01.3.01.02.017.005.	Penyusunan LPPD	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	45 Orang	turikale	268.100.000,00	45 Orang	294.250.000,00	
3.01.3.01.02.017.006.	Pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkup Pemkab Maros	Jumlah Urusan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Ketentuan	6 Urusan	Turikale	15.250.000,00	6 Urusan	12.430.000,00	
3.01.3.01.02.017.007.	Penyusunan Laporan akhir masa jabatan kepala daerah	Jumlah Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	1 Dokumen	Turikale	20.475.000,00	1 Dokumen	21.312.500,00	
3.01.3.01.02.017.008.	Pelaksanaan Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Dan Provinsi	Jumlah Peserta Lomba Kelurahan	23 Kelurahan	Kabupaten Maros	5.059.900.000,00	23 Kelurahan	5.059.900.000,00	
3.01.3.01.02.017.009.	Koordinasi Pengelolaan Dana Kelurahan	Jumlah Dokumen Juklak Pengelolaan Dana Kelurahan	1 Dokumen	Kabupaten Maros	5.007.920.000,00	1 Dokumen	5.007.920.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.017.010.	Penegasan Batas Wilayah Administrasi Daratan Antar Daerah	Jumlah Lokasi Batas Wilayah Antar Daerah yang Dibuat	23 Lokasi	Kabupaten Maros	5.621.050.000,00	23 Lokasi	5.621.050.000,00	
3.01.3.01.02.017.011.	Penataan Batas Wilayah Administrasi Antar Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Batas Wilayah Administrasi Antar Desa/Kelurahan yang Ditata	15 Dokumen	Kabupaten Maros	5.131.950.000,00	15 Dokumen	5.131.950.000,00	
3.01.3.01.02.018.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN RUMAH TANGGA DAN KE PROTOKOLERAN	100	-		19.464.000.000,00		20.123.660.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.018.001.	Pelayanan tamu sekretariat daerah			turikale	363.000.000,00		399.300.000,00	
3.01.3.01.02.018.002.	Penyediaan jasa keprotokolan	Jumlah Penyediaan Jasa Keprotokolan	12 Bulan	turikale	166.900.000,00	12 Bulan	183.590.000,00	
3.01.3.01.02.018.004.	Dialog/audiens dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Dialog/Audiens dengan Tokoh-tokoh Masyarakat	9 Kali	turikale	505.600.000,00	9 Kali	561.000.000,00	
3.01.3.01.02.018.006.	Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	190 Buah	turikale	159.400.000,00	190 Buah	179.960.000,00	
3.01.3.01.02.018.007.	Peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	Jumlah Penyediaan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	12 Bulan	turikale	555.600.000,00	12 Bulan	611.160.000,00	
3.01.3.01.02.018.008.	Pengadaan Pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati yang Disediakan	5 Jenis	turikale	250.000.000,00	5 Jenis	275.000.000,00	
3.01.3.01.02.018.009.	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati	12 Bulan	turikale	66.500.000,00	12 Bulan	73.150.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.018.010.	Penyediaan layanan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Layanan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	12 Bulan	turikale	175.000.000,00	12 Bulan	192.500.000,00	
3.01.3.01.02.018.011.	Penyediaan jasa pengamanan Bupati dan wakil Bupati			TURIKALE	204.000.000,00		224.400.000,00	
3.01.3.01.02.018.012.	Pengelolaan Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Layanan Pengelolaan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	12 Bulan	turikale	100.000.000,00	12 Bulan	448.800.000,00	
3.01.3.01.02.018.013.	penyediaan jasa pramusaji/pramubakti rujab Bupati dan wakil Bupati			turikale	408.000.000,00		448.800.000,00	
3.01.3.01.02.018.014.	Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas Operasional Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Bupati dan Wakil Bupati	12 Bulan	turikale	160.000.000,00	12 Bulan	176.000.000,00	
3.01.3.01.02.018.015.	Pelayanan Tamu Sekretariat Daerah	Jumlah Pelayanan Tamu Sekretariat Daerah	12 Bulan	Kabupaten Maros	5.600.000.000,00	12 Bulan	5.600.000.000,00	
3.01.3.01.02.018.016.	Peringatan HUT Kemerdekaan RI Tingkat Kabupaten Maros	Jumlah Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 Kali	Kabupaten Maros	5.400.000.000,00	1 Kali	5.400.000.000,00	
3.01.3.01.02.018.017.	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Maros	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Maros	1 Kali	Kabupaten Maros	5.350.000.000,00	1 Kali	5.350.000.000,00	
3.01.3.01.02.019.	PROGRAM PENATAAN KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI PRODUK PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH	100	-		627.869.500,00		675.934.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.019.001.	Penyediaan konsultasi hukum	Jumlah Perkara Hukum Pemerintah Daerah Yang Ditangani	100 Perkara	Turikale	185.550.000,00	100 Perkara	203.500.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.019.002.	Penyuluhan Hukum aparaturnya dan Masyarakat	Jumlah Aparatur dan Masyarakat Yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum	600 Orang	Kab. Maros	92.780.000,00	600 Orang	100.116.500,00	
3.01.3.01.02.019.003.	Penyediaan bantuan hukum masyarakat miskin	Jumlah Perkara Hukum Masyarakat Miskin Yang Ditangani	13 Perkara	Turikale	55.430.000,00	13 Perkara	60.500.000,00	
3.01.3.01.02.019.004.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM)			Turikale	27.480.500,00		29.810.000,00	
3.01.3.01.02.019.005.	Penyuluhan anti korupsi	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Anti Korupsi	1 Kali	Turikale	30.979.000,00	1 Kali	33.000.000,00	
3.01.3.01.02.019.006.	Pembentukan produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum Yang Ditetapkan	100 Produk Hukum	Turikale	153.480.000,00	100 Produk Hukum	165.000.000,00	
3.01.3.01.02.019.007.	Bimtek penyusunan produk hukum daerah			Turikale	17.499.000,00		17.600.000,00	
3.01.3.01.02.019.008.	Publikasi produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Dipublikasikan	100 Produk Hukum	Turikale	47.350.000,00	100 Produk Hukum	47.685.000,00	
3.01.3.01.02.019.009.	Sosialisasi produk hukum daerah	Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan	3 Perda	Turikale	17.321.000,00	3 Perda	18.723.100,00	
3.01.3.01.02.020.	PROGRAM PENGELOLAAN KEHUMASAN DAERAH	100	-		3.557.480.000,00		3.891.811.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.020.001.	Penyediaan barang dan jasa pendukung kehumasan	Jumlah Barang dan Jasa Pendukung Kehumasan yang Tersedia	6 Jenis	Turikale	728.250.000,00	6 Jenis	801.955.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.020.002.	Peliputan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah	Jumlah Peliputan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Daerah	12 Bulan	Turikale	2.286.250.000,00	12 Bulan	2.469.500.000,00	
3.01.3.01.02.020.003.	Penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan daerah melalui media cetak	Jumah Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah melalui media Cetak	12 Bulan	Turikale	450.380.000,00	12 Bulan	518.100.000,00	
3.01.3.01.02.020.004.	Worshop jurnalistik			Turikale	11.600.000,00		12.760.000,00	
3.01.3.01.02.020.007.	Penanganan pengaduan masyarakat			Turikale	81.000.000,00		89.496.000,00	
3.01.3.01.02.021.	PROGRAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SOSIAL KEAGAMAAN	100	-		3.334.575.000,00		3.921.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.021.001.	Pelaksanaan kegiatan hari-hari besar islam	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan hari-hari Besar Islam	7 Kali	turikale	223.650.000,00	7 Kali	230.615.000,00	
3.01.3.01.02.021.003.	MTQ tingkat kabupaten	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten	500 Orang	kabupaten maros	545.000.000,00	500 Orang	629.090.000,00	
3.01.3.01.02.021.004.	MTQ tingkat provinsi	Jumah Peserta yang mengikuti MTQ Tingkat Propinsi	57 Orang	turikale	796.200.000,00	57 Orang	943.800.000,00	
3.01.3.01.02.021.005.	Pestival anak saleh tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti festival anak saleh Tk. Propinsi	65 Orang	turikale	170.925.000,00	65 Orang	189.117.500,00	
3.01.3.01.02.021.006.	Penyediaan Kitab Suci	Jumlah Kitab Suci yang Disediakan	1000 Exemplar	turikale	145.750.000,00	1000 Exemplar	160.325.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.021.007.	Pelayanan jamaah haji	Jumlah Jamaah Haji Kabupaten Maros	350 Orang	turikale	305.900.000,00	350 Orang	490.710.000,00	
3.01.3.01.02.021.009.	Pengajian Rutin	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengajian rutin	1000 Orang	lapangan palantikan	269.500.000,00	1000 Orang	290.400.000,00	
3.01.3.01.02.021.010.	Pembinaan guru mengaji	Jumlah Peserta Pembinaan Guru Mengaji	60 Orang	turikale	170.050.000,00	60 Orang	187.055.000,00	
3.01.3.01.02.021.011.	Lomba kendaraan hias dan takbir keliling	Jumlah Kategori Lomba Kendaraan Hias dan Takbir Keliling	3 Kategori	turikale	113.100.000,00	3 Kategori	126.610.000,00	
3.01.3.01.02.021.012.	Taddrus al-Quran tingkat provinsi			turikale	151.925.000,00		189.117.500,00	
3.01.3.01.02.021.013.	Pemeliharaan mushollah kantor Bupati dan Mushollah rumah jabatan Bupati			turikale	47.400.000,00		51.700.000,00	
3.01.3.01.02.021.014.	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV aids	Jumlah Peserta Penyuluhan HIV/AIDS dan Bahaya Narkoba	1000 Orang	turikale	175.600.000,00	1000 Orang	192.500.000,00	
3.01.3.01.02.021.015.	Penyuluhan Narkoba			Turikaale	219.575.000,00		240.570.000,00	
3.01.3.01.02.022	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	100	-		161.850.000,00		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.022.001.	Penyusunan Laporan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Jumlah Laporan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra)	4 Laporan	Turikale	24.000.000,00	4 Laporan	38.500.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.022.002.	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros	Jumlah Dokumen SSH	1 Dokumen	turikale	33.150.000,00	1 Dokumen	33.000.000,00	
3.01.3.01.02.022.003.	Penyusunan Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros	Jumlah Dokumen SBM	1 Dokumen	Turikale	4.700.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	
3.01.3.01.02.022.004.	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Jumlah Dokumen ASB	1 Dokumen	Turikale	100.000.000,00	1 Dokumen	33.000.000,00	
3.01.3.01.02.023.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	100	-		11.013.025.000,00		11.095.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.023.001.	Peningkatan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Administrasi PBJ	1000 Dokumen	turikale	637.000.000,00	1000 Dokumen	707.850.000,00	
3.01.3.01.02.023.002.	Layanan pengadaan secara eletronik			turikale	66.600.000,00		76.890.000,00	
3.01.3.01.02.023.003.	Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Peserta Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ	150 Orang	turikale	55.900.000,00	150 Orang	38.390.000,00	
3.01.3.01.02.023.004.	Bimbingan rencana umum pengadaan (RUP), layanan pengelolaan secara eletronik (LPSE) dan konsolidasi pemaketan	Jumlah Peserta Birtek Peningkatan Kapasitas Pokja	25 Orang	turikale	84.025.000,00	25 Orang	42.570.000,00	
3.01.3.01.02.023.005.	Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis barang dan jasa	Jumlah Peserta Birtek SIRUP, LPSE, E-Katalog, E-Monev dan SIKAP	150 Orang	turikale	39.550.000,00	150 Orang	92.455.000,00	
3.01.3.01.02.023.006.	Sosialisasi Peraturan Pengadaan Baramg dan Jasa Bagi Stakeholder Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros	Jumlah Peserta Sosialisasi PBJ	500 Orang	turikale	84.950.000,00	500 Orang	92.455.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.023.007.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pokja PBJ			Kabupaten Maros	5.020.000.000,00		5.020.000.000,00	
3.01.3.01.02.023.008.	Bimbingan Teknis SIRUP, LPSE, E-Catalog, E-Monev, Dan SIKAP			Kabupaten Maros	5.025.000.000,00		5.025.000.000,00	
3.01.3.01.02.024.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SDA	100	-		15.442.762.000,00		15.457.473.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.024.001.	Peningkatan Produktivitas BUMD dan BLUD melalui Capacity Building	Jumlah Laporan Monev BUMD dan BLUD	4 Laporan	Turikale	13.150.000,00	4 Laporan	14.465.000,00	
3.01.3.01.02.024.002.	Koordinasi pengawasan pengendalian inflasi daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah	2 Kali	Kab. Maros	44.600.000,00	2 Kali	41.470.000,00	
3.01.3.01.02.024.003.	Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Bebrbasis SMART bagi BLUD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1 Laporan	Turikale	12.800.000,00	1 Laporan	261.208.200,00	
3.01.3.01.02.024.004.	Diseminasi Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	1 Laporan	Turikale	16.000.000,00	1 Laporan	17.490.000,00	
3.01.3.01.02.024.005.	Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	2 Kali	Turikale	33.900.000,00	2 Kali	37.290.000,00	
3.01.3.01.02.024.006.	Pembangunan Ruang Isolasi Penderita Penyakit Akibat Dampak Rokok			Turikale	238.462.000,00		14.080.000,00	
3.01.3.01.02.024.007.	Sosialisasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada Binaan UMKM			Turikale	16.150.000,00		-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.024.008.	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah			Turikale	37.700.000,00		41.470.000,00	
3.01.3.01.02.024.009.	Monitoring Dan Evaluasi BUMD/BLUD			Kabupaten Maros	5.005.000.000,00		5.005.000.000,00	
3.01.3.01.02.024.010.	Pengendalian Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau			Kabupaten Maros	5.020.000.000,00		5.020.000.000,00	
3.01.3.01.02.024.011.	Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam			Kabupaten Maros	5.005.000.000,00		5.005.000.000,00	
3.01.3.01.02.025.	PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	100	-		5.324.380.000,00		5.359.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.01.3.01.02.025.001.	Penyusunan laporan pertanggung jawaban	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan OPD	12 Bulan	Turikale	29.500.000,00	12 Bulan	25.300.000,00	
3.01.3.01.02.025.002.	Pengelolaan Keuangan OPD			Turikale	168.000.000,00		192.500.000,00	
3.01.3.01.02.025.003.	Pengelolaan administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah (TPTGR) daerah			Turikale	41.000.000,00		38.500.000,00	
3.01.3.01.02.025.004.	Pelaksanaan verifikasi kelengkapan SPJ			Turikale	11.500.000,00		15.400.000,00	
3.01.3.01.02.025.005.	Pengelolaan perbendaharaan sekretariat daerah			Turikale	34.380.000,00		47.300.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.01.3.01.02.025.006.	Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah			Kabupaten Maros	5.040.000.000,00		5.040.000.000,00	
3.02	SEKRETARIAT DPRD				14.000.000.000,00		12.967.500.000,00	
3.02.3.02.02.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		2.110.000.000,00		983.500.000,00	SEKERTARIAT DPRD
3.02.3.02.02.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi umum	100%	Sekretariat DPRD	800.000.000,00	100%	800.500.000,00	
3.02.3.02.02.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	1.122.455.000,00	12 Layanan	-	
3.02.3.02.02.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan			Sekretariat DPRD	140.000.000,00		41.000.000,00	
3.02.3.02.02.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD			Sekretariat DPRD	35.000.000,00		36.000.000,00	
3.02.3.02.02.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD			Sekretariat DPRD	6.615.000,00		101.000.000,00	
3.02.3.02.02.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi			Sekretariat DPRD	5.930.000,00		5.000.000,00	
3.02.3.02.02.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		2.540.000.000,00		2.684.600.000,00	SEKERTARIAT DPRD



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.02.3.02.02.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	750.000.000,00	12 Layanan	974.600.000,00	
3.02.3.02.02.002.003.	Penyediaan Ruang Kantor	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	800.000.000,00	12 Layanan	800.000.000,00	
3.02.3.02.02.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai			Sekretariat DPRD	10.000.000,00		10.000.000,00	
3.02.3.02.02.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	650.000.000,00	12 Layanan	650.000.000,00	
3.02.3.02.02.002.008.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah cakupan layanan administrasi	12 Layanan	Sekretariat DPRD	330.000.000,00	12 Layanan	250.000.000,00	
3.02.3.02.02.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-		90.000.000,00		40.000.000,00	SEKERTARIAT DPRD
3.02.3.02.02.003.002.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	90.000.000,00	12 Layanan	40.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	-	-		9.260.000.000,00		9.259.400.000,00	SEKERTARIAT DPRD
3.02.3.02.02.015.001.	Pelaksanaan Rapat Badan Legeslatif DPRD	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	35.000.000,00	12 Layanan	36.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.002.	Pelaksanaan Rapat Paripurna	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	250.000.000,00	12 Layanan	270.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.02.3.02.02.015.003.	Pelaksanaan Rapat Fraksi	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	30.000.000,00	12 Layanan	35.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.004.	Pelaksanaan Rapat panitia Khusus (PANSUS) DPRD	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	15.000.000,00	12 Layanan	15.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.005.	Pelaksanaan Rapat Badan Anggaran (BANGGAR)	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	35.000.000,00	12 Layanan	35.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.006.	Pelaksanaan Rapat Badan Musyawarah (BANMUS)	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	30.000.000,00	12 Layanan	30.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.007.	Penggantian Antar Waktu (PAW)	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	150.000.000,00	12 Layanan	150.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.008.	Pelaksanaan Kegiatan Reses	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	1.063.500.000,00	12 Layanan	1.063.500.000,00	
3.02.3.02.02.015.009.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	1.500.000.000,00	12 Layanan	1.500.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.010.	Hearing/Dialog/dan Kordinasi dengan Masyarakat,Pejabat Pemda dan Tokoh Agama	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	115.000.000,00	12 Layanan	115.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.011.	Kunjungan Kerja DPRD Dalam Daerah	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	212.100.000,00	12 Layanan	150.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.012.	Kunjungan Kerja DPRD Luar Daerah	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	2.100.000.000,00	12 Layanan	2.100.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.02.3.02.02.015.013.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	2.624.900.000,00	12 Layanan	2.642.400.000,00	
3.02.3.02.02.015.014.	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	245.000.000,00	12 Layanan	260.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.015.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	684.000.000,00	12 Layanan	685.000.000,00	
3.02.3.02.02.015.016.	Pengelola Kehumasan DPRD	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	85.250.000,00	12 Layanan	86.250.000,00	
3.02.3.02.02.015.017.	Sosialisasi Ranperda	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Sekretariat DPRD	85.250.000,00	12 Layanan	86.250.000,00	
3.03.	INSPEKTORAT				5.176.430.000,00		3.457.265.000,00	
3.03.3.03.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	5 Fungsi		712.932.500,00		358.270.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
3.03.3.03.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 layanan	Kab. Maros	380.513.250,00	12 layanan	358.270.000,00	
3.03.3.03.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan pendukung Administrasi Umum Perkantoran	8 layanan	kab. Maros	283.141.250,00	8 layanan	-	
3.03.3.03.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	12 dokumen	Kab. Maros	7.500.000,00	12 dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.03.3.03.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen rencana dan anggaran kegiatan OPD	7 dokumen	Kab. Maros	5.990.000,00	7 dokumen	-	
3.03.3.03.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian kegiatan	4 dokumen	kab. maros	29.290.000,00	4 dokumen	-	
3.03.3.03.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah dokumen hasil survey	1 dokumen	kab. maros	6.498.000,00	1 dokumen	-	
3.03.3.03.01.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Persentase ketersediaan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	80%		340.340.000,00		185.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
3.03.3.03.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Bangunan	2 Jenis	-	185.000.000,00	2 Jenis	185.000.000,00	
3.03.3.03.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	5 jenis	kab. maros	120.000.000,00	5 jenis	-	
3.03.3.03.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/ Devile/ Karnaval / Pawai	1 unit	kab. maros	10.000.000,00	1 unit	-	
3.03.3.03.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Yang Berada dalam Kondisi Baik	1 jenis	kab. maros	10.000.000,00	1 jenis	-	
3.03.3.03.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Berada dalam Kondisi Baik	5 jenis	kab. maros	15.340.000,00	5 jenis	-	
3.03.3.03.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya	95%		71.239.500,00		-	INSPEKTORAT KABUPATEN



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.03.3.03.01.003.003.	Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri	2 kali	kab. maros	71.239.500,00	2 kali	-	
3.03.3.03.01.015.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Skor 1 - 5)	3		2.684.788.000,00		1.880.845.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
3.03.3.03.01.015.001.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti	100 temuan	kab. maros	139.199.000,00	100 temuan	-	
3.03.3.03.01.015.002.	Pengelolaan Temuan Hasil Pemeriksaan	Jumlah dokumen hasil pengawasan	4 dokumen	kab. maros	49.215.000,00	4 dokumen	-	
3.03.3.03.01.015.003.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah dokumen hasil pengawasan	37 dokumen	kab. maros	540.105.000,00	37 dokumen	-	
3.03.3.03.01.015.004.	Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah	Jumlah Gelar Pengawasan Daerah yang Dilaksanakan	1 kali	kab. maros	38.449.500,00	1 kali	-	
3.03.3.03.01.015.005.	Monitoring dan Evaluasi Dalam Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	4 dokumen	kab. maros	62.145.000,00	4 dokumen	89.450.000,00	
3.03.3.03.01.015.006.	Koordinasi Satgas Saber Pungli	Jumlah Koordinasi Satgas Saber Pungli	10 kali	kab. maros	72.570.000,00	10 kali	72.575.000,00	
3.03.3.03.01.015.007.	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal OPD	jumlah dokumen evaluasi	4 dokumen	kab. maros	61.395.000,00	4 dokumen	61.395.000,00	
3.03.3.03.01.015.008.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Sistem Pengendalian Internal	4 dokumen	kab. maros	53.749.500,00	4 dokumen	46.610.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.03.3.03.01.015.009.	Reviu Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	4 dokumen	kab. maros	52.995.000,00	4 dokumen	49.220.000,00	
3.03.3.03.01.015.010.	Pembangunan Zona Integritas Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengendalian Gratifikasi, Evaluasi Eppd Dan Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	4 dokumen	kab. maros	70.525.000,00	4 dokumen	64.355.000,00	
3.03.3.03.01.015.011.	Penanganan Kasus Pengaduan Pada Wilayah Pemerintah Kabupaten Maros	Jumlah dokumen hasil pengawasan	15 dokumen	kab.maros	131.745.000,00	15 dokumen	106.375.000,00	
3.03.3.03.01.015.012.	Pengawasan Pengelolaan Dana BOS	Jumlah dokumen Laporan Atas Pengawasan Pengelolaan Dana BOS	4 dokumen	kab. maros	52.995.000,00	4 dokumen	61.820.000,00	
3.03.3.03.01.015.013.	Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan	23 Laporan	-	98.000.000,00	23 Laporan	98.000.000,00	
3.03.3.03.01.015.014.	Koordinasi TP4D	Jumlah dokumen Koordinasi TP4D yang dilaksanakan	1 dokumen	kab.maros	47.820.000,00	1 dokumen	48.075.000,00	
3.03.3.03.01.015.015.	Pengawasan Penyelenggraan Perizinan	Jumlah dokumen Atas Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan	4 dokumen	kab. maros	52.995.000,00	4 dokumen	46.700.000,00	
3.03.3.03.01.015.016.	Reviu Dokumen Perencanaan Berbasis Gender	Jumlah dokumen Perencanaan Berbasis Gender	4 dokumen	kab. maros	52.995.000,00	4 dokumen	46.700.000,00	
3.03.3.03.01.015.017.	Pelaksanaan Audit Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Atas Pelaksanaan Audit Kinerja OPD	4 dokumen	kab. maros	52.995.000,00	4 dokumen	49.220.000,00	
3.03.3.03.01.015.018.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Review	2 Laporan	-	80.000.000,00	2 Laporan	80.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.03.3.03.01.015.019.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen atas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah daerah	1 laporan	kab.maros	25.695.000,00	1 laporan	25.700.000,00	
3.03.3.03.01.015.020.	Pendampingan Audit BPK	Jumlah Temuan BPK yang ditindak lanjuti	10 temuan	kab. maros	42.495.000,00	10 temuan	43.250.000,00	
3.03.3.03.01.015.021.	Pendampingan BPKP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	86.000.000,00	1 Dokumen	86.000.000,00	
3.03.3.03.01.015.022.	Evaluasi Penerapan SAKIP	Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Sakip	4 dokumen	kab.maros	52.995.000,00	4 dokumen	46.700.000,00	
3.03.3.03.01.015.023.	Reviu RKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	-	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	
3.03.3.03.01.015.024.	Reviu RKA/DPA	Jumlah Dokumen Reviu RKA	4 dokumen	kab.maros	52.995.000,00	4 dokumen	49.220.000,00	
3.03.3.03.01.015.025.	Reviu DAK Fisik	Jumlah Dokumen Reviu	2 dokumen	kab.maros	27.795.000,00	2 dokumen	24.860.000,00	
3.03.3.03.01.015.026.	Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah dokumen evaluasi IKM OPD	2 dokumen	kab.maros	27.795.000,00	2 dokumen	24.860.000,00	
3.03.3.03.01.015.027.	Verifikasi LHKPN/LHKASN	Jumlah Laporan	4 Laporan	-	300.000.000,00	4 Laporan	300.000.000,00	
3.03.3.03.01.015.028.	Evaluasi Capaian IKM OPD	Jumlah dokumen evaluasi IKM OPD	2 dokumen	kab.maros	22.335.000,00	2 dokumen	24.860.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.03.3.03.01.015.028.	Survey Penilaian Integritas	Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas	1 dokumen	kab. maros	115.760.000,00	1 dokumen	115.760.000,00	
3.03.3.03.01.015.029.	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	39.000.000,00	1 Dokumen	39.000.000,00	
3.03.3.03.01.015.031.	Evaluasi Capaian SPMOPD	Jumlah dokumen evaluasi SPMOPD	2 dokumen	kab.maros	26.750.000,00	2 dokumen	24.860.000,00	
3.03.3.03.01.015.032.	Sosialisasi Pencegahan Dan Pengawasan	Jumlah Peserta Sosialisasi	600 Org	Kantor Inspektorat	69.300.000,00	600 Org	69.300.000,00	
3.03.3.03.01.015.033.	Pelaksanaan Proby Audit	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kantor Inspektorat	60.980.000,00	5 Laporan	60.980.000,00	
3.03.3.03.01.016.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP (Skor 1- 5)	3		1.367.130.000,00		1.033.150.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
3.03.3.03.01.016.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Tenaga APIP yang Mendapat Diklat	7 orang	BPKP Ciawi Bogor	157.030.000,00	7 orang	-	
3.03.3.03.01.016.002.	Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Diklat	50 Org	-	220.000.000,00	50 Org	220.000.000,00	
3.03.3.03.01.016.003.	Diklat Proby audit			-	300.000.000,00		300.000.000,00	
3.03.3.03.01.016.004.	Diklat Evaluasi Implentasi SAKIP	Jumlah Tenaga APIP yang Mendapat Diklat	30 orang	BPKP Makassar	128.150.000,00	30 orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.03.3.03.01.016.005.	Diklat Penyusunan Kertas Kerja	Jumlah Peserta Diklat	50 Org	-	300.000.000,00	50 Org	300.000.000,00	
3.03.3.03.01.016.009.	Diklat Penilaian Angka Kredit	Jumlah Tenaga APIP Yang Mendapat Diklat	4 orang	Ciawi Bogor	48.800.000,00	4 orang	-	
3.03.3.03.01.016.010.	Diklat Siswaskeudes	Jumlah Peserta Diklat	50 Org	Kantor Inspektorat	213.150.000,00	50 Org	213.150.000,00	
3.04.	PERENCANAAN				2.879.900.000,00		28.400.000,00	
3.04.3.04.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen		413.000.000,00		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.04.3.04.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	-	253.860.000,00	12 Layanan	-	
3.04.3.04.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	-	133.800.000,00	9 Layanan	-	
3.04.3.04.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Dan SPJ Administratif Keuangan OPD	24 Dokumen	-	14.350.000,00	24 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Pemcaanaan Dan Penganggaran OPD	59 Dokumen	-	3.950.000,00	59 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Laporan Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan OPD	12 Laporan	-	1.600.000,00	12 Laporan	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.04.3.04.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah ASN Dalam Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	47 Orang	-	5.440.000,00	47 Orang	-	
3.04.3.04.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	100 Persen		407.500.000,00		28.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.04.3.04.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Bangunan Kantor	2 Unit	-	28.400.000,00	2 Unit	28.400.000,00	
3.04.3.04.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	3 Jenis	-	58.100.000,00	3 Jenis	-	
3.04.3.04.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	1 Unit	-	11.000.000,00	1 Unit	-	
3.04.3.04.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	4 Jenis	-	20.000.000,00	4 Jenis	-	
3.04.3.04.01.002.010.	Rehabilitasi Ruangan Kantor	Jumlah Ruangan Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	1 Unit	-	290.000.000,00	1 Unir	-	
3.04.3.04.01.015.	Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	100 Persen		795.351.000,00		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.04.3.04.01.015.001.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen RKPD	2 Dokumen	-	40.332.000,00	2 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.015.002.	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupten Maros Tahun 2021-2025	Jumlah Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupten Maros Tahun 2021-2026	1 Dokumen	-	226.432.000,00	1 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.04.3.04.01.015.003.	Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Pokok)	Jumlah Dokumen KUA – PPAS Pokok 2020	2 Dokumen	-	24.100.000,00	2 Dokumen	-
3.04.3.04.01.015.004.	Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah (KUA-PPAS Perubahan)	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	2 Dokumen	-	22.550.000,00	2 Dokumen	-
3.04.3.04.01.015.005.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD	15 Dokumen	-	131.682.000,00	15 Dokumen	-
3.04.3.04.01.015.006.	Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan DAK Fisik	Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Sumber Dana DAK Tahun 2021	1 Dokumen	-	62.690.000,00	1 Dokumen	-
3.04.3.04.01.015.007.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ Bupati Atas Hasil Pelaksanaan Pembangunan	1 dokumen	-	20.750.000,00	1 dokumen	-
3.04.3.04.01.015.008.	Pengelolaan Data Dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	-	60.630.000,00	1 dokumen	-
3.04.3.04.01.015.009.	Koordinasi Penyusunan Usulan Kegiatan Penerapan SPM	Jumlah dokumen usulan kegiatan penerapan SPM	1 dokumen	-	86.585.000,00	1 dokumen	-
3.04.3.04.01.015.010.	Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Secara Periodik	4 Dokumen	-	33.450.000,00	4 Dokumen	-
3.04.3.04.01.015.011.	Implementasi E- Planning	Jumlah Aplikasi E-Planning yang Diimplementasikan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	1 sistem	-	65.400.000,00	1 sistem	-
3.04.3.04.01.015.012.	Evaluasi Dan Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian RPJMD	1 dokumen	-	20.750.000,00	1 dokumen	-



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.04.3.04.01.016.	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Program Bidang Ekonomi Dan SDA Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen		306.450.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.04.3.04.01.016.001.	Kerjasama Dunia Usaha/Lembaga Usaha	Jumlah Program Dalam APBD Pada Tahun Rencana Yang Dikerjakamkan Dengan Dunia Usaha/Lembaga Usaha	1 Program	-	33.500.000,00	1 Program	-	
3.04.3.04.01.016.002.	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Ekonomi Dan SDA	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pembangunan Ekonomi Dan SDA Yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	7 Dokumen	-	4.000.000,00	7 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.016.003.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Dan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Berita Acara Kesepakatan Hasil Pelaksanaan Forum SKPD	3 Dokumen	-	19.950.000,00	3 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.016.004.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Sektor Ekonomi Dan SDA	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi	1 Dokumen	-	49.000.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.016.005.	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD	1 Dokumen	-	200.000.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.017.	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Kesesuaian Program Bidang Sosial Budaya Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen		153.210.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.04.3.04.01.017.001.	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen Renja OPD	11 Dokumen	-	4.100.000,00	11 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.017.002.	Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's	Jumlah laporan hasil pelaksanaan TPB/SDG's	1 Dokumen	-	49.200.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.017.003.	Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	-	50.800.000,00	1 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.04.3.04.01.017.004.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Laporan Atas hasil Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Nasional Dan Provinsi Lingkup Sosial Budaya	1 Dokumen	-	35.000.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.017.005.	Monitoring Evaluasi Renja OPD Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya	Jumlah Laporan Atas Hasil Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja OPD Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	108 Laporan	-	14.110.000,00	108 Laporan	-	
3.04.3.04.01.018.	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	Persentase Kesesuaian Program Bidang Sumber Daya Manusia Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen		200.625.000,00		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.04.3.04.01.018.001.	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan SDM	Jumlah Dokumen Renja OPD	8 Dokumen	-	6.450.000,00	8 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.018.002.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan SDM	Jumlah Dokumen Laporan Atas hasil Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Nasional Dan Provinsi Lingkup SDM	1 Dokumen	-	60.000.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.018.003.	Pengendalian Dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja OPD Bidang SDM	1 Dokumen	-	51.375.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.018.004.	Monitoring Dan Evaluasi Penerapan PPRG, Gernas, UKS Dan KLA	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja OPD Bidang SDM	4 Dokumen	-	82.800.000,00	4 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.019.	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persentase Kesesuaian Program Bidang Pembangunan Infrastruktur Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen		314.314.000,00		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.04.3.04.01.019.001.	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Lingkup Sektor Pembangunan Sarana Prasarana Daerah	Jumlah Dokumen RENJA OPD Lingkup Sarana dan Prasarana Daerah dan KAK Kegiatan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	3 Dokumen	-	4.120.000,00	3 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.019.002.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional Dan Provinsi Bidang Sarana Dan Prasarana Daerah	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	11 Dokumen	-	91.675.000,00	11 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.04.3.04.01.019.003.	Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	Jumlah Dokumen SSK	1 Dokumen	-	58.150.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.019.004.	Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Sekolah (SSS)	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah	1 Dokumen	-	26.450.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.019.005.	Penyelenggaraan Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA)/Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kelurahan dan Desa dengan Tingkat Risiko Kesehatan Lingkungan	103 Kelurahan dan Desa	-	133.919.000,00	103 Kelurahan dan Desa	-	
3.04.3.04.01.020.	Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Wilayah Dan Kawasan	Persentase Kesesuaian Program Bidang Pengembangan Wilayah Dalam Renja OPD Terhadap RKPD	100 Persen		289.450.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.04.3.04.01.020.001.	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan	Jumlah Dokumen Renja OPD	1 Dokumen	-	4.000.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.020.002.	Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pengembangan Wilayah Dan Kawasan	Jumlah Dokumen Atas Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Nasional Dan Provinsi	1 Dokumen	-	55.000.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.020.003.	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pembangunan Wilayah Dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pembangunan Wilayah Dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	1 Dokumen	-	38.400.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.020.004.	Penyusunan Naskah Akademik (NA) Dan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penanganan Kawasan	Jumlah Dokumen Naskah Akademik (NA) Dan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penanganan Kawasan	2 Dokumen	-	150.000.000,00	2 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.020.005.	Pelaksanaan Forum OPD Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen OPD Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	-	7.600.000,00	1 Dokumen	-	
3.04.3.04.01.020.006.	Pendampingan Penyusunan Renja OPD Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	1 Dokumen	-	1.000.000,00	1 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.04.3.04.01.020.007.	Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Bidang Pembangunan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Dokumen Atas Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Prioritas Nasional Dan Provinsi	1 Dokumen	-	33.450.000,00	1 Dokumen	-	
3.05.	KEUANGAN				22.497.453.000,00		1.810.440.050,00	
3.05.3.05.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		15.923.794.000,00		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.05.3.05.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	13 Layanan	BPKPD	11.916.754.000,00	13 Layanan	-	
3.05.3.05.01.001.002.	Pelayanan Dan Penatausahaan Kepegawaian	Jumlah Cakupan Layanan Kepegawaian Yang Dilaksanakan	10 Layanan	BPKPD	7.950.000,00	10 Layanan	-	
3.05.3.05.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	14 Layanan	BPKPD	3.909.540.000,00	14 Layanan	-	
3.05.3.05.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	12 Dokumen	BPKPD	80.350.000,00	12 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan OPD	10 Dokumen	BPKPD	4.550.000,00	10 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian OPD	5 Laporan	BPKPD	4.650.000,00	5 Laporan	-	
3.05.3.05.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		624.000.000,00		-	BADAN KEUANGAN DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.05.3.05.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	4 Jenis	BPKPD	145.000.000,00	4 Jenis	-	
3.05.3.05.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	5 Jenis	BPKPD	389.000.000,00	5 Jenis	-	
3.05.3.05.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	1 Unit	BPKPD	10.000.000,00	1 Unit	-	
3.05.3.05.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	2 Jenis	BPKPD	50.000.000,00	2 Jenis	-	
3.05.3.05.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	2 Jenis	BPKPD	30.000.000,00	2 Jenis	-	
3.05.3.05.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-		30.000.000,00		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.05.3.05.01.003.001.	Kursus/Pelatihan Singkat Aparatur	Jumlah Peserta Kursus/Pelatihan Singkat	30 Orang	BPKPD	30.000.000,00	30 Orang	-	
3.05.3.05.01.015.	Program Penatausahaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	-	-		1.353.805.000,00		165.550.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.05.3.05.01.015.001.	Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD	Jumlah Laporan realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD	12 Dokumen	BPKPD	30.360.000,00	12 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.015.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester Satu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Kabupaten Semesteran	2 Dokumen	BPKPD	127.975.000,00	2 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.05.3.05.01.015.003.	Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	BPKPD	436.500.000,00	1 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.015.004.	Verifikasi Belanja Dana BOS dan JKN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Belanja Daerah	12 Dokumen	BPKPD	33.525.000,00	12 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.015.005.	Verifikasi Permintaan Dana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan	12 Dokumen	BPKPD	31.025.000,00	12 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.015.006.	Rekonsiliasi Kas Bendahara Umum Daerah	Opini BPK	12 Laporan	BPKPD	33.700.000,00	12 Laporan	-	
3.05.3.05.01.015.007.	Penyusunan Laporan Keuangan SIPKD	WTP	12 Laporan	BPKPD	32.800.000,00	12 Laporan	-	
3.05.3.05.01.015.008.	Penyediaan Jasa Administrasi BUD Dan Staf BUD			BPKPD	479.920.000,00		-	
3.05.3.05.01.015.009.	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	BPKPD	148.000.000,00	1 Dokumen	165.550.000,00	
3.05.3.05.01.016.	Program Pengelolaan Dan Pengendalian PBB/BPHTB	-	-		1.069.890.000,00		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.05.3.05.01.016.001.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembayaran PBB Dan BPHTB	Jumlah Pelayanan Pembayaran bagi Masyarakat Miskin	Aplikasi	Kabupaten Maros	150.000.000,00	Aplikasi	-	
3.05.3.05.01.016.002.	Penerbitan SPPT PBB Dan SSPD BPHTB	Jumlah Dokumen SPPT PBB dan SSPD BPHTB	230400 Lembar	BPKPD	268.580.000,00	230400 Lembar	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.05.3.05.01.016.003.	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Jumlah Peserta PBB dan BPHTB	200 Orang	BPKPD	24.410.000,00	200 Orang	-	
3.05.3.05.01.016.004.	Optimalisasi Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan PBB dan BPHTB	Jumlah Penerimaan PBB dan BPHTB	32000000000	Kabupaten Maros	592.700.000,00	32000000000	-	
3.05.3.05.01.016.005.	Pengawasan Dan Pengendalian PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Laporan atas hasil Pelaksanaan	12 Dokumen	BPKPD	34.200.000,00	12 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.017.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pajak, Retribusi, Dan Dana Perimbangan	-	-		1.126.862.500,00		404.098.750,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.05.3.05.01.017.001.	Verifikasi dan Validasi Data Obyek Retribusi Pasar Kecamatan	Jumlah Kios Pasar yang terverifikasi dan tervalidasi	4879 Kios / Lods	Kabupaten Maros	387.300.000,00	4879 Kios / Lods	-	
3.05.3.05.01.017.002.	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	51303000000	Kabupaten Maros	306.250.000,00	51303000000	-	
3.05.3.05.01.017.003.	Pengawasan Dan Pengendalian Subyek dan Obyek Pajak Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Subjek dan Objek Pajak Daerah	9 Jenis Pajak	Kabupaten Maros	75.000.000,00	9 Juenis Pajak	-	
3.05.3.05.01.017.004.	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Surat Ketetapan Pajak daerah	1806 Lembar	BPKPD	253.300.000,00	1806 Lembar	278.630.000,00	
3.05.3.05.01.017.005.	Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Sosialisasi	60 Orang	Kabupaten Maros	33.050.000,00	60 Orang	46.310.000,00	
3.05.3.05.01.017.006.	Uji Petik 9 Jenis Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemdapatan Daerah	12 Dokumen	Kabupaten Maros	71.962.500,00	12 Dokumen	79.158.750,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.05.3.05.01.018.	Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah	-	-		1.536.667.500,00		1.240.791.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.05.3.05.01.018.001.	Pengelolaan Hibah dan Bansos	Jumlah Peserta Sosialisasi Dana Hibah dan Bansos	150 Orang	BPKPD	17.719.500,00	150 Orang	-	
3.05.3.05.01.018.002.	Pengelolaan Bantuan Keuangan / Alokasi Dana Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan atas Hasil Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos	12 Dokumen	BPKPD	3.990.000,00	12 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.018.003.	Pengelolaan Dana Hibah Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana Hibah dan Kesetaraan	2 Dokumen	BPKPD	16.080.000,00	2 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.018.004.	Pengelolaan Dana Tak Terduga	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengelolaan Bantuan Dana Pasca Bencana Melalui Dana Tak Terduga	2 Dokumen	BPKPD	12.797.500,00	2 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.018.005.	Sosialisasi Penyusunan APBD	Jumlah Peserta Sosialisasi Penyusunan APBD	200 Orang	BPKPD	246.850.000,00	200 Orang	-	
3.05.3.05.01.018.006.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020	Jumlah Dokumen Perda APBD dan Perbup APBD	2 Dokumen	BPKPD	89.600.000,00	2 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.018.007.	Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021	Jumlah Dokumen Perda APBD dan Perbup APBD	2 Dokumen	BPKPD	25.000.000,00	2 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.018.008.	Penyusunan dan Asistensi Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Anggaran Kas	1 Dokumen	BPKPD	501.200.000,00	1 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.018.009.	Implementasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan			BPKD	100.000.000,00		100.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.05.3.05.01.018.010.	Pelatihan Aplikasi Pengelolaan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi Keuangan	150 Orang	BPKPD	58.450.000,00	150 Orang	67.595.000,00	
3.05.3.05.01.018.011.	Implementasi Aplikasi Pengelolaan Barang Persediaan	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi Pengelolaan Barang	80 Orang	BPKPD	20.200.000,00	80 Orang	551.320.000,00	
3.05.3.05.01.018.012.	Pelatihan Aplikasi DAK Fisik	Jumlah Hasil Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi DAK Fisik	30 Orang	BPKPD	11.850.000,00	30 Orang	33.385.000,00	
3.05.3.05.01.018.013.	Monitoring Pelaporan Dana DAK dan Dana Perimbangan	jumlah Dokumen Laporan Keuangan Atas Hasil Opini BPK	12 Dokumen	BPKPD	51.750.000,00	12 Dokumen	56.925.000,00	
3.05.3.05.01.018.014.	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah	12 Dokumen	BPKPD	71.208.000,00	12 Dokumen	75.955.000,00	
3.05.3.05.01.018.015.	Pelatihan Aplikasi Persediaan Barang	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi Barang Persediaan	80 Orang	BPKPD	30.350.000,00	80 Orang	33.385.000,00	
3.05.3.05.01.018.017.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pembiayaan	Jumlah Ketersediaan Dokumen Pertanggung Jawaban Bantuan dan Pembiayaan	12 Dokumen	Kabupaten Maros	116.775.000,00	12 Dokumen	128.122.500,00	
3.05.3.05.01.018.018.	Sosialisasi Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bansos	Jumlah Peserta Sosialisasi Dana Hibah dan Bansos	150 Orang	BPKPD	22.519.500,00	150 Orang	31.140.450,00	
3.05.3.05.01.018.019.	Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bansos	Jumlah Ketersediaan Dokumen Pertanggung Jawaban Dana Hibah dan Bansos	12 Dokumen	BPKPD	135.930.000,00	12 Dokumen	153.068.850,00	
3.05.3.05.01.018.020.	Pengelolaan Dana Hibah Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana Hibah dan Kesetaraan	2 Dokumen	Kabupaten Maros	2.448.000,00	2 Dokumen	4.617.250,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.05.3.05.01.018.021.	Kegiatan Pengelolaan Dana Tak Terduga	Jumlah Laporan atas Hasil Pengelolaan Bantuan Dana Pasca Bencana melalui Dana Tak Terduga	1 Dokumen	Kabupaten Maros	1.950.000,00	1 Dokumen	5.277.250,00	
3.05.3.05.01.019.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Manajemen Aset Daerah	-	-		832.434.000,00		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.05.3.05.01.019.001.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan BMD	45 Laporan	BPKPD	111.000.000,00	45 Laporan	-	
3.05.3.05.01.019.002.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Lokasi yang dibuatkan Prasasti BMD	50 Titik	BPKPD	30.000.000,00	50 Titik	-	
3.05.3.05.01.019.003.	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD pengusul Penghapusan BMD dan Diproses secara Berkala	45 OPD	BPKPD	21.000.000,00	45 OPD	-	
3.05.3.05.01.019.004.	Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung dan Bangunan yang diinventarisasi	2597 Gedung	Kabupaten Maros	46.250.000,00	2597 Gedung	-	
3.05.3.05.01.019.005.	Implementasi Sistem Aplikasi Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengaplikasikan Sistem Pengelolaan BMD secara Elektornik	45 OPD	Kabupaten Maros	68.400.000,00	45 OPD	-	
3.05.3.05.01.019.006.	Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah			-	-		-	
3.05.3.05.01.019.007.	Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Tenaga Teknis Penilai BMD	2 Orang	Luar Kota	16.500.000,00	2 Orang	-	
3.05.3.05.01.019.008.	Pensertifikatan Tanah Milik Pemda	Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah yang akan disertifikatkan	50 Dokumen	Kabupaten Maros	182.500.000,00	50 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.05.3.05.01.019.009.	Pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu yang Mengikuti Pelatihan Manajemen BMD	100 ASN	BPKPD	52.500.000,00	100 ASN	-	
3.05.3.05.01.019.010.	Penyusunan RKBMD Pengadaan Dan RKBMD Pemeliharaan Kabupaten	Jumlah Dokumen RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan Kabupaten	2 Dokumen	BPKPD	7.500.000,00	2 Dokumen	-	
3.05.3.05.01.019.011.	Penyelenggaraan Lelang Barang Milik Daerah	Jumlah Lelang yang Dilaksanakan	2 Kali	BPKPD	70.850.000,00	2 Kali	-	
3.05.3.05.01.019.012.	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah	Jumlah Paket Perencanaan Pengadaan Tanah	5 Paket	BPKPD	225.934.000,00	5 Paket	-	
3.06.	KEPEGAWAIAN				2.789.335.900,00		1.593.165.100,00	
3.06.3.06.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		745.175.500,00		745.175.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
3.06.3.06.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Umum Administrasi Perkantoran	10 Layanan	BKPSDM	524.884.500,00	10 Layanan	524.884.500,00	
3.06.3.06.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum perkantoran	9 Layanan	BKPSDM	177.561.000,00	9 Layanan	177.561.000,00	
3.06.3.06.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Dan Administrasi Keuangan OPD	6 Layanan	BKPSDM	19.340.000,00	6 Layanan	19.340.000,00	
3.06.3.06.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan OPD	46 Dokumen	BKPSDM	9.160.000,00	46 Dokumen	9.160.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.06.3.06.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Laporan Pengendalian Kegiatan OPD	7 Dokumen	BKPSDM	7.750.000,00	7 Dokumen	7.750.000,00	
3.06.3.06.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Nilai Survey Layanan Kepuasan Kepegawain	70%	BKPSDM	6.480.000,00	70%	6.480.000,00	
3.06.3.06.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		143.786.500,00		149.282.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
3.06.3.06.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	2 Jenis	BKPSDM	32.875.500,00	2 Jenis	39.380.000,00	
3.06.3.06.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	1 Unit	BKPSDM	10.000.000,00	1 Unit	11.000.000,00	
3.06.3.06.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	3 Jenis	BKPSDM	86.000.000,00	3 Jenis	82.500.000,00	
3.06.3.06.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	4 Jenis	BKPSDM	14.911.000,00	4 Jenis	16.402.100,00	
3.06.3.06.01.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-		45.640.000,00		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
3.06.3.06.01.003.001.	Kursus/Pelatihan Singkat Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kursus singkat/pelatihan/Bimtek	60 orang	BKPSDM	5.640.000,00	60 orang	-	
3.06.3.06.01.003.003.	Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah Peserta Kursus/Pelatihan Singkat	4 Orang	BKPSDM	40.000.000,00	4 Orang	40.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.06.3.06.01.015.	Program Pengelolaan Data/Informasi Dan Layanan Kepegawaian	Jumlah Aparatur yang Mendapat Layanan	6258 ASN		1.263.858.900,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
3.06.3.06.01.015.001.	Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi	4 Kali	BKPSDM	38.420.000,00	4 Kali	-	
3.06.3.06.01.015.002.	Pengelolaan Sistem Informasi Aplikasi OPD	Jumlah sistem yang diimplementasikan	1 Sistem	BKPSDM	17.975.000,00	1 Sistem	-	
3.06.3.06.01.015.004.	Penyelenggaraan Penerimaan Tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	Jumlah Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Dan Non PNS Berprestasi	1 Kali	BKPSDM	24.350.000,00	1 Kali	-	
3.06.3.06.01.015.005.	Penyelenggaraan Penerimaan Calon ASN	Jumlah Pelaksanaan Penerimaan Calon ASN	1 Kali	BKPSDM	123.800.000,00	1 Kali	-	
3.06.3.06.01.015.008.	Penyusunan Dokumen Formasi PNS	Jumlah dokumen formasi PNS	1 Dokumen	BKPSDM	26.600.000,00	1 Dokumen	-	
3.06.3.06.01.015.010.	Pengelolaan Pelaporan Kinerja	Jumlah ASN yang melaporkan capaian kinerjanya	6258 orang	BKPSDM	48.550.000,00	6258 orang	-	
3.06.3.06.01.015.011.	Sosialisasi Pengelolaan Pelaporan Penilaian Kinerja	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	45 Orang	BKPSDM	28.250.000,00	45 Orang	-	
3.06.3.06.01.015.016.	Pelayanan Administrasi KARIS/KARSU, Taspen, Bapetarum dan Cuti PNS	Jumlah PNS yang menerima KARIS/KARSU, Taspen, BAPETARUM dan cuti PNS	1000 Orang	BKPSDM	26.900.000,00	1000 Orang	-	
3.06.3.06.01.015.017.	Pelaksanaan Rekonsiliasi/Updating Gaji PNS	Jumlah dokumen print out daftar gaji PNS disetiap OPD	540 Dokumen	BKPSDM	32.540.000,00	540 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.06.3.06.01.015.018.	Pelayanan Bantuan Sosial Bagi PNS ASN	Jumlah PNS ASN Yang Mendapatkan Bantuan Sosial	25 Orang	BKPSDM	97.600.000,00	25 Orang	-	
3.06.3.06.01.015.024.	Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Kepagkatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	90 Orang	BKPSDM	84.898.000,00	90 Orang	-	
3.06.3.06.01.015.025.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah ASN	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	350 Orang	BKPSDM	50.280.000,00	350 Orang	-	
3.06.3.06.01.015.026.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional ASN/PNS	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi calon pejabat struktural dan fungsional	350 Orang	BKPSDM	47.975.000,00	350 Orang	-	
3.06.3.06.01.015.028.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Teknis Penggunaan Komputer	Jumlah peserta uji kompetensi teknis penggunaan komputer	1250 Orang	BKPSDM	52.400.000,00	1250 Orang	-	
3.06.3.06.01.015.029.	Koordinasi Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Jumlah dokumen laporan hasil kekayaan pejabat penyelenggara negara	200 Dokumen	BKPSDM	28.590.000,00	200 Dokumen	-	
3.06.3.06.01.015.030.	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN	Jumlah Surat Keputusan Hukuman Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik	10 SK	BKPSDM	31.650.000,00	10 SK	-	
3.06.3.06.01.015.031.	Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi PNS dan Non PNS Berprestasi	Jumlah Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Dan Non PNS Berprestasi	1 Kali	BKPSDM	14.195.000,00	1 Kali	-	
3.06.3.06.01.015.032.	Penegakan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Rekapitulasi dan evaluasi absensi PNS Setiap Bulan	12 Dokumen	BKPSDM	4.625.000,00	12 Dokumen	-	
3.06.3.06.01.015.033.	Pelaksanaan Pemberian Satya Lancana Karya Satya	Jumlah PNS penerima satyalancana karyasatya dan pumabakti	100 orang	BKPSDM	36.350.000,00	100 orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

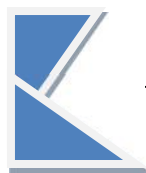
3.06.3.06.01.015.034.	Penilaian Potensi dan Kompetensi (Talent Poll)	Jumlah peserta yang mengikuti Penilaian Potensi dan Kompetensi (Talent Poll)	100 Orang	BKPSDM	100.250.000,00	100 Orang	-	
3.06.3.06.01.015.036.	Uji Potensi Kemampuan Personal	Jumlah ASN yang mengikuti Uji Potensi Kemampuan Personal	3000 orang	BKPSDM	142.050.000,00	3000 orang	-	
3.06.3.06.01.015.037.	Pengelolaan Kepangkatan, Penyerahan SK dan KGB PNS	Jumlah PNS yang dikelola kenaikan pangkatnya, memperoleh SK dan KGB	2860 orang	BKPSDM	128.035.900,00	2860 orang	-	
3.06.3.06.01.015.038.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pensiun	Jumlah PNS yang menerima SK pensiun	261 Orang	BKPSDM	22.800.000,00	261 Orang	-	
3.06.3.06.01.015.039.	Penyusunan Buku Profil Kepegawaian	Jumlah Buku Profil Kepegawaian	100 Buku	BKPSDM	23.825.000,00	100 Buku	-	
3.06.3.06.01.015.040.	Rekonsiliasi Data dan Dokumen Kepegawaian	Tersedianya Data dan Dokumen Kepegawaian yang lengkap, Akutrat dan Terkini	100%	BKPSDM	30.950.000,00	100%	-	
3.06.3.06.01.016.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Karir Aparatur	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	36 Jabatan		590.875.000,00		658.707.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
3.06.3.06.01.016.001.	Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah peserta calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang mengikuti seleksi	25 Orang	BKPSDM	263.235.000,00	25 Orang	296.983.500,00	
3.06.3.06.01.016.002.	Pengelolaan Administrasi Mutasi PNS	Jumlah SK mutasi pns yang diterbitkan	900 SK	BKPSDM	148.950.000,00	900 SK	163.845.000,00	
3.06.3.06.01.016.006.	Penyusunan Pola Karir PNS	Jumlah Peserta yang mengikuti Pola Karir PNS	250 Orang	BKPSDM	57.140.000,00	250 Orang	62.854.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.06.3.06.01.016.007.	Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional PNS	Jumlah Dokumen Jabatan Fungsional PNS	10000 SK	BKPSDM	121.550.000,00	10000 SK	135.025.000,00	
3.07.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				813.925.100,00		887.331.995,00	
3.07.3.06.01.015.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas SDM Dan Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang memahami Tugas dan Jabatannya	100%		813.925.100,00		887.331.995,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
3.07.3.06.01.015.002.	Diklat Prajabatan CPNS	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	206 Orang	BKPSDM	124.643.000,00	206 Orang	137.107.685,00	
3.07.3.06.01.015.003.	Kursus-kursus Singkat, Pelatihan dan Bimtek	Jumlah ASN yang mengikuti kursus singkat/pelatihan/Bimtek	200 orang	BKPSDM	30.000.000,00	200 orang	33.000.000,00	
3.07.3.06.01.015.004.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	24 orang	BKPSDM	209.187.000,00	24 orang	230.105.700,00	
3.07.3.06.01.015.005.	Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis jabatan fungsional	8 orang	BKPSDM	77.260.000,00	8 orang	84.986.000,00	
3.07.3.06.01.015.006.	Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah	90 orang	BKPSDM	99.625.000,00	90 orang	109.587.500,00	
3.07.3.06.01.015.007.	Diklat Teknis bagi ASN	Jumlah Kegiatan diklat teknis	1 Paket	BKPSDM	77.260.000,00	1 Paket	77.000.000,00	
3.07.3.06.01.015.008.	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek pengadaan barang dan jasa	65 orang	BKPSDM	195.950.100,00	65 orang	215.545.110,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.08.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.166.816.000,00		641.536.000,00	
3.08.3.08.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		447.957.000,00		254.949.800,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.08.3.08.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Dokumen Laporan Keuangan termasuk SPJ Fungsional dan keuangan serta kelengkapan dokumen pendukung	12	balitbangda	249.337.000,00	12	17.000.000,00	
3.08.3.08.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Dokumen Laporan Pelayanan Administrasi perkantoran	12	-	178.862.000,00	12	200.035.000,00	
3.08.3.08.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD			balitbangda	8.800.000,00		17.650.000,00	
3.08.3.08.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD			-	3.270.000,00		14.264.800,00	
3.08.3.08.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi			Balitbangda	7.688.000,00		6.000.000,00	
3.08.3.08.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		163.650.000,00		154.615.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.08.3.08.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan bangunan Gedung kantor	1 Jenis	-	57.000.000,00	1 Jenis	40.700.000,00	
3.08.3.08.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Perlengkapan kantor	1	balitbangda	78.000.000,00	1	78.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.08.3.08.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai			Balitbangda	11.000.000,00		11.000.000,00	
3.08.3.08.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan kantor	44 Jenis	-	17.650.000,00	44 Jenis	19.415.000,00	
3.08.3.08.01.002.009.	Rehabilitasi Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor			-	-		5.500.000,00	
3.08.3.08.01.015.	Program Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	0	100		213.560.000,00		45.971.200,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.08.3.08.01.015.001.	Kajian Kebijakan Analisis Potensi Unggulan Sumber Daya Alam di Kabupaten Maros	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1 Dokumen	Litbang	42.292.000,00	1 Dokumen	-	
3.08.3.08.01.015.002.	Kajian Kebijakan Analisis Air bersih di kabupaten Maros	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1 Dokumen	-	42.392.000,00	1 Dokumen	-	
3.08.3.08.01.015.003.	Evaluasi Kebijakan Ekonomi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan	1 Dokumen	Balitbangda Maros	42.292.000,00	-	45.971.200,00	
3.08.3.08.01.015.004.	Kajian Kebijakan Master Plan Ekonomi Kabupaten Maros	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1 Dokumen	-	41.792.000,00	1 Dokumen	-	
3.08.3.08.01.015.004.	Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Naskah Akademik/Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	-	44.792.000,00	1 Dokumen	-	
3.08.3.08.01.016.	Program Penelitian Pengembangan Bidang Sosial Dan Pemerintahan	0	100		127.821.000,00		-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.08.3.08.01.016.001.	Pengembangan Kebijakan Perencanaan Pmbangunan Daerah			Balittbangda Maros	-		-	
3.08.3.08.01.016.002.	Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan			Balittbangda Maros	-		-	
3.08.3.08.01.016.003.	Kajian Kebijakan Analisis Kemiskinan Kabupaten Maros	Jumlah Dokumen Naskah Akademik/Rancangan Perda	1 Dokumen	-	44.237.000,00	1 Dokumen	-	
3.08.3.08.01.016.004.	Kajian Kebijakan Analisis Indeks Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1 Dokumen	-	41.792.000,00	1 Dokumen	-	
3.08.3.08.01.016.005.	Kajian Kebijakan Organisasi dan Tata Laksana / Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1 Dokumen	-	41.792.000,00	1 Dokumen	-	
3.08.3.08.01.017.	Program Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Daerah	0	100		132.314.000,00		186.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.08.3.08.01.017.001.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Diseminasi yang dilaksanakan	5 Kali	BALITBANGDA MAROS	32.100.000,00	5 Kali	60.000.000,00	
3.08.3.08.01.017.002.	Perekayasaan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen perekayasaan inovasi dan teknologi	1 dokumen	Balittbangda Maros	42.464.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	
3.08.3.08.01.017.004.	Kajian Kebijakan Organisasi dan tata laksana/Kelembagaan Pemerintah Daerah			Balittbangda	57.750.000,00		66.000.000,00	
3.08.3.08.01.018.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelitbangan Daerah	0	100		81.514.000,00		-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.08.3.08.01.018.001.	Penerapan dan Pengoperasian Hasil Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengoperasian Hasil Inovasi & teknologi	1 Kali	-	54.400.000,00	1 Kali	-	
3.08.3.08.01.018.002.	Fasilitasi Peningkatan kapasitas Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu	Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelitbangan Daerah	1 Dokumen	-	27.114.000,00	1 Dokumen	-	
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	
3.09.3.09.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		390.737.000,00		390.925.000,00	KECAMATAN MAROS BARU
3.09.3.09.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Kecamatan Maros Baru	159.369.500,00	12 Layanan	155.225.000,00	
3.09.3.09.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	Kecamatan Maros Baru	207.342.500,00	9 Layanan	210.900.000,00	
3.09.3.09.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen SPJ fungsional dan administrasi keuangan OPD	10 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	10.450.000,00	10 Dokumen	12.950.000,00	
3.09.3.09.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen rencana dan anggaran OPD	44 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	3.850.000,00	44 Dokumen	3.750.000,00	
3.09.3.09.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah dokumen Pengendalian OPD	3 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	5.750.000,00	3 Dokumen	5.600.000,00	
3.09.3.09.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah responden (aparat PNS Aktif pada saat dilakukan survei)	70 Orang	Kecamatan Maros Baru	3.975.000,00	70 Orang	2.500.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.01.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	100 persen		971.535.000,00		89.700.000,00	KECAMATAN MAROS BARU
3.09.3.09.01.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Cakupan pelayanan sarana parasarana aparatur	100 Persen	Kecamatan Maros Baru	744.600.000,00	100 Persen	40.000.000,00	
3.09.3.09.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan sarana dan parasarana kerja aparatur	110 Pasang	Kecamatan Maros Baru	194.400.000,00	110 Pasang	17.200.000,00	
3.09.3.09.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah kendaraan hias/ devile/ Karnaval/ pawai	1 Unit	Kecamatan Maros Baru	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	
3.09.3.09.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan bangunan gedung kantor yang berada dalam kondisi yang baik	1 Jenis	Kecamatan Maros Baru	12.500.000,00	1 Jenis	12.500.000,00	
3.09.3.09.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang berada dalam kondisi yang baik	9 Jenis	Kecamatan Maros Baru	10.035.000,00	9 Jenis	10.000.000,00	
3.09.3.09.01.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	3,25		109.432.500,00		112.600.000,00	KECAMATAN MAROS BARU
3.09.3.09.01.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah Layanan Administrasi Perijinan dan Non Perijinan	17 Layanan	Kecamatan Maros Baru	15.782.500,00	17 Layanan	15.100.000,00	
3.09.3.09.01.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Laporan Realisasi PBB dan BPHTB	12 Laporan	Kecamatan Maros Baru	16.900.000,00	12 Laporan	17.500.000,00	
3.09.3.09.01.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Jumlah peringatan Hari - hari Nasional	5 Kegiatan	Kecamatan Maros Baru	76.750.000,00	5 Kegiatan	80.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.01.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kecamatan	100 persen		38.230.000,00		39.300.000,00	KECAMATAN MAROS BARU
3.09.3.09.01.016.001.	Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Trantibun	7 Kasus	Kecamatan Maros Baru	17.080.000,00	7 Kasus	18.225.000,00	
3.09.3.09.01.016.005.	Pencegahan dan Penanggulangan bencana	Jumlah kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian bencana	7 kegiatan	Kecamatan Maros Baru	10.575.000,00	7 kegiatan	10.575.000,00	
3.09.3.09.01.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Bencana	7 Kegiatan	Kecamatan Maros Baru	10.575.000,00	7 Kegiatan	10.500.000,00	
3.09.3.09.01.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	45 persen		17.500.000,00		17.500.000,00	KECAMATAN MAROS BARU
3.09.3.09.01.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada MUSRENBANG Tingkat Kecamatan	400 Orang	Kecamatan Maros Baru	17.500.000,00	400 Orang	17.500.000,00	
3.09.3.09.01.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen		768.075.000,00		645.800.000,00	KECAMATAN MAROS BARU
3.09.3.09.01.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	4 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	5.875.000,00	4 Dokumen	6.100.000,00	
3.09.3.09.01.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Jumlah Dokumen laporan atas hasil pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini tingkat kecamatan	4 Dokumen	Kecamatan Maros Baru	46.400.000,00	4 Dokumen	44.800.000,00	
3.09.3.09.01.018.004.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kecamatan	Jumlah Tugas perbantuan yang dilaksanakan di kecamatan	5 Kegiatan	Kecamatan Maros Baru	19.250.000,00	5 Kegiatan	19.250.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.01.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	4 Desa	Kecamatan Maros Baru	7.650.000,00	4 Desa	6.750.000,00	
3.09.3.09.01.018.006.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di bina	3 Kelurahan	Kecamatan Maros Baru	688.900.000,00	3 Kelurahan	568.900.000,00	
3.09.3.09.01.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	100 persen		20.625.000,00		20.750.000,00	KECAMATAN MAROS BARU
3.09.3.09.01.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	250 Orang	Kecamatan Maros Baru	10.750.000,00	250 Orang	10.750.000,00	
3.09.3.09.01.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	Jumlah masyarakat dalam pembinaan ekonomi kerakyatan	300 Orang	Kecamatan Maros Baru	9.875.000,00	300 Orang	10.000.000,00	
3.09.3.09.01.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	100 persen		185.440.500,00		205.200.000,00	KECAMATAN MAROS BARU
3.09.3.09.01.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga/ Kader PKK Yang Mendapatkan Pembinaan	250 Kader	Kecamatan Maros Baru	24.200.000,00	250 Kader	26.700.000,00	
3.09.3.09.01.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan	1000 Orang	Kecamatan Maros Baru	73.750.000,00	1000 Orang	85.000.000,00	
3.09.3.09.01.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Keolahragaan Kepemudaan dan Sosial	2 Kegiatan	Kecamatan Maros Baru	36.000.000,00	2 Kegiatan	38.500.000,00	
3.09.3.09.01.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah Kegiatan Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan	3 Kegiatan	Kecamatan Maros Baru	51.490.500,00	3 Kegiatan	55.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.01.022	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat kelurahan	100 Persen		794.000.000,00		787.000.000,00	KECAMATAN MAROS BARU
3.09.3.09.01.022.001.	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	Jumlah kelurahan yang di bina	3 Kelurahan	Kecamatan Maros Baru	89.500.000,00	3 Kelurahan	89.500.000,00	
3.09.3.09.01.022.002.	Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi	jumlah kelurahan yang dibina	3 kelurahan	Kecamatan Maros Baru	644.500.000,00	3 kelurahan	623.500.000,00	
3.09.3.09.01.022.004.	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	Jumlah kelurahan yang di bina	3 Kelurahan	Kecamatan Maros Baru	45.000.000,00	3 Kelurahan	45.000.000,00	
3.09.3.09.01.022.006.	Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	jumlah kelurahan yang dibina	3 Kelurahan	Kecamatan Maros Baru	15.000.000,00	3 Kelurahan	29.000.000,00	
3.09.3.09.01.023.	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Persentase Penurunan Masyarakat Miskin Di Wilayah Kelurahan	100 Persen		304.000.000,00		304.000.000,00	KECAMATAN MAROS BARU
3.09.3.09.01.023.001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kelurahan yang dibina	3 Kelurahan	Kecamatan Maros Baru	34.000.000,00	3 Kelurahan	34.000.000,00	
3.09.3.09.01.023.004.	Pengembangan UMKM Masyarakat	Jumlah Kelurahan yang di bina	3 Kelurahan	Kecamatan Maros Baru	260.000.000,00	3 Kelurahan	260.000.000,00	
3.09.3.09.01.023.006.	Pengelolaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kelurahan yang di bina	3 Kelurahan	Kecamatan Maros Baru	10.000.000,00	3 Kelurahan	10.000.000,00	
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.02.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		328.253.750,00		148.093.830,00	KECAMATAN BANTIMURUNG
3.09.3.09.02.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Kec. Bantimurung	155.800.000,00	12 Layanan	126.540.500,00	
3.09.3.09.02.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	9 Layanan	Kantor Kec. Bantimurung	146.998.750,00	9 Layanan	153.330,00	
3.09.3.09.02.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	12 Dokumen	Kantor Kec. Bantimurung	1.400.000,00	12 Dokumen	15.400.000,00	
3.09.3.09.02.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan	12 Dokumen	Kantor Kec. Bantimurung	16.630.000,00	12 Dokumen	1.175.000,00	
3.09.3.09.02.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	3 Dokumen	Kantor Kec. Bantimurung	4.200.000,00	3 Dokumen	1.175.000,00	
3.09.3.09.02.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Cakupan Fungsi Manajemen OPD Yang Terlaksana Dengan Baik	3.0 Persen	Kantor Kec. Bantimurung	3.225.000,00	3.0 Persen	3.650.000,00	
3.09.3.09.02.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	100 Persen		671.631.250,00		144.000.000,00	KECAMATAN BANTIMURUNG
3.09.3.09.02.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pakaian Hari - Hari tertentu Yang di Sediakan	60 Orang	Kantor Kec. Bantimurung	546.631.250,00	60 Orang	19.000.000,00	
3.09.3.09.02.002.004.	Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	4 Unit	Kantor Kec. Bantimurung	100.000.000,00	4 Unit	100.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.02.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah penyediaan Kendaraan Hias / Devile / Karnaval / Pawai	1 Unit	Kantor Kec. Bantimurung	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	
3.09.3.09.02.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang dipelihara dalam kondisi Baik	1 Set	Kantor Kec. Bantimurung	10.000.000,00	1 set	10.000.000,00	
3.09.3.09.02.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	3,25 IKM		102.300.000,00		86.625.000,00	KECAMATAN BANTIMURUNG
3.09.3.09.02.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah Layanam Perijinan dan Non Perijinan	9 Layanan	Kantor Kec. Bantimurung	6.600.000,00	9 Layanan	6.300.000,00	
3.09.3.09.02.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Jumlah Kelurahan Yang di Bina	2 Kelurahan (Kel. Kalabbirang dan Kel. Leang - Leang)	Kantor Kec. Bantimurung	8.450.000,00	2 Kelurahan (Kel. Kalabbirang dan Kel. Leang - Leang)	8.650.000,00	
3.09.3.09.02.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Jumlah Peringatan Hari Hari Nasional	1 Kegiatan	Kantor Kec. Bantimurung	87.250.000,00	1 Kegiatan	71.675.000,00	
3.09.3.09.02.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kecamatan	85 Persen		25.375.000,00		22.700.000,00	KECAMATAN BANTIMURUNG
3.09.3.09.02.016.001.	Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Trantibum	24 Kasus	Kantor Kec. Bantimurung	8.575.000,00	24 Kasus	6.700.000,00	
3.09.3.09.02.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Bencana	1 Kali	Kantor Kec. Bantimurung	16.800.000,00	1 Kali	16.000.000,00	
3.09.3.09.02.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	20 Persen		15.575.000,00		15.550.000,00	KECAMATAN BANTIMURUNG



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.02.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Musrenbang Tingkat Kecamatan	300 Orang	Kantor Kecamatan Bantimurung	15.575.000,00	300 Orang	15.550.000,00	
3.09.3.09.02.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	100 Persen		492.000.000,00		484.900.000,00	KECAMATAN BANTIMURUNG
3.09.3.09.02.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	2 Kegiatan	Kantor Kec. Bantimurung	10.800.000,00	2 Kegiatan	7.400.000,00	
3.09.3.09.02.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	6 Dokumen	Kantor Kec. Bantimurung	51.400.000,00	6 Dokumen	48.100.000,00	
3.09.3.09.02.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang di Bina	6 Desa	Kantor Kec. Bantimurung	8.400.000,00	6 Desa	8.400.000,00	
3.09.3.09.02.018.006.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang di Bina	2 Kelurahan (Kel. Kalabbirang dan Kel. Leang - Leang	Kelurahan Kalabbirang dan kelurahan Leang - Leang	421.400.000,00	2 Kelurahan (Kel. Kalabbirang dan Kel. Leang - Leang	421.000.000,00	
3.09.3.09.02.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	100 Persen		5.450.000,00		5.450.000,00	KECAMATAN BANTIMURUNG
3.09.3.09.02.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Kegiatan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	150 Orang	Kantor Kec. Bantimurung	5.450.000,00	150 Orang	5.450.000,00	
3.09.3.09.02.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	100 Persen		131.915.000,00		126.222.500,00	KECAMATAN BANTIMURUNG
3.09.3.09.02.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Kader PKK Yang Mendapatkan pembinaan	200 Orang	Kantor Kecamatan Bantimurung	10.200.000,00	200 Orang	10.200.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.02.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan	300 Orang	Kantor Kec. Bantimurung	70.925.000,00	300 Orang	70.375.000,00	
3.09.3.09.02.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Keolahragaan Kepemudaan Sosisl	1 Kegiatan	Kantor Kecamatan Bantimurung	22.500.000,00	1 Kegiatan	20.500.000,00	
3.09.3.09.02.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah Kegiatan Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan	3 Kegiatan	Kantor Kecamatan Bantimurung	26.885.000,00	3 Kegiatan	23.825.000,00	
3.09.3.09.02.020.006.	Pengawasan penyaluran BANSOS	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyaluran Bansos	4 Kegiatan	Kantor Kec. Bantimurung	1.405.000,00	4 Kegiatan	1.322.500,00	
3.09.3.09.02.021.	Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum Masyarakat Kecamatan Yang Berfungsi Dengan Baik	100 Persen					KECAMATAN BANTIMURUNG
3.09.3.09.02.022.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Persentase Keterseediaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat kelurahan	100 Persen		15.749.500.000,00		15.738.000.000,00	KECAMATAN BANTIMURUNG
3.09.3.09.02.022.001.	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman	Jumlah sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman	6 Paket	Kelurahan Kalabbirang dan Kelurahan Leang - Leang	749.500.000,00	6 Paket	738.000.000,00	
3.09.3.09.02.022.006.	Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan	12 Paket	Kelurahan Kalabbirang dan Kelurahan Leang - Leang Kec. Bantimurung	15.000.000.000,00	12 Paket	15.000.000.000,00	
3.09.3.09.02.023.	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Persentase Penurunan Masyarakat Miskin Di Wilayah Kelurahan	-					KECAMATAN BANTIMURUNG
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.03.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		381.363.000,00		316.017.000,00	KECAMATAN CAMBA
3.09.3.09.03.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Umum Administrasi Perkantoran	11 Layanan	Kecamatan Camba	183.081.000,00	11 Layanan	136.559.000,00	
3.09.3.09.03.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	Kecamatan Camba	152.157.000,00	9 Layanan	148.723.000,00	
3.09.3.09.03.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Dan Administrasi Keuangan OPD	12 Layanan	Kecamatan Camba	24.300.000,00	12 Layanan	19.360.000,00	
3.09.3.09.03.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	46 Dokumen	Kecamatan Camba	8.850.000,00	46 Dokumen	5.000.000,00	
3.09.3.09.03.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Pelaporan OPD	3 Dokumen	Kecamatan Camba	9.750.000,00	3 Dokumen	4.875.000,00	
3.09.3.09.03.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Nilai Hasil Survey Kapasitas Organisasi	3,0 Nilai Survey	Kecamatan Camba	3.225.000,00	3,0 Nilai Survey	1.500.000,00	
3.09.3.09.03.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	A		637.142.000,00		269.399.500,00	KECAMATAN CAMBA
3.09.3.09.03.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana Prasarana	1 Unit	Kecamatan Camba	518.978.400,00	1 Unit	200.000.000,00	
3.09.3.09.03.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana Prasarana yang Berada dalam Kondisi Baik	100 Persen	Kecamatan Camba	64.712.352,00	100 Persen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.03.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	1 Unit	Kecamatan Camba	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	
3.09.3.09.03.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	10 Jenis	Kecamatan Camba	14.981.748,00	10 Jenis	15.000.000,00	
3.09.3.09.03.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Kantor Yang Berada Dalam Kondisi baik	12Jenis	Kecamatan Camba	4.970.000,00	12Jenis	20.900.000,00	
3.09.3.09.03.002.011.	Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	6 Unit	Kecamatan Camba	18.499.500,00	6 Unit	18.499.500,00	
3.09.3.09.03.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	3,25		94.822.000,00		97.036.000,00	KECAMATAN CAMBA
3.09.3.09.03.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah Administrasi Perijinan Dan Non Perijinan	14 Layanan	Kecamatan Camba	9.322.000,00	14 Layanan	13.586.000,00	
3.09.3.09.03.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Jumlah Orang Yang Berpartisipasi Pada Kegiatan Sosialisasi PBB	150 Orang	Kecamatan Camba	12.000.000,00	150 Orang	10.700.000,00	
3.09.3.09.03.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Hari Hari Nasional	300 Orang	Kecamatan Camba	73.500.000,00	300 Orang	72.750.000,00	
3.09.3.09.03.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kecamatan	100		35.000.000,00		28.535.000,00	KECAMATAN CAMBA
3.09.3.09.03.016.001.	Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Kasus Trantibun	24 Kasus	Kecamatan Camba	24.500.000,00	24 Kasus	14.835.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.03.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Bencana	2 Kegiatan	Kecamatan Camba	10.500.000,00	2 Kegiatan	13.700.000,00	
3.09.3.09.03.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	76		21.450.000,00		19.050.000,00	KECAMATAN CAMBA
3.09.3.09.03.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Musrenbang Tingkat Kecamatan	300 Orang	Kecamatan Camba	21.450.000,00	300 Orang	19.050.000,00	
3.09.3.09.03.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	23		64.870.000,00		27.887.500,00	KECAMATAN CAMBA
3.09.3.09.03.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Koordinasi Forum komunikasi Pimpinan Kecamatan	4 Kali	Kecamatan Camba	5.875.000,00	4 Kali	10.087.500,00	
3.09.3.09.03.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan FKDM Kecamatan	4	Kecamatan Camba	46.500.000,00	4	4.650.000,00	
3.09.3.09.03.018.004.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kecamatan	Jumlah Tugas Perbantuan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan	3 Kegiatan	Kecamatan Camba	2.545.000,00	3 Kegiatan	5.000.000,00	
3.09.3.09.03.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan	6	Kecamatan Camba	9.950.000,00	6	8.150.000,00	
3.09.3.09.03.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	80		11.975.000,00		65.496.500,00	KECAMATAN CAMBA
3.09.3.09.03.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Tudang Sipulung Pada Kecamatan	200	Kecamatan Camba	7.150.000,00	200	71.500,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.03.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	Jumlah Masyarakat Dalam Pembinaan Ekonomi Kerakyatan	50 Orang	Kecamatan Camba	4.825.000,00	50 Orang	65.425.000,00	
3.09.3.09.03.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	100		182.978.000,00		199.403.000,00	KECAMATAN CAMBA
3.09.3.09.03.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang Mendapatkan Pembinaan	406	Kecamatan Camba	35.850.000,00	406	54.050.000,00	
3.09.3.09.03.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan	6,910 Laki Laki dan 7.286 Perempuan	Kecamatan Camba	65.965.000,00	6,910 Laki Laki dan 7.286 Perempuan	54.050.000,00	
3.09.3.09.03.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Keolahragaan Kepemudaan Dan Sosial	2 Kegiatan	Kecamatan Camba	38.778.000,00	2 Kegiatan	38.778.000,00	
3.09.3.09.03.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah Kegiatan Kebersihan Dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan	3	Kecamatan CAmba	38.735.000,00	3	49.375.000,00	
3.09.3.09.03.020.006.	Pengawasan penyaluran BANSOS	Jumlah Kegiatan Pengawasan	2	Kecamatan CAmba	3.650.000,00	2	3.150.000,00	
3.09.3.09.03.022.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Persentase Keterseediaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat kelurahan	-		732.000.000,00		-	KECAMATAN CAMBA
3.09.3.09.03.022.006.	Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang Di bina	2 Kelurahan	Kecamatan camba	732.000.000,00	2 Kelurahan	-	
3.09.3.09.03.023.	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Persentase Penurunan Masyarakat Miskin Di Wilayah Kelurahan	-		453.000.000,00		-	KECAMATAN CAMBA



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.03.023.008.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang Dibina	2 Kelurahan	Kelurahan Cempaniga, Mario Pulana	453.000.000,00	2 Kelurahan	-	
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	
3.09.3.09.04.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan	4 Fungsi		414.439.500,00		-	KECAMATAN MALLAWA
3.09.3.09.04.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Layanan	Kecamatan Mallawa	193.377.000,00	12 Layanan	-	
3.09.3.09.04.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	9 Layanan	Kecamatan Mallawa	182.587.500,00	9 Layanan	-	
3.09.3.09.04.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Dan Administrasi Keuangan OPD	10 Dokumen	Kecamatan Mallawa	29.800.000,00	10 Dokumen	-	
3.09.3.09.04.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan OPD	44 Dokumen	Kecamatan Mallawa	2.290.000,00	44 Dokumen	-	
3.09.3.09.04.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan OPD	3 Dokumen	Kecamatan Mallawa	2.650.000,00	3 Dokumen	-	
3.09.3.09.04.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Dokumen Pengendalian OPD	1 Dokumen	Kecamatan Mallawa	3.735.000,00	1 Dokumen	-	
3.09.3.09.04.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	4 Unit		452.225.500,00		-	KECAMATAN MALLAWA



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.04.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	13 Jenis	Kecamatan Mallawa	100.000.000,00	13 Jenis	-	
3.09.3.09.04.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	8 Jenis	Kecamatan Mallawa	334.600.000,00	8 Jenis	-	
3.09.3.09.04.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	1 Unit	Kecamatan Mallawa	11.000.000,00	1 Unit	-	
3.09.3.09.04.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	3 Jenis	Kecamatan Mallawa	6.625.500,00	3 Jenis	-	
3.09.3.09.04.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	3,25 Nilai Indeks		176.850.000,00		-	KECAMATAN MALLAWA
3.09.3.09.04.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah Layanan Administrasi Perijinan dan Non Perijinan	11 Layanan	Kecamatan Mallawa	4.250.000,00	11 Layanan	-	
3.09.3.09.04.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Laporan Realisasi PBB dan BPHTB	12 Laporan	Kecamatan Mallawa	9.750.000,00	12 Laporan	-	
3.09.3.09.04.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional	5 Kegiatan	Kecamatan Mallawa	162.850.000,00	5 Kegiatan	-	
3.09.3.09.04.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Kecamatan	24 Kasus		19.700.000,00		-	KECAMATAN MALLAWA
3.09.3.09.04.016.001.	Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	12 Kasus	Kecamatan Mallawa	7.800.000,00	12 Kasus	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.04.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	40 Orang	Kecamatan Mallawa	11.900.000,00	40 Orang	-	
3.09.3.09.04.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	100 Persen		23.900.000,00		-	KECAMATAN MALLAWA
3.09.3.09.04.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Musrenbang Tingkat Kecamatan	300 Orang	Kecamatan Mallawa	23.900.000,00	300 Orang	-	
3.09.3.09.04.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur Dan Masyarakat Tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	40 Orang		237.735.000,00		-	KECAMATAN MALLAWA
3.09.3.09.04.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Aparat Yang Ikut Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	40 Orang	Kecamatan Mallawa	14.210.000,00	40 Orang	-	
3.09.3.09.04.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Kecamatan Mallawa	68.600.000,00	4 Dokumen	-	
3.09.3.09.04.018.004.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kecamatan	Jumlah Tugas Perbantuan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan	5 Kegiatan	Kecamatan Mallawa	1.800.000,00	5 Kegiatan	-	
3.09.3.09.04.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dibina	10 Desa	Kecamatan Mallawa	1.325.000,00	10 Desa	-	
3.09.3.09.04.018.006.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang Dibina	1 Kelurahan	Kecamatan Mallawa	151.800.000,00	1 Kelurahan	-	
3.09.3.09.04.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Ekonomi Di Kecamatan	55 Orang		22.800.000,00		-	KECAMATAN MALLAWA



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.04.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	55 Orang	Kecamatan Mallawa	13.000.000,00	55 Orang	-	
3.09.3.09.04.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	Jumlah Masyarakat Dalam Pembinaan Ekonomi Kerakyatan	100 Orang	Kecamatan Mallawa	9.800.000,00	100 Orang	-	
3.09.3.09.04.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Dan Keagamaan	300 Orang		129.350.000,00		-	KECAMATAN MALLAWA
3.09.3.09.04.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK Yang Mendapatkan Pembinaan	220 Orang	Kecamatan Mallawa	16.400.000,00	220 Orang	-	
3.09.3.09.04.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan	1000 Orang	Kecamatan Mallawa	84.300.000,00	1000 Orang	-	
3.09.3.09.04.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah Pemuda/Atlet Yang Berpartisipasi Pada Kegiatan Olah Raga/Kepemudaan	40 Orang	Kecamatan Mallawa	21.450.000,00	40 Orang	-	
3.09.3.09.04.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah Lokasi Yang Berada Dalam Kondisi Yang Bersih, Rapi dan Indah	11 Kelurahan dan Desa	Kecamatan Mallawa	5.200.000,00	11 Kelurahan dan Desa	-	
3.09.3.09.04.020.006.	Pengawasan penyaluran BANSOS	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25 IKM	Kecamatan Mallawa	2.000.000,00	3,25 IKM	-	
3.09.3.09.04.022.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat kelurahan	100 Persen		1.276.000.000,00		1.000.000.000,00	KECAMATAN MALLAWA
3.09.3.09.04.022.002.	Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Kelurahan Yang Dibina	1 Kelurahan	-	176.000.000,00	1 Kelurahan	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.04.022.003.	Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan	Jumlah Kelurahan Yang Dibina	1 Kelurahan	-	100.000.000,00	1 Kelurahan	-	
3.09.3.09.04.022.006.	Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	jumlah kelurahan yang dibina	100%	Kelurahan Sabila Kec. Mallawa	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	
3.09.3.09.04.023.	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Persentase Penurunan Masyarakat Miskin Di Wilayah Kelurahan	100 Persen		90.000.000,00		-	KECAMATAN MALLAWA
3.09.3.09.04.023.004.	Pengembangan UMKM Masyarakat	Jumlah Kelurahan Yang Dibina	1 Kelurahan	-	70.000.000,00	1 Kelurahan	-	
3.09.3.09.04.023.006.	Pengelolaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kelurahan Yang Dibina	1 Kelurahan	-	20.000.000,00	1 Kelurahan	-	
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	
3.09.3.09.05.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		301.384.000,00		301.384.000,00	KECAMATAN TANRALILI
3.09.3.09.05.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah cakupan layanan administrasi umum perkantoran	12 Layanan	Kecamatan Tanralili	125.450.000,00	12 Layanan	125.450.000,00	
3.09.3.09.05.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	9 layanan	Kecamatan Tanralili	154.987.000,00	9 Layanan	154.987.000,00	
3.09.3.09.05.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan	12 Dokumen	Kecamatan Tanralili	11.710.000,00	12 Dokumen	11.710.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.05.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Rencana dan anggaran Kegiatan OPD	46 Dokumen	Kecamatan Tanralili	2.324.500,00	46 Dokumen	2.324.500,00	
3.09.3.09.05.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	3 Dokumen	Kecamatan Tanralili	3.900.000,00	3 Dokumen	3.900.000,00	
3.09.3.09.05.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksana dengan Baik	3.0	Kecamatan Tanralili	3.012.500,00	3.0	3.012.500,00	
3.09.3.09.05.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	100 Persen		441.300.000,00		441.300.000,00	KECAMATAN TANRALILI
3.09.3.09.05.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Perlengkapan Kantor	4 Jenis	Kecamatan Tanralili	229.100.000,00	4 Jenis	229.100.000,00	
3.09.3.09.05.002.004.	Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jenis Pengelolaan Sarana Prasarana Kebersihan Kecamatan yang Berfungsi dengan baik	8 Jenis	Kecamatan Tanralili	37.000.000,00	8 Jenis	37.000.000,00	
3.09.3.09.05.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	1 Unit	Kecamatan Tanralili	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	
3.09.3.09.05.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor yang Berada dalam Kondisi Baik	11 Jenis	Kecamatan Tanralili	10.200.000,00	11 Jenis	10.200.000,00	
3.09.3.09.05.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan kantor yang berada Dalam Kondisi Baik	11 Jenis	Kecamatan Tanralili	10.000.000,00	11 Jenis	10.000.000,00	
3.09.3.09.05.002.010.	Rehabilitasi Ruangan Kantor	Jumlah Jenis Ruangan kantor yang berada Dalam Kondisi Baik	13 Ruangan	Kecamatan Tanralili	145.000.000,00	13 Ruangan	145.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.05.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	3,25		87.425.000,00		87.425.000,00	KECAMATAN TANRALILI
3.09.3.09.05.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	8 Layanan	Kecamatan Tanralili	8.900.000,00	8 Layanan	8.900.000,00	
3.09.3.09.05.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Jumlah layanan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB yang dilaksanakan dengan Baik	2 Layanan	Kecamatan Tanralili	9.975.000,00	2 Layanan	9.975.000,00	
3.09.3.09.05.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Jumlah Masyarakat dan apartur yang Memperingati Hari Hari Nasional	500 Orang	Kecamatan Tanralili	68.550.000,00	500 Orang	68.550.000,00	
3.09.3.09.05.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kecamatan	66,67		17.730.000,00		17.730.000,00	KECAMATAN TANRALILI
3.09.3.09.05.016.001.	Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian (Ketenteraman, ketertiban dan Keindahan) masyarakat	12 Kasus	Kecamatan Tanralili	8.250.000,00	12 Kasus	8.250.000,00	
3.09.3.09.05.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Bencana	12 Kasus	Kecamatan Tanralili	9.480.000,00	12 Kasus	9.480.000,00	
3.09.3.09.05.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	14,1		18.850.000,00		18.850.000,00	KECAMATAN TANRALILI
3.09.3.09.05.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan	300 Orang	Kecamatan Tanralili	18.850.000,00	300 Orang	18.850.000,00	
3.09.3.09.05.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	100 Persen		230.480.000,00		230.480.000,00	KECAMATAN TANRALILI



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.05.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	4 Dokumen	Kecamatan Tanralili	9.180.000,00	4 Dokumen	9.180.000,00	
3.09.3.09.05.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	Kecamatan Tanralili	56.200.000,00	4 Kegiatan	56.200.000,00	
3.09.3.09.05.018.004.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kecamatan	Jumlah Tugas pembantuan yang dilaksanakan dikecamatan	8 Layanan	Kecamatan tanralili	5.000.000,00	8 Layanan	5.000.000,00	
3.09.3.09.05.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	7 Desa	Kecamatan Tanralili	2.500.000,00	7 Desa	2.500.000,00	
3.09.3.09.05.018.006.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di Bina	1 Kelurahan	Kecamatan Tanralili	157.600.000,00	1 Kelurahan	157.600.000,00	
3.09.3.09.05.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	100 Persen		10.000.000,00		10.000.000,00	KECAMATAN TANRALILI
3.09.3.09.05.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pada Tudang Sipulung tingkat kecamatan	150 Orang	Kecamatan Tanralili	5.200.000,00	150 Orang	5.200.000,00	
3.09.3.09.05.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	Jumlah Masyarakat Dalam Pembinaan Ekonomi Kerakyatan	250 Orang	Kecamatan Tanralili	4.800.000,00	250 Orang	4.800.000,00	
3.09.3.09.05.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	100 Persen		158.331.000,00		158.331.000,00	KECAMATAN TANRALILI
3.09.3.09.05.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang mendapatkan Pembinaan	250 Orang	Kecamatan Tanralili	26.500.000,00	250 Orang	26.500.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.05.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	500 Orang	Kecamatan Tanralili	59.106.000,00	500 Orang	59.106.000,00	
3.09.3.09.05.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Keolahragaan Kepemudaan dan Sosial	2 Kegiatan	Kecamatan Tanralili	34.300.000,00	2 Kegiatan	34.300.000,00	
3.09.3.09.05.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah Kegiatan Kebersihan dan Penyehatan lingkungan	2 Kegiatan	Kecamatan Tanralili	37.100.000,00	2 Kegiatan	37.100.000,00	
3.09.3.09.05.020.006.	Pengawasan penyaluran BANSOS	Jumlah Kegiatan Pengawasan	1 Kegiatan	Kecamatan Tanralili	1.325.000,00	1 Kegiatan	1.325.000,00	
3.09.3.09.05.021.	Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum Masyarakat Kecamatan Yang Berfungsi Dengan Baik	100 Persen					KECAMATAN TANRALILI
3.09.3.09.05.022.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Persentase Keterediaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat kelurahan	100 Persen		1.283.500.000,00		1.273.500.000,00	KECAMATAN TANRALILI
3.09.3.09.05.022.001.	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	Jumlah Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	2 Paket	Kelurahan Borong Kecamatan Tanralili	383.500.000,00	2 Paket	373.500.000,00	
3.09.3.09.05.022.006.	Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan	4 Paket	Kel. Borong Kec. Tanralili	900.000.000,00	4 Paket	900.000.000,00	
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	
3.09.3.09.06.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		351.704.000,00		-	KECAMATAN BONTOA



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.06.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Kecamatan Bontoa	180.483.000,00	12 Layanan	-	
3.09.3.09.06.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	Kecamatan Bontoa	122.956.000,00	9 Layanan	-	
3.09.3.09.06.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen SPJ fungsional dan administrasi keuangan OPD	12 Dokumen	Kecamatan Bontoa	18.070.000,00	12 Dokumen	-	
3.09.3.09.06.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	7 Dokumen	Kecamatan Bontoa	3.170.000,00	7 Dokumen	-	
3.09.3.09.06.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan kinerja Perangkat daerah	3 Dokumen	Kecamatan Bontoa	3.495.000,00	3 Dokumen	-	
3.09.3.09.06.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Kegiatan Survei Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	1 Kegiatan	Kecamatan Bontoa	23.530.000,00	1 Kegiatan	-	
3.09.3.09.06.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	Nilai SAKIP		573.973.000,00		-	KECAMATAN BONTOA
3.09.3.09.06.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor yang tersedia	1 Paket	Kecamatan Bontoa	277.290.000,00	1 Paket	-	
3.09.3.09.06.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	10 Jenis	Kecamatan Bontoa	266.743.000,00	10 Jenis	-	
3.09.3.09.06.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	1 Unit	Kecamatan Bontoa	10.000.000,00	1 Unit	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.06.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang berada dalam kondisi baik	6 Jenis	Kecamatan	19.940.000,00	6 Jenis	-	
3.09.3.09.06.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	3,25		67.597.000,00		-	KECAMATAN BONTOA
3.09.3.09.06.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah Layanan Administrasi perijinan dan non perijinan	3 Layanan	Kecamatan Bontoa	2.272.000,00	3 Layanan	-	
3.09.3.09.06.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Jumlah Laporan Realisasi PBB dan BPHTB	1 Dokumen	Kecamatan Bontoa	3.825.000,00	1 Dokumen	-	
3.09.3.09.06.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Jumlah Peringatan hari-hari Nasional	5 Hari Nasional	Kecamatan Bontoa	61.500.000,00	5 Hari Nasional	-	
3.09.3.09.06.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kecamatan	100%		30.530.000,00		15.000.000,00	KECAMATAN BONTOA
3.09.3.09.06.016.001.	Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Trantibum	5 Kasus	Kecamatan Bontoa	3.780.000,00	5 Kasus	-	
3.09.3.09.06.016.005.	Pencegahan dan Penanggulangan bencana			-	15.000.000,00		15.000.000,00	
3.09.3.09.06.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Bencana	1 Kegiatan	Kecamatan Bontoa	11.750.000,00	1 Kegiatan	-	
3.09.3.09.06.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	27,5%		18.670.000,00		-	KECAMATAN BONTOA



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.06.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada musrenbang tingkat Kecamatan	300 Orang	Kecamatan Bontoa	18.670.000,00	300 Orang	-	
3.09.3.09.06.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	100%		327.429.000,00		-	KECAMATAN BONTOA
3.09.3.09.06.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	23 urusan	Kecamatan Bontoa	3.000.000,00	23 urusan	-	
3.09.3.09.06.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Jumlah Dokumen laporan atas hasil pelaksanaan forum kewaspadaan dini tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Kecamatan Bontoa	64.150.000,00	4 Dokumen	-	
3.09.3.09.06.018.004.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kecamatan	Jumlah Tugas Perbantuan yang dilaksanakan di Kecamatan	2 Kegiatan	Kecamatan Bontoa	1.393.000,00	2 Kegiatan	-	
3.09.3.09.06.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	8 Desa	Kecamatan Bontoa	4.126.000,00	8 Desa	-	
3.09.3.09.06.018.006.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di Bina	1 kelurahan	Kecamatan Bontoa	254.760.000,00	1 kelurahan	-	
3.09.3.09.06.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	14,02%		11.293.000,00		3.315.000,00	KECAMATAN BONTOA
3.09.3.09.06.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi pada Tudang sipulung Tingkat Kecamatan	200 Orang	Kecamatan Bontoa	6.475.000,00	200 Orang	-	
3.09.3.09.06.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	Jumlah Masyarakat dalam pembinaan Ekonomi Kerakyatan	400 Orang	Kecamatan Bontoa	4.818.000,00	400 Orang	3.315.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.06.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	100%		110.804.000,00		-	KECAMATAN BONTOA
3.09.3.09.06.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang mendapatkan Pembinaan	250 kader	Kecamatan Bontoa	12.400.000,00	250 kader	-	
3.09.3.09.06.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	800 Orang	Kecamatan Bontoa	43.469.000,00	800 Orang	-	
3.09.3.09.06.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Keolahragaan Kepemudaan dan sosial	2 Kegiatan	Kecamatan Bontoa	37.475.000,00	2 Kegiatan	-	
3.09.3.09.06.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah Kegiatan Kebersihan dan Penyehatan lingkungan	7 Kegiatan	Kecamatan Bontoa	17.460.000,00	7 Kegiatan	-	
3.09.3.09.06.022.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat kelurahan	100%		302.000.000,00		-	KECAMATAN BONTOA
3.09.3.09.06.022.001.	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	Jumlah Kelurahan yang di bina	1 Kelurahan	Kelurahan Bontoa	302.000.000,00	1 Kelurahan	-	
3.09.3.09.06.023.	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Persentase Penurunan Masyarakat Miskin Di Wilayah Kelurahan	100%		64.000.000,00		-	KECAMATAN BONTOA
3.09.3.09.06.023.004.	Pengembangan UMKMMasyarakat	Jumlah UMKM yang berkembang	87 UMKM	Kelurahan bontoa	64.000.000,00	87 UMKM	-	
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.07.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		475.053.500,00		-	KECAMATAN TURIKALE
3.09.3.09.07.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah cakupan layanan administrasi umum perkantoran	12 Layanan	Kecamatan turikale	144.169.000,00	12 Layanan	-	
3.09.3.09.07.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan layanan pendukung administrasi perkantoran yang dilaksanakan	9 Layanan	Kecamatan Turikale	317.804.500,00	9 Layanan	-	
3.09.3.09.07.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	12 Dokumen	Kecamatan Turikale	11.230.000,00	12 Dokumen	-	
3.09.3.09.07.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah dokumen Perencanaan , penganggaran dan pelaporan	38 dokumen	Kecamatan Turikale	900.000,00	38 dokumen	-	
3.09.3.09.07.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Kapasitas Organisasi	126 Orang	Kecamatan Turkale	950.000,00	126 Orang	-	
3.09.3.09.07.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		250.604.264,00		-	KECAMATAN TURIKALE
3.09.3.09.07.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Unit	Kecamatan Turikale	101.804.264,00	1 Unit	-	
3.09.3.09.07.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan kantor	15 Unit	Kecamatan Turikale	118.800.000,00	15 Unit	-	
3.09.3.09.07.002.004.	Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Turikale	-		-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.07.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/ deville/ karnaval/ pawai	1 Unit	Kecamatan Turikale	10.000.000,00	1 Unit	-	
3.09.3.09.07.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan kantor yang berada dalam kondidi baik	20 Jenis	Kecamatan Turikale	20.000.000,00	20 jenis	-	
3.09.3.09.07.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	-		1.609.020.250,00		-	KECAMATAN TURIKALE
3.09.3.09.07.015.003.	Percepatan Pencapaian Standar pelayanan Minimal Di Kecamatan	Jumlah Capaian standar pelayanan minimal dikecamatan	12 Layanan	kecamatan turikale	39.950.000,00	12 Layanan	-	
3.09.3.09.07.015.004.	Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan	Cakupan Jumlah laporan realisasi PBB	90 %	Kecamatan Turikale	9.550.000,00	90 %	-	
3.09.3.09.07.015.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Tingkat Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Pelayanan sesuai aturan yang berlaku	7 Kelurahan	Kecamatan Turikale	1.514.400.000,00	7 Kelurahan	-	
3.09.3.09.07.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah Cakupan Layanan Perijinan dan Non Perijinan	12 Layanan	Kecamatan Turikale	2.150.000,00	12 Layanan	-	
3.09.3.09.07.015.009.	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan			kecamatan Turikale	6.050.000,00		-	
3.09.3.09.07.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	jumlah Masyarakat yang berpartisipasi pasi pada hari-hari nasional	100 Orang	Kecamatan Turikale	36.920.250,00	100 Orang	-	
3.09.3.09.07.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kecamatan	-		23.925.000,00		-	KECAMATAN TURIKALE



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.07.016.001.	Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kasus Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1 Kasus	Kecamatan Turikale	6.825.000,00	1 Kasus	-	
3.09.3.09.07.016.003.	Koordinasi Penyelesaian Kasus Ketentraman Dan ketertiban Di Kecamatan	Jumlah Kasus Ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Jenis Kasus	Kecamatan Turikale	2.100.000,00	1 Jenis Kasus	-	
3.09.3.09.07.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan			Kecamatan Turikale	15.000.000,00		-	
3.09.3.09.07.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	-		28.550.000,00		-	KECAMATAN TURIKALE
3.09.3.09.07.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	300 Orang	Kecamatan Turikale	17.400.000,00	300 Orang	-	
3.09.3.09.07.017.003.	Pembinaan Lembaga/Organisasi Masyarakat	Jumlah Lembaga organisasi masyarakat yang mendapat bantuan	2 Lembaga	Kecamatan Turikale	11.150.000,00	2 lembaga	-	
3.09.3.09.07.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	-		65.100.000,00		-	KECAMATAN TURIKALE
3.09.3.09.07.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Dokumen laporan atas Hasil forkopimda	1 Dokumen	Kecamatan Turikale	8.500.000,00	1 Dokumen	-	
3.09.3.09.07.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Jumlah Dokumen atgs laporan hasil forkopimda	1 Dokumen	Kecamatan Turkale	56.600.000,00	1 Dokumen	-	
3.09.3.09.07.018.003.	Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan atas Hasil Peringatan hari-hari nasional	1 Dokumen	Kecamatan Turikale	-	1 Dokumen	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.07.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	-		7.150.000,00		-	KECAMATAN TURIKALE
3.09.3.09.07.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan tudang sipulung	300 Orang	Kecamatan turikale	7.150.000,00	300 Orang	-	
3.09.3.09.07.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	-		264.326.000,00		-	KECAMATAN TURIKALE
3.09.3.09.07.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga/ Kader PKK yang mendapat Pembinaan	250 Orang	Kecamatan turikale	18.450.000,00	250 Orang	-	
3.09.3.09.07.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan	2 Kegiatan	Kecamatan Turikale	111.450.000,00	2 Kegiatan	-	
3.09.3.09.07.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah Pemuda/ atlet yang Berpartisi pasi pada Olahraga Kepemudaan	50 Orang	Kecamatan Turikale	30.750.000,00	50 Orang	-	
3.09.3.09.07.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah Lokasi yang berada dalam Kondisi bersih dan bebas dari sarang nyamuk demam berdarah	7 Lokasi	Kecamatan Turikale	95.526.000,00	7 Lokasi	-	
3.09.3.09.07.020.005.	Penyaluran Bantuan/Jaminan Sosial Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan jaminan/ Bantuan sosial	250	Kecamatan Turikale	8.150.000,00	250	-	
3.09.3.09.07.020.006.	Pengawasan penyaluran BANSOS	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial	250 Orang	Kecamatan turikale	-	250 Orang	-	
3.09.3.09.07.021.	Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum Masyarakat Kecamatan Yang Berfungsi Dengan Baik	-		5.000.000,00		-	KECAMATAN TURIKALE



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.07.021.002.	Pengelolaan Jalur Hijau/Ruang Terbuka Hijau Kecamatan	Jumlah Unit RTH Kecamatan	- Unit	Kecamatan Turikale	5.000.000,00	- Unit	-	
3.09.3.09.07.022.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat kelurahan	-		4.603.200.000,00		-	KECAMATAN TURIKALE
3.09.3.09.07.022.006.	Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan			Kecamatan Turikale	4.603.200.000,00		-	
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	
3.09.3.09.08.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		339.245.000,00		315.305.000,00	KECAMATAN MARUSU
3.09.3.09.08.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan layanan Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	Kecamatan Marusu	187.341.000,00	9 Layanan	176.441.000,00	
3.09.3.09.08.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	6 Layanan	Kecamatan Marusu	128.934.000,00	6 Layanan	121.610.000,00	
3.09.3.09.08.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	12 Dokumen	Kecamatan Marusu	18.070.000,00	12 Dokumen	11.500.000,00	
3.09.3.09.08.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah dokumen rencana dan anggaran OPD	44 dokumen	Kecamatan Marusu	2.600.000,00	44 dokumen	4.600.000,00	
3.09.3.09.08.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah dokumen pengendalian OPD	3 dokumen	Kecamatan Marusu	2.300.000,00	3 dokumen	1.154.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.08.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi			Kecamatan Marusu	-		-	
3.09.3.09.08.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		128.500.000,00		37.800.000,00	KECAMATAN MARUSU
3.09.3.09.08.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur	100 persen	Kecamatan Marusu	35.000.000,00	100 persen	-	
3.09.3.09.08.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	6 Jenis	Kecamatan Marusu	65.450.000,00	6 Jenis	-	
3.09.3.09.08.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah kendaraan hias/deville/kamaval/pawai	1 unit	Kecamatan Marusu	17.800.000,00	1 unit	21.800.000,00	
3.09.3.09.08.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan bangunan gedung kantor yang berada dalam kondisi yang baik	1 jenis	Kecamatan Marusu	10.250.000,00	1 jenis	16.000.000,00	
3.09.3.09.08.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang berada dalam kondisi yang baik	9 Jenis	Kecamatan Marusu	-	9 Jenis	-	
3.09.3.09.08.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	3.25		120.330.000,00		7.200.000,00	KECAMATAN MARUSU
3.09.3.09.08.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah Layanan Administrasi Perijinan Dan Non Perijinan	32 Layanan	Kecamatan Marusu	6.800.000,00	32 Layanan	7.200.000,00	
3.09.3.09.08.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Laporan realisasi PBB dan BPHTB	12 laporan	Kecamatan Marusu	7.900.000,00	12 laporan	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.08.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Jumlah peringatan hari-hari Nasional	5 kegiatan	Kecamatan Marusu	105.630.000,00	5 kegiatan	-	
3.09.3.09.08.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kecamatan	100%		26.850.000,00		38.350.000,00	KECAMATAN MARUSU
3.09.3.09.08.016.001.	Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah kegiatan, pencegahan dan penyelesaian kasus trantibum	7 kasus	Kecamatan Marusu	10.300.000,00	7 kasus	19.400.000,00	
3.09.3.09.08.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan	Jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian bencana	7 kegiatan	Kecamatan Marusu	16.550.000,00	7 kegiatan	18.950.000,00	
3.09.3.09.08.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	66%		19.320.000,00		20.700.000,00	KECAMATAN MARUSU
3.09.3.09.08.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang tingkat kecamatan	400 orang	Kecamatan Marusu	19.320.000,00	400 orang	20.700.000,00	
3.09.3.09.08.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	100%		80.800.000,00		84.250.000,00	KECAMATAN MARUSU
3.09.3.09.08.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	3 dokumen	Kecamatan Marusu	14.900.000,00	3 dokumen	16.550.000,00	
3.09.3.09.08.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Jumlah dokumen laporan atas hasil pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Tingkat Kecamatan	4 dokumen	Kecamatan Marusu	53.400.000,00	4 dokumen	51.350.000,00	
3.09.3.09.08.018.004.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kecamatan	Jumlah tugas pembantuan yang dilaksanakan di kecamatan	5 kegiatan	Kecamatan Marusu	5.800.000,00	5 kegiatan	5.850.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.08.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	7 Desa	Kecamatan Marusu	6.700.000,00	7 Desa	10.500.000,00	
3.09.3.09.08.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	30%		12.400.000,00		14.400.000,00	KECAMATAN MARUSU
3.09.3.09.08.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada tudang sipulung tingkat kecamatan	150 orang	Kecamatan Marusu	6.200.000,00	150 orang	6.200.000,00	
3.09.3.09.08.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	Jumlah masyarakat dalam pembinaan ekonomi kerakyatan	100 orang	Kecamatan Marusu	6.200.000,00	100 orang	8.200.000,00	
3.09.3.09.08.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	100%		231.955.000,00		232.650.000,00	KECAMATAN MARUSU
3.09.3.09.08.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga/kader PKK yang mendapatkan pembinaan	250 kader	Kecamatan Marusu	41.300.000,00	250 kader	50.900.000,00	
3.09.3.09.08.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	900 orang	Kecamatan Marusu	101.900.000,00	900 orang	98.825.000,00	
3.09.3.09.08.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah kegiatan keolahragaan, kepemudaan dan sosial	2 kegiatan	Kecamatan Marusu	39.650.000,00	2 kegiatan	41.900.000,00	
3.09.3.09.08.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah kegiatan kebersihan dan penyehatan lingkungan	3 kegiatan	Kecamatan Marusu	42.355.000,00	3 kegiatan	32.625.000,00	
3.09.3.09.08.020.006.	Pengawasan penyaluran BANSOS	Jumlah kegiatan pengawasan	4 kegiatan	Kecamatan Marusu	6.750.000,00	4 kegiatan	8.400.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	
3.09.3.09.09.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		396.862.000,00		399.000.000,00	KECAMATAN LAU
3.09.3.09.09.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah cakupan layanan administrasi umum perkantoran	12 Layanan	Kecamatan Lau	138.433.000,00	12 Layanan	130.000.000,00	
3.09.3.09.09.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah cakupan layan administrasi perkantoran	9 Layanan	Kecamatan Lau	236.539.000,00	9 Layanan	245.000.000,00	
3.09.3.09.09.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen SPJ Fungsional dan administrasi Keuangan OPD	10 Layanan	Kecamatan Lau	18.380.000,00	10 Layanan	20.000.000,00	
3.09.3.09.09.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan OPD	3 Dokumen	Kecamatan Lau	2.310.000,00	3 Dokumen	2.500.000,00	
3.09.3.09.09.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan OPD	1 Dokumen	Kecamatan Lau	1.200.000,00	1 Dokumen	1.500.000,00	
3.09.3.09.09.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		1.161.557.000,00		1.133.000.000,00	KECAMATAN LAU
3.09.3.09.09.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah unit sarana prasarana pelayanan publik yang berfungsi dengan baik	83 Unit	Kecamatan Lau	784.747.000,00	83 Unit	800.000.000,00	
3.09.3.09.09.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit sarana prasarana pelayanan publik yang berfungsi dengan baik	83 Unit	Kecamatan Lau	337.700.000,00	83 Unit	300.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.09.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah kendaraan hias/ devile/karnaval/pawai	1 Unit	Kecamatan Lau	10.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	
3.09.3.09.09.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan bangunan gedung kantor yang berada dalam kondisi yang baik	8 Jenis	Kecamatan Lau	29.110.000,00	8 Jenis	18.000.000,00	
3.09.3.09.09.003.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Memahami Dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi Jabatannya.	-		3.700.000,00		5.000.000,00	KECAMATAN LAU
3.09.3.09.09.003.001.	Kursus/Pelatihan Singkat Aparatur	Jumlah peserta kursus/pelatihan singkat	50 Orang	Kecamatan Lau	3.700.000,00	50 Orang	5.000.000,00	
3.09.3.09.09.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	-		90.481.000,00		57.500.000,00	KECAMATAN LAU
3.09.3.09.09.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah layanan administrasi perijinan dan non perijinan	5 Layanan	Kecamatan Lau	3.981.000,00	5 Layanan	4.500.000,00	
3.09.3.09.09.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Laporan realisasi PBB dan BPHTB	70 Persen	Wilayah Kecamatan lau	7.900.000,00	100 Persen	8.000.000,00	
3.09.3.09.09.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Jumlah Masyarakat dan aparatur yang berpartisipasi pada peringatan hari-hari Nasional	200 Orang	Kecamatan Lau	78.600.000,00	220 Orang	45.000.000,00	
3.09.3.09.09.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kecamatan	-		24.100.000,00		20.500.000,00	KECAMATAN LAU
3.09.3.09.09.016.001.	Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian kasus trantibum	5 Kasus	Kecamatan Lau	9.100.000,00	5 Kasus	5.500.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.09.016.005.	Pencegahan dan Penanggulangan bencana			-	15.000.000,00		15.000.000,00	
3.09.3.09.09.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	-		20.600.000,00		20.000.000,00	KECAMATAN LAU
3.09.3.09.09.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada Musrenbang tingkat kecamatan	100 Orang	Kecamatan Lau	20.600.000,00	150 Orang	20.000.000,00	
3.09.3.09.09.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	-		2.626.910.000,00		3.818.050.000,00	KECAMATAN LAU
3.09.3.09.09.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Ke Kecamatan	12 Dokumen	Kecamatan Lau	11.060.000,00	12 Dokumen	14.000.000,00	
3.09.3.09.09.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Jumlah dokumen laporan atas hasil pelaksanaan FKDM	4 Laporan	kecamatan Lau	53.700.000,00	4 Laporan	45.900.000,00	
3.09.3.09.09.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	2 Desa	kecamatan Lau	8.150.000,00	2 Desa	8.150.000,00	
3.09.3.09.09.018.006.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan berlaku	4 Kelurahan	Kecamatan Lau	2.554.000.000,00	4 Kelurahan	3.750.000.000,00	
3.09.3.09.09.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	-		13.850.000,00		12.500.000,00	KECAMATAN LAU
3.09.3.09.09.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi pada tudang sipulung tingkat Kecamatan	50 Orang	Kecamatan Lau	9.200.000,00	70 Orang	7.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.09.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	jumlah masyarakat dalam pembinaan ekonomi rakyat	50	Kecamatan lau	4.650.000,00	60	5.500.000,00	
3.09.3.09.09.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	-		138.925.000,00		160.675.000,00	KECAMATAN LAU
3.09.3.09.09.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga/ Kader PKK yang mendapatkan pembinaan	50 Kader	Kecamatan Lau	15.200.000,00	50 Kader	12.000.000,00	
3.09.3.09.09.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	100 Orang	Kecamatan Lau	71.800.000,00	100 Orang	78.675.000,00	
3.09.3.09.09.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah kegiatan keolahragaan kepemudaan dan sosial	50 Orang	Kecamatan Lau	20.250.000,00	60 Orang	35.000.000,00	
3.09.3.09.09.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah kegiatan kebersihan dan penyehatan lingkungan	6 Lokasi	Kecamatan Lau	31.675.000,00	6 Lokasi	35.000.000,00	
3.09.3.09.09.021.	Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum Masyarakat Kecamatan Yang Berfungsi Dengan Baik	-					KECAMATAN LAU
3.09.3.09.09.022.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Persentase Keterseediaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat kelurahan	-		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00	KECAMATAN LAU
3.09.3.09.09.022.006.	Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	-	-	Kec. Lau	2.800.000.000,00	-	2.800.000.000,00	
3.09.3.09.09.023.	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Persentase Penurunan Masyarakat Miskin Di Wilayah Kelurahan	-					KECAMATAN LAU



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	
3.09.3.09.10.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		251.012.000,00		237.091.000,00	KECAMATAN CENRANA
3.09.3.09.10.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Kepegawaian Yang Di Laksanakan	12 Layanan	Kantor Kecamatan Cenrana	112.819.000,00	12 Layanan	119.323.000,00	
3.09.3.09.10.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan layanan Administrasi Umum Perkantoran	9	Kantor Kecamatan Cenrana	106.493.000,00	9	94.493.000,00	
3.09.3.09.10.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Cakupan Layanan Yang Dilaksanakan	10	Kantor Kecamatan Cenrana	18.000.000,00	10	9.575.000,00	
3.09.3.09.10.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan	12	Kantor Kecamatan Cenrana	10.450.000,00	12	10.450.000,00	
3.09.3.09.10.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	-	-	Kecamatan Cenrana	3.250.000,00	-	3.250.000,00	
3.09.3.09.10.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi			-	-		-	
3.09.3.09.10.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		390.700.000,00		41.000.000,00	KECAMATAN CENRANA
3.09.3.09.10.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor			Kecamatan Cenrana	320.700.000,00		10.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.10.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor			-	40.000.000,00		-	
3.09.3.09.10.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai			Kecamatan Cenrana	10.000.000,00		11.000.000,00	
3.09.3.09.10.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Cenrana	5.000.000,00		5.000.000,00	
3.09.3.09.10.002.011.	Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Cenrana	15.000.000,00		15.000.000,00	
3.09.3.09.10.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	72.12		65.120.000,00		65.130.000,00	KECAMATAN CENRANA
3.09.3.09.10.015.001.	Pelayanan Administrasi Perijinan dan Non Perijinan			Kecamatan Cenrana	7.240.000,00		7.250.000,00	
3.09.3.09.10.015.007.	Pelayanan Penanganan Jenazah Pada Wilayah Kecamatan			Kecamatan Cenrana	18.180.000,00		18.180.000,00	
3.09.3.09.10.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Persentase Penrimaan PBB dan BPHTB	100%	Kecamatan Cenrana	7.700.000,00	100%	7.700.000,00	
3.09.3.09.10.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional			Kecamatan Cenrana	32.000.000,00		32.000.000,00	
3.09.3.09.10.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kecamatan	90		25.715.000,00		27.495.000,00	KECAMATAN CENRANA



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.10.016.001.	Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat			Kecamatan Cenrana	6.375.000,00		6.375.000,00	
3.09.3.09.10.016.003.	Koordinasi Penyelesaian Kasus Ketentraman Dan ketertiban Di Kecamatan			Kecamatan Cenrana	13.900.000,00		13.900.000,00	
3.09.3.09.10.016.004.	Penegakan Perda Pada Wlayah Kecamatan			Kecamatan Cenrana	5.440.000,00		7.220.000,00	
3.09.3.09.10.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	26,70		39.075.000,00		37.075.000,00	KECAMATAN CENRANA
3.09.3.09.10.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang tingkat Kecamatan	200	Kecamatan Cenrana	8.350.000,00	200	8.000.000,00	
3.09.3.09.10.017.002.	Penyelenggaraan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan			Kecamatan Cenrana	9.225.000,00		9.325.000,00	
3.09.3.09.10.017.003.	Pembinaan Lembaga/Organisasi Masyarakat			Kecamatan Cenrana	13.350.000,00		11.600.000,00	
3.09.3.09.10.017.004.	Pembinaan, Penyelenggaraan Pemerintahan desa			Kecamatan Cenrana	8.150.000,00		8.150.000,00	
3.09.3.09.10.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	100%		45.760.000,00		51.800.000,00	KECAMATAN CENRANA
3.09.3.09.10.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Kecamatan Cenrana	3.960.000,00	100%	10.100.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.10.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan			Kecamatan Cenrana	41.800.000,00		41.700.000,00	
3.09.3.09.10.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	72,12%		12.600.000,00		11.125.000,00	KECAMATAN CENRANA
3.09.3.09.10.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan			Kecamatan Cenrana	5.200.000,00		5.175.000,00	
3.09.3.09.10.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	187	Kecamatan Cenrana	7.400.000,00	200	5.950.000,00	
3.09.3.09.10.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	100%		139.875.000,00		127.750.000,00	KECAMATAN CENRANA
3.09.3.09.10.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga			Kecamatan Cenrana	17.450.000,00		17.450.000,00	
3.09.3.09.10.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah Masyarakat/Apartur yang berpartisipasi pada amalia Ramdhan dan Kegiatan Keagamaan	350	Kecamatan Cenrana	59.675.000,00	350	58.875.000,00	
3.09.3.09.10.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan			Kecamatan Cenrana	20.250.000,00		20.250.000,00	
3.09.3.09.10.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan			Kecamatan Cenrana	42.500.000,00		31.175.000,00	
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.11.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		290.512.800,00		297.341.000,00	KECAMATAN MONCONGLOE
3.09.3.09.11.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Kantor Kecamatan Moncongloe	111.166.000,00	12 Layanan	101.967.000,00	
3.09.3.09.11.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	Kantor Kecamatan Moncongloe	140.731.000,00	9 Layanan	148.392.000,00	
3.09.3.09.11.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Dan Administrasi Keuangan	12 Dokumen	Kantor Kecamatan Moncongloe	33.490.000,00	12 Dokumen	39.531.000,00	
3.09.3.09.11.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	46 Dokumen	Kantor Kecamatan Moncongloe	1.450.000,00	46 Dokumen	4.441.000,00	
3.09.3.09.11.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kecamatan Moncongloe	1.396.800,00	3 Dokumen	2.000.000,00	
3.09.3.09.11.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	1 Kegiatan	Kantor Kecamatan Moncongloe	2.279.000,00	1 Kegiatan	1.010.000,00	
3.09.3.09.11.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	29 Jenis		373.613.700,00		375.500.000,00	KECAMATAN MONCONGLOE
3.09.3.09.11.002.001.	Penyediaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	1 Jenis	Kantor Kecamatan Moncongloe	20.000.000,00	-	-	
3.09.3.09.11.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	12	Kantor Kecamatan Moncongloe	319.538.700,00	15	337.350.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.11.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	1 Unit	Kantor Kecamatan Moncongloe	10.000.000,00	1 Unit	10.400.000,00	
3.09.3.09.11.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	6 Jenis	Kantor Kecamatan Moncongloe	9.075.000,00	10 Jenis	11.750.000,00	
3.09.3.09.11.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	1 Jenis	Kantor Kecamatan Moncongloe	3.000.000,00	1 Jenis	3.000.000,00	
3.09.3.09.11.002.008.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	6 Unit	Kantor Kecamatan Moncongloe	12.000.000,00	6 Unit	13.000.000,00	
3.09.3.09.11.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	3,25 Nilai Indeks		71.604.000,00		65.087.000,00	KECAMATAN MONCONGLOE
3.09.3.09.11.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah Layanan Administrasi Perijinan Dan Non Perijinan	12 Layanan	Kantor Kecamatan Moncongloe	7.254.000,00	12 Layanan	2.687.000,00	
3.09.3.09.11.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Laporan Realisasi PBB dan BPHTB	12 Laporan	Kecamatan Moncongloe	6.950.000,00	12 Laporan	5.500.000,00	
3.09.3.09.11.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Jumlah Penringatan Hari - Hari Nasional	1 Kegiatan	Kecamatan Moncongloe	57.400.000,00	1 Kegiatan	56.900.000,00	
3.09.3.09.11.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kecamatan	100%		27.300.000,00		23.800.000,00	KECAMATAN MONCONGLOE
3.09.3.09.11.016.001.	Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Trantibun	4 Kasus	Kantor Kecamatan Moncongloe	9.800.000,00	3 Kasus	8.800.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.11.016.005.	Pencegahan dan Penanggulangan bencana			-	15.000.000,00		15.000.000,00	
3.09.3.09.11.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan	Jumlah Kegiatan pencegahan dan penyelesaian Bencana	4 Layanan	Kecamatan Moncongloe	2.500.000,00	4 Layanan	-	
3.09.3.09.11.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	100%		21.137.000,00		17.997.000,00	KECAMATAN MONCONGLOE
3.09.3.09.11.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Musrenbang Tingkat Kecamatan	300 Orang	Kantor Kecamatan Moncongloe	21.137.000,00	300 Orang	17.997.000,00	
3.09.3.09.11.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	100%		54.490.000,00		49.950.000,00	KECAMATAN MONCONGLOE
3.09.3.09.11.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kecamatan	100%	Kantor Kecamatan Moncongloe	3.490.000,00	100%	-	
3.09.3.09.11.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan FKDM	4 Laporan	Kantor Kecamatan Moncongloe	40.400.000,00	4 Laporan	41.600.000,00	
3.09.3.09.11.018.004.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kecamatan	Jumlah Tugas Perbantuan yang dilaksanakandi Kecamatan	2 urusan	Kecamatan Moncongloe	3.500.000,00	2 urusan	-	
3.09.3.09.11.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang di Bina	5 Desa	Kecamatan Moncongloe	7.100.000,00	5 Desa	8.350.000,00	
3.09.3.09.11.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	72.12%		16.300.000,00		13.300.000,00	KECAMATAN MONCONGLOE



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.11.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Tudanmg Sipulung Tingkat Kecamatan	200 Orang	Kecamatan Moncongloe	10.250.000,00	200 Orang	8.250.000,00	
3.09.3.09.11.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	Jumlah Masyarakat dalam Pembinaan Ekonomi Kerakyatan	100 Orang	Kecamatan Moncongloe	6.050.000,00	100 Orang	5.050.000,00	
3.09.3.09.11.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	100%		130.042.500,00		123.025.000,00	KECAMATAN MONCONGLOE
3.09.3.09.11.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK Yang Mendapatkan Pembinaan	50 Kader	Kecamatan Moncongloe	18.200.000,00	50 Kader	18.900.000,00	
3.09.3.09.11.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan	1.000 Orang	Kecamatan Moncongloe	72.312.500,00	1.000 Orang	69.350.000,00	
3.09.3.09.11.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Keolahragaan Kepemudaan dan Sosial	1 Kegiatan	Kegiatan	16.025.000,00	1 Kegiatan	16.250.000,00	
3.09.3.09.11.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah Kegiatan Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan	2 Kegiatan	Kecamatan Moncongloe	23.505.000,00	2 Kegiatan	18.525.000,00	
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	
3.09.3.09.12.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	A Nilai sakiP		308.589.050,00		325.300.000,00	KECAMATAN TOMPOBULU
3.09.3.09.12.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah cakupan layanan administrasi umum perkantoran	12 layanan	Kecamatan Tompobulu	135.265.050,00	12 layanan	140.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.12.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah cakupan layanan pendukung Aministrasi perkantoran	7 Layanan	Kecamatan Tompobulu	138.107.000,00	7 Layanan	160.000.000,00	
3.09.3.09.12.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Cakupan fungsi OPD yang berjalan dengan baik	18 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	11.950.000,00	18 Dokumen	12.000.000,00	
3.09.3.09.12.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran kegiatan OPD	7 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	4.350.000,00	7 Dokumen	6.400.000,00	
3.09.3.09.12.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen pelaporan kegiatan OPD	37 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	15.092.000,00	37 Dokumen	5.500.000,00	
3.09.3.09.12.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Nilai hasil survey kapasitas organisasi	3,0 Nilai survey	Kecamatan Tompobulu	3.825.000,00	3,0 Nilai survey	1.400.000,00	
3.09.3.09.12.002	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	A Nilai SAKIP		245.897.950,00		242.040.000,00	KECAMATAN TOMPOBULU
3.09.3.09.12.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	14 Jenis	Kecamatan Tompobulu	195.897.950,00	14 Jenis	189.040.000,00	
3.09.3.09.12.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah kendaraan hias/Devile/Kamaval/Pawai	1 Unit	Kantor Kecamatan Tompobulu	10.000.000,00	1 Unit	11.000.000,00	
3.09.3.09.12.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantoryang berada dalam kondisi baik	10 Jenis	Kecamatan Tompobulu	10.000.000,00	10 Jenis	11.000.000,00	
3.09.3.09.12.002.008.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas operasional berada dalam kondisi baik	1 Unit	Kecamatan Tompobulu	30.000.000,00	1 Unit	31.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.12.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	3,25		94.095.000,00		107.500.000,00	KECAMATAN TOMPOBULU
3.09.3.09.12.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	jumlah layanan administrasi perijinan dan non perijinan	7 Layanan	Kecamatan Tompobulu	15.215.000,00	7 Layanan	15.500.000,00	
3.09.3.09.12.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Laporan realisasi PBB dan BPHTB	2927 Wajib Pajak	Kecamatan Tompobulu	12.600.000,00	2927 Wajib Pajak	13.000.000,00	
3.09.3.09.12.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Jumlah masyarakat dan aparatur yang berpartisipasi pada Peringatan Hari-hari Nasional	600 Orang	Kecamatan Tompobulu	66.280.000,00	620 Orang	79.000.000,00	
3.09.3.09.12.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kecamatan	75,00		40.390.000,00		37.500.000,00	KECAMATAN TOMPOBULU
3.09.3.09.12.016.001.	Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah kegiatan dan pencegahan dan penyelesaian kasus trantibun	18 Kasus	Kecamatan Tompobulu	21.480.000,00	20 Kasus	21.000.000,00	
3.09.3.09.12.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan	Jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian bencana	4 Layanan	Kecamatan Tompobulu	18.910.000,00	4 Layanan	16.500.000,00	
3.09.3.09.12.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	24,66		21.200.000,00		22.000.000,00	KECAMATAN TOMPOBULU
3.09.3.09.12.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah msyarkat yang berpartisipasi pada Musrenbang Tingkat Kecamatan	400 Orang	Kecamatan Tompobulu	21.200.000,00	450 Orang	22.000.000,00	
3.09.3.09.12.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	23		75.775.000,00		77.300.000,00	KECAMATAN TOMPOBULU



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.12.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	4 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	12.980.000,00	4 Dokumen	14.000.000,00	
3.09.3.09.12.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan atas Hasil Pelaksanaan FKDM	4 Dokumen	Kecamatan Tompobulu	49.200.000,00	4 Dokumen	49.200.000,00	
3.09.3.09.12.018.004.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kecamatan	Jumlah tugas pembantuan yang dilaksanakan di kecamatan	2 Urusan	Kecamatan Tompobulu	4.595.000,00	2 Urusan	4.600.000,00	
3.09.3.09.12.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa	Kecamatan Tompobulu	9.000.000,00	8 Desa	9.500.000,00	
3.09.3.09.12.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	64,08		12.690.000,00		15.300.000,00	KECAMATAN TOMPOBULU
3.09.3.09.12.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tudang sipulung tingkat kecamatan	200 orang	Kecamatan Tompobulu	8.230.000,00	200 orang	8.500.000,00	
3.09.3.09.12.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	Jumlah masyarakat dalam pembinaan ekonomi rakyat	100 Orang	Kecamatan Tompobulu	4.460.000,00	100 Orang	6.800.000,00	
3.09.3.09.12.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	53,33		171.363.000,00		153.500.000,00	KECAMATAN TOMPOBULU
3.09.3.09.12.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga/kader PKK yang mendapatkan pembinaan	250 Orang	Kecamatan Tompobulu	24.200.000,00	300 Orang	27.000.000,00	
3.09.3.09.12.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	500 orang	Kecamatan Tompobulu	67.600.000,00	525 Orang	59.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.12.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah kegiatan keolahragaan kepemudaan dan social kemasyarakatan	2 kegiatan	Kecamatan Tompobulu	34.805.000,00	2 kegiatan	21.000.000,00	
3.09.3.09.12.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah kegiatan kebersihan dan penyehatan lingkungan	3 Layanan	Kecamatan Tompobulu	38.458.000,00	3 Layanan	40.000.000,00	
3.09.3.09.12.020.006.	Pengawasan penyaluran BANSOS	Jumlah kegiatan pengawasan	8 Desa	Kecamatan Tompobulu	6.300.000,00	8 Desa	6.500.000,00	
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	
3.09.3.09.13.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	A nilai saki		267.661.300,00		299.296.000,00	KECAMATAN SIMBANG
3.09.3.09.13.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah cakupan layanan administrasi umum perkantoran	12 layanan	kecamatan simbang	129.080.700,00	12 layanan	155.263.000,00	
3.09.3.09.13.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	jumlah cakupan layanan pendukung administrasi perkantoran	9 layanan	Kecamatan Simbang	116.341.600,00	9 layanan	127.868.000,00	
3.09.3.09.13.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen SPJ fungsional dan administrasi keuangan OPD	12 dokumen	Kecamatan simbang	11.860.000,00	12 dokumen	11.860.000,00	
3.09.3.09.13.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	46 dokumen	Kecamatan simbang	2.254.000,00	46 dokumen	1.605.000,00	
3.09.3.09.13.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah dokumen pengendalian OPD	3 dokumen	Kecamatan simbang	4.500.000,00	3 dokumen	1.320.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.13.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Nilai hasil survey kapasitas organisasi	3,0 nilai survey	kecamatan simbang	3.625.000,00	3,0 nilai survey	1.380.000,00	
3.09.3.09.13.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	A nilai saki		290.287.200,00		249.964.000,00	KECAMATAN SIMBANG
3.09.3.09.13.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	23 jenis	Kecamatan Simbang	257.787.200,00	23 jenis	224.964.000,00	
3.09.3.09.13.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan hias/devile/kamaval/pawai	1 unit	Kecamatan simbang	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	
3.09.3.09.13.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan bangunan gedung kantor yang berada dalam kondisi yang baik	30 jenis	Kecamatan simbang	12.500.000,00	30 jenis	10.000.000,00	
3.09.3.09.13.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang berada dalam kondisi yang baik	10 jenis	Kecamatan simbang	10.000.000,00	10 jenis	5.000.000,00	
3.09.3.09.13.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	3,25 persen		98.847.500,00		101.886.000,00	KECAMATAN SIMBANG
3.09.3.09.13.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah layanan Administrasi perijinan dan non perijinan	14 layanan	kecamatan simbang	9.322.500,00	14 layanan	13.586.000,00	
3.09.3.09.13.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	laporan realisasi PBB dan BPHTB	9389 wajib pajak	kecamatan simbang	16.525.000,00	9389 wajib pajak	17.050.000,00	
3.09.3.09.13.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	jumlah peringatan hari - hari nasional	4 kegiatan	kecamatan simbang	73.000.000,00	4 kegiatan	71.250.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.13.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kecamatan	57,4 persen		30.755.000,00		32.855.000,00	KECAMATAN SIMBANG
3.09.3.09.13.016.001.	Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian kasus Trantibun	12 kasus	Kecamatan Simbang	16.155.000,00	12 kasus	19.155.000,00	
3.09.3.09.13.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan	Jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian bencana	4 kegiatan	Kecamatan Simbang	14.600.000,00	4 kegiatan	13.700.000,00	
3.09.3.09.13.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	64,2 persen		15.850.000,00		15.850.000,00	KECAMATAN SIMBANG
3.09.3.09.13.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi pada MUSRENBANG tingkat kecamatan	300 orang	kecamatan simbang	15.850.000,00	350 orang	15.850.000,00	
3.09.3.09.13.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	23 urusan		61.790.000,00		61.485.000,00	KECAMATAN SIMBANG
3.09.3.09.13.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	4 kali	kecamatan Simbang	8.200.000,00	4 kali	6.900.000,00	
3.09.3.09.13.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	jumlah dokumen laporan atas hasil pelaksanaan FKDM	4 dokumen	kecamatan simbang	36.950.000,00	4 dokumen	36.950.000,00	
3.09.3.09.13.018.004.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kecamatan	Jumlah tugas pembantuan yang dilaksanakan di kecamatan	3 kegiatan	kecamatan simbang	9.130.000,00	3 kegiatan	10.125.000,00	
3.09.3.09.13.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	jumlah Desa yang dibina	6 desa	kecamatan simbang	7.510.000,00	6 desa	7.510.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.13.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	57,1 persen		25.000.000,00		25.900.000,00	KECAMATAN SIMBANG
3.09.3.09.13.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada Tudang Sipulung tingkat kecamatan	200 orang	kecamatan simbang	10.900.000,00	250 orang	10.900.000,00	
3.09.3.09.13.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	jumlah masyarakat dalam pembinaan ekonomi kerakyatan	250 orang	kecamatan simbang	14.100.000,00	250 orang	15.000.000,00	
3.09.3.09.13.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	100 persen		179.809.000,00		182.555.000,00	KECAMATAN SIMBANG
3.09.3.09.13.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	jumlah keluarga/kader PKK yang mendapatkan pembinaan	250 kader	kecamatan simbang	27.519.000,00	250 kader	40.450.000,00	
3.09.3.09.13.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	1100 orang	kecamatan simbang	66.400.000,00	1100 orang	73.385.000,00	
3.09.3.09.13.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	jumlah kegiatan keolahragaan dan kepemudaan dan sosial	1 kegiatan	kecamatan simbang	22.350.000,00	1 kegiatan	20.250.000,00	
3.09.3.09.13.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah kegiatan kebersihan dan penyehatan lingkungan	3 kegiatan	Kecamatan simbang	60.390.000,00	3 kegiatan	42.820.000,00	
3.09.3.09.13.020.006.	Pengawasan penyaluran BANSOS	jumlah kegiatan pengawasan	2 kegiatan	Kecamatan Simbang	3.150.000,00	2 kegiatan	5.650.000,00	
3.09.	KECAMATAN				53.456.346.014,00		39.636.032.830,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.14.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		415.710.000,00		388.710.000,00	KECAMATAN MANDAI
3.09.3.09.14.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Administrasi Umum	12 Layanan	Kecamatan Mandai	171.998.500,00	12 Layanan	144.998.500,00	
3.09.3.09.14.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	Kecamatan Mandai	182.211.500,00	9 Layanan	182.211.500,00	
3.09.3.09.14.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dok SPJ Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	36.700.000,00	12 Dokumen	36.700.000,00	
3.09.3.09.14.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Perencanaan dan Penganggaran OPD	12 Dokumen	Kecamatan Mandai	7.900.000,00	12 Dokumen	7.900.000,00	
3.09.3.09.14.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dok Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	46 Dokumen	Kecamatan Mandai	4.150.000,00	46 Dokumen	4.150.000,00	
3.09.3.09.14.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	46 Dokumen	Kecamatan Mandai	12.750.000,00	46 Dokumen	12.750.000,00	
3.09.3.09.14.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	-		599.850.000,00		599.850.000,00	KECAMATAN MANDAI
3.09.3.09.14.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	1 Paket	Kecamatan Mandai	184.800.000,00	1 Paket	184.800.000,00	
3.09.3.09.14.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Kamaval/Pawai	1 Unit	Kecamatan Mandai	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.14.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	1 unit	Kecamatan Mandai	12.500.000,00	1 unit	12.500.000,00	
3.09.3.09.14.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	4 unit	Kecamatan Mandai	9.750.000,00	4 unit	9.750.000,00	
3.09.3.09.14.002.010.	Rehabilitasi Ruang Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Bangunan Gedung kantor	1	Kecamatan mandai	372.800.000,00	1	372.800.000,00	
3.09.3.09.14.015.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	3,25		91.200.000,00		91.200.000,00	KECAMATAN MANDAI
3.09.3.09.14.015.008.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan	Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan	11 Layanan	Kecamatan Mandai	6.200.000,00	11 Layanan	6.200.000,00	
3.09.3.09.14.015.010.	Optimalisasi Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB	Laporan Realisasi PBB dan BPHTB	12 Laporan	Kecamatan Mandai	7.200.000,00	12 Laporan	7.200.000,00	
3.09.3.09.14.015.011.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Jumlah Peringatan Hari Hari Nasional	300 Orang	Kecamatan Mandai	77.800.000,00	300 Orang	77.800.000,00	
3.09.3.09.14.016.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kecamatan	100		15.000.000,00		15.000.000,00	KECAMATAN MANDAI
3.09.3.09.14.016.001.	Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Trantibum	7 Kasus	Kecamatan Mandai	5.100.000,00	7 Kasus	5.100.000,00	
3.09.3.09.14.016.006.	Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan	Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Bencana	1 Kegiatan	Kecamatan Mandai	9.900.000,00	1 Kegiatan	9.900.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.14.017.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	14,00		22.645.000,00		22.645.000,00	KECAMATAN MANDAI
3.09.3.09.14.017.001.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang berpartisipasi pada Musrenbang Tingkat Kecamatan	300 Orang	Kecamatan Mandai	22.645.000,00	300 Orang	22.645.000,00	
3.09.3.09.14.018.	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang Pemerintahan Dan Ideologi Negara	100 Persen		934.950.000,00		934.950.000,00	KECAMATAN MANDAI
3.09.3.09.14.018.001.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Koordinasi Forum Komunikasi Kecamatan	4 Dokumen	Kecamatan Mandai	16.650.000,00	4 Dokumen	16.650.000,00	
3.09.3.09.14.018.002.	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	Kecamatan Mandai	34.300.000,00	4 Kegiatan	34.300.000,00	
3.09.3.09.14.018.004.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kecamatan	Jumlah Pengangbantuan yang dilaksanakan di Kecamatan	2 Kegiatan	Kecamatan Mandai	3.800.000,00	2 Kegiatan	3.800.000,00	
3.09.3.09.14.018.005.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Di Bina	4 Desa	Kecamatan Mandai	13.600.000,00	4 Desa	13.600.000,00	
3.09.3.09.14.018.006.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang Di Bina	2 Kelurahan	Kecamatan Mandai	866.600.000,00	2 Kelurahan	866.600.000,00	
3.09.3.09.14.019.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi di Kecamatan	100 Persen		18.350.000,00		18.350.000,00	KECAMATAN MANDAI
3.09.3.09.14.019.001.	Pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi pada Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan	200 Orang	Kecamatan MAndai	10.550.000,00	200 Orang	10.550.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.14.019.002.	Pembinaan ekonomi rakyat	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi pada Pembinaan Ekonomi rakyat Tingkat Kecamatan	350 Orang	Kecamatan Mandai	7.800.000,00	350 Orang	7.800.000,00	
3.09.3.09.14.020.	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial Dan Keagamaan	100 persen		177.295.000,00		177.295.000,00	KECAMATAN MANDAI
3.09.3.09.14.020.001.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader/PKK yang Mendapatkan Pembinaan	250 Kader	Kecamatan Mandai	17.450.000,00	250 Kader	17.450.000,00	
3.09.3.09.14.020.002.	Pembinaan kegiatan keagamaan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi sosial dan Keagamaan	600 Orang	Kecamatan Mandai	73.575.000,00	600 Orang	73.575.000,00	
3.09.3.09.14.020.003.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dan social kemasyarakatan	Jumlah Masyarakat Yang berpartisipasi Pada Kegiatan Olah raga/Kepemudaan	25 Orang	Kecamatan Mandai	31.250.000,00	25 Orang	31.250.000,00	
3.09.3.09.14.020.004.	Pelayanan kebersihan dan penyehatan lingkungan	Jumlah Lokasi Yang berada dalam kondisi yang bersih dan bebas dari sarang nyamuk Demam Berdarah	7 Lokasi	Kecamatan Mandai	47.520.000,00	7 Lokasi	47.520.000,00	
3.09.3.09.14.020.005.	Penyaluran Bantuan/Jaminan Sosial Kecamatan	Jumlah Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Bantuan/Jaminan Sosial	12.500	Kecamatan Mandai	7.500.000,00	12.500	7.500.000,00	
3.09.3.09.14.021.	Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum Masyarakat Kecamatan Yang Berfungsi Dengan Baik	100 Persen					KECAMATAN MANDAI
3.09.3.09.14.022.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat kelurahan	100 Persen		732.000.000,00		732.000.000,00	KECAMATAN MANDAI
3.09.3.09.14.022.006.	Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Kantor	100 Persen	Kelurahan Hasanuddin/Bontoa	732.000.000,00	100 Persen	732.000.000,00	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.09.3.09.14.023.	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Persentase Penurunan Masyarakat Miskin Di Wilayah Kelurahan	-					KECAMATAN MANDAI
3.10.	PEMERINTAHAN UMUM				1.373.180.000,00		-	
3.10.3.10.01.001.	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Jumlah Fungsi Manajemen Kelembagaan OPD yang Dilaksanakan.	4 Fungsi		407.985.000,00		-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.10.3.10.01.001.001.	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	218.515.000,00	12 Layanan	-	
3.10.3.10.01.001.003.	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi perkantoran	jumlah Cakupan Layanan pendukung Administrasi Umum perkantoran	9 Layanan	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	136.330.000,00	9 Layanan	-	
3.10.3.10.01.001.004.	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	jumlah Cakupan Layanan Administasi Umum perkantoran	10 layanan	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	40.000.000,00	10 layanan	-	
3.10.3.10.01.001.005.	Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan OPD	10 dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	7.503.000,00	10 dokumen	-	
3.10.3.10.01.001.006.	Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen dan Pelaporan OPD	7 laporan	Badan Kesatuan bangsa dan politik	2.633.000,00	7 laporan	-	
3.10.3.10.01.001.007.	Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah laporan pelaksanaan survei penilaian kapasitas Organisasi	7 laporan	Badan Kesatuan bangsa dan politik	3.004.000,00	7 laporan	-	
3.10.3.10.01.002.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kerja Aparatur Yang Tersedia	71 jenis		137.000.000,00		-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.10.3.10.01.002.002.	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Perlengkapan kantor	4 jenis	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	81.000.000,00	4 jenis	-	
3.10.3.10.01.002.005.	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai	Jumlah kendaraan hias/Devile/karnaval	1 unit	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	13.000.000,00	1 unit	-	
3.10.3.10.01.002.006.	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Gedung kantor yang berada dalam kondisi yang baik	1 unit	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	15.000.000,00	1 unit	-	
3.10.3.10.01.002.007.	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan Bangunan Gedung Kantor yang berada dalam kondisi yang baik	1 unit	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	28.000.000,00	1 unit	-	
3.10.3.10.01.015.	Program Pembinaan Politik	Cakupan pembinaan Politik Terhadap partisipasi dan pengawasan Politik	100 %		129.550.000,00		-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.10.3.10.01.015.001.	Pemantauan Pemilu 2020	Jumlah Tim Pemantau Pemilu	60 orang	Kabupaten Maros	58.200.000,00	60 orang	-	
3.10.3.10.01.015.002.	Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 orang	Kabupaten Maros	13.230.000,00	100 orang	-	
3.10.3.10.01.015.003.	Pengawasan Ormas	Jumlah laporan Atas hasil pengawasan Ormas	16 ormas	Kabupaten Maros	47.870.000,00	16 ormas	-	
3.10.3.10.01.015.004.	Tim Verifikasi Parpol	Jumlah Partai Politik yang diverifikasi	16 parpol	Kabupaten Maros	10.250.000,00	16 parpol	-	
3.10.3.10.01.016.	Program Pembinaan Kerukunan Dan Stabilitas Keamanan	Tingkat Toleransi dan Kondusifitas kehidupan Masyarakat	100 %		225.685.000,00		-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.10.3.10.01.016.001.	Sosialisasi Pencegahan Narkotika	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	390 orang	Kabupaten Maros	59.485.000,00	390 orang	-	
3.10.3.10.01.016.002.	Tim Kewaspadaan Dini	Jumlah Peserta yang mengikuti fasilitasi	400 orang	Kabupaten Maros	166.200.000,00	400 orang	-	
3.10.3.10.01.017.	Program Penanganan Konflik Sosial	Tingkat partisipasi Masyarakat Dalam Identifikasi dan penanganan konflik sosial	100%		137.170.000,00		-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.10.3.10.01.017.001.	Pendataan Warga Negara Orang Asing	Jumlah Data orang asing yang ada di kecamatan	6 kecamatan	Kecamatan cenrana, marusu, bantimurung, tanralili, simbang dan tompobulu	24.900.000,00	6 kecamatan	-	
3.10.3.10.01.017.002.	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta yang mengikuti fasilitasi	400 orang	Kecamatan Maros Baru, kec.Lau, Kec.Turikale dan kec.tanralili	65.230.000,00	400 orang	-	
3.10.3.10.01.017.003.	Pembuatan Peta Rawan Konflik	Jumlah Titik Rawan Konflik Kecamatan	7 Kecamatan	Kecamatan Bantimurung, kec,Marusu, kec.turikale, kec.Maros baru, Kec.Bontoa, Kec.mandai dan Kec.Moncongloe	47.040.000,00	7 Kecamatan	-	
3.10.3.10.01.018.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Kesatuan Bangsa	Tingkat pengembangan wawasan kebangsaan per wilayah kecamatan	100%		212.060.000,00		-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.10.3.10.01.018.001.	Pelaksanaan Forum Dialog FKUB	Jumlah Peserta Forum Dialog FKUB	110 orang	Kabupaten Maros	33.630.000,00	110 orang	-	
3.10.3.10.01.018.002.	Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta Forum Pembauran Kebangsaan	110 orang	Kabupaten Maros	33.630.000,00	110 orang	-	



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

3.10.3.10.01.018.003.	Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Melalui Bidang Seni dan Budaya	Jumlah peserta pelaksanaan penyelenggaraan Pembauran kebangsaan melalui bidang seni dan budaya	215 orang	Kabupaten Maros	144.800.000,00	215 orang	-	
3.10.3.10.01.019.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pengembangan Pembauran Per wilayah	100%		123.730.000,00		-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.10.3.10.01.019.001.	Forum Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti forum	240 orang	Kabupaten Maros	39.380.000,00	240 orang	-	
3.10.3.10.01.019.002.	Kemah Bela Negara	Jumlah Peserta yang mengikuti kemah bela negara	130 orang	Kecamatan tompobulu	63.650.000,00	130 orang	-	
3.10.3.10.01.019.003.	Pelaksanaan fasilitasi Forum PPWK	Jumlah peserta pelaksanaan Pendidikan wawasan kebangsaan	60 orang	Kabupaten Maros	20.700.000,00	60 orang	-	



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah , yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Maros diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Maros. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tatakelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah yang diambil dari indikator sasaran strategik dalam RPJMD dalam bentuk penetapan Indikator Kinerja Utama Pembangunan daerah (key performance indicator) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan..

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dan indikator kinerja kunci dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut ini:



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MAROS PERIODE 2016 - 2021

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE -					SATUAN
		1	2	3	4	5	
1	Pertumbuhan PDRB	9,50	6,81	7,50	7,58	7,66	Persen
2	Indeks Gini	0,39	0,40	0,00	0,00	0,00	Persen
3	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	11,38	11,11	10,84	10,57	10,32	Persen
4	Laju inflasi	3,18	3,14	3,47	3,03	3,00	Persen
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	88,59	88,90	89,21	89,50	89,79	Persen
6	Rasio kesenjangan kemiskinan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	Rasio
7	Produktivitas total daerah	74,39	89,53	95,82	102,60	110,81	Persen
8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,43	62,60	62,13	61,74	60,92	Persen
9	Tingkat pengangguran terbuka	6,73	6,85	6,46	6,09	5,79	Persen
10	Persentase PAD terhadap pendapatan	12,82	15,00	16,41	17,94	19,62	Persen
11	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	10	15	25	35	45	Skala
12	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Baik
14	Indeks Pembangunan Manusia	67,76	68,43	69,11	69,8	70,49	IPM
15	Indeks Pembangunan Gender	89,77	90,36	90,95	91,55	92,15	IPG



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

16	Angka kriminalitas yang tertangani	18,75	17,00	16,00	15,05	14,18	Persen
17	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,20	1,18	1,15	1,13	1,10	Persen
18	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	57,28	57,28	57,28	57,28	57,28	Persen
19	PDRB Per Kapita	52,12	56,16	65,85	77,38	91,12	Persen
20	Penguatan cadangan pangan	85,71	90	91,51	93,18	93,18	Persen
21	Produksi sektor pertanian	10.431.218	11.053.650	11.704.318	12.464.951	13.242.824	Ton
22	Produksi sektor perkebunan	3011	3132	3257	3387	3523	Ton
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	49,83	59,24	59,87	60,48	60,59	IKLH
24	Indeks Resiko Bencana (IRB)	168,4	168,4	143,14	117,88	92,62	IRB



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
A	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1	FUNGSI PENUNJANG/SEKRETARIAT DAERAH/LINTAS SEKTOR/URUSAN								
01.01	Pertumbuhan PDRB	6,1	9,50	6,81	7,50	7,58	7,66	7,66	Persen
01.02	Laju Inflasi Kabupaten	7,23	3,18	3,14	3,47	3,03	3,00	3,00	Angka Inflasi
01.03	PDRB Perkapita	48,3	52,12	56,16	65,85	77,38	91,12	91,12	Persen
01.04	Presentase penduduk diatas garis kemiskinan	88,33	88,59	88,90	89,21	89,50	89,79	89,79	Persen
01.05	Angka kriminalitas yang tertangani	18,75	18,75	17,00	16,00	15,05	14,18	14,18	Rasio
B	FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	PENDIDIKAN								
01.01	Angka melek Huruf	99.18.00	97,96	96,35	100	100	100	100	Persen
01.02	Angka Rata-Rata lama sekolah	7,24	7,32	7,4	7,47	7,55	7,63	7,63	Persen
01.03	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	100	100	100	100	100	100	100	Persen
01.04	Angka Kelulusan	98.87	100	100	100	100	100	100	Persen
01.05	Angka Partisipasi Murni (APM)	83,57	84,57	85,57	86,57	87,57	88,57	88,57	Persen
2	KESEHATAN								
02.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	9,41	5,51	3,87	2,42	1,14	0,54	0,54	AKB
02.02	Angka Usia harapan Hidup	68,52	68,54	68,56	68,58	68,6	68,62	68,62	AHH



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
02.03	Presentase Balita Gizi buruk	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	Persen
3	PERTANAHAN								
03.01	Presentase penduduk yang memiliki lahan								
4	KETENAGAKERJAAN								
04.01	Rasio penduduk Yang Bekerja	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	Rasio
04.02	Presentase angka pengangguran	4,03	3,63	3,32	3,07	2,86	2,68	2,68	Persen
C	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA								
1	KEBUDAYAAN								
01.01	Grup kesenian	0,0025	0,0026	0,0033	0,004	0,0047	0,0054	0,0054	Rasio
01.02	Gedung kesenian	0,0001	0,0002	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0006	Rasio
2	PEMUDA DAN OLAHRAGA								
02.01	Klub Olahraga	0,0026	0,0012	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	Rasio
02.02	Gedung Olahraga	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	Rasio
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB								
1	PENDIDIKAN								
01.01	Angka partisipasi Sekolah	100	100	100	100	100	100	100	Persen
01.02	Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia Sekolah	68,70	75,82	69,42	69,69	69,95	70,21	70,21	Rasio
01.03	Rasio Guru/Murid	858,72	842,46	909,9	941,95	973,52	942,43	942,43	Rasio
01.04	Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata	0,34	0,31	0,31	0,3	0,29	0,27	0,27	Rasio



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
01.05	Penduduk diatas > 15 Tahun melek Huruf (tidak buta aksara)	99,18,00	97,96	96,35	100	100	100	100	Persen
01.06	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	69,63	75,82	81,84	87,92	93,99	100	100	Persen
01.07	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	40,8	48,38	55,96	63,54	71,12	78,7	78,7	Persen
01.08	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,32	0,25	0,32	0,25	0,26	0,2	0,2	Persen
01.09	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts	0,27	0,3	0,21	0,19	0,16	0,14	0,14	Persen
01.10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,48	100	100	100	100	100	100	Persen
01.11	Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	99,26	100	100	100	100	100	100	Persen
01.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	100	100	100	100	100	100	100	Persen
01.13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA	91,06	92,46	93,96	95,46	96,96	98,46	98,46	Persen
01.14	Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	92,96	96	99	100	100	100	100	Persen
2	KESEHATAN								
02.01	Rasio Pos yandu per satuan Balita	9,06	7,93	8,67	8,57	8,47	8,37	8,37	Rasio
02.02	Rasio Puskesmas,poliklinik,pustu persatuan penduduk	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,11	Rasio
02.03	Rasio rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Rasio
02.04	Rasio Dokter persatuan penduduk	0,15	0,16	0,17	0,18	0,2	0,22	0,22	Rasio
02.05	Rasio Tenaga medis persatuan penduduk	0,47	0,53	0,58	0,65	0,72	0,79	0,79	Rasio
02.06	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	51,25	60	70	80	80	80	80	Persen
02.07	Cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94,82	99,99	100	100	100	100	100	Persen
02.08	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	79,61	83,69	87,77	91,84	95,92	100	100	Persen



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
02.09	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100	100	Persen
02.10	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	Persen
02.11	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC	15,46	25,46	45,46	55,46	65,46	75,46	75,46	Persen
02.12	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	30,56	100	100	100	100	100	100	Persen
02.13	Cakupan Kunjungan Bayi	96,54	81,59	81,59	81,78	82,13	85	85	Persen
02.14	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	0	25,47	57,14	78,57	100	100	100	Persen
02.15	Cakupan Pembantu Puskesmas	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	Persen
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
03.01	Proporsi panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik	39,71	50,72	80,74	93,08	100	100	100	Persen
03.02	Rasio Jaringan irigasi	28,6	28,67	29,07	29,47	29,87	30,27	30,27	Rasio
03.03	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	2,36	2,33	2,3	2,28	2,25	2,22	2,22	Rasio
03.04	Presentase rumah tinggal bersanitasi	79	83,46	88,18	93,16	98,43	100	100	Persen
03.05	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk								
03.06	Rasio Tempat pembuangan Sampah (TPS) persatuan penduduk	101,34	102,16	102,96	103,73	104,46	105,16	105,16	Rasio
03.07	Rasio Rumah Layak Huni	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	Rasio
03.08	Rasio permukiman layak Huni	1	1	1	1	1	1	1	Rasio
03.09	Panjang Jalan dilalui Roda Empat	31,91	10,8	24,12	9,92	11,61	11,63	100	Persen
03.10	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	31,91	10,8	24,12	9,92	11,61	11,63	100	Persen
03.11	Drainase dalam kondisi/pembuangan aliran tidak tersumbat	90,83	94,27	96,66	98,42	99,77	100	100	Persen



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

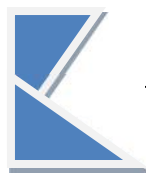
NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
03.12	Pembangunan Turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	25,77	8,17	9,21	15,15	19,63	22,07	100	Persen
03.13	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	50,95	56,76	62,57	68,38	74,19	80	80	Persen
03.14	Lingkungan Pemukiman	0,35	0,26	0,21	0,04	0	0	0	Persen
03.15	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	8,15	2,13	0,2	0,06	0,11	0,07	0,07	Rasio
03.16	Rasio bangunan yang ber IMB persatuan bangunan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Rasio
03.17	Ruang Publik yang berubah peruntukannya	40,08	38,87	37,67	35,04	32,38	29,14	29,14	Persen
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
04.01	Rumah Tangga pengguna air bersih	82,71	83,17	83,62	84,08	84,54	85	85	Persen
04.02	Rumah Tangga pengguna listrik	85,16	86,13	87,1	88,07	89,03	90	90	Persen
04.03	Rumah tangga bersanitasi	79	83,46	88,18	93,16	98,43	100	100	Persen
04.04	Lingkungan Pemukiman kumuh	0,35	0,26	0,21	0,04	0	0	0	Persen
04.05	Rumah Layak huni	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	Rasio
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN/FUNGSI PENUNJANG								
05.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen
05.02	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen
05.03	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen
05.04	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100	Persen
6	PERHUBUNGAN								
06.01	Jumlah arus penumpang angkutan umum	50,64	58,03	66,48	76,17	87,28	100	100	Persen



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
06.02	Rasio Ijin trayek	0,00091	0,0009	0,00089	0,00088	0,00087	0,00086	0,00086	Rasio
06.03	Jumlah Uji kir angkutan umum	7.350,00	7.400	7.450	7.500	7.550	7.600	7.600	KIR
06.04	Pelabuhan/Dermaga Penyeberangan	18,18	9,09	18,18	18,18	18,18	18,18	100	Persen
06.05	Ketersediaan Terminal Pembantu (Tipe C)	0	0	25	25	25	25	100	Persen
06.06	Angkutan Darat	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	Persen
06.07	Kepemilikan KIR angkutan umum	100	100	100	100	100	100	100	Persen
06.08	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	3	3	2	1	1	0,5	0,5	Jam
06.09	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	34.256	34.256	34.256	34.256	34.256	34.256	34.256	Rupiah
06.10	Pemasangan rambu-rambu		20	20	20	20	20	100	Persen
7	LINGKUNGAN HIDUP								
07.01	Presentase penanganan Sampah	14,2	16,2	18,2	20,2	22,2	24,2	24,2	Persen
07.02	Presentase Penduduk berakses air minum	60,49	70,37	80,24	90,12	100	100	100	Persen
07.03	Presentase luas pemukiman yang tertata	5,52	22,19	38,85	55,52	72,19	88,85	88,85	Persen
07.04	Pencemaran Status mutu air								
07.04.01	Status Mutu Air Sungai Maros (Hulu)	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	BMA
07.04.02	Status Mutu Air Sungai Maros (Tengah)	8,11	8,11	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	BMA
07.04.03	Status Mutu Air Sungai Maros (Hilir)	12,77	12,77	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	BMA
07.04.04	Status Mutu Air Sungai Pute (Hulu)	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	BMA
07.04.05	Status Mutu Air Sungai Pute (Tengah)	14,17	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	BMA



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
07.04.06	Status Mutu Air Sungai Pute (Hilir)	22,32	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	BMA
07.04.07	Status Mutu Air Sungai Bantimurung (Hulu, Tengah, Hilir)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	BMA
07.04.08	Status Mutu Air Sungai Rammang - Rammang	12,92	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	BMA
07.05	Cakupan Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	100	100	100	100	100	100	100	Persen
07.06	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100	100	100	100	100	100	100	Persen
07.07	Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	101,34	102,16	102,96	103,73	104,46	105,16	105,16	Rasio
07.08	Penegakan hukum lingkungan	55	100	100	100	100	100	100	Persen
8	PERTANAHAN								
08.01	Presentase luas lahan bersertifikat	2,17	2,51	21	22,05	23,10	24,15	24,15	Persen
08.02	Penyelesaian kasus tanah Negara								
08.03	Penyelesaian Izin Lokasi								
9	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
09.01	Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk			0,88	0,97	1,00	1,00	1,00	Rasio
09.02	Rasio bayi berakte kelahiran	75,39	77,51	80	82,5	85	90	90	Persen
09.03	Kepemilikan KTP	85	90	92,5	93	93,5	95	95	Persen
09.04	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	4,17	77,5	80	82,5	85	87,5	87,5	Persen
09.05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100	100	100	100	100	Persen
10	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
10.01	Presentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	8,08	11,83	15,58	19,33	23,08	26,83	26,83	Persen



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
10.02	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	91,92	88,58	88,58	82,25	79,26	76,38	76,38	Persen
10.03	Rasio KDRT	0,04	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	Rasio
10.04	Presentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0	0	0	Persen
10.05	Partisipasi angkatan kerja perempuan	44,57	43,63	42,71	41,81	40,93	40,07	40,07	Persen
10.06	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	Persen
11	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
11.01	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	1,66	1,63	1,61	1,59	1,58	1,56	1,56	ARR
11.02	Rasio Akseptor KB	14,87	15,02	15,17	15,32	15,47	15,63	15,63	Rasio
11.03	Cakupan peserta KB aktif	69,39	69,4	69,6	69,7	69,8	69,9	69,9	Persen
11.04	Keluarga prasejahtera dan sejahtera I	36,36	35,64	35,28	34,93	34,68	34,23	34,23	Persen
12	SOSIAL								
12.01	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan,Panti jompo dan Panti Rehabilitasi	14	15	16	17	18	19	19	Buah
12.02	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	43,78	46,4	49,03	51,66	54,28	56,91	56,91	Persen
12.03	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100	Persen
13	TENAGA KERJA								
13.01	Angka Partisipasi angkatan kerja	67,35	62,42	62,07	61,67	61,21	60,67	60,67	Persen
13.02	Angka sengketa pengusaha - pekerja pertahun	10	0	0	0	0	0	0	Kasus
13.03	Tingkat partisipasi angkatan kerja	51,94	67,35	66,8	66,21	65,58	64,89	64,89	Persen
13.04	Pencari Kerja yang ditempatkan	34,18	42,73	25	22,29	26	30,69	30,69	Persen
13.05	Tingkat pengangguran terbuka	4,03	3,63	3,32	3,07	2,86	2,68	2,68	Persen
13.06	Keselamatan dan perlindungan	1,68	6,68	16,68	26,68	36,68	46,68	46,68	Persen



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
13.07	Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	Persen
14	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
14.01	Presentase Koperasi Aktif	62,64	65,75	68,62	71,28	73,76	76,08	76,08	Persen
14.02	Jumlah UKM non BPR/LKMUKM	30.955	31.113	31.273	31.443	31.633	31.843	31.843	Unit
14.03	Jumlah BPR/LKM	8	0	0	0	0	0	0	Buah
14.04	Usaha Mikro dan dan Kecil	99,23	99,18	99,14	99,09	99,05	99	99	Persen
15	PENANAMAN MODAL								
15.01	jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	237	298	359	420	481	542	542	Investor
15.02	jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)(Rp. 000.000,-)	2.276.485	2.473.292	2.670.099	2.866.906	3.063.713	3.260.520	3.260.520	Rupiah
15.03	Rasio daya serap tenaga kerja	6,13	6,25	6,47	6,66	7,36	8	8	Rasio
15.04	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	69,82	75,86	81,89	87,93	93,96	100	100	Persen
16	KEBUDAYAAN								
16.01	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	9	18	18	18	18	18	100	Persen
16.02	sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	14	14	14	19	19	19	100	Persen
16.03	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	38,46	53,85	69,23	84,62	100	100	Persen
17	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
17.01	Jumlah Organisasi pemuda	28	28	28	28	28	28	28	Organisasi
17.02	Jumlah Organisasi Olahraga	26	26	26	26	26	26	26	Organisasi
17.03	Kegiatan kepemudaan	10	11,47	12,27	13,07	13,87	14,67	14,67	Persen
17.04	Jumlah Kegiatan olahraga	9	12	14	15	17	19	18,67	Kegiatan



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
17.05	Rasio Gedung Olahraga (Per 10.000 Penduduk)	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	Rasio
17.06	Lapangan Olahraga	1,37	1,37	1,38	1,39	1,41	1,43	1,43	Rasio
18	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI/PEMERINTAHAN UMUM								
18.01	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	3	3	3	3	16	Kegiatan
18.02	Kegiatan Pembinaan politik daerah	1	1	2	2	2	2	10	Kegiatan
19	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
19.01	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,39	2,35	3,75	5,11	6,42	7,7	7,7	Rasio
19.02	Rasio Satuan Linmas Per 10.000 Penduduk	0	17,95	66,82	114,27	159,89	158,08	158,08	Rasio
19.03	Rasio Pos siskamling per jumlah Desa/kelurahan	1	2	3	4	5	6	6	Rasio
19.04	Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	100	100	Persen
19.05	Cakupan patroli petugas Satpol PP	100	100	100	100	100	100	100	Persen
19.06	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan) di Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	Persen
19.07	Petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) Kabupaten	0	0,18	0,67	1,14	1,6	1,58	1,58	Persen
19.08	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	Persen
19.09	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	92,86	100	100	100	100	100	100	Persen
20	SEKRETARIAT DAERAH/FUNGSI PENUNJANG								
20.01	Pertumbuhan Ekonomi	6,1	6,57	7,06	7,31	7,73	8	8	Persen
20.02	Kemiskinan	11,67	11,16	10,68	10,22	9,78	9,36	9,36	Persen
20.03	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sistem



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
20.04	Sistem Informasi Manajemen Pemda	12	2	2	2	2	2	22	Sistem
20.05	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	0	0	50	75	85	95	95	Persen
21	PANGAN								
21.01	Regulasi Ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Regulasi
21.02	Ketersediaan Pangan Utama	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07	0,07	Persen
22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
22.01	PKK Aktif	100	100	100	100	100	100	100	Persen
22.02	Posyandu Aktif	35,53	43,15	50,76	58,38	65,99	73,6	73,6	Persen
22.03	Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	69,44	70,54	71,64	72,74	73,84	74,94	74,94	Persen
23	STATISTIK								
23.01	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Buku
23.02	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Buku
24	KERARSIPAN								
24.01.00	Pengelolaan arsip secara baku	60	70	80	90	95	100	100	Persen
24.02.00	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	1	3	3	3	3	15	Kali
25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
25.01.00	Jumlah jaringan komunikasi	186	190	200	210	220	230	230	Jaringan
25.02.00	Jumlah surat kabar nasional/lokal	8	9	11	12	12	12	12	Surat Kabar
25.03.00	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	20	20	21	21	21	21	21	Siaran



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
25.04.00	Website milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Website
25.05.00	Pameran / expo	1	2	2	2	2	2	11	Kali
26	PERPUSTAKAAN								
26.01.00	Jumlah Perpustakaan	371	371	392	413	434	455	455	Unit
26.02.00	Jumlah Pengunjung perpustakaan pertahun	1.900.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	8.500.000	Kunjungan
26.03.00	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	74	74	81	87	94	100	100	Persen
B	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	PERTANIAN								
01.01	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	6,4	7,27	7,58	7,93	8,28	8,64	8,64	Persen
01.02	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	40,61	39,67	38,75	37,86	36,98	36,13	36,13	Persen
01.03	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0,01	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	Persen
01.04	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	24,2	24,74	25,3	25,87	26,45	27,04	27,04	Persen
01.05	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100	100	100	100	100	100	Persen
01.06	Cakupan Bina kelompok petani	60,9	100	100	100	100	100	100	Persen
2	KEHUTANAN								
02.01	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,66	1,13	0,76	0,51	0,34	0,23	0,23	Persen
02.02	Kerusakan kawasan hutan	0,24	0,21	0,17	0,14	0,1	0,07	0,07	Persen
02.03	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,34	0,32	0,31	0,29	0,27	0,26	0,26	Persen
3	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
03.01	Kontribusi Sektor Pertambangan Dan Galian terhadap PDRB	2,24	1,92	1,64	1,4	1,2	1,03	1,03	Persen
4	PARIWISATA								
04.01	Kunjungan wisata	327.996							Kunjungan
04.02	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	Persen
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
05.01	Produksi perikanan	12.834	13.155	13.475	13.796	14.117	14.437	14.437	Ton
05.02	Konsumsi ikan	97,3	100	100	100	100	100	100	Persen
05.03	Cakupan Bina Kelompok nelayan	77,27	100	100	100	100	100	100	Persen
05.04	produksi perikanan kelompok nelayan	15,77	16,06	16,45	16,84	17,24	17,63	100	Persen
6	PERDAGANGAN								
06.01	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	Persen
06.02	Ekspor bersih perdagangan (Rp.000,-)	88.782.470	102.099.840	112.309.824	120.171.511	126.180.087	133.750.892	133.750.892	Rupiah
06.03	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100	100	100	100	100	100	100	Persen
7	PERINDUSTRIAN								
07.01	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	17,41	16,58	15,8	15,05	14,34	13,67	13,67	Persen
07.02	Pertumbuhan industri	1,2	4,99	5,71	6,31	6,79	7,16	7,16	Persen
07.03	Cakupan bina kelompok pengrajin								
8	KETRANSMIGRASIAN								
08.01	Transmigrasi Swakarsa	100	100	100	100	100	100	100	Persen



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
A	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH								
1	SEKRETARIAT DAERAH/FUNGSI PENUNJANG								
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	11,8	13,76	16,04	18,7	21,8	21,8	21,8	Rp/RT
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	63,68	64,75	65,84	66,94	68,06	68,06	68,06	Rp/RT
01.03	Produktivitas total daerah	68,07	68,6	71,12	74	77,14	80,68	80,68	Persen
2	PERTANIAN								
02.01	Nilai Tukar Petani								
B	FOKUS FASILITAS WILAYAH / INFRASTRUKTUR								
1	PERHUBUNGAN								
01.01	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	183,62	176,11	168,9	161,99	155,37	149,01	149,01	Rasio
01.02	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	11.428.643	14.961.112	17.121.760	19.597.001	22.432.676	22.432.676	22.432.676	Orang/Barang
01.03	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	178.015.033	203.962.901	233.693.025	267.756.721	306.785.666	351.503.616	351.503.616	Orang/Barang
2	PENATAAN RUANG								
02.01	Ketataatan terhadap RTRW	0,71	1,11	1,45	1,79	2,14	2,48	2,48	Persen
02.02	Luas wilayah produktif	37,17	37,17	37,17	37,17	37,17	37,17	37,17	Persen
02.03	Luas wilayah industri	0,15	0,16	0,17	0,19	0,2	0,22	0,22	Persen
02.04	Luas wilayah kebanjiran	5,33	4,26	4,31	3,88	3,49	3,14	3,14	Persen
02.05	Luas wilayah kekeringan	0,3	0,21	0,1	0,05	0,03	0,01	0,01	Persen
02.06	Luas wilayah perkotaan	4,28	4,28	7,85	12,8	17,74	22,68	22,68	Persen



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
3	SEKRETARIAT DAERAH/FUNGSI PENUNJANG								
03.01	Jenis dan jumlah Bank dan Cabang	16	16	16	16	16	16	16	Unit
03.02	Jenis dan Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	2	2	2	2	2	2	2	Unit
03.03	Jenis, kelas, dan jumlah restoran								Unit
03.04	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	14	14	14	14	14	14	14	Unit
4	LINGKUNGAN HIDUP								
04.01	Presentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	82,71	83,17	83,62	84,08	84,54	85	85	Persen
5	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
05.01	Rasio ketersediaan daya listrik								
05.02	Presentase Rumah tangga yang menggunakan listrik	85,16	86,13	87,1	88,07	89,03	90	90	Persen
05.03	Presentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	82,94	82,94	82,95	82,97	83	83,04	83,04	Persen
C	FOKUS IKLIM BERINVESTASI								
1	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
01.01	Angka kriminalitas	4,86	4,42	4,06	3,71	3,35	3	3	Rasio
01.02	Jumlah Demo	5	4	1	3	6	4	4	Kali
2	PENANAMAN MODAL								
02.01	Lama proses perijinan	3,5	2,83	2,17	1,83	1,83	1,83	1,83	Hari
3	KEUANGAN/FUNGSI PENUNJANG								
03.01	Jumlah dan macam Pajak dan Retribusi daerah	1	1	1	1	1	1	1	Jenis
4	SEKRETARIAT DAERAH/FUNGSI PENUNJANG								



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
04.01	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	1	0	1	1	0	0	3	Perda
04.02	Presentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	57,28	57,28	57,28	57,28	57,28	57,28	57,28	Persen
D	FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA								
1	KETENAGAKERJAAN								
01.01	Rasio Ketergantungan	114,7	114,01	113,34	112,68	112,03	111,39	111,39	Rasio



RKPD

Kabupaten Maros Tahun 2020



BAB VII PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2020 merupakan program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. RKPD Tahun 2020 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 yang bertemakan **“PEMANTAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Maros Tahun 2020, akan didapatkan serangkaian program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. RKPD Kabupaten Maros Tahun 2020 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2020 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, yang kemudian akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Maros Tahun 2020.

Rencana pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2020 ini hanya akan efektif dilaksanakan sesuai sasaran dan tujuan yang diharapkan, apabila didukung oleh keterlibatan seluruh *stakeholder* pembangunan.

BUPATI MAROS

Ttd

Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM